PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta hasil yang dicapai secara sistematis dan terstruktur adalah melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efesiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebak disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun meliputi laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP - SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. dan Catatan atas LaporanKeuangan (CaLK).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi :

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyisihan dan Penghapusan Piutang serta Dana Bergulir;
19. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;
20. Peraturan Bupati Lebak Nomor 39 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;
21. Peraturan Bupati Lebak Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Lebak Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 95);
23. Peraturan Bupati Lebak Nomor 149 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 150);
24. Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 16);
26. Peraturan Bupati Lebak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 49).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yaitu sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIANTARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan Daerah
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada Pemerintah Daerah

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-masing Pos – Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

- 5.1.1.1 Pendapatan
- 5.1.1.2 Belanja
- 5.1.1.3 Transfer
- 5.1.1.4 Surplus/Defisit
- 5.1.1.5 Pembiayaan
- 5.1.1.6 Silpa

5.1.2 Laporan Operasional

- 5.1.2.1 Pendapatan
- 5.1.2.2 Beban
- 5.1.2.3 Surplus/Defisit

5.1.3 Laporan Perubahan Ekuitas

- 5.1.3.1 Ekuitas Awal
- 5.1.3.2 Surplus/Defisit (LO)
- 5.1.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan
- 5.1.3.4 RK - PPKD
- 5.1.3.5 Ekuitas Akhir

5.1.4 Neraca

- 5.1.4.1 Aset
- 5.1.4.2 Kewajiban
- 5.1.4.3 Ekuitas

5.1.5 Laporan Arus Kas

- 5.1.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
- 5.1.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
- 5.1.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan
- 5.1.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitori

5.1.6 Laporan Perubahan SAL

- 5.1.6.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
- 5.1.6.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

5.1.6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
5.1.6.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Bab VII PENUTUP

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro menggambarkan keadaan ekonomi secara keseluruhan yang meliputi inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto (PDB) dan perubahan pengangguran yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan**.**

Analisis ekonomi makro sangat dibutuhkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dan mengetahui sejauh mana capaian indikator ekonomi sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Disamping itu, analisis ekonomi tersebut digunakan sebagai salah satu input utama dalam membuat analisis keuangan daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dari sisi penggunaan, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Namun dari sisi sektoral, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila hasil produksi dari seluruh sektor ekonomi, sektor pertanian, pertambangan sampai dengan sektor jasa pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya.

Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan PDB/PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu alat untuk mengukur perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah, diyakini masih merupakan indikator penting dalam melakukan evaluasi dan menentukan arah pembangunan. Tingkat pertumbuhan riil PDRB mencerminkan keberhasilan yang telah dilaksanakan, sedangkan pendapatan perkapita pertahun merupakan indikator kasar tentang tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga satu tahun dasar tertentu saat ini menggunakan Tahun 2010. PDRB Kabupaten Lebak selama kurun waktu 2018 – 2020 dapat dilihat pada grafik 2.1 berikut:

Grafik 2.1

Produk Dome stik Regional Bruto (PDRB)

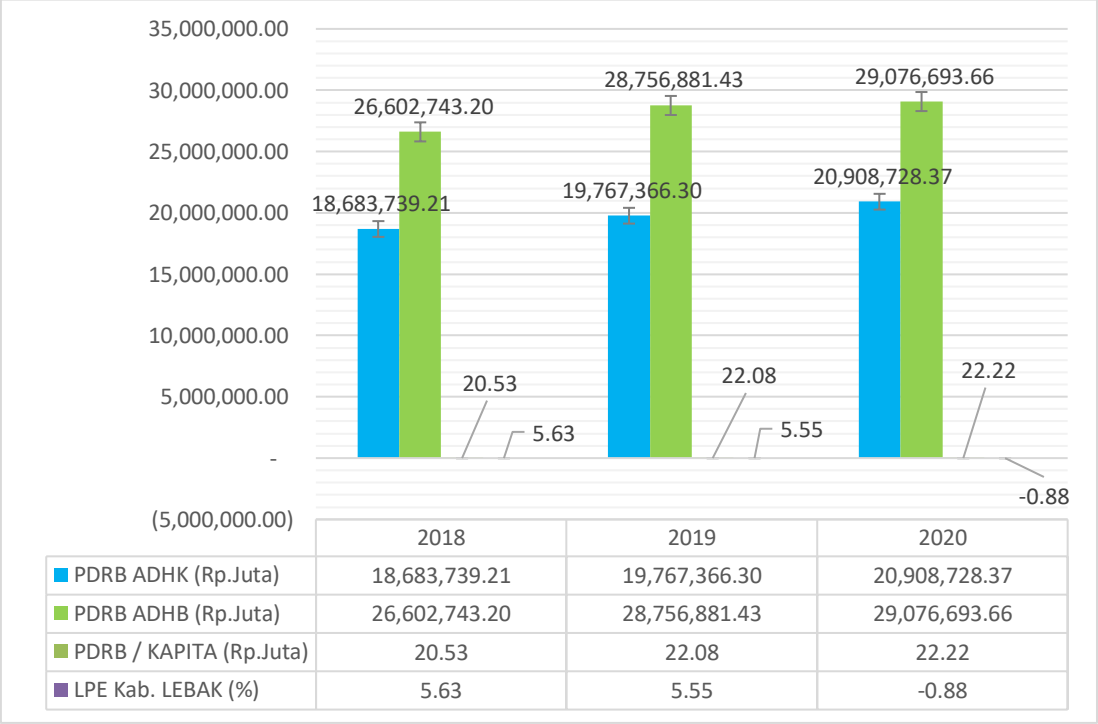

	2018	2019	2020
PDRB ADHK (Rp.Juta)	18,683,739.21	19,767,366.30	20,908,728.37
PDRB ADHB (Rp.Juta)	26,602,743.20	28,756,881.43	29,076,693.66
PDRB / KAPITA (Rp.Juta)	20.53	22.08	22.22
LPE Kab. LEBAK (%)	5.63	5.55	-0.88

Grafik 2.1 memperlihatkan bahwa PDRB perkapita Kabupaten Lebak terus mengalami peningkatan yang terus menerus selama periode 2018-2020. Namun pada Tahun 2020 mengalami kenaikan, tetapi Kabupaten Lebak tetap melakukan pemulihan ekonomi khususnya pada sektor-sektor unggulan. Melalui visi saat ini yang berfokus terhadap pariwisata, tentu saja dengan adanya pandemi covid-19 berdampak langsung terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Lebak khususnya sektor pariwisata dan UMKM. Oleh karena itu, upaya antisipasi pemburukan dampak covid-19 terus digalakan melalui refocusing anggaran untuk sektor kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Selain itu protokol kesehatan juga disiapkan dalam mendukung fase ”new normal” sebagai langkah pemulihan perekonomian.

Distribusi persentase per kategori dalam PDRB dapat menggambarkan struktur perekonomian hasil pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sampai saat ini perekonomian Kabupaten Lebak masih didominasi oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dengan share di atas 25 persen dari total PDRB per tahun. Hal tersebut menunjukan bahwa pembangunan di Kabupaten Lebak sudah sesuai dengan tipologi daerah yang cocok untuk usaha di bidang pertanian karena masih tersedia wilayah pertanian dan perkebunan yang luas dan tanah yang relatif subur serta untuk perikanan tersedianya kawasan laut yang luas di wilayah selatan. Struktur perekonomian Kabupaten Lebak menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Distribusi PDRB Kabupaten Lebak Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2018-2020

No	Sektor / Sub Sektor / Sub Sub Sektor	Tahun (%)		
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,15	25,92	27,21
2	Pertambangan dan Penggalian	6,41	6,11	5,98
3	Industri Pengolahan	8,74	8,72	8,84
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,10	0,12
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05
6	Konstruksi	7,96	8,47	8,20
7	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,84	13,00	12,29
8	Transportasi dan Pergudangan	6,11	6,26	6,03
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,92	4,98	4,69
10	Informasi dan Komunikasi	0,54	0,54	0,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,76	1,73	1,77
12	Real Estate	6,66	6,84	6,92
13	Jasa Perusahaan	0,31	0,32	0,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib	5,75	5,86	5,98
15	Jasa Pendidikan	6,77	7,08	7,12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,21	1,27	1,34
17	Jasa Lainya	2,71	2,74	2,60
Produk Domestik Regional Bruto		**100**	**100**	**100**

Sumber : Kabupaten Lebak Dalam Angka 2022 (BPS Kab. Lebak)

Dari tabel terlihat bahwa 3 (tiga) penyumbang terbesar PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Lebak yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Industri/Pengolahan.

Selanjutnya kondisi indikator makro ekonomi Kabupaten Lebak tahun 2018 sampai dengan 2021 sebagaimana disajikan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
INDIKATOR EKONOMI MAKRO KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2018 – 2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
1	Gini Ratio	0,303	0,297	0,314
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,63	5,45	-0,96
3	Tingkat Kemiskinan	8,41	8,30	9,24
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,57	7,96	9,63
5	Indeks Pembangunan Manusia	63,37	63,88	63,91

Sumber : BPS,2022

Gini ratio adalah angka ketimpangan kondisi ekonomi antara kelompok miskin dan kaya. Gini ratio untuk mengukur ketidakmerataan distribusi penduduk dengan kisaran 0 untuk pendapatan merata sempurna hingga 1 untuk ketimpangan pendapatan sempurna. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk pada 3 (tiga) tahun terakhir (gini ratio) Kabupaten Lebak sebesar 0,303 pada Tahun 2018, 0,297 pada Tahun 2019 dan 0,314 pada Tahun 2020 memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah dibandingkan rata - rata nasional sebesar 0,379 dan 0,370. Dengan nilai gini ratio yang berkisar di angka 0,3 menunjukan bahwa di Kabupaten Lebak tingkat ketimpangan yang rendah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) daerah merupakan indikator yang digunakan untuk melihat peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam hal ini ekonomi daerah berfokus pada sumber daya manusia, sumber daya buatan dan teknologi sebagai penopang dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin baik kondisi ekonomi daerah, maka semakin baik juga perkembangan daerahnya. Perekonomian daerah dikatakan lebih baik dan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat ekonomi lebih tinggi daripada apa yang telah dicapai sebelumnya. Setiap daerah memiliki sektor unggulan yang dapat dijadikan sebagai pendapatan ekonomi wilayah serta bisa digunakan untuk menambah laju pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Dilihat dari Tabel 2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Lebak dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 berkisar antara 5 dan 6 persen jika dirata – rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak dari Tahun 2018 – 2019 adalah sebesar 5,59% yang artinya bahwa pada tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak mengalami pertumbuhan sebesar 5,54 persen, namun pada Tahun 2020 pertumbuhan

perekonomian di Kabupaten Lebak tumbuh negative sebesar -0,96 persen, dikarenakan adanya pandemic COVID-19.

Jika dilihat dari tabel 2.2 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lebak Tahun 2019 sebesar 8,30 persen mengalami penurunan dari Tahun 2018 sebesar 8,41 persen, tetapi pada Tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 9,24 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya dampak pandemi virus Corona-19 atau COVID-19.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian. Berdasarkan Tabel 2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lebak dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 mengalami kenaikan dari 7,57 persen pada Tahun 2018 naik sebesar 0,39 persen menjadi 7,96 persen pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 mengalami kenaikan kembali sebesar 1,67 persen dari 7,96 persen menjadi 9,63 persen, hal ini juga disebabkan karena adanya pandemi COVID-19.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Dari Tabel 2.2 terlihat bahwa IPM Kabupaten lebak terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, meskipun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 hanya sebesar 63,91 sehingga Kabupaten Lebak dikategorikan Kabupaten dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedang.

Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Lebak di tahun 2021 tentunya tidak terlepas dari pengaruh perekonomian tingkat regional dan perekonomian nasional. Arah kebijakan Makro Tahun 2021, pemerintah Kabupaten Lebak melakukan reformasi beberapa sektor :

1. Mereformasi sistem dan penyelenggaraan jasa kesehatan dalam rangka untuk penguatan sistem kesehatan dan health security;
2. Reform di bidang perlindungan sosial akan semakin dilakukan untuk penguatan dan perbaikan sistemnya;
3. Reform di bidang pendidikan, ini yang sudah disampaikan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk penggunaan teknologi;

4. Reform di bidang transfer keuangan dan Dana Desa, karena sepertiga dari belanja selama ini adalah untuk transfer keuangan dan Dana Desa yang berarti sinergi antara Pemerintah Daerah dengan pusat menjadi sangat penting;
5. Pemerintah juga akan melakukan reform di sisi pendapatan karena dari sisi pajak PNBP dan kemampuan untuk memberikan insentif sektor usaha akan tetap dilakukan di dalam mendesain reform di sisi penerimaan negara ini.

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah sebagai bagian integral kebijakan pembangunan daerah merupakan langkah strategis dalam mengatasi krisis serta menjawab berbagai persoalan dan dinamika yang terjadi dewasa ini, maupun tantangan yang mungkin akan timbul di masa depan. Oleh karenanya, kebijakan keuangan daerah disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, kapasitas fiskal daerah, serta tujuan pembangunan daerah sehingga mencerminkan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah yang tercermin dalam format pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik diharapkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaaatkan potensi pembiayaan daerah dapat tercapai guna mendukung arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah yang berdasarkan pada aturan yang melandasinya. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan agar arah kebijakan keuangan daerah memiliki perencanaan yang jelas dan terukur.

Arah kebijakan keuangan daerah sangat mendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan

kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian dari Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Hak tersebut meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pengelolaan terhadap Pendapatan Daerah ini masih menjadi agenda penting dan alternatif utama bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah serta mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan publik tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peratuan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta lebih teknis telah terbit Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Kabupaten terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun–tahun sebelumnya serta potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, objek serta rincian objek penerimaan. Selain itu PAD yang ditargetkan sedapat mungkin tidak menambah beban ekonomi masyarakat dan pelaku usaha, terutama ditengah kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang.

2. Pendapatan Transfer terdiri dari:

   - Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa. Dana Perimbangan diperoleh dari Dana Bagi

Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang alokasinya merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 atas perubahan kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan dampaknya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

- Transfer Antar Daerah terdiri pendapatan bagi hasil dan Bantuan Keuangan. Bantuan Keuangan Provinsi Banten sebagaimana Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.249-Huk/2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, kebijakan Pemerintah atas Pendapatan Transfer perlu diwaspadai, mengingat pengalokasian penerimaan tersebut bersifat dinamis, mengikuti perkembangan penerimaan dalam negeri netto. Kemudian dalam penyalurannya juga memperhatikan kinerja penyerapan dan capaian atas penggunaan dari Tahun Anggaran sebelumnya, oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu melakukan efisiensi dan sekaligus mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah. Beberapa kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan intensifikasi Pajak Daerah dengan melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dan potensi Pajak Daerah;
2. Mengoptimalkan pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan dan aset daerah, penataan ulang (restrukturisasi aset), agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan pada akhirnya akan mendatangkan Pendapatan Daerah melalui

Retribusi Daerah atau Pendapatan Sewa;

3. Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak yang terkait, seperti Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi perpajakan/retribusi yang jelas, dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kompetensi aparatur pemungut Pajak/Retribusi Daerah; dan
5. Mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebagai kepanjangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan publik, motor perekonomian dan sumber Pendapatan Daerah.

Selanjutnya untuk memperkuat struktur penerimaan serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak, beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2021 melalui:

1. Melakukan upaya pengusahaan atau penggalian (eksploitasi) Sumber Daya Alam (SDA) yang baru;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
   a. Dengan melakukan intensifikasi berarti Kabupaten Lebak setidaknya melakukan langkah intensifikasi pemutakhiran data wajib pajak daerah serta peningkatan kualitas pelayanan barang dan jasa milik daerah yang dikonsumsi oleh masyarakat;
   b. Di samping itu pula dengan langkah tax effort, yaitu upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dengan melakukan upaya :
      - Law enforcement oleh aparat pajak;
      - Mengkaji ulang terhadap nilai jual atau jumlah objek pajak yang ada dalam pos bagi hasil pajak (pemerintah pusat dan provinsi);
      - Mengkaji ulang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), jumlah objek, dan subjek pajak. Demikian pula halnya dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
      - Mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan pajak.

c. Usaha peningkatan penerimaan daerah melalui ektensifikasi perlu diupayakan dengan :

- Menciptakan sumber penerimaan baru meliputi, menciptakan sektor produksi baru melalui upaya *creative financing* dengan melibatkan pihak swasta dengan stimulan yang menarik (perijinan, lahan, market yang jelas, insentif pajak) untuk menanamkan investasinya ke daerah;
- Identifikasi sektor unggulan terhadap potensi daerah perlu terus digali dan dikembangkan secara konsisten sebagai sumber PAD potensial, misal sektor pariwisata, pertambangan, pertanian, dan perdagangan;

3. Menarik investor melalui insentif pajak ringan, birokrasi yang mudah, infrastruktur yang mendukung, serta memperbanyak MICE (*meeting, insentive, conference, exhibition*) dengan tujuan menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan kebijakan tersebut diharapkan pendapatan daerah Kabupaten Lebak meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian dan target pendapatan selama kurun waktu tahun 2017-2021 sangat dipengaruhi oleh dana perimbangan dari pusat terutama Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, dimana semakin besar juga tambahan alokasi dana desa. Selain itu kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat. Perlu adanya upaya-upaya peningkatan pendapatan yang lebih intensif dilakukan disertai dengan peningkatan pelayanan publik serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang lebih aktif, diharapkan pada tahun 2021 pendapatan daerah Kabupaten Lebak dapat mengalami peningkatan yang signifikan. Namun demikian, secara keseluruhan proyeksi pendapatan daerah Tahun 2021 masih lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 yaitu sebesar Rp2.949.491.162.625,16. Hal ini merupakan dampak Pandemi COVID-19 yang masih dapat mempengaruhi perekonomian secara nasional maupun global.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan peraturan perundang – undangan Belanja Daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah diprioritaskan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, serta belanja yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang akan bermuara pada pencapaian visi dan misi daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Belanja daerah merupakan representasi tugas pemerintahan dalam rangka pelayanan publik sehingga pengelolaannya didasarkan pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Belanja daerah yang berkualitas mencerminkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga alokasi belanja harus mengedepankan prioritas, ketepatan waktu, akuntabilitas, dan efektivitas. Belanja daerah disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan target kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Pada dasarnya permasalahan belanja daerah bermuara pada kesenjangan fiskal yaitu adanya ketimpangan antara kebutuhan dan kemampuan serta kompleksitas permasalahan yang membutuhkan penanganan secara terpadu serta perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah dengan senantiasa melibatkan masyarakat dan dunia usaha, serta menggalang bantuan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat. Kesenjangan fiskal yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah perlu disikapi secara arif dan bijaksana dengan menetapkan strategi dan prioritas anggaran belanja dengan dilandasi azas keadilan dan pemerataan anggaran serta memperhatikan anggaran berbasis kinerja yang efektif dan efesien, terukur, serta realistis.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran sehingga dalam pelaksanaannya akan

lebih produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, kebijakan belanja daerah yang disesuaikan dengan dinamika regulasi dan kondisi terkini sehingga Kebijakan Belanja Daerah pada Tahun 2021 diarahkan untuk:

1. Pemenuhan pelayanan dasar terutama Pendidikan dan Kesehatan sebagai upaya pemulihan dan antisipasi lanjutan dari dampak wabah COVID-19 yang terjadi pada Tahun 2020;
2. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan pengembangan kawasan pariwisata dan pusat-pusat produksi yang dihasilkan oleh masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan keterampilan yang mampu meningkatkan produktivitas;
4. Meminimalisir dampak bencana alam melalui penanganan yang bersifat preventif maupun kuratif;
5. Meningkatkan kualitas layanan publik yang mampu mendorong pertumbuhan investasi skala besar maupun kewirausahaan pada sektor riil.

Namun mengingat pendanaan yang relatif terbatas, maka ditempuh upaya pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien melalui:

1. Peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula;
2. Penerapan pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang disertai sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan;
3. Pemenuhan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari total belanja daerah tahun 2021;
4. Pemenuhan alokasi anggaran untuk kesehatan guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan minimal 10%. RKPD KABUPATEN LEBAK 2021 III-15;
5. Pemenuhan belanja infrastruktur sebesar 25% dari Dana Transfer Umum

(DAU+DBH);

6. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebesar 50% dari Bagi Hasil Pajak Rokok;
7. Pemenuhan alokasi anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 75% dari alokasi pelayanan kesehatan masyarakat yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Rokok;
8. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum paling sedikit 10% dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;
9. Pengalokasian kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu :
   - Pemenuhan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   - Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil);
   - Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi, serta perencanaan.
10. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah;
11. Peningkatan efektivitas belanja bantuan sosial kepada organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat, belanja hibah yang diperuntukkan bagi lembaga/organisasi dan kelompok masyarakat, serta belanja bantuan keuangan kepada partai politik yang diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak;
12. Pengalokasian belanja tidak terduga sebagai bentuk antisipasi terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan dalam APBD merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit ataupun mendayagunakan surplus anggaran. Pembiayaan juga disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan diantaranya akan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah pada dasarnya disediakan untuk menampung kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal rencana untuk mengalokasikan dana investasi atau penyertaan modal pada Perusahaan Daerah. Disamping itu juga disediakan untuk mengalokasikan dana dalam rangka pemenuhan kewajiban pembayaran utang pokok yang akan jatuh tempo dalam tahun anggaran berkenaan.

Kebijakan umum pembiayaan daerah ditujukan untuk keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak. Hal ini merupakan upaya preventif untuk mensikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD mengalami surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah maupun pembayaran pokok utang;
2. Apabila APBD mengalami defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan atau mencairkan dana cadangan, dan melakukan rasionalisasi belanja;
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit

APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman;

4. Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Lebak kepada PDAM dalam rangka meningkatkan cakupan air bersih, maupun PD. BPR Warunggunung dan PT. LKM Rangkasbitung.

Kebijakan umum Pembiayaan Daerah Tahun 2021 ditujukan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang relatif mendesak dan lebih merupakan pemenuhan kewajiban Pemerintah Kabupaten Lebak. Pada penerimaan pembiayaan daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 hasil audit BPK-RI yaitu sebesar Rp296.838.844.123.,05. Sementara disisi pengeluaran pembiayaan daerah yaitu sebesar Rp9.000.000.000,00 yaitu penyertaan modal kepada PDAM untuk program hibah air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk menyelesaikan target pemenuhan Sambungan Rumah Tangga sebesar Rp5.000.000.000,00, dan PT. LKM Rangkasbitung sebesar Rp4.000.000.000,00 untuk program Pemberdayaan Ekonomi Nasional (PEN) yang akan digunakan untuk penambahan modal bagi kredit kepada masyarakat.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 2 menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan misi, tujuan dan sasaran yang terarah karena merupakan suatu indikator pembangunan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lebak yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019 - 2024 yaitu:

"Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal"

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan

kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi dan tujuan serta 10 sasaran pembangunan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Misi	Tujuan	Sasaran
1 Mengoptimalkan Pembangunan	1 Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	1 Meningkatnya daya saing sumber daya manusia
		2 Terkendalinya pertumbuhan penduduk
2 Mengoptimalkan Pemulihan Ekonomi Daerah	2 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	3 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
		4 Meningkatnya ketahanan pangan daerah
		5 Tumbuhnya sektor pariwisata daerah
3 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	3 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas	6 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur publik
		7 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar
		8 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perhubungan
4 Memelihara Kualitas Lingkungan Hidup	4 Terpeliharanya fungsi ruang dan kualitas lingkungan hidup	9 Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan
5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas	10 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik.

Arah kebijakan pembangunan pada tahun ketiga RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 difokuskan pada upaya peningkatan iklim usaha dan investasi ke dalam maupun keluar, khususnya di sektor kepariwisataan dan di berbagai sektor pendukung kepariwisataan daerah, sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya tarik obyek dan destinasi pariwisata yang ada, sekaligus mampu meningkatkan kesiapan masyarakat dan daerah dalam mendukung implementasi visi kepariwisataan tersebut. Upaya ke dalam dilakukan melalui fasilitasi kebijakan dan program yang makin mendukung kemudahan berinvestasi, termasuk didalamnya adalah beragam program intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan sektor swasta dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya tarik obyek dan destinasi pariwisata. Upaya ke dalam juga dilakukan dengan

mempersiapkan struktur dan aparatur birokrasi guna memiliki pemahaman dan kesiapan yang komprehensif terhadap visi kepariwisataan tersebut. Sedangkan upaya keluar dilakukan dengan melakukan aktifitas promosi secara ekstensif, sehingga mampu mengakselerasi pembangunan kepariwisataan daerah. Karenanya fokus dan tema pembangunan pada tahapan ketiga ini adalah "Peningkatan iklim usaha, investasi sektor kepariwisataan, serta daya tarik obyek dan destinasi pariwisata". Mengingat tema besar perekonomian nasional dan daerah pada tahun 2020-2024 adalah pemulihan ekonomi, maka tema pada tahun ketiga ini kemudian dikontekstualisasi dalam perubahan RPJMD ini menjadi "Penanganan pandemi dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan sosial" dengan tetap memperhatikan Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tarik Obyek dan Destinasi Pariwisata.

Secara makro indikator keberhasilan atau kemajuan pencapaian visi kepariwisataan pada tahun 2021 diarahkan pada upaya ditetapkannya warisan geologi Geopark Bayah Dome oleh Kementrian ESDM, meski terkendala oleh situasi pandemi, namun penelitian dan evaluasi ini diharapkan dapat selesai pada tahun 2021 sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar bagi pelaksanaan fase selanjutnya Pada tahun 2022, sekaligus menjadi dasar bagi upaya peningkatan daya tarik situs geologi tersebut sebagai destinasi pariwisata unggulan nasional.

Pencapaian target indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lebak
Tahun 2021 dan 2020

MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	2	3	4
MISI 1 : Mengoptimalkan Pembangunan Manusia			
Tujuan 1. Meningkatnya kualitas hidup Masyarakat	**Indeks Pembangunan Gender Manusia**	**64,03**	**63,91**
Sasaran 1. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	Indeks Pendidikan	0,55	0,546
	Indeks Kesehatan	0,728	0,726
	Indeks Pembangunan Gender	79,90	79
Sasaran 2. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,88%	0,45%

MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	2	3	4
MISI 2 : Mengoptimalkan Pemulihan Ekonomi Daerah			
Tujuan 2. Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	**Gini Ratio**	**0,332**	**0,314**
	Indeks Williamson	**0,4**	**0,62**
Sasaran 3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	PDRB Perkapita	21.780.000	22.222.990
	LPE	3,08	-0,88
	Daya Beli	8.724.000	8.690.000
	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,86	8,73
	Tingkat Kemiskinan	10,29	9,24
Sasaran 4. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	72,60	72,60
Sasaran 5. Tumbuhnya sektor Pariwisata Daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB	4,64%	5%
MISI 3 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah			
Tujuan 3. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas	**Indeks Infrastruktur Daerah**	**73,48**	**71,8**
Sasaran 6. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Publik;	Indeks Infrastruktur Publik	69,61	69,34
Sasaran 7. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur Dasar	77,35	74,62
Sasaran 8. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Perhubungan	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	4,38%	4,50%
MISI 4: Memelihara Kualitas Lingkungan Hidup			
Tujuan 4. Terpeliharanya Fungsi Ruang dan Kualitas Lingkungan Hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**62,85**	**72,26**
Sasaran 9. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Udara	79,94	0.00
	Indeks Kualitas Air	57,89	0.00
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39,76	0.00
MISI 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih			
Tujuan 5. Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**65* (data sementara)**	**67**
Sasaran 10. Meningkatnya Kinerja, Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	78	80

MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	2	3	4
Daerah Dan Kualitas Pelayanan Publik	OPINI BPK	-	WTP
	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,494	1,5
	IKM Terhadap Pelayanan Publik	78,65	78,46
	Indeks SPBE	2,86	3,52
	Sistim Merit	251,5	0,00
	Maturitas SPIP	Level 3	0,00

Sumber: Bappelitbangda Kab. Lebak

Tabel 2.5
CAPAIAN INDIKATOR RPJMD KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
1	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
1	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**			
1101	**PENDIDIKAN**			
1	Indeks Pendidikan (Satuan: Poin)	0,554	0,55	Dinas Pendidikan
1102	**KESEHATAN**			
1	Indeks Kesehatan (Satuan: Poin)	0,728	0,73	Dinas Kesehatan
1103	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			
1	Indeks infrastruktur dasar (Satuan: %)	73,48	74,62	Dinas PUPR
2	Persentase akses air minum (Satuan: %)	72,73	65	Dinas PUPR
3	Persentase akses sanitasi (air limbah) (Satuan: %)	72,63	72,32	Dinas PUPR
4	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh	71,09	0,00	Dinas PUPR
5	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	72,73	0,00	Dinas PUPR
6	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air Iimbah domestic	72,63	0,00	Dinas PUPR
7	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	103,2	0,00	Dinas PUPR

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
8	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	68,13	0,00	Dinas PUPR
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan	0,00	0,00	Dinas PUPR
1201	**TENAGA KERJA**			
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (Satuan: %)*	7,86	8	Dinas Tenaga Kerja
1202	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			
1	Indeks Pembangunan Gender (Satuan: Poin)	79,9	79	DP3AP2KB
1208	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (Satuan: %)	1,88	0,45	DP3AP2KB
1211	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**			
1	Daya Beli (Satuan: Rupiah)	8.724.000,00	8.690.000,00	Dinas Koperasi dan UMKM
2002	**PARIWISATA**			
1	Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB (Satuan: %)	4,64	5,02	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3006	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**			
1	PDRB Perkapita (Satuan: Juta (Rupiah)	21,780	22,22	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2	Indeks Williamson (Satuan: Indeks)	0,4	0,62	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
3	Laju inflas	0,09	0,00	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
4	Indeks Gin	0,332	0,00	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	89,71	0,00	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
6	Rasio kesenjangan kemiskinan	1,66	0,00	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
7	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	9,5	0,00	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
2	**Fokus Kesejahteraan Sosial**			
1101	**PENDIDIKAN**			
1	Angka Putus sekolah SD (Satuan: %)*	0,17	0,17	Dinas Pendidikan
2	Angka Melek Huruf (AMH) (Satuan: %)*	95,38	99,86	Dinas Pendidikan
3	Angka Putus sekolah SMP (Satuan: %)*	1,15	0,18	Dinas Pendidikan
4	Angka Melanjutkan SD ke SMP (Satuan: %)*	96,78	98,37	Dinas Pendidikan
5	Angka Kelulusan SMP (Satuan: %)*	98,16	97,46	Dinas Pendidikan
1102	**KESEHATAN**			
1	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan RSUD (Satuan: %)	82,23	77,11	Dinas Kesehatan/RSUD Adjidarmo
2	Persentase Desa ODF (Satuan: %)	21,16	22,9	Dinas Kesehatan
3	Persentase keluarga sehat (Satuan: %)	20,4	18,7	Dinas Kesehatan
4	Usia Harapan Hidup (UHH) (Satuan Tahun)	67,33	0,00	Dinas Kesehatan
1106	**SOSIAL**			
1	Tingkat Kemiskinan (Satuan: %)	10,29	7,04	Dinas Sosial
2	Persentase Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) (Satuan:%)	100	0,00	Dinas Sosial
1203	**KETAHANAN PANGAN**			
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Satuan: %)	83,3	83,8	Dinas Ketahanan Pangan
2	Penguatan cadangan pangan (jumlah lokasi/jumlah cadangan pangan)	12.000	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
3	Penanganan daerah rawan pangan/Persentase Desa Rawan Pangan Yang Tertangani (Satuan:%)	3,03	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
3	**Fokus Seni Budaya dan Olahraga**			
1213	**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**			
1	Prosentase wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal (Satuan: %)	10	10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
1	**Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**			
1101	**PENDIDIKAN**			
1	Persentase guru bersertifikat pendidik (Satuan: %)	83,91	40,99	Dinas Pendidikan
2	Persentase sekolah SD berakreditasi A (Satuan: %)*	8,13	8,15	Dinas Pendidikan
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (Satuan: %)	39,81	38,54	Dinas Pendidikan
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP (Satuan: %)*	90,19	99,59	Dinas Pendidikan
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP (Satuan: %)*	76,78	87,56	Dinas Pendidikan
6	Angka Kelulusan SD (Satuan: %)*	98,5	97,63	Dinas Pendidikan
7	Persentase sekolah SMP berakreditasi A (Satuan: %)*	10,09	10,23	Dinas Pendidikan
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SD (Satuan: %)*	96,92	91,25	Dinas Pendidikan
9	Rata-Rata Lama Sekolah (Satuan : Tahun)	6,41	0,00	Dinas Pendidikan
10	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi	49,34	0,00	Dinas Pendidikan
11	Tingkat partisipasiwarga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi	98,11	0,00	Dinas Pendidikan
12	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi	93,07	0,00	Dinas Pendidikan
1102	**KESEHATAN**			
1	Persentase legalitas tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar (Satuan : %)	100	0,00	Dinas Kesehatan
2	Persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen sesuai standar (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Kesehatan
3	Persentase pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai standar (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Kesehatan
4	Indeks Keluarga sehat (Satuan : Poin)	0,2	0,00	Dinas Kesehatan
5	Persentase industri rumah tangga dan farmasi sesuai standar (Satuan : %)	100	0,00	Dinas Kesehatan
6	Persentase pelayanan kesehatan keluarga sesuai standar (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Kesehatan

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
7	Persentase Puskesmas dengan sarana dan prasarana sesuai standar (Satuan: %)	60	85	Dinas Kesehatan
8	Persentase puskesmas terakreditasi minimal madya (Satuan: %)	57,14	24	Dinas Kesehatan
9	Persentase balita kurang Gizi mendapat perawatan (Satuan: %)	100	96,2	Dinas Kesehatan
10	Persentase Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar (Satuan: %)	60	75	Dinas Kesehatan
11	Cakupan pembinaan PHBS di tatanan kesehatan (Satuan: %)	83,33	88	Dinas Kesehatan
12	Rasio Rujukan kasus Non Spesialitik (RRNS)dari Puskesmas ke Rumah Sakit (Satuan: %)	15,86	4,72	Dinas Kesehatan
13	Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai Formularium Nasional (Fornas) (Satuan: %)	90	93	Dinas Kesehatan
14	Persentase puskesmas yang melaksanakan SIKDA (Satuan: %)	79,07	70	Dinas Kesehatan
15	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,38	0,00	Dinas Kesehatan
16	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (Satuan : %)	100	0,00	Dinas Kesehatan
17	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Satuan : %)	90,18	0,00	Dinas Kesehatan
18	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (Satuan : %)	88,89	0,00	Dinas Kesehatan
19	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (Satuan : %)	99,31	0,00	Dinas Kesehatan
20	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (Satuan : %)	86,7	0,00	Dinas Kesehatan
21	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Satuan : %)	79,7	0,00	Dinas Kesehatan
22	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	49,66	0,00	Dinas Kesehatan
23	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (Satuan : %)	61,26	0,00	Dinas Kesehatan

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
24	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Satuan : %)	40,33	0,00	Dinas Kesehatan
25	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Satuan : %)	64,9	0,00	Dinas Kesehatan
26	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (Satuan : %)	62,12	0,00	Dinas Kesehatan
27	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (Satuan : %)	49,15	0,00	Dinas Kesehatan
28	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (Satuan : %)	61	0,00	Dinas Kesehatan
29	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (Satuan : %)	0,38	0,00	Dinas Kesehatan
1103	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang (Satuan: %)	100	72	Dinas PUPR
2	Persentase alat berat dalam kondisi baik (Satuan: %)	80,76	91,49	Dinas PUPR
3	Persentase pembangunan penampung air (embung) (Satuan: %)	121,74	95,77	Dinas PUPR
4	Persentase ketersediaan Fasum di kecamatan (Satuan: %)	82,77	58,54	Dinas PUPR
5	Persentase jalan kabupaten terpelihara / ditingkatkan (Satuan: %)	43,3	34,19	Dinas PUPR
6	Persentase irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (Satuan: %)	71,09	70,62	Dinas PUPR
7	Persentase berkurangnya kawasan yang terkena dampak banjir (Satuan: %)	109,23	82,58	Dinas PUPR
8	Persentase layanan informasi jasa kontruksi (Satuan: %)	100	0,00	Dinas PUPR
9	persentase kesesuaian tata ruang (Satuan: %)	100	0,00	Dinas PUPR
10	persentase jumlah desa binaan P2WKSS tertata (Satuan: % }	100	0,00	Dinas PUPR
11	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani ole	71,09	0,00	Dinas PUPR

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
12	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (Satuan: %)	72,73	0,00	Dinas PUPR
13	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolaha	72,63	0,00	Dinas PUPR
14	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (Satuan: % }	103,2	0,00	Dinas PUPR
15	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (Satuan: %)	68,13	0,00	Dinas PUPR
16	Persentase saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik (Satuan: %)	66,35	0,00	Dinas PUPR
1104	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			
1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (Satuan: %)	13,32	13,45	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
2	Persentase Peningkatan Penanganan Perumahan dengan PSU Layak (Satuan: %)	31,25	12,5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
3	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di Perkotaan (Satuan: %)	38,28	12,55	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
4	Persentase kawasan kumuh di perkotaan	1,25	0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
5	Persentase perumahan dengan PSU memenuhi syarat (Satuan: %)	85,37	0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
6	Persentase masyarakat yang menghuni rumah layak huni (Satuan: %)	86,68	0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
7	Persentasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani (Satuan: %)	38,28	0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
8	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (Satuan: %)	0,40	0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
9	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (Satuan: %)	13,32	0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
10	Persentase Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Satuan: %)	85,37	0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1105	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			
1	Persentase Parpol yang terbina (Satuan: %)	100,00	0,00	Badan Kesbangpol
2	Tingkat Waktu Tanggap (Response time) pengaduan kebakaran (<15 Menit Setelah Pengaduan) (Satuan: %)	68,33	0,00	Satpol PP dan Damkar
3	Cakupan pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran	84,03	0,00	Satpol PP dan Damkar
4	Persentase Penegakan Perda	91,55	0,00	Badan Kesbangpol
5	Prosentase Terlaksananya Peningkatan toleransi dan pembinaan keagamaan (Satuan: %)	100,00	0,00	Badan Kesbangpol
6	Cakupan Pembinaan terhadap Ormas/LSM (Satuan: %)	15,00	0,00	Badan Kesbangpol
7	Cakupan Ormas/LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya berkinerja baik	20,00	0,00	Badan Kesbangpol
8	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan P4GN, PAKEM dan FKUB	100,00	0,00	Badan Kesbangpol
9	Cakupan Penyelenggaraan Sosialisasi dan Edukasi Penguatan Ideologi Pancasila	100,00	0,00	Badan Kesbangpol
10	Prosentase Terpenuhinya kebutuhan Koordinasi Jaringan Deteksi Dini, FKDM dan Forum Kominda	100,00	0,00	Badan Kesbangpol
11	Cakupan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kab. Lebak dan mampu mengelola Bantuan Keuangan sesuai Peraturan (Satuan: %)	100,00	0,00	Badan Kesbangpol

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
12	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (Satuan: %)	100,00	0,00	Badan Kesbangpol
13	Persentase penanganan pra bencana (Satuan: %)	100,00	0,00	Badan Kesbangpol
14	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (Satuan: %)	100,00	0,00	Badan Kesbangpol
15	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00	0,00	Badan Kesbangpol
16	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00	0,00	Badan Kesbangpol
17	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	0,00	Badan Kesbangpol
1106	**SOSIAL**			
1	Jumlah Taman Makam terpelihara (Satuan: Unit)	1	0.00	Dinas Sosial
2	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan kabupaten (Satuan: %)	100	0.00	Dinas Sosial
3	Cakupan PMKS memperoleh Penanganan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial (Satuan: %)	100	27,75	Dinas Sosial
4	Cakupan PMKS memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (Satuan: %)	72,00	100	Dinas Sosial
2	**Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**			
1201	**TENAGA KERJA**			
1	Standarisasi BLK (Satuan: Kelas)	-	C	Dinas Tenaga Kerja
2	Presentase Penyelesaian hubungan industrial (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Tenaga Kerja
3	Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan: Rupiah)	37.322.556,88	0,00	Dinas Tenaga Kerja
4	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Satuan; %)	75,00	0,00	Dinas Tenaga Kerja
5	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja. (Satuan: %)	100,00	0,00	Dinas Tenaga Kerja
6	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (Satuan: %)	32,77	0,00	Dinas Tenaga Kerja

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
7	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). (Satuan: %)	73,44	0,00	Dinas Tenaga Kerja
8	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. (Satuan: %)	23,77	0,00	Dinas Tenaga Kerja
1202	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			
1	Cakupan Stakeholder yang mampu menyusun perencanaan & penganggaran yang responsif gender (Satuan: %)	100	100	DP3AP2KB
2	Presentase tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate)	100	0,00	DP3AP2KB
3	Presentase penanganan kasus kekerasan anak (Satuan: %)	100	0,00	DP3AP2KB
4	Persentase lembaga masyarakat yang aktip dalam lembaga perlidungan dan pemenuhan hak anak	100	0,00	DP3AP2KB
5	Proporsi perempuan dalam bidang pembangunan	100	0,00	DP3AP2KB
6	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (Satuan: %)	0,72	0,00	DP3AP2KB
7	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11,97	0,00	DP3AP2KB
1203	**KETAHANAN PANGAN**			
1	Porsentase Pangan Aman (Satuan: %)	97,5	93,4	Dinas Ketahanan Pangan
2	Persentase Desa Rawan Pangan Yang Tertangani	37,88	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
3	Persentase Angka Kecukupan Gizi berdasarkan ketersediaan pangan (Satuan: %)	157,1	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
1204	**PERTANAHAN**			
1	Persentase Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan (Satuan: %)	40	20	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
2	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
3	Persentase penyelesaian tanah Garapan (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
4	Persentase penyelesaian redistribusi tanah serta ganti kerugian prpgram tanah kelebihan dan tanah absente (Satuan: %)	80	0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
5	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu (Satuan: %)	18,18	0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
6	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi(satuan:%)	40,00	0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1205	**LINGKUNGAN HIDUP**			
1	Persentase Pengurangan Sampah (Satuan: %)*	20,5	20,50	Dinas Lingkungan Hidup
2	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan (Satuan: %)	25,07	36,55	Dinas Lingkungan Hidup
3	Persentase lahan kritis yang tertangani (Satuan: %)	17,03	21,39	Dinas Lingkungan Hidup
4	persentase ruang terbuka hijau terkelola (Satuan: %)*	3,72	3,72	Dinas Lingkungan Hidup
5	Persentase dokumen informasi Lingkungan Hidup (Satuan: %)	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
6	Persentase Penanganan Sampah (Satuan: %)*	16,3	15,5	Dinas Lingkungan Hidup
7	Persentase pengaduan lingkungan yang tertangani (Satuan: %)	166,67	100	Dinas Lingkungan Hidup
8	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup (Satuan: %)	40	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
9	Persentase Pendidikan,Pelatihan dan penyuluhan untuk masyarakat (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
10	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang menjadi acuan perencanaan Daerah (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
11	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Izin Limbah B3 (Satuan: %)	14,63	0,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
12	Pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota (Satuan: %)	36,8	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
13	Persentase kesesuaian tata ruang (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
14	persentase jumlah perusahaan aktif yang diawasi ketaatannya terhadap persetujuan lingkungan (satuan: %)	25,07	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
1206	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			
1	Prosentase Kepemilikan dokumen kependudukan (Satuan: %)	97,16	96	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Prosentase kepemilikan akta-akta catatan sipil (Satuan: %)*	52,94	54,51	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Prosentase Kesesuaian database dokumen kependudukan (Satuan: %)*	93	98,88	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Prosentase Penduduk yang mendapatkan layanan Akte Perkawinan dan Akte Perceraian sesuai SOP (Satuan: %)	99,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Prosentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (Satuan: %)	99,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Cakupan Instansi yang memanfaatkan Data dan Dokumen Kependudukan (Satuan: %)	5,00	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1207	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			
1	Persentase pembangunan sapras perdesaan yang melibatkan masayarakat (Satuan: persen)	70	70	DPMD
2	Persentase LKD yang produktif (Satuan: persen)	16	18,64	DPMD
3	Persentase Terbentuk BUMDes yang Aktif (Satuan: persen)	15	10	DPMD
4	Persentase Desa dengan pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa, dan Administrasi Keuangan yang baik dan Pengelolaan Asetnya Tertib (Satuan: persen)	100	100	DPMD
5	Persentase sarana usaha masyarakat yang berkembang (Satuan: persen)	1,5	13,58	DPMD
6	Persentase Keswadyaan Masyarakat dalam Kegiatan pembangunan Desa (Satuan: persen)	100	62,64	DPMD

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
7	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	100	0,00	DPMD
8	Persentase Kelembagaan Tingkat Desa yang aktif	100	0,00	DPMD
9	Cakupan Sarana dan Prasarana Transportasi antar wilayah dalam Kondisi Baik	100	0,00	DPMD
10	Persentase pengentasan desa tertinggal	14,2	0,00	DPMD
11	Persentase peningkatan status desa Mandiri	0.00	0,00	DPMD
1208	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			
1	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (Satuan: %)	76,81	62,98	DP3AP2KB
2	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (Satuan: %)	1.46	1,46	DP3AP2KB
3	Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun (Satuan: %)	75,33	73,74	DP3AP2KB
4	Cakupan Anggota Bina Keluarga berKB (Satuan: Orang)	23.812,00	40.350,00	DP3AP2KB
5	Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB, BKR, BKL) (Satuan: Kelompok)	841	688	DP3AP2KB
1209	**PERHUBUNGAN**			
1	Persentase pelayanan terminal (Satuan: %)	93,99	83,33	Dinas Perhubungan
2	Persentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (Satuan: %)	98,02	100	Dinas Perhubungan
3	Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik (Satuan: %)	100	83	Dinas Perhubungan
4	Persentase pembangunan prasarana perhubungan (Satuan: %)	83,67	0.00	Dinas Perhubungan
5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (Satuan: %)	94,94	43,7	Dinas Perhubungan
1210	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			
1	Persentase pengelolaan aplikasi informatika Pemerintah Daerah (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Kominfo

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
2	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Kominfo
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Kominfo
4	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pemerintah Daerah provinsi (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Kominfo
5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Kominfo
6	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Kominfo
1211	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**			
1	Prosentase Koperasi Aktif (Satuan: %)	62	0,00	Dinas Koperasi dan UMKM
2	Prosentase UMK yang berdaya saing (Satuan: %)	57,14	10,39	Dinas Koperasi dan UMKM
3	Persentase koperasi berkinerja baik (Satuan: %)	10,12	0,00	Dinas Koperasi dan UMKM
4	Rasio Kewirausahaan (Satuan: %)	0,04	0,00	Dinas Koperasi dan UMKM
5	Persentase pengurus dan pengawas koperasi yang kompeten (Satuan: %)	4,49	0,00	Dinas Koperasi dan UMKM
6	Persentase Koperasi Sehat (Satuan: %)	2,59	0,00	Dinas Koperasi dan UMKM
7	Persentase Usaha Mikro ke Usaha Kecil (Satuan: %)	-98,19	0,00	Dinas Koperasi dan UMKM
1214	**STATISTIK**			
1	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Kominfo
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	0,00	Dinas Kominfo

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
1215	**PERSANDIAN**			
1	Persentase pengamanan informasi Pemerintah Daerah (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Kominfo
2	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Kominfo
3	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Kominfo
1216	**KEBUDAYAAN**		0,00	
1	Persentase pelestarian adat budaya daerah (Satuan: %)	17,64	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Persentase terpenuhinya kebutuhan event seni dan budaya daerah (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %)*	1,59	22,05	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang diakui secara nasional (satuan unit)	1	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Presentase budaya/tradisi lokal yang mendapat pengakuan nasional atau internasional	30	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	Persentase kesenian tradisional yang mendapat pengakuan nasional (satuan %)	5	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Museum (Satuan: Point)	89	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8	Terlestarikannya Cagar Budaya (Satuan: %)	1,56	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1217	**PERPUSTAKAAN**			
1	Jumlah pengunjung perpustakaan (Satuan: Orang)	4.928,00	17.213,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Jumlah Perpustakaan yang dibina (Satuan: Unit)	312	8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Persentase Minat Baca Masyarakat (PMBM)	20	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Satuan: %)	58,77	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Satuan: %)	8,9	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1218	**KEARSIPAN**			
1	Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam sistem layanan kearsipan (Satuan: %)	53	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Persentase OPD yang mengelola arsip sesuai Perbup (Satuan: Buah)	58	57	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
3	Jumlah Dokumen Keuangan Setda yang terpelihara (Satuan: dokumen)	11	11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Tertibnya Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Daerah (Satuan: %)	90	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Jumlah Arsip Yang terdata, tertata dan terpelihara di DEPO unit Kerasipan I	650	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan**			
1205	**LINGKUNGAN HIDUP**			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Satuan: Indeks)	62,85	72,26	Dinas Lingkungan Hidup
2	Peningkatan lndeks Kualitas Udara (Satuan: Poin)	79,94	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
3	Peningkatan lndeks Kualitas Tutupan Lahan (Satuan: Poin)	39,76	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
4	Peningkatan lndeks Kualitas Air (Satuan: Poin)	57,89	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
1209	**PERHUBUNGAN**			
1	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (Satuan: %)	4,38	4,5	Dinas Perhubungan
2	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas (Satuan: %)	0,02	0,00	Dinas Perhubungan
1213	**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**			
1	Prosentase Atlet yang berprestasi (Satuan: %)	47	21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Prosentase Sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik (Satuan: %)	100	100	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	jumlah pemuda yang berprestasi di Tk. Provinsi dan nasional (Satuan: Orang)*	16	7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4	Prosentase Cabor yang berprestasi (Satuan: %)	30	5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
5	Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal (Satuan: %)	10	10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
6	Prosentase lembaga pemuda yang aktif (Satuan: %)	60	0,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
7	Persentase Prestasi Keolahragaan Kabupaten Lebak (Satuan: %)	79	0,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
8	Persentase Kemandirian, partisipasi dan Prestasi Pemuda (Satuan: %)	10	0,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
9	Persentase pembina dan pelatih yang bersertifikat (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
10	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (Satuan: %)	10	0,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
11	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (Satuan: %)	0,22	0,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
12	Peningkatan prestasi olahraga (Satuan: Medali)	79	0,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2001	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**			
1	Persentase peningkatan kelas kelompok perikanan (Satuan: %)	2,54	0,78	Dinas Perikanan
2	Produktivitas Sub Sektor Perikanan (Satuan: Rupiah)	20.293.824	0,00	Dinas Perikanan
3	persentase ketaatan usaha perikanan (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Perikanan
4	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) (ton) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	10196,91	0,00	Dinas Perikanan
2003	**PERTANIAN**			
1	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan (Satuan: %)	1	2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok : Pemula (Satuan: Kelompok)	1.570	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Lanjut (Satuan: Kelompok)	969	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	Madya (Satuan: Kelompok)	42	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5	Utama (Satuan: Kelompok)	1	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Persentase Penurunan Luas Lahan Terdampak bencana alam dan Non-alam (Satuan: %)	27,43	0,00	Dinas Pertanian
7	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Satuan: %)	1	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
8	Persentase prasarana pertanian dan perkebunan dalam kondisi baik (Satuan: %)	82	82	Dinas Pertanian
9	Jumlah peningkatan kelas kelompok (Satuan: Kelompok)	74	-	Dinas Pertanian
10	Persentase Kelompok Ternak yang dibina (Satuan: %)	100	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
11	Persentase Usaha Peternakan yang dibina (Satuan: %)	100	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
2004	**PERDAGANGAN**			
1	Prosentase Jumlah Penanganan Terhadap Pelanggaran Perdagangan (Satuan: %)	80	80	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Indeks Tertib Ukur (Satuan: Point)	50,00	0.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Prosentase proporsi produk dalam negeri yang diperdagangkan di pasar domestic (Satuan: %)	90	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Prosentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (Satuan: %)	0,6	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Prosentase kesadaran pelaku usaha dan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa (Satuan: %)	90	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Prosentase terjaganya Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok (Satuan: %)	90	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Prosentase perusahaan berizin (Satuan: %)	90	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2007	**PERINDUSTRIAN**			
1	Produktivitas Sektor Industri	52,16	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Prosentase Industri Kecil dan Menengah yang Memiliki Standar Mutu (Satuan: %)	12,00	10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Prosentase Evaluasi Rencana Pengembangan Industri (Satuan: %)	89	89	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Persentase Perusahaan Berijin (Satuan: %)	90	90	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Pertumbuhan Industri	3,95	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2008	**TRANSMIGRASI**			
1	Prosentase Keluarga Transmigran yang berhasil (Satuan: %)	0,00	0,00	Dinas Tenaga Kerja
4	**Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah**			
3001	**PERENCANAAN**			

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
1	Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah (Satuan: persen)	76	100	Bapelitbangda
2	Cakupan sinergisitas Program pembangunan Pusat dan Daerah baik jangka pendek maupun jangka menengah (Satuan: %)	100	100	Bapelitbangda
3	Jumlah kerjasama antar Pemerintah Daerah (Satuan: %)	100	0,00	Sekretariat Daerah
4	Persentase Capaian Kinerja RKPD (Satuan: %)	97,37	0,00	Sekretariat Daerah
3002	**KEUANGAN**			
1	Persentase pertumbuhan pajak daerah (Satuan: %)	23,64	15,02	Badan Pendapatan Daerah
2	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (Satuan: %)	1,494	1,502	BKAD
3	Rasio Kemandirian Daerah	19,57	0,00	BKAD
4	Persentase ketaatan wajib pajak daerah (Satuan: %)*	92,09	83,51	Badan Pendapatan Daerah
5	OPINI BPK (Satuan: Predikat)	-	WTP	BKAD
6	Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Satuan: %)	82	80	BKAD
7	Persentase realisasi pendapatan dan belanja daerah (Satuan: %)	94	93,5	BKAD
8	Persentase Laporan Keuangan yang di susun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Satuan: %)	95	95	BKAD
9	Prosentase Jumlah Aset Yang terinventarisasi, terindentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak (Satuan: %)	45	43	BKAD
10	jumlah dokumen standar satuan harga yang di susun (Satuan: dok)	1	1	BKAD
11	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan public (Satuan: %)	100	0,00	BKAD
12	Kesesuaian Nilai Neraca aset dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Satuan: %)	100	0,00	BKAD

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
3003	**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			
1	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat manajerial (Satuan: %)*	63,65	63,65	BKPSDM
2	Persentase jabatan yang terisi berdasarkan peraturan perundang-undangan (Satuan: %)*	96,27	90	BKPSDM
3	Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis (Satuan: %)	16,28	16,28	BKPSDM
3004	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			
1	Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Satuan: persen)	100	100	Bapelitbangda
3005	**PENGAWASAN**			
1	Persentase Audit, Revieu dan Evaluasi yang dilaksanakan sesuai PKPT dan Standar AAIPI (Satuan: persen)	85	93	Inspektorat
2	Persentase OPD yang menerapkan SPIP hasil pendampingan (Satuan: persen)	30,3	100	Inspektorat
3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) (Satuan: Predikat)	78	75	Inspektorat
4	Persentase SDM dan Sarana Pengawasan yang tersedia (Satuan: persen)	85	80	Inspektorat
5	Persentase akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan (Satuan: %)	87,03	0,00	Inspektorat
6	Persentase Perumusan Kebijakan, Asistensi dan Pendampingan (Satuan: %)	77,14	0,00	Inspektorat
7	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	-	Inspektorat
8	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	-	Inspektorat
9	Sistem Merit	251,5	-	Inspektorat
3006	**ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**			

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
1	Jumlah rencana kerja dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Satuan: Perda)*	10	5	Sekretariat Daerah
2	Jumlah jenis administrasi daerah yang berjalan dengan baik (Satuan: dokumen)	7	7	Sekretariat Daerah
3	Persentase indek kepuasan pelayanan kepada Anggota DPRD Kab. Lebak (Satuan: %)*	84	97,31	Sekretariat DPRD
4	Persentase Terpenuhinya layanan kedinasan KDH/WKDH (Satuan: %)	100	100	Sekretariat Daerah
5	cakupan Penetapan Perda dan Perbup (Satuan: %)	100	100	Sekretariat Daerah
6	Persentase penggunaan E-Procurenment terhadap Belanja Pengadaan Barang dan jasa (Satuan: %)	100	95,52	Sekretariat Daerah
7	Rara-rata waktu fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada Anggota DPRD melalui Komisi-Komisi (Satuan: %)	50	0.00	Sekretariat DPRD
8	Persentase Perdes APBDes Sesuai Peraturan Bupati (Satuan: %)	100	0,00	Sekretariat DPRD
9	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif (Satuan: %)	100	0,00	Sekretariat DPRD
3007	**FUNGSI PENUNJANG LAINNYA**			
1	Cakupan penyelenggaraan administrasi perkantoran (Satuan: %)	100	100	Seluruh OPD
2	Cakupan Penanggulangan Bencana (Satuan: %)	100	100	Seluruh OPD
3	IKM (Satuan: Nilai Interval Konversi IKM)	78,65	84,81	Seluruh OPD
4	Presentase kecamatan yang tanggap bencana (Satuan: %)	100	0,00	Seluruh OPD
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan (Satuan: Point)	76,94	0,00	Seluruh OPD
6	Tingkat Kondusifitas Kecamatan dalam kondisi baik (Satuan: %)	100	0,00	Seluruh OPD
3	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
1	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**			
1106	**SOSIAL**			
1	LPE (Satuan: %)	3,08	-0,88	Dinas Sosial
2001	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**			

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
1	Produksi Ikan Budidaya (Satuan: ton)	3.750,44	3.700,89	Dinas Perikanan
2	Produksi Ikan Tangkap (Satuan: ton)	6.446,47	6.401,18	Dinas Perikanan
3	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Budidaya (%)	1,30	0,00	Dinas Perikanan
4	persentase peningkatan produksi ikan tangkap (%)	0,70	0,00	Dinas Perikanan
5	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Perikanan
2002	**PARIWISATA**			
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Satuan: Orang)	7	38	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Cakupan peningkatan sarana prasarana objek wisata dalam kondisi baik (Satuan: %)	52	57,14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Persentase kelembagaan di 23 ODTW (Satuan: %)	182	85,71	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Satuan: Orang)	315.072,00	206.105,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan (Satuan: Desa)	10	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	Persentase sektor ekonomi kreatif yang berkembang (Satuan: %)	50	57,14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7	Persentase Pertumbuhan Jasa Usaha Pariwisata	8	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi	10	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,6	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Museum	89	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
11	Tingkat hunian akomodasi	12,31	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
12	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (Satuan: %)	5,02	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
13	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-81,58	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
14	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	52,87	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
15	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,07	0,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
2003	**PERTANIAN**			
1	Jumlah Produksi Daging (Satuan: ton)	12.590,00	12.590,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Jumlah Produksi :Padi (Satuan: ton)	659.266,00	0,00	Dinas Pertanian
3	Pertumbuhan Nilai Produksi yang terjual (Satuan: %)	6,29	2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	Jumlah Produksi Pertanian (Satuan: ton)	917.541,20	707.252,00	Dinas Pertanian
5	Pertumbuhan Nilai Produksi (Satuan: %)	1,75	3,28	Dinas Pertanian
6	Persentase Usaha Pertanian yang Berizin (Satuan: %)	23,21	0,00	Dinas Pertanian
7	Palawija (Satuan: ton)	28.846,00	0,00	Dinas Pertanian
8	Hortikultura (Satuan: ton)	194.807,00	0,00	Dinas Pertanian
9	Perkebunan (Satuan: ton)	27.489,00	0,00	Dinas Pertanian
10	Persentase meningkatnya jumlah bibit ber sklb sesuai SNI (Satuan: %)	5	0,00	Dinas Pertanian
11	Nilai tukar petani	99,29	0,00	Dinas Pertanian
12	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Satuan : %)	38,43	0,00	Dinas Pertanian
13	Produktivitas total daerah Satuan: Ribu Rupiah)	51.418	0,00	Dinas Pertanian
14	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	230	0,00	Dinas Pertanian
15	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.) Satuan: Rupiah)	21.748.500	0,00	Dinas Pertanian
2	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**			
1103	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			
1	Persentase jalan terbangun (Satuan: %)	88,6	81,12	Dinas PUPR
2	persentase panjang Jalan perdesaan yang terbangun (Satuan: %)	81,2	82,07	Dinas PUPR
3	Persentase layanan informasi jasa konstruksi (Satuan: %)	100	100	Dinas PUPR
4	indeks infrastruktur publik (Satuan: %)	69,61	69,34	Dinas PUPR
5	persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (Satuan: %)	54,23	54,07	Dinas PUPR
6	Persentase jembatan pedesaan yang terbangun (Satuan: %)	62,5	62,5	Dinas PUPR
7	Persentase tenaga kerja bersertifikat (Satuan: %)	56,67	50	Dinas PUPR

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN		PERANGKAT DAERAH
		2021	2020	
1	2	4	3	5
8	persentase jalan dalam kota kabupaten yang memiliki trotoar dan drainase/saluran (Satuan: %)	68,7	16,93	Dinas PUPR
9	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik (Satuan:%)	83,23	0,00	Dinas PUPR
10	persentase pengelolaan sistem drainase (Satuan; %)	0.00	0,00	Dinas PUPR
11	Persentase ketersediaan air untuk irigasi (Satuan: % }	71,09	0,00	Dinas PUPR
12	persentase penataan bangunan dan lingkungan (Satuan: %)	2,28	0,00	Dinas PUPR
13	persentase jalan dalam kondisi mantap (Satuan: %)	68,13	0,00	Dinas PUPR
2004	**PERDAGANGAN**			
1	Produktivitas Sektor Perdagangan (Satuan: Juta Rupiah)	22,58	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase sarana perdagangan yang refresentatif (Satuan: %)	20	20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Persentase / Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (Satuan: %)	1,15	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Persentase / Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Satuan: %)	8,976	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**Fokus Iklim Berinvestasi**			
1212	**PENANAMAN MODAL**			
1	Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional (Satuan: investor)	46	21	Dinas Penanaman Modal
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) (Satuan: Trilyun Rupiah)	1,130	3,235	Dinas Penanaman Modal
3	Jumlah Rencana Investasi PMA/PMDN (Satuan: Trilyun Rupiah)	3,066	0,00	Dinas Penanaman Modal
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan Penanaman Modal (Satuan: Point)	85,45	0,00	Dinas Penanaman Modal
5	Persentase Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal (Satuan: %)	100	0,00	Dinas Penanaman Modal
6	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (Satuan: %)	6,48	0,00	Dinas Penanaman Modal

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan pilihan yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Peraturan Bupati Lebak Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan struktur APBD dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.	**PENDAPATAN**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	103.215.000.000,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	14.395.529.938,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.941.209.868,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	276.844.084.562,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**400.395.824.368,00**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.902.167.716.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	141.011.356.896,00
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	**2.043.179.072.896,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	
4.3.01	Pendapatan Hibah	73.695.542.508,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	154.442.300.000,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**228.137.842.508,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.671.712.739.772,00**
5.	**BELANJA**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	
5.1.01	Belanja Pegawai	1.079.674.437.300,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	813.315.912.918,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.03	Belanja Hibah	117.234.044.560,00
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	4.129.800.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**2.014.354.194.778,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.379.530.660,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.122.746.969,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.960.204.880,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	161.933.415.717,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.083.379.957,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**244.479.278.183,00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	32.134.380.270,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**32.134.380.270,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.761.054.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	409.777.293.200,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**421.538.347.200,00**
	JUMLAH BELANJA	**2.712.506.200.431,00**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(40.793.460.659,00)**
6.	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	
6.1.01	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	58.793.460.659,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**58.793.460.659,00**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	
6.2.01	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	18.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**18.800.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**40.793.460.659,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	**0,00**

Pada Tahun 2021 masih terjadi pandemi *Corona Virus Desease* (COVID–19) dan menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian dan sosial ekonomi masyarakat. Pandemi COVID–19 merupakan salah satu kondisi *force majure* yang mengancam keselamatan masyarakat sehingga perlu direspon dengan cepat oleh seluruh *stakeholder* diantaranya Pemerintah Daerah. Dalam Rangka Percepatan penanganan COVID-19 berdasarkan Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease (*COVID–19) dan Dampaknya, KMK Nomor 2/KM.7/2021 tentang Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan paling sedikit 8% untuk penanganan COVID-19 dari Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi hasil (DBH), sehingga APBD Kabupaten Lebak mengalami Pergeseran Tahap I.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak melakukan pergeseran APBD Tahun 2021 Tahap I berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 7 April 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, sehingga Struktur APBD Kabupaten Lebak Tahun 2021 setelah mengalami pergeseran Tahap I dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021
(*Pergeseran I*)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD 2021	Perubahan APBD	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	**PENDAPATAN**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	103.215.000.000,00	103.215.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	14.395.529.938,00	14.395.529.938,00	0,00	0,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.941.209.868,00	5.941.209.868,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	276.844.084.562,00	269.844.084.562,00	(7.000.000.000,00)	(2,53)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**400.395.824.368,00**	**393.395.824.368,00**	**(7.000.000.000,00)**	**(1,75)**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**				
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.902.167.716.000,00	1.871.976.829.502,00	(30.190.886.498,00)	(1,59)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	141.011.356.896,00	206.059.283.449,00	65.047.926.553,00	46,13
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**2.043.179.072.896,00**	**2.078.036.112.951,00**	**34.857.040.055,00**	**1,71**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**				
4.3.01	Pendapatan Hibah	73.695.542.508,00	72.695.542.508,00	(1.000.000.000,00)	1,36
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	154.442.300.000,00	154.442.300.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**228.137.842.508,00**	**227.137.842.508,00**	**(1.000.000.000,00)**	**(0,44)**
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.671.712.739.772,00**	**2.698.569.779.827,00**	**26.857.040.055,00**	**(1,01)**
5.	**BELANJA**				
5.1	**BELANJA OPERASI**				
5.1.01	Belanja Pegawai	1.079.674.437.300,00	1.078.360.247.610,00	(1.314.189.690,00)	(0,12)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	813.315.912.918,00	903.729.736.063 ,00	90.413.823.145,00	11,12
5.1.03	Belanja Hibah	117.234.044.560,00	116.209.764.560,00	(1.024.280.000,00)	(0,88)
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	4.129.800.000,00	2.535.490.960,00	(1.594.309.040,00)	(38,61)
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**2.014.354.194.778,00**	**2.100.835.239.193,00**	**86.481.044.415,00**	**4,30**
5.2	**BELANJA MODAL**				
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.379.530.660,00	3.383.080.660,00	3.550.000,00	0,11
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.122.746.969,00	49.561.100.539,00	1.438.353.570,00	(2,99)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.960.204.880,00	34.299.223.130,00	4.339.018.250,00	14,48
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	161.933.415.717,00	161.424.731.387,00	(508.684.330,00)	(0,31)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.083.379.957,00	1.049.519.957,00	(33.860.000,00)	(3,13)
	JUMLAH BELANJA MODAL	**244.479.278.183,00**	**249.717.655.673,00**	**5.238.377.490,00**	**2,14**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD 2021	Perubahan APBD	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	32.134.380.270,00	. 32.134380.270,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**32.134.380.270,00**	**32.134.380.270,00**	**0.00**	**0,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**				
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.761.054.000,00	**11.761.054.000,00**	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	409.777.293.200,00	406.932.550.000,00	(2.844.743.200,00)	(0,70)
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**421.538.347.200,00**	**418.693.604.000,00**	**(2.844.743.200,00)**	**(0,67)**
	JUMLAH BELANJA	**2.712.506.200.431,00**	**2.789.809.691.379,00**	**77.303.490.948,00**	**2,85**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(40.793.460.659,00)**	**(91.239.911.552,00)**	**(50.446.450.893,00)**	**(123,66)**
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
6.1.01	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	58.793.460.659,00	109.239.911.552,00	50.446.450.893,00	85,80
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**58.793.460.659,00**	**109.239.911.552,00**	**50.446.450.893,00**	**85,80**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				
6.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**18.000.000.000,00**	**18.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**40.793.460.659,00**	**91.239.911.552,00**	**50.446.450.893,00**	**123,66**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Alokasikan anggaran 8% untuk penanganan COVID-19, dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
ANGGARAN PENANGANAN COVID-19
TAHUN 2021

N0	URAIAN		ANGGARAN
1	2		3
1	**Penanganan COVID-19**		**38.136.111.675,00**
	a.	Pencengahan gangguan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini	625.142.350,00
	b.	Pengawasan dengan tujuan tertentu	275.000.000,00
	c.	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban	1.189.650.000,00
	d.	Fasilitasi bantuan hukum	699.637.750,00
	e.	Fasilitasi di tempat wisata	560.000.000,00
	f.	Koordinasi penyusunan laporan	200.000.000,00
	g.	Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar	2.159.848.000,00
	h.	Pengadaan bahan habis pakai dan operasional dalam rangka penanganan covid-19	32.426.833.575,00
2	**Dukungan vaksinasi:**		**25.681.702.020,00**
	a.	Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi	13.512.702.020,00
	-	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	4.200.624.020,00

N0	URAIAN		ANGGARAN
1	2		3
	-	Pengadaan alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan	2.133.500.000,00
	-	Pengadaan bahan habis pakai	7.178.578.000,00
	b.	Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi	99.000.000,00
	c.	Distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin	570.000.000,00
	d.	Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi	11.500.000.000,00
3	**Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19**		**449.557.560,00**
4	**Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19**		**23.358.150.000,00**
	a	Dokter spesialis (RSUD)	1.785.000.000,00
	b	Dokter umum & dokter gigi (RSUD)	2.330.000.000,00
	c	Tenaga Kesehatan Lainnya	
	-	Perawat Bidan (RSUD)	8.197.500.000,00
	-	Perawat, bidan, dokter (Puskesmas)	7.785.000.000,00
	-	Perawat, bidan, dokter, dokter spesialis (Rumah Isolasi)	1.218.200.000,00
	-	Perawat, bidan, dokter, dokter spesialis(Labkesda)	687.800.000,00
	d	Tenaga kesehatan lainnya (RSUD, Rumis, Labkesda)	
	-	Tenaga kesehatan lainnya (RSUD)	840.000.000,00
	-	Tenaga kesehatan lainnya (Rumis)	351.750.000,00
	-	Tenaga kesehatan lainnya (Labkesda)	162.900.000,00
JUMLAH DUKUNGAN PENDANAAN BELANJA KESEHATAN DAN BELANJA PRIORITAS LAINNYA			**87.625.521.255,00**

Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan pergeseran APBD tahap ke II sehubungan dengan penyesuaian terhadap petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) dan ditetapkannya besaran Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten dengan berdasarkan kepada Peraturan dan Keputusan Gubernur Banten sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2021 Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Propinsi Banten;
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten;
3. Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep131-Huk/202 tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak melakukan *pergeseran* APBD Tahun 2021 Tahap II berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2021 Tanggal 24 Juni 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, sehingga Struktur APBD Kabupaten Lebak Tahun 2021 setelah mengalami pergeseran Tahap I dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021
(*Pergeseran II*)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD 2021	Perubahan APBD	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	**PENDAPATAN**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	103.215.000.000,00	103.215.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	14.395.529.938,00	14.395.529.938,00	0,00	0,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangDipisahkan	5.941.209.868,00	5.941.209.868,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	269.844.084.562,00	269.844.084.562,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**393.395.824.368,00**	**393.395.824.368,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**				
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.871.976.829.502,00	1.871.976.829.502,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	206.059.283.449,00	261.059.283.449,00	55.000.000.000,00	26,69
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**2.078.036.112.951,00**	**2.078.036.112.951,00**	**55.000.000.000,00**	**26,65**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**				
4.3.01	Pendapatan Hibah	72.695.542.508,00	72.695.542.508,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	154.442.300.000,00	154.442.300.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAHYANG SAH	**227.137.842.508,00**	**227.137.842.508,00**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.698.569.779.827,00**	**2.753.569.797.827,00**	**55.000.000.000,00**	**2,04**
5.	**BELANJA**				
5.1	**BELANJA OPERASI**				
5.1.01	Belanja Pegawai	1.078.360.247.610,00	1.078.350.567.610,00	(9.680.000,00)	(0,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	903.729.736.063 ,00	894.736.463.990,00	(8.993.272.073,00)	(0,10)
5.1.03	Belanja Hibah	116.209.764.560,00	125.719.203.860,00	9.509.439.300,00	8,18
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	2.535.490.960,00	2.535.490.960,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**2.100.835.239.193,00**	**2.101.341.726.420,00**	**506.487.227,00**	**0,02**
5.2	**BELANJA MODAL**				
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.383.080.660,00	3.383.080.660,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.561.100.539,00	51.776.480.312,00	2.215.379.773,00	4,47
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.299.223.130,00	41.647.356.130,00	7.348.133.000,00	21,42
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	161.424.731.387,00	206.424.731.387,00	45.000.000.000,00	27,88
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.049.519.957,00	1.049.519.957,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**249.717.655.673,00**	**304.281.168.446,00**	**54.563.512.773,00**	**21,85**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD 2021	Perubahan APBD	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.3.01..	Belanja Tidak Terduga	20.563.192.513,00	20.493.192.513,00	(70.000.000,00)	(0,00)
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**20.563.192.513,00**	**32.134.380.270,00**	**(70.000.000.00)**	**(0,00)**
5.4	**BELANJA TRANSFER**				
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.761.054.000,00	11.761.054.000,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	406.932.550.000,00	406.932.550.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**418.693.604.000,00**	**418.693.604.000,00**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH BELANJA	**2.789.809.691.379,00**	**2.844.809.691.379,00**	**(55.000.000.000,00)**	**1,98**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(91.239.911.552,00)**	**(91.239.911.552,00)**	**0,00**	**0,00**
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
6.1.01	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	109.239.911.552,00	109.239.911.552,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**109.239.911.552,00**	**109.239.911.552,00**	**0,00**	**0,00**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				
6.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**18.000.000.000,00**	**18.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**91.239.911.552,00**	**91.239.911.552,00**	**0,00**	**123,66**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD diperbolehkan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang mendasari perubahan APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 antara lain:

1. Refocussing dan realokasi anggaran dalam rangka antisipasi dan penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
3. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor 19.11/Kpts/KL.230/B/03/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Konservasi dan Optimasi Lahan Serta Konstruksi Partisipatif pada Program Flood Management In Selected River Basins;
4. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/3155/Keuda, Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Menu Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2021;
5. Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.131-Huk/2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021;
6. Adanya beberapa perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat dari pandemi COVID-19 dengan tetap mempertimbangkan capaian realisasi sampai dengan semester pertama tahun 2021;
7. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 sesuai dengan peruntukannya, seperti SiLPA BLUD, SiLPA DAK (baik DAK Fisik maupun Non Fisik), SiLPA Bantuan Keuangan Provinsi, serta pemanfaatan Sisa Lebih yang dapat digunakan untuk membiayaikegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas.

Struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021
(*Perubahan*)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD 2021	Perubahan APBD	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	**PENDAPATAN**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	103.215.000.000,00	122.215.000.000,00	19.000.000.000,00	18,41

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD 2021	Perubahan APBD	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	14.395.529.938,00	15.075.569.938,00	680.040.000,00	4,72
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangDipisahkan	5.941.209.868,00	5.941.209.868,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	276.844.084.562,00	216.651.338.645,00	(60.192.745.917,00)	(21,72)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**400.395.824.368,00**	**359.883.118.451,00**	**(40.512.705.917,00)**	**(10,11)**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**				
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.902.167.716.000,00	1.838.997.837.761,00	(63.169.878.239,00)	(3,32)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	141.011.356.896,00	208.165.400.687,00	67.154.043.791,00	47,62
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**2.043.179.072.896,00**	**2.047.163.238.448,00**	**3.984.165.552,00**	**0,19**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**				
4.3.01	Pendapatan Hibah	73.695.542.508,00	79.570.262.208,00	5.874.719.700,00	78,97
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	154.442.300.000,00	155.822.300.000,00	1.380.000.000,00	0,89
	JUMLAH LAIN-LAIN) PENDAPATAN DAERAHYANG SAH	**228.137.842.508,00**	**235.392.562.208,00**	**7.254.719.700,00**	**3,18**
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.671.712.739.772,00**	**2.642.438.919.107,00**	**(29.273.820.665,00)**	**(1,10)**
5.	**BELANJA**				
5.1	**BELANJA OPERASI**				
5.1.01	Belanja Pegawai	1.079.674.437.300,00	1.068.572.233.185,00	(11.102.204.115,00)	(1,03)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	813.315.912.918,00	949.751.006.845,00	136.435.093.927,00	16,78
5.1.03	Belanja Hibah	117.234.044.560,00	128.949.541.560,00	11.715.497.000,00	10,00
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	4.129.800.000,00	2.959.390.960,00	(1.170.409.040,00)	(28,34)
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**2.014.354.194.778,00**	**2.150.232.172.550,00**	**135.877.977.772,00**	**6,75**
5.2	**BELANJA MODAL**				
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.379.530.660,00	6.316.725.660,00	2.937.195.000,00	86,91
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.122.746.969,00	71.057.017.009,00	22.934.270.040,00	47,66
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.960.204.880,00	36.229.710.830,00	6.269.505.950,00	20,93
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	161.933.415.717,00	197.868.736.387,00	35.935.320.670,00	22,19
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.083.379.957,00	6.162.726.133,00	5.079.346.176,00	468,84
	JUMLAH BELANJA MODAL	**244.479.278.183,00**	**317.634.916.019,00**	**73.155.637.836,00**	**29,92**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**				
5.3.01..	Belanja Tidak Terduga	32.134.380.270,00	29.014.066.540,00	(3.120.313.730,00)	(9,71)
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**32.134.380.270,00**	**29.014.066.540,00**	**(3.120.313.730,00)**	**(9.71)**
5.4	**BELANJA TRANSFER**				
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.761.054.000,00	15.998.934.500,00	4.237.880.500,00	36,03
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	409.777.293.200,00	407.529.133.620,00	(2.248.159.580,00)	(0,55)
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**421.538.347.200,00**	**423.528.068.120,00**	**1.989.720.920,00**	**0,47**
	JUMLAH BELANJA	**2.712.506.200.431,00**	**2.920.409.223.229,00**	**207.903.022.798,00**	**7,66**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(40.793.460.659,00)**	**(277.970.304.122,00)**	**(237.176.843.463,00)**	**581,41**
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
6.1.01	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	58.793.460.659,00	296.970.304.122,00	238.176.843.463,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**58.793.460.659,00**	**296.970.304.122,00**	**238.176.843.463,00**	**0,00**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				
6.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	18.000.000.000,00	19.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**18.800.000.000,00**	**19.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**40.793.460.659,00**	**277.970.304.122,00**	**237.176.843.463,00**	**123,66**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD 2021	Perubahan APBD	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp2.642.438.919.107,00 terealisasi sebesar Rp2.643.719.867.031,00 atau 100,05% dan Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp2.920.409.223.229,00 terealisasi sebesar Rp2.643.466.844.441,00 atau 90,52% dan Pembiayaan Netto dianggarkan sebesar Rp277.970.304.122,00 terealisasi sebesar Rp287.833.959.123,05 atau 103,55%. Secara struktur APBD, realisasi APBD Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH /(BERKURANG) (Rp)
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	122.215.000.000,00	156.917.968.633,00	128,40	34.702.968.633,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	15.075.569.938,00	15.138.012.060,00	100,41	62.442.122,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.941.209.868,00	5.282.756.992,00	88,92	(658.452.876,00)
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	216.651.338.645,00	207.805.281.535,00	95,92	(8.802.184.898,00)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**359.883.118.451,00**	**385.144.019.220,00**	**107,02**	**25.304.772.981,00**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**				
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.838.997.837.761,00	1.844.377.914.056,00	100,29	5.336.204.083,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	208.165.400.687,00	208.165.400.687,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**2.047.163.238.448,00**	**2.052.543.314.743,00**	**100,26**	**5.336.204.083,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**				
4.3.01	Pendapatan Hibah	79.570.262.208,00	41.771.463.068,00	52,50	(37.798.799.140,00)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	155.822.300.000,00	164.261.070.000,00	105,42	8.438.770.000,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**235.392.562.208,00**	**206.032.533.068,00**	**87,53**	**(29.360.029.140,00)**
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.642.438.919.107,00**	**2.643.719.867.031,00**	**100,05**	**1.280.947.924,00**
5	**BELANJA**				
5.1	**BELANJA OPERASI**				
5.1.01	Belanja Pegawai	1.068.572.233.185,00	992.375.160.333,00	92,87	76.197.072.852,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	949.751.006.845,00	806.590.537.922,00	84,93	143.166.885.423,00
5.1.03	Belanja Hibah	128.949.541.560,00	114.176.801.020,00	88,54	14.772.740.540,00
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	2.959.390.960,00	2.769.790.960,00	93,59	189.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH /(BERKURANG) (Rp)
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**2.150.232.172.550,00**	**1.915.912.290.235,00**	**89,10**	**234.326.298.815,00**
5.2	**BELANJA MODAL**				
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.316.725.660,00	6.027.811.248,00	95,43	288.914.412,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.057.017.009,00	55.248.493.450,00	77,75	15.808.523.559,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.229.710.830,00	27.007.051.046,00	74,54	9.222.659.784,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	197.868.736.387,00	187.474.208.785,00	94,75	10.394.527.602,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.162.726.133,00	6.097.188.218,00	98,94	65.537.915,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**317.634.916.019,00**	**281.854.752.747,00**	**88,74**	**35.780.163.272,00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**				
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	29.014.066.540,00	24.421.516.341,00	84,17	4.592.550.199,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**29.014.066.540,00**	**24.421.516.341,00**	**84,17**	**4.592.550.199,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**				
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.998.934.500,00	15.998.934.500,00	100,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	407.529.133.620,00	405.279.350.618,00	99,45	2.249.783.002,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**423.528.068.120,00**	**421.278.285.118,00**	**99,47**	**2.249.783.002,00**
	JUMLAH BELANJA	**2.920.409.223.229,00**	**2.643.466.844.441,00**	**90,52**	**276.948.795.288,00**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(277.970.304.122,00)**	**253.022.590,00**	**(0,09)**	**(278.237.016.424,00)**
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
6.1.01	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	296.970.304.122,00	296.833.959.123,05	99,95	131.459.998,95
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**296.970.304.122,00**	**296.833.959.123,05**	**99,95**	**131.459.998,95**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				
6.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	19.000.000.000,00	9.000.000.000,00	47,37	10.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**19.000.000.000,00**	**9.000.000.000,00**	**47,37**	**10.000.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**277.970.304.122,00**	**287.833.959.123,05**	**103,55**	**(9.868.540.001,05)**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	**0.00**	**288.086.981.713,05**		

Realisasi pendapatan dan belanja pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk setiap Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Perangkat Daerah Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN		BELANJA	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	973.416.466.647,00	920.795.861.801,00
2	Dinas Kesehatan	205.086.635.693,00	194.765.747.469,00	606.854.684.860,00	468.148.572.443,00
	Dinas Kesehatan	264.735.000,00	338.373.843,00	268.167.788.691,00	218.481.609.456,00
	RSUD Dr. ADJIDARMO	125.000.000.000,00	128.091.511.135,00	202.252.353.806,00	139.182.573.161,00
	Puskesmas Bojongjuruh	1.324.838.200,00	996.325.187,00	2.787.463.193,00	1.064.165.724,00
	Puskesmas Bayah	2.685.385.000,00	2.067.030.470,00	4.612.354.991,00	3.048.763.483,00
	Puskesmas Bojongmanik	1.240.406.150,00	1.129.609.997,00	2.458.509.127,00	1.182.847.592,00
	Puskesmas Cibadak	1.652.050.552,00	1.536.300.453,00	3.199.750.787,00	1.692.033.613,00
	Puskesmas Mandala	1.255.968.088,00	1.072.341.053,00	2.218.776.000,00	1.289.045.193,00
	Puskesmas Cibeber	1.429.223.279,00	992.631.345,00	2.427.804.428,00	1.115.739.155,00
	Puskesmas Cisungsang	1.002.667.500,00	840.670.774,00	2.066.133.112,00	957.096.284,00
	Puskesmas Citorek	1.016.655.000,00	563.158.398,00	1.670.115.343,00	637.384.757,00
	Puskesmas Cigemblong	1.713.082.910,00	1.200.592.958,00	2.947.591.393,00	1.496.844.097,00
	Puskesmas Cijaku	2.153.343.888,00	1.738.094.490,00	3.666.884.010,00	2.150.284.447,00
	Puskesmas Cikulur	2.494.545.000,00	1.807.941.408,00	4.195.887.785,00	2,077.223.738,00
	Puskesmas Pamandegan	1.334.334.540,00	1.224.456.735,00	2.337.952.587,00	1.376.013.496,00
	Puskesmas Cileles	1.408.240.000,00	1.110.184.240,00	2.374.988.501,00	1.315.998.861,00
	Puskesmas Prabugantungan	1.412.717.608,00	1.085.662.915,00	2.336.340.888,00	1.228.948.754,00
	Puskesmas Cilograng	1.971.627.500,00	1.361.395.400,00	3.258.838.103,00	1.690.651.159,00
	Puskesmas Cimarga	2.460.496.360,00	1.982.735.622,00	4.168.465.976,00	2.530.640.542,00
	Puskesmas Sarageni	756.988.000,00	619.870.391,00	1.468.841.445,00	727.721.121,00
	Puskesmas Cipanas	3.851.585.080,00	2.642.222.687,00	5.343.538.222,00	3.111.283.782,00
	Puskesmas Cirinten	2.338.323.820,00	1.524.343.035,00	3.884.623.472,00	1.586.883.862,00
	Puskesmas Curugbitung	2.503.139.000,00	1.936.007.749,00	4.100.786.035,00	2.189,794.637,00
	Puskesmas Gunungkencana	2.267.202.500,00	1.965.839.729,00	4.477.229.895,00	2.126.763.893,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN		BELANJA	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6
	Puskesmas Sajira	1.700.440.609,00	1.388.700.558,00	3.052.764.104,00	1.679.878.223,00
	Puskesmas Pajagan	1.886.833.720,00	1.098.963.867,00	2.853.103.187,00	1.063.651.694,00
	Puskesmas Leuwidamar	2.042.556.040,00	1.434.724.285,00	3.081.371.830,00	1.549.720.036,00
	Puskesmas Cisimeut	1.295.576.247,00	974.723.541,00	2.399.805.453,00	954.080.433,00
	Puskesmas Maja	3.713.460.670,00	2.823.942.166,00	5.443.115.810,00	3.488.079.353,00
	Puskesmas Cipendeuy	1.839.084.404,00	818.498.285,00	2.913.682.084,00	1.354.308.428,00
	Puskesmas Muncang	2.133.478.500,00	1.627.458.667,00	3.726.886.887,00	1.788.020.116,00
	Puskesmas Panggarangan	2.345.953.340,00	1.719.750.639,00	4.153.755.986,00	1.889.003.679,00
	Puskesmas Rangkasbitung	2.690.044.524,00	2.163.639.412,00	4.841.321.936,00	2.510.271.441,00
	Puskesmas Kolelet	693.196.114,00	509.833.596,00	1.166.222.386,00	581.949.174,00
	Puskesmas Mekarsari	790.825.315,00	624.837.239,00	1.332.431.377,00	701.100.163,00
	Puskesmas Sobang	1.994.770.800,00	1.399.383.096,00	3.377.817.256,00	1.429.907.902,00
	Puskesmas Malingping	2.647.200.000,00	2.584.011.730,00	5.138.914.267,00	3.135.389.084,00
	Puskesmas Binuangeun	2.311.951.000,00	2.142.345.054,00	3.857.222.180,00	2.446.641.852,00
	Puskesmas Parungsari	1.688.148.000,00	949.936.174,00	2.962.224.517,00	1.030.427.201,00
	Puskesmas Baros	1.108.800.000,00	971.136.109,00	2.246.699.021,00	1.257.876.283,00
	Puskesmas Warunggunung	2.265.053.415,00	1.884.928.156,00	3.786.271.791,00	1.924.926.988,00
	Puskesmas Cihara	2.160.211.000,00	1.751.674.254,00	3.335.268.094,00	1.963.699.509,00
	Puskesmas Banjarsari	2.585.320.987,00	2.132.400.007,00	4.782.601.177,00	2.309.199.467,00
	Puskesmas Lebakgedong	1.531.237.700,00	803.425.063,00	2.494.806.626,00	1.062.329.204,00
	Puskesmas Kalanganyar	2.124.938.333,00	1.455.263.045,00	3.485.381.101,00	2,108,715,195.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.150.000.000,00	7.912.620.130,00	319.565.244.353,00	271.358.300.778,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.150.000.000,00	7.912.620.130,00	318.639.930.553,00	270.810.971.558,00
	UPTD Alat berat dan Perbengkelan	0,00	0,00	831.164.000,00	547.329.220,00
	UPTD Gedung	0,00	0,00	94.149.800,00	0,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN		BELANJA	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	120.000.000,00	110.679.395,00	25.772.034.946,00	24.192.799.556,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	9.953.613.409,00	9.713.904.026,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	7.611.400.180,00	6.892.749.901,00
7	Dinas Sosial	0,00	0,00	7.823.457.012,00	7.165.456.945,00
8	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	3.834.614.416,00	3.602.986.037,00
	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	3.421.936.030,00	3.196.802.147,00
	UPTD Latihan Kerja	0,00	0,00	412.678.386,00	406.183.890,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	15.503.910.463,00	15.221.886.166,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	5.905.373.589,00	5.556.638.338,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	890.571.338,00	944.340.928,00	15.255.988.529,00	14.419.706.278,00
	Dinas Lingkungan Hidup	890.571.338,00	944.340.928,00	15.255.988.529,00	14.419.706.278,00
	UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	0,00	0,00	792.035.650,00	707.114.170,00
	UPTD Laboratorium Lingkungan	0,00	0,00	564.352.400,00	558.933.352,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	9.700.859.915,00	8.439.062.823,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	14.295.592.799,00	12.024.979.963,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN		BELANJA	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6
14	Dinas Perhubungan	1.657.720.000,00	1.543.450.000,00	21.499.220.581,00	20.825.789.942,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	7.499.614.954,00	7.135.786.748,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	5.045.932.823,00	4.771.707.374,00
17	Dinas Penanaman Modal	0,00	0,00	7.923.359.278,00	7.444.142.868,00
18	Dinas Kepemudaan Olahraga	20.432.000,00	20.750.000,00	9.558.673.411,00	8.519.250.979,00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	143.200.000,00	128.500.000,00	18.564.449.496,00	14.436.314.040,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	4.115.654.483,00	3.562.438.745,00
21	Dinas Perikanan	1.441.326.600,00	1.446.547.095,00	5.956.112.459,00	5.560.894.295,00
22	Dinas Pertanian	272.850.000,00	273.544.000,00	66.425.650.635,00	48.916.421.273,00
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	24.600.000,00	24.760.000,00	6.346.853.400,00	5.929.737.910,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.090.135.000,00	2.764.182.408,00	18.753.751.189,00	17.453.684.116,00
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.090.135.000,00	2.764.182.408,00	17.998.106.389,00	16.729.236.387,00
	UPTD Teknis Metrologi Legal	0,00	0,00	755.644.800,00	724.447.729,00
25	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	46.313.632.525,00	43.454.354.935,00
26	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	78.782.392.843,00	70.510.448.852,00
27	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	8.781.624.343,00	8.239.762.873,00
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.300.326.448.476,00	2.276.326.842.645,00	490.002.306.693,00	481.222.355.089,00
29	Badan Pendapatan Daerah	122.215.000.000,00	157.457.902.961,00	15.931.941.986,00	14.977.790.777,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN		BELANJA	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	10.022.145.113,00	8.987.461.955,00
31	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	11.440.630.474,00	10.633.449.164,00
32	Kecamatan Rangkasbitung	0,00	0,00	8.931.998.550,00	8.559.009.588,00
	Kecamatan Rangkasbitung	0,00	0,00	4.914.277.423,00	4.679.588.103,00
	Kelurahan Rangkasbitung	0,00	0,00	755.737.647,00	689.519.860,00
	Kelurahan Muara Ciujung Barat	0,00	0,00	819.032.800,00	802.538.745,00
	Kelurahan Muara Ciujung Timur	0,00	0,00	807.116.600,00	782.979.420,00
	Kelurahan Cijoro Lebak	0,00	0,00	817.273.380,00	804.032.070,00
	Kelurahan Cijoro Pasir	0,00	0,00	818.560.700,00	800.351.390,00
33	Kecamatan Kalanganyar	0,00	0,00	1.966.400.138,00	1.803.349.183,00
34	Kecamatan Cibadak	0,00	0,00	2.298.526.050,00	2.138.717.052,00
35	Kecamatan Warunggunung	0,00	0,00	2.057.044.169,00	1.875.317.494,00
36	Kecamatan Cimarga	0,00	0,00	2.465.565.922,00	2.125.664.915,00
37	Kecamatan Cikulur	0,00	0,00	2.451.902.430,00	2.174.587.825,00
38	Kecamatan Leuwidamar	0,00	0,00	2.211.104.219,00	2.027.251.525,00
39	Kecamatan Sajira	0,00	0,00	2.173.542.067,00	1.957.987.188,00
40	Kecamatan Maja	0,00	0,00	2.373.163.461,00	2.223.714.025,00
41	Kecamatan Curugbitung	0,00	0,00	2.476.960.578,00	2.298.302.322,00
42	Kecamatan Muncang	0,00	0,00	1.875.175.669,00	1.728.150.625,00
43	Kecamatan Sobang	0,00	0,00	1.720.310.239,00	1.294.632.525,00
44	Kecamatan Bojongmanik	0,00	0,00	2.075.987.778,00	1.936.784.007,00
45	Kecamatan Cirinten	0,00	0,00	2.172.774.917,00	1.994.256.513,00
46	Kecamatan Cipanas	0,00	0,00	2.527.256.590,00	2.241.977.406,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN		BELANJA	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6
47	Kecamatan Lebakgedong	0,00	0,00	1.882.030.557,00	1.614.586.672,00
48	Kecamatan Gunungkencana	0,00	0,00	2.168.695.828,00	2.033.295.364,00
49	Kecamatan Cileles	0,00	0,00	2.449.442.428,00	2.177.222.644,00
50	Kecamatan Banjarsari	0,00	0,00	2.040.269.594,00	2.012.382.786,00
51	Kecamatan Cijaku	0,00	0,00	2.162.659.100,00	2.013.308.660,00
52	Kecamatan Cigemblong	0,00	0,00	1.882.529.681,00	1.517.635.985,00
53	Kecamatan Malingping	0,00	0,00	2.614.137.998,00	2.449.211.662,00
54	Kecamatan Wanasalam	0,00	0,00	1.954.048.210,00	1.790.625.374,00
55	Kecamatan Panggarangan	0,00	0,00	2.108.717.885,00	1.956.200.917,00
56	Kecamatan Cihara	0,00	0,00	2.374.009.559,00	2.217.797.168,00
57	Kecamatan Bayah	0,00	0,00	2.226.914.407,00	1.973.245.057,00
58	Kecamatan Cibeber	0,00	0,00	2.430.497.227,00	2.309.598.760,00
59	Kecamatan Cilograng	0,00	0,00	1.953.804.589,00	1.877.728.195,00
60	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	3.926.565.585,00	3.725.626.598,00
JUMLAH		**2.642.438.919.107,00**	**2.643.719.867.031,00**	**2.920.409.223.229,00**	**2.643.466.844.441,00**

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Pendapatan dianggarkan sebesar Rp2.642.438.919.107,00 dan terealisasi sebesar Rp2.643.719.867.031,00 atau 100,05%. Pendapatan Tahun Anggaran 2021 dialokasikan pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp385.144.019.220,00 atau 107,02% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp359.883.118.451,00. Rincian target dan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021

NO	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pajak Daerah	122.215.000.000,00	156.917.968.633,00	128,37
2	Retribusi Daerah	15.075.569.938,00	15.138.012.060,00	100,41
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.941.209.868,00	5.282.756.992,00	88,92
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	216.651.338.645,00	207.805.281.535,00	95,92
JUMLAH		**359.883.118.451,00**	**385.144.019.220,00**	**107,02**

Pendapatan Daerah dari Transfer pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp2.052.543.314.743,00 atau 100,26% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.047.163.238.448,00. Rincian anggaran dan realisasi dari Pendapatan Transfer dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Pendapatan Transfer Kabupaten Lebak Tahun 2021

NO	PENDAPATAN TRANSFER	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.838.997.837.761,00	1.844.377.914.056,00	100,29
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	208.165.400.687,00	208.165.400.687,00	100,00
JUMLAH		**2.047.163.238.448,00**	**2.052.543.314.743,00**	**100,26**

Pendapatan Daerah dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp206.032.533.068,00 atau 87,53% dari target yang ditetapkan sebesar Rp235.392.562.208,00. Rincian anggaran dan realisasi dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Lebak Tahun 2021

NO	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Hibah	79.570.262.208,00	41.771.463.068,00	52,50
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	155.822.300.000,00	164.261.070.000,00	105,42
JUMLAH		**235.392.562.208,00**	**206.032.533.068,00**	**87,53**

Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp2.920.409.223.229,00 dan terealisasi sebesar Rp2.643.466.844.441,00 atau 90,52%

sehingga masih terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp276.948.795.288,00 atau 10,48%. Belanja Daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp1.915.912.290.235,00 atau 89,10% dari target yang ditetapkan sebesar RP2.150.232.172.550,00. Rincian anggaran dan realisasi dari Belanja Operasi dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
Belanja Operasi Kabupaten Lebak Tahun 2021

NO	BELANJA OPERASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	1.068.572.233.185,00	992.375.160.333,00	92,87
2	Belanja Barang dan Jasa	949.751.006.845,00	806.590.537.922,00	84,93
3	Belanja Hibah	128.949.541.560,00	114.176.801.020,00	88,54
4	Belanja Bantuan Sosial	2.959.390.960,00	2.769.790.960,00	93,59
JUMLAH		**2.150.232.172.550,00**	**1.915.912.290.235,00**	**89,10**

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp281.854.752.747,00 atau 88,74% dari target yang ditetapkan sebesar RP317.634.916.019,00. Rincian anggaran dan realisasi dari Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12
Belanja Modal Kabupaten Lebak Tahun 2021

NO	BELANJA MODAL	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Modal Tanah	6.316.725.660,00	6.027.811.248,00	95,43
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.057.017.009,00	55.248.493.450,00	77,75
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.229.710.830,00	27.007.051.046,00	74,54
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	197.868.736.387,00	187.474.208.785,00	94,75
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.162.726.133,00	6.097.188.218,00	98,94
JUMLAH		**317.634.916.019,00**	**281.854.752.747,00**	**88,74**

Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp24.421.516.341,00 atau 84,17% dari target yang ditetapkan sebesar RP29.014.066.540,00.

Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp421.278.285.118,00 atau 99,47% dari target yang ditetapkan sebesar Rp423.528.068.120,00. Rincian anggaran dan realisasi dari Belanja Transfer dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13
Belanja Transfer Kabupaten Lebak Tahun 2021

NO	BELANJA TRANSFER	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Bagi Hasil	15.998.934.500,00	15.998.934.500,00	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	407.529.133.620,00	405.279.350.618,00	99,45
JUMLAH		**423.528.068.120,00**	**421.278.285.118,00**	**99,47**

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp296.833.959.123,05 atau 99,95% dari target yang ditetapkan sebesar Rp296.970.304.122,00 dan Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp9.000.000.000,00 atau 47,37% dari target yang ditetapkan sebesar Rp19.000.000.000,00 sehingga Pembiayaan Netto pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp287.833.959.123,05 dari target yang ditetapkan sebesar Rp277.970.304.122,00.

Belanja digunakan untuk melaksanakan program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 yaitu sebanyak 152 program. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja daerah berdasarkan program pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14
Belanja Daerah Berdasarkan Program Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN URUSAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEUANGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	724.208.075.047,00	664.005.778.543,00	(60.202.296.504,00)	91,69
2	Program Pengelolaan	249.208.391.600,00	256.790.083.258,00	7.581.691.658,00	103,04
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	376.867.642.812,00	294.279.546.496,00	(82.588.096.316,00)	78,09
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	189.991.789.328,00	138.881.374.360,00	(51.110.414.968,00)	73,10
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	39.401.363.020,00	34.659.776.341,00	(4.741.586.679,00)	87,97

NO.	URAIAN URUSAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEUANGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	187.916.000,00	55.970.910,00	(131.945.090,00)	29,79
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	405.973.700,00	271.904.336,00	(134.069.364,00)	66,98
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.932.140.536,00	19.335.674.332,00	(1.596.466.204,00)	92,37
9	Program Pengelolaan Sumber	29.956.554.500,00	27.014.654.720,00	(2.941.899.780,00)	90,18
10	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	24.773.060.280,00	23.164.891.905,00	(1.608.168.375,00)	93,51
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	18.694.373.050,00	18.048.745.500,00	(645.627.550,00)	96,55
12	Program Pengembangan Permukiman	440.847.950,00	413.722.000,00	(27.125.950,00)	93,85
13	Program Penataan Bangunan Gedung	7.354.137.750,00	4.646.083.860,00	(2.708.053.890,00)	63,18
14	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	4.033.824.350,00	3.865.972.280,00	(167.852.070,00)	95,84
15	Program Penyelenggaraan Jalan	212.465.306.037,00	201.428.185.068,00	(11.037.120.969,00)	94,81
16	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	495.000.000,00	399.820.740,00	(95.179.260,00)	80,77
17	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	419.999.900,00	368.094.789,00	(51.905.111,00)	87,64
18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.560.750.891,00	3.242.326.855,00	(318.424.036,00)	91,06
19	Program Pengembangan Perumahan	6.797.277.935,00	6.390.463.722,00	(406.814.213,00)	94,02
20	Program Kawasan Permukiman	5.627.273.400,00	5.378.700.979,00	(248.572.421,00)	95,58
21	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	5.667.488.020,00	5.568.831.590,00	(98.656.430,00)	98,26
22	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	3.332.924.700,00	3.100.636.670,00	(232.288.030,00)	93,03
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.756.676.239,00	8.391.063.483,00	(365.612.756,00)	95,82
24	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4.034.124.500,00	3.980.996.510,00	(53.127.990,00)	98,68
25	Program Penanggulangan Bencana	4.550.712.850,00	4.015.970.934,00	(534.741.916,00)	88,25
26	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	223.500.000,00	218.623.000,00	(4.877.000,00)	97,82
27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.700.426.202,00	3.314.199.990,00	(386.226.212,00)	89,56
28	Program Pemberdayaan Sosial	245.963.200,00	234.107.520,00	(11.855.680,00)	95,18
29	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00
30	Program Rehabilitasi Sosial	432.194.500,00	404.068.150,00	(28.126.350,00)	93,49

NO.	URAIAN URUSAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEUANGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
31	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	160.514.350,00	153.114.770,00	(7.399.580,00)	95,39
32	Program Penanganan Bencana	3.223.417.960,00	3.010.626.360,00	(212.791.600,00)	93,40
33	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	51.940.800,00	49.340.155,00	(2.600.645,00)	94,99
34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.983.053.730,00	2.769.634.817,00	(213.418.913,00)	92,85
35	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	554.300.986,00	545.564.450,00	(8.736.536,00)	98,42
36	Program Penempatan Tenaga Kerja	107.158.600,00	104.248.260,00	(2.910.340,00)	97,28
37	Program Hubungan Industrial	190.101.100,00	183.538.510,00	(6.562.590,00)	96,55
38	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	449.658.900,00	443.932.690,00	(5.726.210,00)	98,73
39	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	78.284.800,00	77.401.260,00	(883.540,00)	98,87
40	Program Perlindungan Khusus Anak	456.797.000,00	451.494.174,00	(5.302.826,00)	98,84
41	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.968.886.539,00	2.740.024.018,00	(228.862.521,00)	92,29
42	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	658.100.000,00	646.378.600,00	(11.721.400,00)	98,22
43	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.886.015.350,00	1.801.332.830,00	(84.682.520,00)	95,51
44	Program Penanganan Kerawanan Pangan	161.841.400,00	151.446.630,00	(10.394.770,00)	93,58
45	Program Pengawasan Keamanan Pangan	230.530.300,00	217.456.260,00	(13.074.040,00)	94,33
46	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	152.020.000,00	118.604.650,00	(33.415.350,00)	78,02
47	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	559.300.000,00	355.514.490,00	(203.785.510,00)	63,56
48	Program Penatagunaan Tanah	75.000.000,00	37.720.600,00	(37.279.400,00)	50,29
49	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.357.285.304,00	7.900.813.430,00	(456.471.874,00)	94,54
50	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	219.046.200,00	216.525.890,00	(2.520.310,00)	98,85
51	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.280.684.125,00	1.255.370.268,00	(25.313.857,00)	98,02
52	Program Pengelolaan Keanekaragaman	856.234.100,00	820.718.590,00	(35.515.510,00)	95,85
53	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	62.463.000,00	60.239.130,00	(2.223.870,00)	96,44

NO.	URAIAN URUSAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEUANGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
54	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	149.416.300,00	148.759.960,00	(656.340,00)	99,56
55	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	107.044.300,00	105.868.760,00	(1.175.540,00)	98,90
56	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	74.419.000,00	73.571.230,00	(847.770,00)	98,86
57	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	103.935.200,00	103.110.060,00	(825.140,00)	99,21
58	Program Pengelolaan	4.045.461.000,00	3.734.728.960,00	(310.732.040,00)	92,32
59	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.324.250.315,00	5.856.962.353,00	(467.287.962,00)	92,61
60	Program Pendaftaran	2.816.673.850,00	2.163.872.482,00	(652.801.368,00)	76,82
61	Program Pencatatan Sipil	431.938.500,00	301.956.000,00	(129.982.500,00)	69,91
62	Program Pengelolaan Informasi Administrasi	127.997.250,00	116.271.988,00	(11.725.262,00)	90,84
63	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.715.107.049,00	3.478.216.028,00	(236.891.021,00)	93,62
64	Program Penataan Desa	450.000.000,00	407.864.460,00	(42.135.540,00)	90,64
65	Program Administrasi Pemerintahan Desa	10.033.702.800,00	8.045.232.665,00	(1.988.470.135,00)	80,18
66	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	96.782.950,00	93.666.810,00	(3.116.140,00)	96,78
67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.984.316.763,00	2.888.226.531,00	(96.090.232,00)	96,78
68	Program Pengendalian Penduduk	13.310.000,00	4.310.000,00	(9.000.000,00)	32,38
69	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	11.496.773.000,00	11.331.751.511,00	(165.021.489,00)	98,56
70	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	24.770.000,00	24.770.000,00	0,00	100,00
71	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.559.310.581,00	15.266.021.552,00	(293.289.029,00)	98,12
72	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	5.939.910.000,00	5.559.768.390,00	(380.141.610,00)	93,60
73	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.429.288.454,00	3.314.891.919,00	(114.396.535,00)	96,66
74	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.121.057.430,00	1.080.104.510,00	(40.952.920,00)	96,35
75	Program Aplikasi Informatika	2.572.193.380,00	2.372.132.549,00	(200.060.831,00)	92,22
76	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.043.068.873,00	2.901.155.714,00	(141.913.159,00)	95,34

NO.	URAIAN URUSAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEUANGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
77	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	222.102.800,00	213.963.230,00	(8.139.570,00)	96,34
78	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	662.943.700,00	613.590.030,00	(49.353.670,00)	92,56
79	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	221.099.550,00	217.809.780,00	(3.289.770,00)	98,51
80	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	328.999.450,00	286.100.280,00	(42.899.170,00)	86,96
81	Program Pengembangan Umkm	567.718.450,00	539.088.340,00	(28.630.110,00)	94,96
82	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.107.726.038,00	5.738.030.308,00	(369.695.730,00)	93,95
83	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	177.596.650,00	175.717.580,00	(1.879.070,00)	98,94
84	Program Promosi Penanaman Modal	105.526.400,00	102.803.330,00	(2.723.070,00)	97,42
85	Program Pelayanan Penanaman Modal	616.167.540,00	609.194.950,00	(6.972.590,00)	98,87
86	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	714.415.950,00	623.296.570,00	(91.119.380,00)	87,25
87	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	201.926.700,00	195.100.130,00	(6.826.570,00)	96,62
88	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.564.951.521,00	2.251.779.199,00	(313.172.322,00)	87,79
89	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.986.384.900,00	1.575.383.660,00	(411.001.240,00)	79,31
90	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.857.336.990,00	4.542.088.120,00	(315.248.870,00)	93,51
91	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
92	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	276.955.850,00	269.777.820,00	(7.178.030,00)	97,41
93	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100.119.840,00	98.879.950,00	(1.239.890,00)	98,76
94	Program Pengembangan Kebudayaan	115.888.950,00	108.683.550,00	(7.205.400,00)	93,78
95	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	235.429.000,00	230.751.250,00	(4.677.750,00)	98,01
96	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	866.036.500,00	812.207.124,00	(53.829.376,00)	93,78
97	Program Pengelolaan	600.000.000,00	569.626.100,00	(30.373.900,00)	94,94
98	Program Pembinaan Perpustakaan	761.670.200,00	705.702.250,00	(55.967.950,00)	92,65
99	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.880.687.733,00	2.485.868.035,00	(394.819.698,00)	86,29
100	Program Pengelolaan Arsip	273.590.300,00	177.677.880,00	(95.912.420,00)	64,94
101	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	199.706.250,00	193.190.580,00	(6.515.670,00)	96,74

NO.	URAIAN URUSAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEUANGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
102	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.132.959.948,00	3.844.874.975,00	(288.084.973,00)	93,03
103	Program Pengelolaan	677.689.250,00	629.619.750,00	(48.069.500,00)	92,91
104	Program Pengelolaan	1.145.463.261,00	1.086.399.570,00	(59.063.691,00)	94,84
105	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.994.712.869,00	4.779.000.345,00	(215.712.524,00)	95,68
106	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.589.452.147,00	5.296.855.962,00	(292.596.185,00)	94,77
107	Program Pemasaran Pariwisata	4.702.849.640,00	1.265.648.179,00	(3.437.201.461,00)	26,91
108	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.460.080.390,00	1.373.541.530,00	(86.538.860,00)	94,07
109	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.818.135.885,00	18.837.094.655,00	(981.041.230,00)	95,05
110	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.575.549.525,00	3.556.994.399,00	(3.018.555.126,00)	54,09
111	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	42.746.897.950,00	29.062.944.409,00	(13.683.953.541,00)	67,99
112	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	457.100.125,00	412.955.805,00	(44.144.320,00)	90,34
113	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	163.641.800,00	143.975.990,00	(19.665.810,00)	87,98
114	Program Perizinan Usaha Pertanian	200.150.000,00	192.126.000,00	(8.024.000,00)	95,99
115	Program Penyuluhan Pertanian	2.811.028.750,00	2.640.067.925,00	(170.960.825,00)	93,92
116	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.300.691.234,00	3.990.135.622,00	(310.555.612,00)	92,78
117	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	226.825.500,00	167.452.000,00	(59.373.500,00)	73,82
118	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	11.937.651.655,00	11.315.946.115,00	(621.705.540,00)	94,79
119	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.227.956.900,00	1.019.619.900,00	(208.337.000,00)	83,03
120	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	755.644.800,00	724.447.729,00	(31.197.071,00)	95,87
121	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	68.344.500,00	7.260.000,00	(61.084.500,00)	10,62
122	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	106.374.600,00	102.361.060,00	(4.013.540,00)	96,23
123	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	130.262.000,00	126.461.690,00	(3.800.310,00)	97,08
124	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.163.279.095,00	25.083.026.046,00	(2.080.253.049,00)	92,34
125	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan	16.196.187.400,00	15.767.302.022,00	(428.885.378,00)	97,35

NO.	URAIAN URUSAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEUANGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
126	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.954.166.030,00	2.604.026.867,00	(350.139.163,00)	88,15
127	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36.736.822.629,00	34.551.066.522,00	(2.185.756.107,00)	94,05
128	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	42.045.570.214,00	35.959.382.330,00	(6.086.187.884,00)	85,52
129	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.846.216.023,00	5.565.477.996,00	(280.738.027,00)	95,20
130	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.338.810.400,00	1.250.364.290,00	(88.446.110,00)	93,39
131	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.088.097.520,00	917.619.957,00	(170.477.563,00)	84,33
132	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43.709.864.859,00	41.917.538.781,00	(1.792.326.078,00)	95,90
133	Program Pengelolaan	456.400.336.960,00	424.649.590.303,00	(31.750.746.657,00)	93,04
134	Program Pengelolaan Barang	3.559.648.300,00	3.040.877.951,00	(518.770.349,00)	85,43
135	Program Pengelolaan	2.264.398.560,00	2.147.057.490,00	(117.341.070,00)	94,82
136	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.620.146.863,00	4.080.234.304,00	(539.912.559,00)	88,31
137	Program Kepegawaian Daerah	5.191.925.250,00	4.706.955.651,00	(484.969.599,00)	90,66
138	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	210.073.000,00	200.272.000,00	(9.801.000,00)	95,33
139	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	508.500.400,00	506.300.630,00	(2.199.770,00)	99,57
140	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.407.922.924,00	8.046.552.237,00	(361.370.687,00)	95,70
141	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.562.326.400,00	2.287.254.605,00	(275.071.795,00)	89,26
142	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	470.381.150,00	299.642.322,00	(170.738.828,00)	63,70
143	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	58.551.608.413,00	53.764.270.866,00	(4.787.337.547,00)	91,82
144	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.166.930.600,00	1.809.566.246,00	(357.364.354,00)	83,51
145	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.080.007.277,00	4.715.197.165,00	(364.810.112,00)	92,82
146	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.390.401.400,00	1.340.685.130,00	(49.716.270,00)	96,42
147	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	836.522.150,00	692.822.030,00	(143.700.120,00)	82,82
148	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.909.151.975,00	1.769.302.668,00	(139.849.307,00)	92,67

NO.	URAIAN URUSAN ORGANISASI, PROGRAM DAN KEUANGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
149	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100.820.000,00	96.320.000,00	(4.500.000,00)	95,54
150	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.358.482.010,00	1.358.482.010,00	0,00	100,00
151	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	223.710.000,00	211.360.000,00	(12.350.000,00)	94,48
152	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	334.401.600,00	290.161.920,00	(44.239.680,00)	86,77
JUMLAH		**2.920.409.223.229,00**	**2.643.466.844.441,00**	**(276.942.378.788,00)**	**90,52**

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, total realisasi pendapatan daerah yaitu sebesar Rp2.643.719.867.031,00 atau 100,05% dari yang ditargetkan sebesar Rp2.642.438.919.107,00. Realisasi pendapatan yang melampaui target yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp385.144.019.220,00 atau 107,02% dan dari transfer sebesar Rp2.052.543.314.743,00 atau 100,26%, sedangkan realisasi pendapatan yang tidak mencapai target yaitu dari Lain – lain Pendapatan yang Sah hanya sebesar Rp206.032.533.068,00 atau 87,53% dari yang ditargetkan, pendapatan yang tidak tercapai tersebut adalah pendapatan Hibah Pemerintah Pusat yang hanya terealisasi sebesar Rp41.771.463.068,00 atau 52,50% dari yang ditargetkan, dikarenakan kegiatan yang menggunakan dana hibah dilaksanakan pada akhir tahun sehingga *reimbursement* diajukan pada Tahun Anggaran 2022. Secara umum tidak ada hambatan dalam pencapaian target pendapatan.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 152 Program, 686 kegiatan dan 1.478 sub kegiatan terealisasi sebesar Rp2.643.466.844.441,00 atau 90,52% dari yang ditargetkan sebesar Rp2.920.409.223.229,00. Beberapa hambatan tidak tercapainya realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berdampak terhadap realisasi belanja terutama untuk belanja makan minum dalam rangka rapat kerja, sosialisasi ataupun bimtek, belanja perjalan dinas tidak dapat direalisasikan secara maksimal, tetapi secara umum baik secara fisik maupun keuangan telah sesuai dengan indikator kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan;
2. Alokasi anggaran penanganan COVID-19 bidang Kesehatan sebesar 8% dari dana transfer umum tidak terealisasi seluruhnya karena menyesuaikan kebutuhan daerah;
3. Beberapa kegiatan tidak dilaksanakan karena pertimbangan teknis dan kebijakan Pemerintah Pusat.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun terdiri dari 7 (tujuh) laporan yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi dan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan terdiri dari SAL awal SiLPA/SiKPA koreksi dan SAL akhir;
3. Laporan Operasional (LO) adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan penyusunannya. Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan - LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas;
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan

berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit - LO, koreksi dan ekuitas akhir;

5. Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca Perangkat Daerah disajikan mengenai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas;
6. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah dan pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP – SAL) dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pengakuan, pengukuran dan penyajian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebak berdasarkan pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 72 Tahun 2018 tentang perubahannya, Peraturan Bupati Lebak Nomor 149 Tahun 2020 tentang perubahan kedua tentang Kebijakan Akuntansi Daerah yang memuat tentang prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktek spesifik dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) tertuang dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 39 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting dalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban, menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, tetapi laporan keuangan yang dihasilkannya untuk dikonsolidasikan atau digabungkan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pada Entitas Pelaporan. Entitas akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yaitu Pemerintah Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berimplikasi terhadap Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak sehingga perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan peraturan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak Tanggal 28 Desember 2020 yang mulai berlaku efektif pada 01 Januari 2021.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menjadi sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b. Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c. Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak merupakan Inspektorat Tipe A;
d. Dinas Daerah Kabupaten Lebak, terdiri dari:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
3. Dinas Pendidikan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
4. Dinas Perikanan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
6. Dinas Kesehatan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
10. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
16. Dinas Penanaman Modal dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
18. Dinas Perhubungan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
19. Dinas Pertanian dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan;
20. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
21. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
22. Dinas Sosial dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
23. Dinas Tenaga Kerja dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahanbidang tenaga kerja.

e. Badan Daerah terdiri dari:
    1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan;
    2. Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset;
    3. Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
    4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
    5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intesitas sedang, melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Lebak.

f. Kecamatan terdiri dari 28 Kecamatan dengan Tipe A yaitu :
   1. Kecamatan Rangkasbitung;
   2. Kecamatan Cibadak;
   3. Kecamatan Warunggunung;
   4. Kecamatan Cikulur;
   5. Kecamatan Cimarga;
   6. Kecamatan Leuwidamar;
   7. Kecamatan Muncang;
   8. Kecamatan Bojongmanik;
   9. Kecamatan Cileles;
   10. Kecamatan Gunungkencana;
   11. Kecamatan Banjarsari;
   12. Kecamatan Cijaku;
   13. Kecamatan Malingping;
   14. Kecamatan Sajira;
   15. Kecamatan Cipanas;
   16. Kecamatan Maja;
   17. Kecamatan Panggarangan;
   18. Kecamatan Bayah;
   19. Kecamatan Cibeber;
   20. Kecamatan Sobang;
   21. Kecamatan Curugbitung;
   22. Kecamatan Wanasalam;
   23. Kecamatan Cilograng;
   24. Kecamatan Kalanganyar;
   25. Kecamatan Lebakgedong;
   26. Kecamatan Cirinten;
   27. Kecamatan Cihara; dan
   28. Kecamatan Cigemblong.

g. Rumah Sakit Daerah dr. Adjidarmo sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat Kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara professional.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan pada penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan - LO dan beban, pengakuan aset, ekuitas dan kewajiban, sedangkan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas karena anggaran disusun dan dilaksanakan berdasakan basis kas.

Basis akrual pada Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas sehingga pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), serta belanja transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Basis akrual pada Neraca untuk Aset, Kewajiban dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat

variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;

2. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral;
3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
4. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, belanja diukur sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto;
5. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah;
6. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi pembiayaan;
7. Aset dicatat sebesar pengeluaran Kas dan Setara Kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah Kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada Pemerintah Daerah

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 mengacu kepada Peraturan dan Perundang – Undangan diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah dan perubahannya yaitu Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018, perubahan kedua Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 39 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LaporanKeuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 yaitu:

a) Pendapatan

Terdapat 2 (dua) istilah pendapatan yaitu:

1. Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan – LO diklasifikasikan sebagai berikut:
   a. Pendapatan Operasional yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan/Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
   b. Pendapatan Non Operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.
   c. Pendapatan Luar Biasa adalah pendapatan yang diperoleh karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

   Pendapatan - LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

   Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk seluruh transaksi BUD;
b. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan di Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah untuk seluruh transaksi Perangkat Daerah.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifkasikan kedalam beberapa cara:

a. Pengakuan pendapatan yang didahului dengan penetapan, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pendapatan ini diakui sebagai Pendapatan - LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Pendapatan tersebut adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Air Tanah, sedangkan untuk Pendapatan - LRA diakui ketika pembayaran telah diterima.
b. Pengakuan pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan sendiri tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan - LRA, ketika dokumen SPTPD diterbitkan dan atau kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (bersamaan). Pendapatan tersebut adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pendapatan - LRA diakui ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan - LRA.

   Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan - LRA.

c. Pengakuan Pendapatan Dana Bagi Hasil dilakukan pada saat diterimanya kas di Rekening Kas Umum Daerah, baik pada Pendapatan - LO maupun Pendapatan - LRA.
d. Pengakuan Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dilakukan pada saat diterimanya kas di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), baik pada Pendapatan - LO maupun Pendapatan - LRA.
e. Pengakuan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan pada saat diterimanya kas di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), baik pada Pendapatan - LO maupun Pendapatan - LRA.
f. Pengakuan Lain - Lain Pendapatan Yang Sah baik Hibah, Bantuan Sosial, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya dilakukan pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), baik pada Pendapatan - LO maupun Pendapatan - LRA.
g. Pengakuan Pendapatan Pajak Reklame yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan dengan basis akrual dicatat sebagai pendapatan diterima di muka, pengakuan Pendapatan - LO dilakukan pada saat diakuinya pendapatan dengan cara mendebet akun “Pendapatan diterima di muka” dan mengkredit “Pendapatan - LO”. Sedangkan Pendapatan - LRA diakui pada saat pembayaran diterima.
h. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan Pendapatan - LO diakui ketika kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pendapatan tersebut adalah Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Dividen, Pendapatan dari pengembalian, Pendapatan atas penggunaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari pemanfaatan hasil kekayaan daerah, dan pendapatan dari hasil eksekusi jaminan. Sedangkan pengakuan Pendapatan - LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk pendapatan retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi terminal, dan retribusi lainnya.

b) Beban dan Belanja

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Rekening Kas Umum Daerah.
2. Terjadinya konsumsi aset yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer dan beban tak terduga.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama 1 (satu) periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi.

Sesuai dengan klasifikasi ekonomi pada PPKD, pengakuan beban diakui sebagai berikut:

1. Beban Bunga diakui pada saat bunga jatuh tempo untuk dibayarkan, namun untuk keperluan pelaporan beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
2. Beban Subsidi diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi;
3. Beban Hibah diakui pada saat penyaluran Belanja Hibah;
4. Beban Bantuan Sosial diakui pada saat penyaluran Belanja Bantuan Sosial;

5. Beban Penyisihan Piutang diakui pada saat akhir tahun; dan
6. Beban Transfer diakui pada saat terbitnya SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah yang didukung dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam aturan pengelolaan keuangan daerah, juga terhadap pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi sampai dengan akhir tahun belum direalisasikan.

Pada Perangkat Daerah:

1. Beban Pegawai yang pembayarannya menggunakan mekanisme LS diakui pada saat diterbitkan SP2D sedangkan Beban Pegawai yang pembayarannya menggunakan mekanisme UP/GU/TU diakui pada saat bukti pembayaran telah disahkan oleh pengguna anggaran;
2. Beban Barang diakui pada saat bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tak Terduga.

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di Perangkat Daerah dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di Perangkat Daerah dan PPKD.
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK – Perangkat Daerah.

Belanja diukur sebesar jumlah pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berdasarkan klasifikasi ekonomi.

c) Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil. Transfer diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah, kecuali untuk Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi diakui pada saat ditetapkannya SK Gubernur tentang Penetapan Hak Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota. Selain Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi, transfer diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima/dikeluarkan Rekening Kas Umum Daerah. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Sentral.

d) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengukuran Pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang.

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Penerimaan Pembiayaan yaitu semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaanmodal Pemerintah Daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode

tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

e) Kas dan Setara Kas

Kas yaitu uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas adalah investasi jangka pendek (mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya) yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing maka nilainya dikonversi terlebih dahulu menjadi rupiah dengan menggunakan kurs nilai tengah Bank Sentral. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening KasUmum Daerah, atau kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD. Kas yang dikeluarkan untukbelanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

f) Piutang

Piutang yaitu hak Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Piutang merupakan manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapus tagihan *(write-off)* dan penghapus bukuan *(write down).* Penetapan besaran penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyisihan dan Penghapusan Piutang Serta Dana Bergulir adalah :

1. Piutang dengan kualitas lancar sebesar 0,5% dari saldo piutang kualitas lancar;
2. Piutang dengan kualitas kurang lancar sebesar 10% dari saldo piutang kualitas kurang lancar;
3. Piutang dengan kualitas diragukan sebesar 50% dari saldo piutang kualitas diragukan; dan
4. Piutang dengan kualitas macet sebesar 100% dari saldo piutang kualitas macet.

g) Persediaan

Persediaan yaitu aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila persediaan diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila persediaan diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Persediaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak disajikan sebesar harga perolehan terakhir menggunakan metode pencatatan secara periodik.

h) Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh

Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi berdasarkan jangka waktunya dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
2. Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode yaitu:

a. Metode biaya (kepemilikan kurang dari 20%) dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
b. Metode ekuitas (kepemilikan lebih dari 20%) dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (kepemilikan bersifat non permanen) dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

i) Aset Tetap

Aset Tetap yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri dari:

a. Tanah yaitu tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Dalam hal tanah dimiliki pemerintah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan atau digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai Aset Tetap Tanah pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Tanah Wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada Neraca karena Pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut.
b. Peralatan dan Mesin mencakup mesin - mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
c. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan dalam kondisi siap pakai.
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan dalam kondisi siap pakai.
e. Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan dalam kondisi siap pakai.
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Aset Tetap diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan Aset Tetap yaitu jika Aset Tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengakuan Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a. berwujud;
b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. tidak dimaksudkan untuk dipindah tangankan (dijual atau dihibahkan) dalam operasi normal entitas;
e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah atau dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah pengguna; dan
f. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap akan diperlakukan sebagai beban operasional/persediaan/aset lainnya dan/atau tetap sebagai Barang Milik Daerah yang diklasifikasikan sebagai ekstra komptabel. Pengadaan Tanah pemerintah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan.

Aset tetap yang dimanfaatkan (Kemitraan dengan pihak ketiga) direklas sebagai aset lainnya dengan tetap memperhitungkan penyusutannya. Setelah masa pemanfaatan (Kemitraan dengan pihak ketiga) berakhir direklas kembali menjadi aset tetap sesuai dengan nilai buku pada saat aset tetap tersebut dialihkan kembali. Aset tetap yang akan dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan direklas sebagai aset lainnya pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penjualan dari Pengelola Barang Milik daerah (BMD). Dan apabila aset lainnya tersebut sudah terjual maka dilakukan penghapusan melalui Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan.

Penghapusan sebagian aset tetap dihitung oleh Perangkat Daerah terkait berdasarkan Peraturan Bupati tentang Indeks Harga Satuan Gedung Bangunan untuk memperoleh nilai penghapusan sebagian aset tetap tersebut.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap

didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Khusus honorarium yang meliputi beberapa paket pengadaan aset tetap, maka honorarium diakui pada pengadaan aset tetap yang nilainya paling besar dan/atau yang melekat pada Belanja Modal yang bersangkutan.

Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Nilai Satuan Minimun Kapitalisasi Aset Tetap, Masa Manfaat Aset Tetap dan Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat perbaikan dan atau pemeliharaan terhadap Aset Tetap dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut dinilai berdasarkan nilai wajar aset tetap sejenis pada saat aset tersebut diperoleh.

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa. Waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh menggunakan pendekatan bulanan yaitu penyusutan dihitung setiap bulan pada bulan berikutnya setelah aset tersebut diperoleh. Selain Aset Tetap Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan Aset Lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan, seluruh Aset Tetap disusutkan.

Pelepasan Aset Tetap lazim disebut sebagai pemindahtanganan dapat dilakukan dengan cara:

a. dijual; dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan Risalah Lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
b. dipertukarkan; dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan Risalah Lelang

atau dokumen pertukaran sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

c. dihibahkan; dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan Berita Acara Serah Terima Hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.
d. dijadikan penyertaan modal daerah; dikeluarkan dari Neraca pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal daerah.

Aset Tetap hilang dikeluarkan dari Neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi. Aset Tetap hilang dikeluarkan dari Neraca sebesar nilai buku dan entitas melakukan reklasifikasi Aset Tetap hilang menjadi aset lainnya (Aset Tetap hilang yang masih dalam proses Tuntutan Ganti Rugi). Apabila terdapat TuntutanGanti Rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasimenjadi piutang tuntutan ganti rugi.

j) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
d. Sumber dana cadangan; dan
e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dan penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

k) Aset Lainnya

Aset Lainnya yaitu Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak selain Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Termasuk dalam aset lainnya yaitu:

1. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP - TGR) yaitu sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dan dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

   3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat berupa Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG).
4. Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan. Aset Tak Berwujud terdiri atas *Goodwill*, Hak Paten atau Hak Cipta, Royalti, *Software*, Lisensi serta Hasil Kajian atau penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
5. Aset Lain – Lain yaitu Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah, direklasifikasi ke dalam aset lain - lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

l) Kewajiban

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, kewajiban yaitu utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya yaitu:

a. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer , utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.
b. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
   - jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   - entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
   - maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atas belanja pemeliharaan (retensi) secara otomatis akan dihapuskan oleh Pemerintah Daerah jika pihak ketiga dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut - turut (dianggarkan dalam APBD) tidak mengajukan permintaan pembayaran atas belanja pemeliharaan (retensi) tersebut, serta nilai aset yang sudah diakui dari Belanja Modal tersebut akan dikoreksi senilai belanja pemeliharaan (retensi) yang tidak direalisasikan. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal Neraca.

m) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas pada Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pengakuan dan pengukuran atas ekuitas tergantung pada pengakuan aset dan kewajiban.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Daerah. Pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan intruksi dari Kementrian Dalam Negeri bahwa Pemerintah Daerah pada Tahun 2021 diwajibkan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerahnya namun dikarenakan aplikasi SIPD masih banyak penyempurnaan sehingga sebagai aplikasi pendamping Pemerintah Kabupaten Lebak dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2021 masih menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) untuk perencanaan dan penganggaran sampai pertanggungjawaban dan pelaporan, sedangkan program aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan Aset Daerah menggunakan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak TahunAnggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
   - Pendapatan Daerah Rp2.643.719.867.031,00
   - Belanja Daerah Rp2.643.466.844.441,00
   - Surplus/Defisit Rp 253.022.590,00
   - Pembiayaan Netto Rp 287.833.959.123,05
   - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 288.086.981.713,05
2. Laporan Operasional (LO)
   - Pendapatan Rp2.867.837.976.851,92
   - Beban Rp2.738.175.985.435,73

- Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	129.661.991.416,19
- Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	450.410.684,99
- Surplus/Defisit	Rp	130.112.402.101,18
3. Neraca		
- Aset	Rp	4.611.617.075.217,17
- Kewajiban	Rp	21.963.855.388,59
- Ekuitas	Rp	4.589.653.219.828,58
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)		
- Ekuitas Awal	Rp	4.519.373.640.594,81
- Surplus/Defisit (LO)	Rp	130.112.402.101,18
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp	(59.832.822.837,41)
- Ekuitas Akhir	Rp	4.589.653.219.828,58
5. Laporan Arus Kas (LAK)		
- Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	Rp	264.379.727.984,00
- Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	Rp	(254.912.296.989,00)
- Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	Rp	6.400.000,00
- Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	Rp	0,00
- Kenaikan Kas	Rp	9.473.830.995,00
- Saldo Awal Kas di BUD	Rp	209.798.226.340,00
- Saldo Akhir Kas di BUD	Rp	219.272.057.335,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	9.975.000,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
- Saldo Akhir Kas di Kas BLUD	Rp	68.379.564.093,85
- Saldo Akhir Kas di Kas Dana BOS	Rp	425.385.284,20
- Saldo Akhir Kas	Rp	288.825.778.827,05
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)		
- Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	296.838.844.123,05
- Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp	296.833.959.123,05
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan	Rp	288.091.866.713,05
- Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(4.885.000,00)
- Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	288.086.981.713,05

5.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penjelasan secara rinci dari masing-masing pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 akan diuraikan berdasarkan jenis laporannya sebagai berikut:

5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit - LRA, Pembiayaan dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

5.1.1.1 Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.643.719.867.031,00 atau 100,05% dari target yang direncanakan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.642.438.919.107,00. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp96.632.806.809,00 atau 3,79% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.547.087.060.222,00. Rincian dari masing-masing pos Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (RP)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Asli Daerah	359.883.118.451,00	385.144.019.220,00	107,02	377.504.404.119,00
2	Pendapatan Transfer	2.047.163.238.448,00	2.052.543.314.743,00	100,26	1.957.551.507.059,00
3	Lain – Lain Pendapatan Yang Sah	235.392.562.208,00	206.032.533.068,00	87,53	212.031.149.044,00
Jumlah		**2.642.438.919.107,00**	**2.643.719.867.031,00**	**100,05**	**2.547.087.060.222,00**

Rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak sampai dengan 31 Desember 2021 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	TAHUN 2021			TAHUN 2020
	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1	2	3	4	5
Pendapatan Asli Daerah	**359.883.118.451,00**	**385.144.019.220,00**	**107,02**	**377.504.404.119,00**
Pajak Daerah	122.215.000.000,00	156.917.968.633,00	128,40	119.245.503.318,00
Retribusi Daerah	15.075.569.938,00	15.138.012.060,00	100,41	15.470.158.630,00
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.941.209.868,00	5.282.756.992,00	88,92	5.231.517.851,00
Lain-Lain PAD Yang Sah	216.651.338.645,00	207.805.281.535,00	95,92	237.557.224.320,00
Pendapatan Transfer	**2.047.163.238.448,00**	**2.052.543.314.743,00**	**100,26**	**1.957.551.507.059,00**
Transfer Pemerintah Pusat	1.838.997.837.761,00	1.844.377.914.056,00	100,29	1.815.924.958.156,00
Transfer Pemerintah Antar Daerah	208.165.400.687,00	208.165.400.687,00	100,00	141.626.548.903,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	**235.392.562.208,00**	**206.032.533.068,00**	**87,53**	**212.031.149.044,00**
Pendapatan Hibah	79.570.262.208,00	41.771.463.068,00	52,50	25.850.328.544,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	155.822.300.000,00	164.261.070.000,00	105,42	186.180.820.500,00
JUMLAH	**2.642.438.919.107,00**	**2.643.719.867.031,00**	**100,05**	**2.547.087.060.222,00**

Dari tabel realisasi pendapatan diatas terlihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana-dana transfer baik transfer dari Pemerintah Pusat maupun transfer dari Pemerintah Provinsi yang menunjukkan masih rendahnya rasio kemandirian daerah untuk menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya. Rasio Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Yang Sah dengan total Pendapatan Daerah dapat terlihat dari grafik 5.1 berikut ini:

Grafik 5.1
Rasio Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021
(persentase PAD 107,02%)

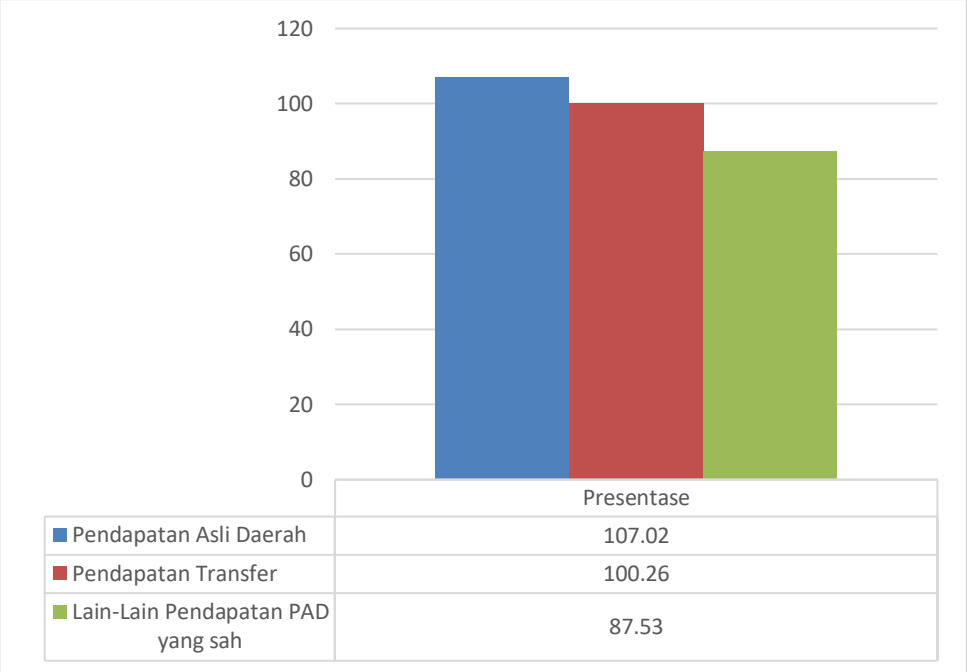

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak sampai dengan 31 Desember 2021 yang telah diterima di rekening Kas Daerah sebesar Rp385.144.019.220,00 atau 107,02% dariyang ditargetkan sebesar Rp359.883.118.451,00 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.3
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Daerah	122.215.000.000,00	156.917.968.633,00	128,40	119.245.503.318,00
2	Retribusi Daerah	15.075.569.938,00	15.138.012.060,00	100,41	15.470.158.630,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.941.209.868,00	5.282.756.992,00	88,92	5.231.517.851,00
4	Lain - Lain PAD yang Sah	216.651.338.645,00	207.805.281.535,00	95,92	237.557.224.320,00
JUMLAH		**359.883.118.451,00**	**385.144.019.220,00**	**107,02**	**377.504.404.119,00**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tabel di atas, terlihat secara keseluruhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2021 dapat melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 107,02%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp385.144.019.220,00 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp377.504.404.119,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.639.615.101,00 atau 2,02%.

1.a. Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah. Berdasarkan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten, bahwa Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Pajak Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah.

Realisasi Pajak Daerah yang dapat dipungut dan disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp156.917.968.633,00 atau 128,40% dari target yang ditetapkan sebesar Rp122.215.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi dari Pajak Daerah Tahun Anggran 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4
Pajak Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel	300.000.000,00	365.169.359,00	121,72	286.939.028,00
2	Pajak Restoran	4.000.000.000,00	5.275.155.975,00	131,88	4.866.769.183,00
3	Pajak Hiburan	350.000.000,00	48.059.769,00	13,73	124.813.650,00
4	Pajak Reklame	750.000.000,00	1.054.006.970,00	140,53	863.466.371,00
5	Pajak Penerangan Jalan	17.300.000.000,00	18.970.648.682,00	109,66	18.809.016.160,00
6	Pajak Parkir	530.000.000,00	563.946.900,00	106,41	462.030.600,00
7	Pajak Air Tanah	331.750.000,00	590.974.903,00	178,14	288.763.328,00
8	Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet & Sejenisnya	12.800.000,00	13.830.000,00	108,05	15.530.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	34.000.000.000,00	39.686.694.061,00	116,73	16.631.207.840,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
10	Pajak Bumi dan Bangunan	23.300.000.000,00	26.474.473.704,00	113,62	25.362.320.651,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	41.340.450.000,00	63.875.008.310,00	154,51	51.534.646.507,00
Jumlah		**122.215.000.000,00**	**156.917.968.633,00**	**128,40**	**119.245.503.318,00**

Berdasarkan tabel Pajak Daerah di atas terlihat bahwa seluruh realisasi Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 2021 melampui target pendapatan yang ditetapkan. Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp156.917.968.633,00 jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp119.245.503.318,00 mengalami peningkatan sebesar Rp37.672.465.315,00 atau 31,59%.

Rincian dari pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel ditargetkan sebesar Rp300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp365.169.359,00 atau 121,72%, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp286.939.028,00 mengalami kenaikan sebesar Rp78.230.331,00 atau 27,26%, kenaikan tersebut dikarenakan pada Tahun 2021 terdapat realisasi piutang tahun sebelumnya dan tingkat kunjungan hotel lebih banyak dibandingkan Tahun 2020;
2. Pajak Restoran ditargetkan sebesar Rp4.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.275.155.975,00 atau 131,88%, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.866.769.183,00 mengalami kenaikan sebesar Rp408.386.792,00 atau 8,39% kenaikan ini dikarenakan Tahun 2021 bertambahnya jumlah wajib pajak;
3. Pajak Hiburan ditargetkan sebesar Rp350.000.000,00 terealisasi sebesar Rp48.059.769,00 atau 13,73%, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp124.813.650,00 mengalami penurunan sebesar Rp76.753.881,00 atau 61,49% penurunan tersebut dikarenakan situasi pandemi COVID-19 dengan ditetapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga berkurangnya objek pajak hiburan;

4. Pajak Reklame ditargetkan sebesar Rp750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.054.006.970,00 atau 140,53%, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp863.466.371,00 mengalami kenaikan sebesar Rp190.540.599,00 atau 22,07% kenaikan dikarenakan pada Tahun 2021 berlakunya Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame yang merubah harga dasar jenis reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan yaitu dari Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri ditargetkan sebesar Rp17.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp18.970.648.682,00 atau 109,66%, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp18.809.016.160,00 mengalami kenaikan sebesar Rp161.632.522,00 atau 0,86% kenaikan ini dikarenakan pada Tahun 2021 bertambahnya pengguna Jasa Listrik di wilayah Kabupaten Lebak;
6. Pajak Parkir ditargetkan sebesar Rp530.000.000,00 terealisasi sebesar Rp563.946.900,00 atau 106,41%, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Parkir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp462.030.600,00 mengalami kenaikan sebesar Rp101.916.300,00 atau 22,06% kenaikan ini dikarenakan terdapat penambahan tingkat pengguna jasa parkir pada Wajib Pajak PT. Reska area Stasiun KAI Rangkasbitung dan Maja sebagai akibat meningkatnya pengguna Jasa KRL;
7. Pajak Air Tanah yaitu dari Pajak Air Bawah Tanah ditargetkan sebesar Rp331.750.000,00 terealisasi sebesar Rp590.974.903,00 atau 178,14%, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Parkir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp288.763.328,00 mengalami kenaikan sebesar Rp302.211.575,00 atau 104,66% kenaikan ini dikarenakan terdapat penambahan Wajib Pajak Air Tanah hasil kegiatan Ekstensifikasi dan penetapan Peraturan Bupati Lebak Nomor 19 Tahun 2020 tetang Nilai Perolehan Air Tanah;
8. Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet dan sejenisnya ditargetkan sebesar Rp12.800.000,00 terealisasi sebesar Rp13.830.000,00 atau 108,05%, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.530.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.700.000,00 atau 10,95%;
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar Rp34.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp39.686.694.061,00 atau 116,73%, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran

2020 sebesar Rp16.631.207.840,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.055.486.221,00 atau 138,63%, kenaikan ini dikarenakan terdapat penambahan produksi atas Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Tahun 2021;

10. PBB–P2 ditargetkan sebesar Rp23.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp26.474.473.704,00 atau 113,62%, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PBB-P2 Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp25.362.320.651,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.112.153.053,00 atau 4,39% dikarenakan terdapat penambahan Objek Pajak baru pada PBB-P2 dan terdapat Pembayaran Piutang PBB-P2 untuk Pokok Ketetapan Tahun sebelumnya di Tahun 2021;
11. BPHTB ditargetkan sebesar Rp41.340.450.000,00 terealisasi sebesar Rp63.875.008.310,00 atau 154,51%, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan BPHTB Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp51.534.646.507,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.340.361.803,00 atau 23,95% kenaikan ini dikarenakan terdapat peningkatan transaksi jual beli terutama pada sektor hunian di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2021.

1.b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Terdapat 17 jenis retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Pendapatan dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah dan di Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp15.138.012.060,00 atau 100,41% dari target yang ditetapkan sebesar Rp15.075.569.938,00 jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.470.158.630,00 mengalami penurunan sebesar Rp332.146.570,00 atau 2,15%. Rincian anggaran dan realisasi dari Retribusi Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut ini :

Tabel 5.5
Retribusi Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Jasa Umum	5.211.039.000,00	5.272.389.608,00	101,18	4.502.106.800,00

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
				Rp	%	
1	2		3	4	5	6
	a	Retribusi Pelayanan Kesehatan	264.735.000,00	301.605.000,00	113,93	25.793.500,00
	b	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	392.970.000,00	423.082.700,00	107,66	384.970.000,00
	c	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	339.720.000,00	271.680.000,00	79,97	233.020.000,00
	d	Retribusi Pelayanan Pasar	2.506.382.000,00	2.399.768.802,00	95,75	2.253.684.300,00
	e	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	934.800.000,00	963.595.000,00	103,08	683.138.000,00
	f	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.000.000,00	23.400.500,00	117,00	18.003.000,00
	g	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	52.432.000,00	92.217.606,00	175,88	78.378.000,00
	h	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	700.000.000,00	797.040.000,00	113,86	825.120.000,00
2		**Retribusi Jasa Usaha**	**3.713.130.938,00**	**3.444.380.062,00**	**92,76**	**3.619.797.557,00**
	a	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.583.922.338,00	1.368.244.967,00	86,38	1.677.742.830,00
	b	Retribusi Tempat Pelelangan	1.237.726.600,00	1.242.847.535,00	100,41	1.201.122.000,00
	c	Retribusi Terminal	330.400.000,00	285.634.000,00	86,45	307.585.000,00
	d	Retribusi Rumah Potong Hewan	24.600.000,00	24.760.000,00	100,65	34.560.000,00
	e	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	163.632.000,00	149.250.000,00	91,21	4.262.727,00
	f	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	372.850.000,00	373.643.560,00	100,21	355.825.000,00
3		**Retribusi Perizinan Tertentu**	**6.151.400.000,00**	**6.421.242.390,00**	**104,39**	**7.348.254.273,00**
	a	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	6.000.000.000,00	6.300.112.390,00	105,00	7.173.764.273,00
	b	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	52.800.000,00	22.530.000,00	42,67	52.490.000,00
	c	Retribusi Izin Usaha Perikanan	98.600.000,00	98.600.000,00	100,00	122.000.000,00
		JUMLAH	**15.075.569.938,00**	**15.138.012.060,00**	**100,41**	**15.470.158.630,00**

Berdasarkan tabel di atas pada Tahun Anggaran 2021 dari 3 rekening objek retribusi hanya sebanyak 2 jenis realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan adalah Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu, sedangkan terdapat 1 (satu) rekening objek retribusi yang realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan adalah Retribusi Jasa Usaha, dikarenakan kondisi masa pandemi COVID-19 dengan menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga terjadi pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan yang

berdampak juga kepada menurunnya penerimaan dari pendapatan retribusi.

Secara terinci penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum ditargetkan sebesar Rp5.211.039.000,00 terealisasi sebesar Rp5.272.389.608,00 atau 101,18%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.502.106.800,00 mengalami kenaikan sebesar Rp770.282.808,00 atau 17,11%. Rincian anggaran dan realisasi dari Retribusi Jasa Umum dapat dilihat pada Tabel 5.6 berikut ini:

Tabel 5.6
Retribusi Jasa Umum Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
				Rp	%	
1	2		3	4	5	6
1	**Retribusi Pelayanan Kesehatan**		**264.735.000,00**	**301.605.000,00**	**113,93**	**25.793.500,00**
	a	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	264.735.000,00	301.605.000,00	113,93	25.793.500,00
2	**Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**		**392.970.000,00**	**423.082.700,00**	**107,66**	**384.970.000,00**
	a	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	392.970.000,00	423.082.700,00	107,66	384.970.000,00
3	**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**		**339.720.000,00**	**271.680.000,00**	**79,97**	**233.020.000,00**
	a	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	339.720.000,00	271.680.000,00	79,97	233.020.000,00
4	**Retribusi Pelayanan Pasar**		**2.506.382.000,00**	**2.399.768.802,00**	**95,75**	**2.253.684.300,00**
	a	Retribusi Pelataran	527.000.000,00	512.207.802,00	97,19	530.000.000,00
	b	Retribusi Los	907.944.000,00	860.360.000,00	94,76	748.812.000,00
	c	Retribusi Kios	1.071.438.000,00	1.027.201.000,00	95,87	974.872.300,00
5	**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**		**934.800.000,00**	**963.595.000,00**	**103,08**	**683.138.000,00**
	a	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	934.800.000,00	963.595.000,00	103,08	683.138.000,00
6	**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**		**20.000.000,00**	**23.400.500,00**	**117,00**	**18.003.000,00**
	a	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.000.000,00	23.400.500,00	117,00	18.003.000,00
7	**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**		**52.432.000,00**	**92.217.606,00**	**175,88**	**78.378.000,00**

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
				Rp	%	
1	2		3	4	5	6
	a	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	52.432.000,00	92.217.606,00	175,88	78.378.000,00
8	**Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**		**700.000.000,00**	**797.040.000,00**	**113,86**	**825.120.000,00**
	a	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	700.000.000,00	797.040.000,00	113,86	825.120.000,00
	JUMLAH		**5.211.039.000,00**	**5.272.389.608,00**	**101,18**	**4.502.106.800,00**

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Retribusi Pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, ditargetkan sebesar Rp264.735.000,00 terealisasi sebesar Rp301.605.000,00 atau 113,93%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp25.793.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp275.811.500,00 atau 1069,31%. Kenaikan Retribusi Pelayanan Kesehatan sangat besar dikarenakan pada Tahun 2021 masyarakat Kabupaten Lebak secara mandiri banyak melakukan swab antigen dan Polymerase Chain Reaction (PCR) sehubungan dengan melonjaknya kasus COVID-19;

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, ditargetkan sebesar Rp392.970.000,00 terealisasi sebesar Rp423.082.700,00 atau 107,66%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp384.970.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp38.112.700,00 atau 9,90%. Kenaikan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikarenakan ada penambahan jumlah sarana dan prasarana persampahan dan penambahan kerjasama pelayanan persampahan;

c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, ditargetkan sebesar Rp339.720.000,00 terealisasi sebesar Rp271.680.000,00 atau 79,97%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp233.020.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp38.660.000,00 atau 16,59%. Kenaikan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dikarenakan masih Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM) dan penutupan tempat pariwisata yang berakibat penurunan jumlah pengunjung yang memakai jasa parkir;

d. Retribusi Pelayanan Pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ditargetkan sebesar Rp2.506.382.000,00 terealisasi sebesar Rp2.399.768.802,00 atau 95,75%. Retribusi Pelayanan Pasar tidak mencapai target dikarenakan Tahun 2021 masih terjadi pandemi COVID-19 dan dengan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.253.684.300,00 mengalami kenaikan sebesar Rp146.084.502,00 atau 6,48%. Retribusi Pelayanan Pasar terdiri dari:
   - Pelataran/Tampakan ditargetkan sebesar Rp527.000.000,00 terealisasi sebesar Rp512.207.802,00 atau 97,19%;
   - Los ditargetkan sebesar Rp907.944.000,00 terealisasi sebesar Rp860.360.000,00 atau 94,76%;
   - Kios ditargetkan sebesar Rp1.071.438.000,00 terealisasi sebesar Rp1.027.201.000,00 atau 95,87%.

e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, ditargetkan sebesar Rp934.800.000,00 terealisasi sebesar Rp963.595.000,00 atau 103,08%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp683.138.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp280.457.000,00 atau 41,05%;

f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, ditargetkan sebesar Rp20.000.000,00 terealisasi sebesar Rp23.400.500,00 atau 117%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp18.003.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.397.500,00 atau 29,98%. Kenaikan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dikarenakan adanya armada baru pengangkut kakus serta adanya Kerjasama dengan pihak swasta di bidang Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT);

g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yaitu pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ditargetkan sebesar Rp52.432.000,00 terealisasi sebesar

Rp92.217.606,00 atau 175,88%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp78.378.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.839.606,00 atau 17,66%. Kenaikan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dikarenakan pada Tahun 2021 terdapat penambahan objek pendapatan retribusi Tera/Tera ulang dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang baru;

h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang dikelola oleh Dinas PUPR, ditargetkan sebesar Rp700.000.000,00 terealisasi sebesar Rp797.040.000,00 atau 113,86%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp825.120.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.080.000,00 atau 3,40%. Penurunan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dikarenakan adanya pembayaran piutang Tahun 2020, sehingga menambah realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu pembayaran piutang PT.XL Axiata untuk 24 unit Menara telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp3.713.130.938,00 terealisasi sebesar Rp3.444.380.062,00 atau 92,76%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.619.797.557,00 mengalami penurunan sebesar Rp175.417.495,00 atau 4,85%. Rincian anggaran dan realisasi dari Retribusi Jasa Usaha dapat dilihat pada Tabel 5.7 berikut ini :

Tabel 5.7
Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Lebak Tahun 2021

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
				Rp	%	
1	2		3	4	5	6
1	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**		**1.583.922.338,00**	**1.368.244.967,00**	**86,38**	**1.677.742.830,00**
	A	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	536.321.000,00	274.809.000,00	51,24	531.948.000,00
	B	Retribusi Penyewaan Bangunan	149.700.000,00	143.851.777,00	96,09	133.231.486,00
	C	Retribusi Pemakaian Laboratorium	647.901.338,00	668.344.190,00	103,16	708.923.344,00
	D	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	250.000.000,00	281.240.000,00	112,50	303.640.000,00
2	**Retribusi Tempat Pelelangan**		**1.237.726.600,00**	**1.242.847.535,00**	**100,41**	**1.201.122.000,00**

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
				Rp	%	
1	2		3	4	5	6
	A	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	1.237.726.600,00	1.242.847.535,00	100,41	1.201.122.000,00
3	**Retribusi Terminal**		**330.400.000,00**	**285.634.000,00**	**86,45**	**307.585.000,00**
	A	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	330.400.000,00	285.634.000,00	86,45	307.585.000,00
4	**Retribusi Rumah Potong Hewan**		**24.600.000,00**	**24.760.000,00**	**100,65**	**34.560.000,00**
	A	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	24.600.000,00	24.760.000,00	100,65	34.560.000,00
5	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**		**163.632.000,00**	**149.250.000,00**	**91,21**	**42.962.727,00**
	A	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	163.632.000,00	149.250.000,00	91,21	42.962.727,00
6	**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**		**372.850.000,00**	**373.643.560,00**	**100,21**	**355.825.000,00**
	A	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	272.850.000,00	273.544.000,00	100,25	273.250.000,00
	B	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	100.000.000,00	100.099.560,00	100,10	82.575.000,00
	JUMLAH		**3.713.130.938,00**	**3.444.380.062,00**	**92,76**	**3.619.797.557,00**

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp1.583.922.338,00 terealisasi sebesar Rp1.368.244.967,00 atau 86,38%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.677.742.830,00 mengalami penurunan sebesar Rp309.497.863,00 atau 18,45%. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri dari:

- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan ditargetkan sebesar Rp536.321.000,00 terealisasi sebesar Rp274.809.000,00 atau 51,24%, dan terdiri dari:
  - Sewa tanah dan bangunan yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditargetkan sebesar Rp523.871.000,00 terealisasi sebesar

Rp272.196.000,00 atau 51,23% yaitu sewa lahan/bangunan pasar milik Pemerintah Daerah;

- Sewa Tanah dan bangunan seluas 10,2m di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah terealisasi sebesar Rp2.613.000,00.

➢ Retribusi Penyewaan Bangunan ditargetkan sebesar Rp149.700.000,00 terealisasi sebesar Rp143.851.777,00 atau 96,09%, dan terdiri dari:

- Sewa Gedung/Ruangan/Aula/Asrama yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yaitu Sewa Rumah Susun ditargetkan sebesar Rp120.000.000,00 terealisasi sebesar Rp109.151.777,00 atau 90,96%
- Sewa Tanah dan Bangunan untuk Bangsal Pengolahan Ikan yang dikelola oleh Dinas Perikanan terealisasi sebesar Rp5.000.000,00;
- Sewa Tanah dan Bangunan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu berasal dari penyewaan MCK ditargetkan sebesar Rp29.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp29.700.000,00 atau 100%.

➢ Retribusi Pemakaian Laboratorium ditargetkan sebesar Rp647.901.338,00 terealisasi sebesar Rp668.344.190,00 atau 103,16%, dan terdiri dari:

- Berasal dari labratorium yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Laboratorium Quality Control yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

➢ Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditargetkan sebesar Rp250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp281.240.000,00 atau 112,50% dan berasal dari UPT Alat Berat.

b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI Binuangeun, TPI Tanjungpanto, TPI Sukahujan, TPI Cipunaga, TPI Panyaungan, TPI Situregen, TPI Bayah, TPI Pulomanuk, TPI Sawarna, TPI Citarate dan TPI Cibareno) yang dikelola oleh Dinas Perikanan ditargetkan sebesar Rp1.237.726.600,00 terealisasi sebesar Rp1.242.847.535,00 atau 100,41%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.201.122.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp41.725.535,00 atau 3,47%. Kenaikan tersebut dikarenakan faktor alam yang mendukung nelayan

dapat lebih banyak mendapat ikan dan menjualnya langsung ke TPI tanpa melalui tengkulak.

c. Retribusi Terminal (Terminal Kalijaga, Terminal Malingping, Terminal Bayah, Terminal Aweh, Terminal Curug) yaitu pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum pada terminal tipe C yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, ditargetkan sebesar Rp330.400.000,00 terealisasi sebesar Rp285.634.000,00 atau 86,45%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Terminal Tahun 2020 sebesar Rp307.585.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp21.951.000,00 atau 7,14%. Penurunan tersebut dikarenakan tidak semua kendaraan masuk dalam Terminal Kalijaga, Malingping dan Bayah karena kondisi Implasemen (Aspal) dalam terminal rusak, penurunan ini juga disebabkan karena pada bulan Juli sampai November 2021 masih di berlakukan PPKM sehingga ada penurunan mobilitas menggunakan angkutan umum yang berpengaruh pada penurunan pembayaran retribusi.

d. Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) yang dikelola oleh Dinas Peternakan, ditargetkan sebesar Rp24.600.000,00 terealisasi sebesar Rp24.760.000,00 atau 100,65%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp34.560.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.800.000,00 atau 28,36%. Penurunan tersebut dikarenakan:

- Perubahan pola perdagangan produk hewan (daging) pada tahun 2016 yaitu potong hidup di tahun 2021 hanya membeli karkas sesuai kebutuhan pasar;
- Masih ada pemotongan hewan diluar Rumah Pemotongan Hewan (RPH);
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam proses pemeriksaan ante/post mortem diluar Rumah Pemotongan Hewan.

e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditargetkan sebesar Rp163.632.000,00 terealisasi sebesar Rp149.250.000,00 atau 91,21%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp42.962.727,00 mengalami kenaikan sebesar Rp106.287.273,00 atau 247,39%. Rincian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai berikut:

- Pelayanan Tempat Rekreasi yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, ditargetkan sebesar Rp143.200.000,00 terealisasi sebesar Rp128.500.000,00 atau 89,37% terdiri dari:

- Pemandian Air Panas Cipanas ditargetkan sebesar Rp45.000.000,00 terealisasi sebesar Rp47.500.000,00 atau 105,56%;
- Pantai Bagedur ditargetkan sebesar Rp31.000.000,00 terealisasi sebesar Rp15.500.000,00 atau 50,00%;
- Pantai Sawarna ditargetkan sebesar Rp61.000.000,00 terealisasi sebesar Rp58.500.000,00 atau 95,90%;
- Kebun Teh Cikuya ditargetkan sebesar Rp6.200.000,00 terealisasi sebesar Rp7.000.000,00 atau 112,90%.

➢ Pelayanan Tempat Olahraga yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, ditargetkan sebesar Rp20.432.000,00 terealisasi sebesar Rp20.750.000,00 atau 101,56% yaitu:

- Tenis Lapang ditargetkan sebesar Rp3.590.000,00 terealisasi sebesar Rp950.000,00 atau 26,46%;
- Sepak Bola ditargetkan sebesar Rp3.800.000,00 terealisasi sebesar Rp3.950.000,00 atau 103,95%;
- Bulu Tangkis ditargetkan sebesar Rp2.730.000,00 terealisasi sebesar Rp4.700.000,00 atau 172,16%;
- GGM (Futsal) ditargetkan sebesar Rp9.082.500,00 terealisasi sebesar Rp7.800.000,00 atau 85,88%;
- GGM (basket) ditargetkan sebesar Rp1.785.000,00 terealisasi sebesar Rp1.750.000,00 atau 98,04%;
- GGM (bilyard) ditargetkan sebesar Rp1.575.000,00 terealisasi sebesar Rp1.600.000,00 atau 101,59%;
- Area lomba burung ditargetkan sebesar Rp840.000,00 tidak terealisasi.

f. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah ditargetkan sebesar Rp372.850.000,00 terealisasi sebesar Rp373.643.560,00 atau 100,21%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp355.825.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.818.560,00 atau 5,01%. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kelebihan bibit tanaman padi dan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha terdiri dari:

➢ Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman dikelola oleh Dinas Pertanian ditargetkan sebesar

Rp272.850.000,00 terealisasi sebesar Rp273.544.000,00 atau 100,25% dan terdiri dari:

- Retribusi Balai Benih Bibit Tanaman Bojong Leles Cibadak ditargetkan sebesar Rp272.850.000,00 terealisasi Rp273.544.000,00 atau 100,25%.

➢ Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan dikelola oleh Dinas Perikanan ditargetkan sebesarRp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp100.099.560,00 atau 100,10% dan terdiri dari:

- Retribusi Balai Benih Ikan Kalanganyar tidak ditargetkan sebesar Rp35.000.000,00 terealisasi sebesar Rp30.300.000,00 atau 86,57%;
- Retribusi Balai Benih Ikan Cikoncang ditargetkan sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp54.699.560,00 atau 109,40%;
- Retribusi Balai Benih Ikan Cipanas tidak ditargetkan sebesar Rp15.000.000,00 terealisasi sebesar Rp15.100.000,00 atau 100,67%.

3. Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp6.151.400.000,00 terealisasi sebesar Rp6.421.242.390,00 atau 104,39%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.348.254.273,00 mengalami penurunan sebesar Rp927.011.883,00 atau 12,62%. Rincian anggaran dan realisasi dari Retribusi Perizinan Tertentu dapat dilihat pada Tabel 5.8 berikut ini:

Tabel 5.8
Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
		(Rp)	Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	**Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**	**6.000.000.000,00**	**6.300.112.390,00**	**105,00**	**7.173.764.273,00**
	a. Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	6.000.000.000,00	6.300.112.390,00	105,00	7.173.764.273,00
2	**Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum**	**52.800.000,00**	**22.530.000,00**	**42,67**	**52.490.000,00**
	a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	52.800.000,00	22.530.000,00	42,67	52.490.000,00
3	**Retribusi Izin Usaha Perikanan**	**98.600.000,00**	**98.600.000,00**	**100,00**	**122.000.000,00**

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			(Rp)	Rp	%	(Rp)
	a.	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	98.600.000,00	98.600.000,00	100,00	122.000.000,00
	JUMLAH		**6.151.400.000,00**	**6.421.242.390,00**	**104,39**	**7.348.254.273,00**

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikelola oleh Dinas PUPR, ditargetkan sebesar Rp6.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp6.300.112.390,00 atau 105,00%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.173.764.273,00 mengalami penurunan sebesar Rp873.651.883,00 atau 12,18%. Penurunan tersebut dikarenakan Peralihan sistem dari Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG);

b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, ditargetkan sebesar Rp52.800.000,00 terealisasi sebesar Rp22.530.000,00 atau 42,67%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp52.490.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.960.000,00 atau 57,08%. Penurunan tersebut dikarenakan kendaraan umum di Kabupaten Lebak pada umumnya sudah berumur lebih dari 10 tahun dan tidak layak pakai, sehingga ketika melakukan uji KIR tidak lulus uji dan tidak dapat memperoleh ijin trayek.

c. Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan yang dikelola oleh Dinas Perikanan ditargetkan sebesar Rp98.600.000,00 terealisasi sebesar Rp98.600.000,00 atau 100%, jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp122.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.400.000,00 atau 19,18%.

1.c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Pada Tahun

Anggaran 2021 penerimaan pendapatan ini berasal dari pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD ditargetkan sebesar Rp5.941.209.868,00 terealisasi sebesar Rp5.282.756.992,00 atau 88,92%, jika dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.231.517.851,00 mengalami kenaikan sebesar Rp51.239.141,00 atau 0,98%.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari Deviden dari Bank BJB sebesar Rp3.598.485.746,00 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Tahunan Tahun Buku 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2021 dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal kepada PT. BPR Lebak Sejahtera sebesar Rp1.408.997.905,00. Bagian Laba atas Penyertaan Modal PT. LKM sebesar Rp275.273.341,00. Bagian Laba atas Penyertaan Modal kepada PD Lebak Niaga sampai dengan Tahun 2021 belum memberikan bagian labanya kepada Pemerintah Kabupaten Lebak dikarenakan PD Lebak Niaga belum melakukan operasional usaha sehingga belum menghasilkan laba dan belum ada kewajiban untuk memberikan bagian laba kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. Rincian pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dapat dilihat pada Tabel 5.9 berikut ini:

Tabel 5.9
Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Lebak
Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021 (RP)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
				Rp	%	
1	2		3	4	5	6
1	**Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**					
	a	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				
		Deviden dari Bank BJB	3.533.837.788,00	3.598.485.746,00	101,83	3.533.837.788,00
		Deviden dari PT. BPR Lebak Sejahtera	2.115.111.580,00	1.408.997.905,00	66,62	1.697.680.063,00
		Deviden dari PT. LKM	292.260.500,00	275.273.341,00	94,19	0,00
JUMLAH			**5.941.209.868,00**	**5.282.756.992,00**	**88,92**	**5.231.517.851,00**

1.d. Lain – Lain PAD Yang Sah

Akun Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pendapatan dari Lain – Lain PAD Yang Sah Pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 510 berikut ini:

Tabel 5.10
Lain – Lain PAD Yang Sah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021 (RP)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
				Rp	%	
1	2		3	4	5	6
1	**Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**		**979.769.255,00**	**1.796.536.941,00**	**183,36**	**351.201.000,00**
	a	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	764.680.701,00	1.233.496.376,00	161,31	29.600.000,00
	b	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	0,00	162.808.000,00	0,00	300.226.000,00
	c	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	215.088.554,00	400.232.565,00	186,08	21.375.000,00
2	**Jasa Giro**		**4.050.000.000,00**	**3.423.402.912,00**	**84,53**	**3.803.142.379,00**
	a	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.050.000.000,00	3.273.420.592,00	80,83	3.803.142.379,00
	b	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	149.982.320,00	0,00	0,00
3	**Pendapatan Bunga**		**6.000.000.000,00**	**5.498.630.143,00**	**91,64**	**10.192.530.382,00**
	a	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	5.498.630.143,00	91,64	10.192.530.382,00
4	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**		**0,00**	**370.809.401,00**	**0,00**	**251.937.496,00**
	a	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	370.809.401,00	0,00	251.937.496,00
5	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**		**0,00**	**539.934.328,00**	**0,00**	**513.330.698,00**
	a	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	1.098.644,00	0,00	3.026.740,00
	b	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	35.515.411,00	0,00	15.587.819,00
	c	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	284.224,00	0,00	1.727.480,00
	d	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	e	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	3.457.313,00	0,00	0,00

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021 (RP)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
				Rp	%	
1	2		3	4	5	6
	f	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	112.658,00	0,00	0,00
	g	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	99.600,00	0,00	0,00
	h	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	74.247.935,00	0,00	4.523.587,00
	i	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	425.118.543,00	0,00	488.438.072,00
6	**Pendapatan Denda Retribusi Daerah**		**0,00**	**1.539.338,00**	**0,00**	**2.073.600,00**
	a	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	1.539.338,00	0,00	2.073.600,00
7	**Pendapatan dari Pengembalian**		**799.668.697,00**	**1.742.434.846,00**	**217,89**	**3.372.649.714,00**
	a	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	529.611.155,00	0,00	2.430.082.846,00
	b	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	799.668.697,00	1.203.679.378,00	150,52	942.566.868,00
	c	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,00	3.022.191,00	0,00	0,00
	e	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	0,00	6.122.122,00	0,00	0,00
8	**Pendapatan BLUD**		**204.821.900.693,00**	**194.427.373.626,00**	**94,93**	**219.060.439.051,00**
	a	Pendapatan BLUD	204.821.900.693,00	194.427.373.626,00	94,93	219.060.439.051,00
9	**Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**		0,00	**4.620.000,00**	**0,00**	**9.920.000,00**
	a	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	4.620.000,00	0,00	9.920.000,00
JUMLAH			**216.651.338.645,00**	**207.805.281.535,00**	**95,92**	**237.557.224.320,00**

Pada tabel di atas terlihat pendapatan dari Lain – Lain PAD Yang Sah pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp216.651.338.645,00 terealisasi sebesar Rp207.805.281.535,00 atau 95,92%, mengalami penurunan sebesar Rp29.751.942.785,00 atau 12,52% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp237.557.224.320,00. Secara terinci penerimaan hasil Lain – Lain PAD yang Sah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp979.769.255,00 terealisasi sebesar Rp1.796.536.941,00 atau 183,36% jika dibandingkan dengan realisasiTahun Anggaran 2020 sebesar Rp351.201.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.445.335.941,00 atau 411,54%, kenaikan tersebut dikarenakan pada Tahun 2021 penjualan BMD yang tidak dipisahkan lebih banyak dan harga penjualan lebih tinggi daripada Tahun 2020. Hasil Penjualan Aset daerah Yang Tidak Dapat Dipisahkan terdiri dari:
   - Hasil Penjualan Peralatan Dan Mesin ditargetkan sebesar Rp764.680.701,00 terealisasi sebesar Rp1.233.496.376,00 atau 161,31%, yang merupakan hasil penjualan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 4 (empat), serta peralatan kantor;
   - Gedung dan Bangunan tidak ditargetkan, namun terealisasi sebesar Rp162.808.000,00 merupakan hasil penjualan material bongkaran bangunan gedung kantor;
   - Hasil penjualan aset tetap lainnya ditargetkan sebesar Rp215.088.554,00 terealisasi sebesar Rp400.232.565,00 atau 186,08% yaitu penjualan atas hewan ternak kerbau.
2. Pendapatan Jasa Giro ditargetkan sebesar Rp4.050.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.423.402.912,00 atau 84,53%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.803.142.379,00 mengalami penurunan sebesar Rp379.739.467,00 atau 9,98%, pendapatan Jasa Giro terdiri dari:
   - Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah terdapat pada Bank BJB Rangkasbitung dengan Rekening Nomor 0190030032635 ditargetkan sebesar Rp4.050.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.273.420.592,00 atau 80,83%;
   - Jasa Giro pada Rekening Dana BOS ditargetkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp149.982.320,00.

3. Pendapatan Bunga ditargetkan sebesar Rp6.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.498.630.143,00 atau 91,64%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp10.192.530.382,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.693.900.239,00 atau 46,05%, penurunan tersebut dikarenakan pada Tahun 2021 penempatan deposito lebih kecil dibandingkan dengan Tahun 2020. Penempatan Deposito Tahun 2021 hanya pada BJB Cabang Rangkasbitung;
4. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan ditargetkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp370.809.401,00, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp251.937.496,00 mengalami kenaikan sebesar Rp118.871.905,00 atau 47,18%.
5. Pendapatan Denda Pajak ditargetkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp539.934.328,00, terdiri dari:
   - Pendapatan Denda Pajak Hotel ditargetkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp1.098.644,00;
   - Pendapatan Denda Pajak Restoran ditargetkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp35.515.411,00;
   - Pendapatan Denda Pajak Hiburan ditargetkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp284.224,00;
   - Pendapatan Denda Pajak Reklame ditargetkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp3.457.313,00;
   - Pendapatan Denda Pajak Air Tanah ditargetkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp112.658,00;
   - Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung walet ditargetkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp99.600,00;
   - Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp74.247.935,00;
   - Pendapatan Denda PBB ditargetkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp425.118.543,00.
6. Pendapatan Denda Retribusi ditargetkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp1.539.338,00, terdiri dari pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp1.528.338,00 dan pendapatan denda retribusi terminal sebesar Rp11.000,00;

7. Pendapatan dari Pengembalian ditargetkan sebesar Rp799.668.697,00 terealisasi sebesar Rp1.742.434.846,00 atau 217,89% yang terdiri dari:
   - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 ditargetkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp529.611.155,00, yang merupakan penerimaan pada kas daerah yang belum dapat ditelusuri jenis pendapatannya, serta penerimaan yang tidak ada kode rekening pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
   - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ditargetkan sebesar Rp799.668.697,00 terealisasi sebesar Rp1.203.679.378,00 atau 150,52%;
   - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas ditargetkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00;
   - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ditargetkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp3.022.191,00;
   - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM) ditargetkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp6.122.122,00.
8. Pendapatan BLUD ditargetkan sebesar Rp204.821.900.693,00 terealisasi sebesar Rp194.427.373.626,00 atau 94,93% dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.11 berikut:

Tabel 5.11
Pendapatan BLUD
Tahun 2021 Dan 2020

NO	NAMA FKTP	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan BLUD RSUD dr. Adjidarmo	125.000.000.000,00	128.091.511.135,00	102,47	153.086.918.385,00
2	Pendapatan BLUD Puskesmas Rangkasbitung	2.690.044.524,00	2.350.933.447,00	87,39	2.592.050.035,00
3	Pendapatan BLUD Puskesmas Kalanganyar	2.124.938.333,00	1.594.277.784,00	75,03	1.681.095.498,00
4	Pendapatan BLUD Puskesmas Mekarsari	790.825.315,00	680.271.113,00	86,02	658.287.129,00
5	Pendapatan BLUD Puskesmas Kolelet	693.196.114,00	559.552.896,00	80,72	459.214.264,00

NO	NAMA FKTP	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
6	Pendapatan BLUD Puskesmas Cibadak	1.652.050.552,00	1.671.490.666,00	101,18	1.634.830.195,00
7	Pendapatan BLUD Puskesmas Mandala	1.255.968.088,00	1.176.976.229,00	93,71	1.253.431.661,00
8	Pendapatan BLUD Puskesmas Warunggunung	2.265.053.415,00	2.054.894.493,00	90,72	1.927.766.464,00
9	Pendapatan BLUD Puskesmas Baros	1.108.800.000,00	1.051.967.076,00	94,87	1.051.379.156,00
10	Pendapatan BLUD Puskesmas Cikulur	2.494.545.000,00	1.955.725.331,00	78,40	1.942.589.335,00
11	Pendapatan BLUD Puskesmas Pamandegan	1.334.334.540,00	1.339.265.092,00	100,37	1.367.917.267,00
12	Pendapatan BLUD Puskesmas Cimarga	2.460.496.360,00	2.147.779.710,00	87,29	2.167.141.482,00
13	Pendapatan BLUD Puskesmas Sarageni	756.988.000,00	684.707.720,00	90,45	605.458.225,00
14	Pendapatan BLUD Puskesmas Maja	3.713.460.670,00	3.109.379.857,00	83,73	3.071.661.623,00
15	Pendapatan BLUD Puskesmas Curugbitung	2.503.139.000,00	2.119.071.324,00	84,66	2.117.843.355,00
16	Pendapatan BLUD Puskesmas Leuwidamar	2.042.556.040,00	1.569.266.966,00	76,83	1.382.698.407,00
17	Pendapatan BLUD Puskesmas Pajagan	1.886.833.720,00	1.188.420.479,00	62,98	1.238.689.934,00
18	Pendapatan BLUD Puskesmas Sajira	1.700.440.609,00	1.518.630.213,00	89,31	1.665.793.058,00
19	Pendapatan BLUD Puskesmas Cisimeut	1.295.576.247,00	1.060.708.475,00	81,87	1.020.722.342,00
20	Pendapatan BLUD Puskesmas Cipanas	3.851.585.080,00	2.924.838.057,00	75,94	3.011.026.601,00
21	Pendapatan BLUD Puskesmas Lebakgedong	1.531.237.700,00	872.230.370,00	56,96	751.227.864,00
22	Pendapatan BLUD Puskesmas Muncang	2.133.478.500,00	1.787.808.943,00	83,80	1.665.050.726,00
23	Pendapatan BLUD Puskesmas Bojongmanik	1.240.406.150,00	1.251.676.491,00	100,91	1.410.333.700,00
24	Pendapatan BLUD Puskesmas Cirinten	2.338.323.820,00	1.686.631.032,00	72,13	1.551.447.836,00
25	Pendapatan BLUD Puskesmas Sobang	1.994.770.800,00	1.521.268.220,00	76,26	1.211.495.334,00
26	Pendapatan BLUD Puskesmas Cileles	1.408.240.000,00	1.205.267.528,00	85,59	1.146.215.314,00
27	Pendapatan BLUD Puskesmas Prabugantungan	1.412.717.608,00	1.197.847.980,00	84,79	1.352.062.159,00

NO	NAMA FKTP	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
28	Pendapatan BLUD Puskesmas Gunungkencana	2.267.202.500,00	2.173.132.513,00	95,85	2.364.182.242,00
29	Pendapatan BLUD Puskesmas Banjarsari	2.585.320.987,00	2.327.507.988,00	90,03	2.431.156.637,00
30	Pendapatan BLUD Puskesmas Bojongjuruh	1.324.838.200,00	1.078.577.735,00	81,41	1.085.656.931,00
31	Pendapatan BLUD Puskesmas Cijaku	2.153.343.888,00	1.888.403.807,00	87,70	2.039.197.670,00
32	Pendapatan BLUD Puskesmas Cigemblong	1.713.082.910,00	1.298.736.917,00	75,81	1.157.670.511,00
33	Pendapatan BLUD Puskesmas Malingping	2.647.200.000,00	2.829.915.465,00	106,90	2.907.300.714,00
34	Pendapatan BLUD Puskesmas Binuangeun	2.311.951.000,00	2.341.529.827,00	101,28	2.304.846.115,00
35	Pendapatan BLUD Puskesmas Parungsari	1.688.148.000,00	1.032.959.707,00	61,19	1.025.732.677,00
36	Pendapatan BLUD Puskesmas Panggarangan	2.345.953.340,00	1.887.533.937,00	80,46	1.590.547.609,00
37	Pendapatan BLUD Puskesmas Cihara	2.160.211.000,00	1.881.593.093,00	87,10	1.728.445.216,00
38	Pendapatan BLUD Puskesmas Bayah	2.685.385.000,00	2.286.712.067,00	85,15	2.259.499.909,00
39	Pendapatan BLUD Puskesmas Cilograng	1.971.627.500,00	1.480.436.803,00	75,09	1.518.038.069,00
40	Pendapatan BLUD Puskesmas Cibeber	1.429.223.279,00	1.114.466.113,00	77,98	1.086.140.275,00
41	Pendapatan BLUD Puskesmas Cisungsang	1.002.667.500,00	912.438.836,00	91,00	995.287.700,00
42	Pendapatan BLUD Puekesmas Citorek	1.016.655.000,00	618.391.391,00	60,83	588.065.957,00
43	Pendapatan BLUD Puekesmas Cipendeuy	1.839.084.404,00	902.638.800,00	49,08	954.323.470,00
JUMLAH		**204.821.900.693,00**	**194.427.373.626,00**	**94,93**	**219.060.439.051,00**

9. Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah ditargetkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp4.620.000,00.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Total Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp2.052.543.314.743,00 atau 100,26% dari yang ditargetkan sebesar Rp2.047.163.238.448,00, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.957.551.507.059,00 mengalami kenaikan sebesar Rp94.991.807.684,00 atau 4,85%. Rincian Pendapatan Transfer yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Kas Daerah pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.12 berikut:

Tabel 5.12
Pendapatan Transfer Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (RP)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
1	Transfer Pemerintah Pusat	1.838.997.837.761,00	1.844.377.914.056,00	100,29	1.815.924.958.156,00
2	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	208.165.400.687,00	208.165.400.687,00	100,00	141.626.548.903,00
Jumlah		**2.047.163.238.448,00**	**2.052.543.314.743,00**	**100,26**	**1.957.551.507.059,00**

2.a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Dana Intensif Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Pada Tahun Anggaran 2021 realisasi Transfer Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Tabel 5.13 berikut ini:

Tabel 5.13
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021 Dan 2020

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
				Rp	%	
1	2		3	4	5	6
1	**Dana Perimbangan**		**1.526.553.045.761,00**	**1.534.182.905.056,00**	**100,50**	**1.500.223.029.156,00**
	a	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**	**64.942.528.185,00**	**87.218.798.085,00**	**134,30**	**56.961.954.242,00**
		DBH Pajak Bumi dan Bangunan	10.088.208.130,00	19.589.359.005,00	194,18	6.899.212.347,00
		DBH PPh Pasal 21	51.492.199.000,00	62.088.969.224,00	120,58	48.180.536.356,00
		DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	378.738.400,00	2.040.685.755,00	538,81	0,00

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
				Rp	%	
1	2		3	4	5	6
		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	34.408.000,00	213.516,00	0,62	3.710.000,00
		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	177.291.273,00	181.973.897,00	102,64	133.961.800,00
		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	47.271.050,00	300.873.300,00	636,49	349.977.900,00
		Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	739.804.974,00	1.334.866.020,00	180,43	536.154.700,00
		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	310.107.208,00	324.238.218,00	104,56	70.124.850,00
		DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.674.500.150,00	1.357.619.150,00	81,08	788.276.289,00
	b	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**	**1.013.013.728.000,00**	**1.013.013.728.000,00**	**100,00**	**1.014.388.131.000,00**
		Dana Alokasi Umum	1.013.013.728.000,00	1.013.013.728.000,00	100,00	1.014.388.131.000,00
	c	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**160.045.542.000,00**	**154.561.604.359,00**	**96,57**	**131.207.853.806,00**
		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	829.165.000,00	806.352.400,00	97,25	525.008.000,00
		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	23.773.052.000,00	22.924.531.950,00	96,43	12.847.146.220,00
		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	19.091.875.000,00	18.084.526.548,00	94,72	10.269.979.000,00
		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	722.300.000,00	704.695.558,00	97,56	299.773.000,00
		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	200.000.000,00	170.592.400,00	85,30	0,00
		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	4.131.641.000,00	3.491.871.296,00	84,52	10.704.273.830,00
		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	5.320.785.000,00	5.297.195.068,00	99,56	0,00
		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	7.122.793.000,00	6.108.907.818,00	85,77	0,00

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
				Rp	%	
1	2		3	4	5	6
		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	650.000.000,00	637.000.000,00	98,00	0,00
		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.110.311.000,00	1.081.563.000,00	97,41	15.135.525.386,00
		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	340.000.000,00	215.325.000,00	63,33	4.212.350.270,00
		DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	6.370.000.000,00	6.178.060.619,00	96,99	1.744.349.000,00
		DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.158.425.000,00	1.075.754.600,00	92,86	579.986.700,00
		DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.462.799.000,00	2.367.842.602,00	96,14	1.209.411.600,00
		DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	30.978.254.000,00	30.978.254.000,00	100,00	23.355.630.000,00
		DAK Reguler Bidang Air Minum	0,00	0,00	0,00	17.072.701.000,00
		DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	12.646.818.000,00	12.646.818.000,00	100,00	10.102.784.000,00
		DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	18.957.833.000,00	17.948.786.000,00	94,68	8.123.528.000,00
		DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	12.563.172.000,00	12.447.572.500,00	99,08	3.400.000.000,00
		DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.030.180.000,00	2.812.137.100,00	92,80	1.847.079.800,00
		DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	5.800.000.000,00	5.797.678.900,00	99,96	4.009.559.000,00
		DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	2.786.139.000,00	2.786.139.000,00	100,00	5.768.769.000,00
	d	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**288.551.247.576,00**	**279.388.774.612,00**	**96,82**	**297.665.090.108,00**
		DAK Non Fisik-TPG PNSD	218.107.764.700,00	218.823.849.200,00	100,33	207.508.948.000,00
		DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	343.800.000,00	0,00	0,00
		DAK Non Fisik-TKG PNSD	16.056.172.900,00	6.274.806.100,00	39,08	8.202.977.000,00
		DAK Non Fisik-BOP PAUD	14.438.900.000,00	14.203.100.000,00	98,37	15.604.200.000,00
		DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.514.300.000,00	4.514.300.000,00	100,00	0,00

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
				Rp	%	
1	2		3	4	5	6
		DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	600.000.000,00	539.908.000,00	89,98	0,00
		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	10.944.369.881,00	20.846.387.881,00	190,48	48.919.273.000,00
		DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	489.559.000,00	0,00	0,00	0,00
		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	2.705.599.000,00	0,00	0,00	0,00
		DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	6.706.860.000,00	0,00	0,00	8.051.136.622,00
		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	8.305.726.230,00	8.305.726.230,00	100,00	0,00
		DAK Non Fisik-PK2UKM	345.304.000,00	345.304.000,00	100,00	0,00
		DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.771.136.865,00	2.626.038.201,00	94,76	4.125.267.336,00
		DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	962.578.000,00	962.578.000,00	100,00	236.730.150,00
		DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0,00	0,00	0,00	417.358.000,00
		DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	372.462.000,00	372.462.000,00	100,00	0,00
		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	383.515.000,00	383.515.000,00	100,00	4.599.200.000,00
		DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	847.000.000,00	847.000.000,00	100,00	0,00
2	**Dana Insentif Daerah (DID)**		**18.211.284.000,00**	**18.211.284.000,00**	**100,00**	**28.301.537.000,00**
		DID	18.211.284.000,00	18.211.284.000,00	100,00	28.301.537.000,00
3	**Dana Desa**		**294.233.508.000,00**	**291.983.725.000,00**	**99,24**	**287.400.392.000,00**
	a	Dana Desa	294.233.508.000,00	291.983.725.000,00	99,24	287.400.392.000,00
	JUMLAH		**1.838.997.837.761,00**	**1.844.377.914.056,00**	**100,29**	**1.815.924.958.156,00**

2.b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Akun Pendapatan Transfer antar Daerah merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota/Kabupaten. Pendapatan Transfer Antar

Daerah ditargetkan sebesar Rp208.165.400.687,00 dan terealisasi sebesar Rp208.165.400.687,00 atau 100%, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp141.626.548.903,00 mengalami kenaikan sebesar Rp66.538.851.784,00 atau 46,98%. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya pendapatan bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2020 dibayarkan dan diterima di kas daerah di Tahun 2021. Adapun rincian penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dapat dilihat pada tabel 5.14 berikut:

Tabel 5.14
Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2021 Dan 2020

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
				Rp	%	
1	2		3	4	5	6
1	**Pendapatan Bagi Hasil**		**183.165.400.687,00**	**183.165.400.687,00**	**100,00**	**76.626.548.903,00**
	a	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	183.165.400.687,00	183.165.400.687,00	100,00	76.626.548.903,00
		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	32.130.761.236,00	32.130.761.236,00	100,00	8.220.149.308,00
		Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	34.402.180.520,00	28.731.590.730,00	83,52	9.341.236.081,00
		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	42.214.912.168,00	43.508.407.460,00	103,06	250.103.248,00
		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	861.462.111,00	861.462.111,00	100,00	11.032.029.390,00
		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	73.556.084.652,00	77.933.179.150,00	105,95	47.783.030.876,00
2	**Bantuan Keuangan**		**25.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**	**100,00**	**65.000.000.000,00**
	a	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	65.000.000.000,00
	JUMLAH		**208.165.400.687,00**	**208.165.400.687,00**	**100,00**	**141.626.548.903,00**

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp183.165.400.687,00 atau 100% dari target yang ditetapkan, Untuk Bantuan Keuangan terealisasi Rp25.000.000.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan. Bantuan Keuangan merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten yang dialokasikan untuk Rehabilitasi Jalan dan dibelanjakan pada Belanja Modal Jalan Kabupaten, Pemeliharaan Berkala dan Peningkatan Jalan Kabupaten dan terealisasi sebesar Rp23.449.299.000,00 atau 93,80%. Sesuai dengan Peraturan Gubernur

Banten Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten pasal 24 ayat (2) bahwa sisa bantuan keuangan disetorkan kembali ke Rekening Keuangan Umum Daerah (RKUD) Provinsi Banten. Sisa dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten tahun 2021 telah dikembalikan pada tanggal 24 Desember 2021 senilai Rp1.550.701.000,00.

3. Lain–Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Tahun Anggaran 2021 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah ditargetkan sebesar Rp235.392.562.208,00 terealisasi sebesar Rp206.032.533.068,00 atau 87,53%, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp212.031.149.044,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.998.615.976,00 atau 2,83%. Rincian dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dapat dilihat pada Tabel 5.15 berikut:

Tabel 5.15
Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Lebak
Tahun 2021 Dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
1	**Pendapatan Hibah**	**79.570.262.208,00**	**41.771.463.068,00**	**52,50**	**25.850.328.544,00**
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	79.570.262.208,00	41.771.463.068,00	52,50	25.850.328.544,00
2	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**155.822.300.000,00**	**164.261.070.000,00**	**105,42**	**186.180.820.500,00**
	Lain-lain Pendapatan	155.822.300.000,00	164.261.070.000,00	105.42	186.180.820.500,00
JUMLAH		**235.392.562.208,00**	**206.032.533.068,00**	**87,53**	**212.031.149.044,00**

Secara terinci untuk masing–masing Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut:

34. Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp79.570.262.208,00 terealisasi sebesar Rp41.771.463.068,00 atau 52,50%. Tidak tercapainya realisasi pendapatan hibah sesuai yang ditargetkan dikarenakan kegiatan yang menggunakan dana hibah dilaksanakan pada akhir tahun sehingga *reimbursement* diajukan pada Tahun 2022.

Pendapatan Hibah *Project Flood Management in Selested River Basin* (FMSRB) sebesar Rp41.771.463.068,00 dialokasikan untuk:

a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pembangunan Daerah sebesar Rp310.175.468,00;
b. Sub. Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota dan Sub Keg Penyediaan Peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp460.917.500,00;
c. Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya, Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing, Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Hibah Air Minum Perdesaan) pada Dinas PUPR Sebesar Rp17.952.282.100,00;
d. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya pada Dinas Pertanian sebesar Rp20.183.088.000,00;
e. Pengeluaran Pembiayaan / Hibah Air Minum Perkotaan Rp 2.865.000.000,00.

2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah pendapatan lain-lain dari Dana BOS berdasarkan Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Negeri dan Swasta, Pendidikan Menengah Swasta dan Sekolah Khusus Swasta Se- Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021. Pemerintah Kabupaten Lebak menganggarkan Pendapatan Lain-lain dari Dana BOS untuk Pendidikan Dasar dan Menengah Negeri sebesar Rp155.822.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp164.261.070.000,00 atau 105,42%. Rincian Pendapatan Lain-lain dari Dana BOS dapat dilihat pada Tabel 5.16 berikut:

Tabel 5.16
Pendapatan Lain-lain Dari Dana BOS Kabupaten Lebak
Tahun 2021 Dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Lain-lain Dari Dana BOS	155.822.300.000,00	164.261.070.000,00	105,42	186.180.820.500,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
JUMLAH		155.822.300.000,00	164.261.070.000,00	105,42	186.180.820.500,00

5.1.1.2 Belanja

Dalam rangka Pelaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak memberikan Uang Persediaan kepada seluruh Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor 900/Kep.52 – BPKAD/2021 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021. Adapun besaran Uang Persediaan untuk setiap Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 5.17 berikut:

Tabel 5.17
Uang Persediaan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN TAHUN 2021	UANG PERSEDIAAN TAHUN 2020
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	700.000.000,00	700.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.000.000.000,00	1.450.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	500.000.000,00	450.000.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	75.000.000,00	100.000.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	200.000.000,00	250.000.000,00
6	Dinas Sosial	70.000.000,00	70.000.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja	70.000.000,00	75.000.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	100.000.000,00	105.000.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	220.000.000,00	240.000.000,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	50.000.000,00	55.000.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	60.000.000,00	55.000.000,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Keluarga Berencana Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak	140.000.000,00	150.000.000,00
13	Dinas Perhubungan	55.000.000,00	60.000.000,00
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	45.000.000,00	45.000.000,00
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	50.000.000,00	50.000.000,00
16	Dinas Penanaman Modal	75.000.000,00	75.000.000,00
17	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	145.000.000,00	145.000.000,00
18	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	45.000.000,00	55.000.000,00
19	Dinas Perikanan	50.000.000,00	55.000.000,00
20	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	100.000.000,00	100.000.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN TAHUN 2021	UANG PERSEDIAAN TAHUN 2020
1	2	3	4
21	Dinas Pertanian	160.000.000,00	160.000.000,00
22	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	60.000.000,00	85.000.000,00
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	130.000.000,00	160.000.000,00
24	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	160.000.000,00	170.000.000,00
25	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	175.000.000,00	180.000.000,00
26	Badan Pendapatan Daerah	145.000.000,00	145.000.000,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	120.000.000,00	170.000.000,00
28	Inspektorat Daerah	200.000.000,00	290.000.000,00
29	Sekretariat Daerah	1.000.000.000,00	1.300.000.000,00
30	Sekretariat DPRD	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	45.000.000,00	45.000.000,00
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00
33	Kecamatan Rangkasbitung	80.000.000,00	85.000.000,00
34	Kecamatan Kalanganyar	12.000.000,00	15.000.000,00
35	Kecamatan Cibadak	13.000.000,00	12.000.000,00
36	Kecamatan Warunggunung	12.000.000,00	12.000.000,00
37	Kecamatan Cimarga	14.000.000,00	13.000.000,00
38	Kecamatan Cikulur	13.000.000,00	13.000.000,00
39	Kecamatan Leuwidamar	13.000.000,00	16.000.000,00
40	Kecamatan Sajira	14.000.000,00	12.000.000,00
41	Kecamatan Maja	13.000.000,00	12.000.000,00
42	Kecamatan Curugbitung	14.000.000,00	15.000.000,00
43	Kecamatan Muncang	12.000.000,00	16.000.000,00
44	Kecamatan Sobang	12.000.000,00	13.000.000,00
45	Kecamatan Bojongmanik	12.000.000,00	13.000.000,00
46	Kecamatan Cirinten	13.000.000,00	13.000.000,00
47	Kecamatan Cipanas	14.000.000,00	12.000.000,00
48	Kecamatan Lebakgedong	12.000.000,00	12.000.000,00
49	Kecamatan Gunungkencana	13.000.000,00	16.000.000,00
50	Kecamatan Cileles	13.000.000,00	18.000.000,00
51	Kecamatan Banjarsari	13.000.000,00	12.000.000,00
52	Kecamatan Cijaku	13.000.000,00	18.000.000,00
53	Kecamatan Cigemblong	12.000.000,00	17.000.000,00
54	Kecamatan Malingping	14.000.000,00	14.000.000,00
55	Kecamatan Wanasalam	13.000.000,00	19.000.000,00
56	Kecamatan Panggarangan	13.000.000,00	15.000.000,00
57	Kecamatan Cihara	13.000.000,00	14.000.000,00
58	Kecamatan Bayah	13.000.000,00	17.000.000,00
59	Kecamatan Cibeber	14.000.000,00	17.000.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN TAHUN 2021	UANG PERSEDIAAN TAHUN 2020
1	2	3	4
60	Kecamatan Cilograng	12.000.000,00	16.000.000,00
JUMLAH		**8.544.000.000,00**	**9.637.000.000,00**

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp2.920.409.223.229,00 dan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp2.643.466.844.441,00 atau 90,52%. Secara rinci mengenai anggaran dan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak selama Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.18 berikut:

Tabel 5.18
Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Operasi	2.150.232.172.550,00	1.915.912.290.235,00	89,10	1.713.250.168.627,50
2	Belanja Modal	317.634.916.019,00	281.854.752.747,00	88,74	228.259.512.209,80
3	Belanja Tidak Terduga	29.014.066.540,00	24.421.516.341,00	84,17	145.966.332.799,00
4	Belanja Transfer	423.528.068.120,00	421.278.285.118,00	99,47	409.526.945.900,00
JUMLAH		**2.920.409.223.229,00**	**2.643.466.844.441,00**	**90,52**	**2.497.002.959.536,30**

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari Pemerintah Kabupaten Lebak selama satu Tahun Anggaran yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp1.915.912.290.235,00 atau 89,10% dari yang dianggarkan pada APBD sebesar Rp2.150.232.172.550,00 jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.497.002.959.536,30 mengalami kenaikan sebesar Rp146.463.884.904,70 atau 5,86%. Anggaran dan realisasi dari Belanja Operasi dapat dilihat pada Tabel 5.19 berikut:

Tabel 5.19
Belanja Operasi Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai	1.068.572.233.185,00	992.375.160.333,00	92,87	989.336.121.659,00
2	Belanja Barang dan Jasa	949.751.006.845,00	806.590.537.922,00	84,93	677.038.051.905,00
3	Hibah	128.949.541.560,00	114.176.801.020,00	88,54	41.446.073.010,00
4	Bantuan Sosial	2.959.390.960,00	2.769.790.960,00	93,59	5.429.922.053,50
JUMLAH		**2.150.232.172.550,00**	**1.915.912.290.235,00**	**89,10**	**1.713.250.168.627,50**

Rincian dari masing-masing Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp1.068.572.233.185,00 terealisasi sebesar Rp992.375.160.333,00 atau 92,87%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp989.336.121.659,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.039.038.674,00 atau 0,31%. Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat dari tabel 5.20 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.20
Belanja Pegawai Kabupaten Lebak Tahun 2021 Dan 2020

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
				Rp	%	
1	2		3	4	5	6
1	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**		**667.714.312.937,00**	**616.529.855.120,00**	**92,33**	**630.990.959.759,00**
	a	Belanja Gaji Pokok ASN	468.398.579.622,00	463.128.074.035,00	98,87	467.632.066.193,00
	b	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	45.422.994.781,00	44.694.651.523,00	98,40	45.923.151.973,00
	c	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.470.395.000,00	8.033.387.500,00	94,84	8.333.705.000,00
	d	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	35.820.697.000,00	33.341.250.000,00	93,08	34.709.532.000,00
	e	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.277.668.744,00	5.880.620.000,00	93,68	5.154.173.000,00
	f	Belanja Tunjangan Beras ASN	31.350.735.464,00	27.459.226.868,00	87,6	23.915.847.900,00
	g	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.590.193.119,00	479.475.879,00	30,15	420.140.654,00
	h	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.678.740,00	6.680.595,00	48,84	6.457.480,00

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
				Rp	%	
1	2		3	4	5	6
	i	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	56.939.467.907,00	29.723.532.982,00	52,20	35.894.144.621,00
	j	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.305.863.523,00	945.763.564,00	28,61	958.260.235,00
	k	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.408.705.071,00	2.837.192.174,00	44,27	2.874.780.703,00
	l	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	3.687.741.889,00	0,00	0,00	5.168.700.000,00
	m	Belanja Jaminan Hari Tua ASN	27.592.077,00	0,00	0,00	0,00
2	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**		**104.564.254.500,00**	**98.852.414.567,00**	**94,54**	**96.997.444.416,00**
	a	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	99.924.754.500,00	94.258.664.567,00	94,36	87.451.652.257,00
	b	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	4.639.500.000,00	4.593.750.000,00	99,01	3.733.180.000,00
	c	Tunjangan PPh bagi Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja	0,00	0,00	0,00	5.812.612.159,00
3	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**		**263.065.203.872,00**	**244.320.767.163,00**	92,87	**237.199.234.309,00**
	a	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	5.829.401.375,00	5.715.892.339,00	98,05	4.707.578.662,00
	b	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	753.778.497,00	657.790.068,00	87,27	645.169.297,00
	c	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	229.926.362.000,00	222.578.120.456,00	96,80	200.156.235.400,00

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
				Rp	%	
1	2		3	4	5	6
	d	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	16.131.762.000,00	6.010.378.300,00	37,26	8.965.664.800,00
	e	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.146.000.000,00	583.500.000,00	50,92	618.000.000,00
	f	Belanja Honorarium	9.277.900.000,00	8.775.086.000,00	94,58	22.106.586.150,00
4	**Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**		**27.980.920.188,00**	**27.726.319.993,00**	**99,09**	**19.136.408.940,00**
	a	Belanja Uang Representasi DPRD	1.115.360.400,00	1.110.585.000,00	99,57	955.080.000,00
	b	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	151.071.900,00	151.071.900,00	100,00	128.041.200,00
	c	Belanja Tunjangan Beras DPRD	162.401.280,00	162.401.280,00	100,00	161.564.160,00
	d	Belanja Uang Paket DPRD	95.140.500,00	95.140.500,00	100,00	95.508.000,00
	e	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.610.348.250,00	1.610.348.250,00	100,00	1.384.866.000,00
	f	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	132.366.150,00	132.366.150,00	100,00	0,00
	g	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	17.356.500,00	17.356.500,00	100,00	18.087.300,00
	h	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.805.300.000,00	8.805.300.000,00	100,00	8.820.000.000,00
	i	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.190.300.000,00	2.190.300.000,00	100,00	2.190.300.000,00
	j	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	163.217.817,00	163.217.817,00	100,00	143.043.180,00
	k	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.542.057.391,00	7.294.232.596,00	96,71	133.919.100,00
	l	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.996.000.000,00	5.994.000.000,00	99,97	5.106.000.000,00
5	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**		**178.378.419,00**	**173.449.858,00**	**97,24**	**143.573.568,00**

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
				Rp	%	
1	2		3	4	5	6
	a	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	46.800.000,00
	b	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.056.000,00	7.056.000,00	100,00	6.048.000,00
	c	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	84.240.000,00
	d	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160,00	7.097.160,00	100,00	6.083.280,00
	e	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	696.752,00	483.578,00	69,40	402.048,00
	f	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	591,00	320,00	54,15	240,00
	g	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.861.676,00	5.483.520,00	55,60	0,00
	h	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	196.560,00	112.320,00	57,14	0,00
	i	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	589.680,00	336.960,00	57,14	0,00
6	**Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**		**942.720.000,00**	**942.720.000,00**	**100,00**	**955.320.000,00**
	a	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	342.720.000,00	342.720.000,00	100,00	355.320.000,00
	b	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
7	**Belanja Pegawai BLUD**		**4.126.443.269,00**	**3.829.633.632,00**	**92,81**	**3.913.180.667,00**
	A	Belanja Pegawai BLUD	4.126.443.269,00	3.829.633.632,00	92,81	3.913.180.667,00
JUMLAH			**1.068.572.233.185,00**	**992.375.160.333,00**	**92,87**	**989.336.121.659,00**

Berdasarkan tabel di atas belanja pegawai pada Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp667.714.312.937,00

dan terealisasi sebesar Rp616.529.855.120,00 atau 92,33% yang terdiri dari:

- Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan sebesar Rp468.398.579.622,00 terealisasi sebesar Rp463.128.074.035,00 atau 98,87% dengan rincian sebagai berikut:
  - Belanja Gaji PNS dianggarkan sebesar Rp459.067.995.422,00 terealisasi sebesar Rp453.798.301.135,00 atau sebesar 98,85%;
  - Belanja Gaji PPPK dianggarkan sebesar Rp9.330.584.200,00 terealisasi sebesar Rp9.329.772.900,00 atau sebesar 99,99%.
- Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan sebesar Rp45.422.994.781,00 terealisasi sebesar Rp44.694.651.523,00 atau 98,40% dengan rincian sebagai berikut:
  - Belanja Tunjangan Keluarga PNS dianggarkan sebesar Rp44.701.769.605,00 terealisasi sebesar Rp43.973.729.757,00 atau sebesar 98,37%;
  - Belanja Tunjangan Keluarga PPPK dianggarkan sebesar Rp721.225.176,00 terealisasi sebesar Rp720.921.766,00 atau sebesar 99,96%.
- Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan sebesar Rp8.470.395.000,00 terealisasi sebesar Rp8.033.387.500,00 atau 94,84%;
- Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan sebesar Rp35.820.697.000,00 terealisasi sebesar Rp33.341.250.000,00 atau 93,08% dengan rincian sebagai berikut:
  - Belanja Tunjangan Fungsional PNS dianggarkan sebesar Rp35.802.117.000,00 terealisasi sebesar Rp33.322.670.000,00 atau sebesar 93,07%;
  - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK dianggarkan sebesar Rp18.580.000,00 terealisasi sebesar Rp18.580.000,00 atau sebesar 100%.
- Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan sebesar Rp6.277.668.744,00 terealisasi sebesar Rp5.880.620.000,00 atau 93,68% dengan rincian sebagai berikut:
  - Tunjangan Fungsional Umum PNS dianggarkan sebesar Rp5.704.363.744,00 terealisasi sebesar Rp5.307.315.000,00 atau

sebesar 93,04%;

- Tunjangan Fungsional Umum PPPK dianggarkan sebesar Rp573.305.000,00 terealisasi sebesar Rp573.305.000,00 atau sebesar 100%.

➢ Tunjangan Beras ASN dianggarkan sebesar Rp31.350.735.464,00 terealisasi sebesar Rp27.459.226.868,00 atau 87,59% terdiri dari;

- Tunjangan Beras PNS dianggarkan sebesar Rp30.754.284.344,00 terealisasi sebesar Rp26.864.296.568,00 atau sebessr 87,35%;

- Tunjangan Beras PPPK dianggarkan sebesar Rp596.451.120,00 trealisasi sebesar Rp594.930.300,00 atau 99,75 %.

➢ Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan sebesar Rp1.590.193.119,00 terealisasi sebesar Rp479.475.879,00 atau 30,15% terdiri dari:

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS dianggarkan sebesar Rp1.588.287.999,00 terealisasi sebesar Rp479.475.879,00 atau 30,19%;
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK dianggarkan sebesar Rp1.905.120,00 realisasi Rp0,00.

➢ Pembulatan Gaji ASN dianggarkan sebesar Rp13.678.740,00 terealisasi sebesar Rp6.680.595,00 atau 48,84% terdiri dari:

- Pembulatan Gaji PNS dianggarkan sebesar Rp13.315.702,00 terealisasi sebesar Rp6.519.428,00 atau sebesar 48,96%;
- Pembulatan Gaji PPPK dianggarkan sebesar Rp363.038,00 terealisasi sebesar Rp161.167,00 atau sebesar 44,39%.

➢ Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan sebesar Rp56.939.467.907,00 terealisasi sebesar Rp29.723.532.982,00 atau 52,20% terdiri dari:

- Iuran Jaminan Kesehatan PNS dianggarkan sebesar Rp56.263.614.829,00 terealisasi sebesar Rp29.605.850.938,00 atau sebesar 52,62%;
- Iuran Jaminan Kesehatan PPPK dianggarkan sebesar Rp675.853,00 terealisasi sebesar Rp117.682.044 atau sebesar 17,41%.

➢ Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan sebesar Rp3.305.863.523,00 terealisasi sebesar Rp945.763.564,00 atau sebesar

28,61% yang terdiri dari:

- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS dianggarkan sebesar Rp3.274.423.347,00 terealisasi sebesar Rp939.670.117,00 atau sebesar 28,70%;
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK dianggarkan sebesar Rp31.440.176,00 terealisasi sebesar Rp6.093.447,00 atau sebesar 19,38%.

➢ Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan sebesar Rp6.408.705.071,00 terealisasi sebesar Rp2.837.192.174,00 atau sebesar 44,87% terdiri dari:

- Iuran Jaminan Kematian PNS dianggarkan sebesar Rp 6.313.292.147,00 terealisasi sebesar Rp2.818.451.030,00 atau 44,64%;
- Iuran Jaminan Kematian PPPK dianggarkan sebesar Rp 95.412.924,00 terealisasi sebesar Rp18.741.144,00 atau 19,64% .

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan sebesar Rp104.564.254.500,00 terealisasi sebesar Rp98.852.414.567,00 atau 94,54% terdiri dari:

➢ Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN dianggarkan sebesar Rp99.924.754.500,00 terealisasi sebesar Rp94.258.664.567,00 atau 94,33% terdiri dari:

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS dianggarkan sebesar Rp97.278.754.500,00 terealisasi sebesar Rp91.961.664.567,00 atau 94,53%;
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK dianggarkan sebesar Rp2.646.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.297.000.000,00 atau 86,81%;

c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dianggarkan sebesar Rp263.065.203.872,00 terealisasi sebesar Rp244.320.767.163,00 atau 92,87%, terdiri dari:

➢ Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp5.829.401.375,00 terealisasi sebesar Rp5.715.892.339,00 atau 98,05% terdiri dari:

- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 terealisasi sebesar Rp14.851.250,00 atau

99,01%;

- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran dianggarkan sebesar Rp226.250.000,00 terealisasi sebesar Rp226.250.000,00 atau 100%;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan dianggarkan sebesar Rp17.500.000,00 dan tidak ada realisasi;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame dianggarkan sebesar Rp38.744.000,00 terealisasi sebesar Rp38.744.000,00 atau 100%;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00 terealisasi sebesar Rp900.000.000,00 atau 100%;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir dianggarkan sebesar Rp26.930.000,00 terealisasi sebesar Rp26.930.000,00 atau 100%;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah dianggarkan sebesar Rp16.587.500,00 terealisasi sebesar Rp14.203.125,00 atau 85,63%;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dianggarkan sebesar Rp640.000,00 terealisasi sebesar Rp600.464,00 atau 93,82%;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggarkan sebesar Rp1.325.292.000,00 terealisasi sebesar Rp1.231.855.625,00 atau 92,95%;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan dianggarkan sebesar Rp1.165.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.165.000.000,00 atau 100%;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp2.097.457.875,00 terealisasi sebesar Rp2.097.457.875,00 atau 100%.

➢ Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp753.778.497,00 terealisasi sebesar Rp657.790.068,00 atau 87,27% terdiri dari;

- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp13.236.750,00 terealisasi sebesar Rp13.236.750,00 atau 100%;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan dianggarkan sebesar Rp19.648.500,00 terealisasi sebesar Rp19.648.500,00 atau 100%;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dianggarkan sebesar Rp16.986.000,00 terealisasi sebesar Rp6.794.400,00 atau 40%;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar dianggarkan sebesar Rp125.319.100,00 terealisasi sebesar Rp93.989.325,00 atau 75%;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp46.740.000,00 terealisasi sebesar Rp35.055.000,00 atau 75%;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp1.000.000,00 terealisasi Rp1.000.000,00 atau 100%;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang dianggarkan sebesar Rp2.621.600,00 terealisasi sebesar Rp2.621.600,00 atau 100%;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00 terealisasi sebesar Rp35.000.000,00 atau 100%;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp79.196.117,00 terealisasi sebesar Rp49.614.975,00 atau 62,65%;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan dianggarkan sebesar Rp61.886.330,00 terealisasi sebesar Rp61.886.330,00 atau 100%;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-

Terminal dianggarkan sebesar Rp16.520.000,00 terealisasi sebesar Rp12.390.000,00 atau 75%;

- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan dianggarkan sebesar Rp1.230.000,00 atau terealisasi 100%;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp8.181.600,00 terealisasi sebesar Rp694.688,00 atau 8,49%;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah dianggarkan sebesar Rp18.642.500,00 terealisasi sebesar Rp18.642.500,00 atau 100%;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp300.000.000,00 atau 100%;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dianggarkan sebesar Rp2.640.000,00 terealisasi sebesar Rp1.056.000,00 atau 40%;
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan dianggarkan sebesar Rp4.930.000,00 terealisasi sebesar Rp4.930.000,00 atau 100%.

➢ Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dianggarkan sebesar Rp229.926.362.000,00 terealisasi sebesar Rp222.578.120.456,00 atau 96,80%;

➢ Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD dianggarkan sebesar Rp16.131.762.000,00 terealisasi sebesar Rp6.010.378.300,00 atau 37,26%;

➢ Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD dianggarkan sebesar Rp1.146.000.000,00 terealisasi sebesar Rp583.500.000,00 atau 50,92%;

➢ Belanja Honorarium dianggarkan sebesar Rp9.277.900.000,00 terealisasi sebesar Rp8.775.086.000,00 atau 94,58% terdiri dari:

- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dianggarkan sebesar Rp8.294.990.000,00 terealisasi sebesar Rp7.910.576.000,00 atau 95,37%;

- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dianggarkan sebesar Rp980.410.000,00 terealisasi sebesar Rp864.510.000,00 atau 88,18%;
- Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00 dan tidak ada realisasi.

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dianggarkan sebesar Rp27.980.920.188,00 terealisasi sebesar Rp27.726.319.993,00 atau 99,09% terdiri dari:

- Belanja Uang Representasi DPRD dianggarkan sebesar Rp1.115.360.400,00 terealisasi sebesar Rp1.110.585.000,00 atau 99,57%;
- Belanja Tunjangan Keluarga DPRD dianggarkan sebesar Rp151.071.900,00 terealisasi sebesar Rp151.071.900,00 atau 100%;
- Belanja Tunjangan Beras DPRD dianggarkan sebesar Rp162.401.280,00 terealisasi sebesar Rp162.401.280,00 atau 100%;
- Belanja Uang Paket DPRD dianggarkan sebesar Rp95.140.500,00 terealisasi sebesar Rp95.140.500,00 atau 100%;
- Belanja Tunjangan Jabatan DPRD dianggarkan sebesar Rp1.610.348.250,00 terealisasi sebesar Rp1.610.348.250,00 atau 100%;
- Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD dianggarkan sebesar Rp132.366.150,00 terealisasi sebesar Rp132.366.150,00 atau 100%;
- Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD dianggarkan sebesar Rp17.356.500,00 terealisasi sebesar Rp17.356.500,00 atau 100%;
- Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan sebesar Rp8.805.300.000,00 terealisasi sebesar Rp8.805.300.000,00 atau 100%;
- Belanja Tunjangan Reses DPRD dianggarkan sebesar Rp2.190.300.000,00 terealisasi sebesar Rp2.190.300.000,00 atau 100%;
- Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan sebesar Rp163.217.817,00 terealisasi sebesar Rp163.217.817,00 atau 100%;
- Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan sebesar Rp7.542.057.391,00 terealisasi sebesar Rp7.294.232.596,00 atau 96,71% dengan rincian:
  - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD dianggarkan sebesar Rp373.888.623,00 terealisasi sebesar Rp133.704.468,00 atau 35,76%;

- Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD dianggarkan sebesar Rp2.292.192,00 terealisasi sebesar Rp382.032,00 atau 16,67%;
- Belanja Jaminan Kematian DPRD dianggarkan sebesar Rp6.876.576,00 terealisasi sebesar Rp1.146.096,00 atau 16,67%;
- Belanja Tunjangan Perumahan DPRD dianggarkan sebesar Rp7.159.000.000,00 terealisasi sebesar Rp7.159.000.000,00 atau 100%.

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp178.378.419,00 terealisasi sebesar Rp173.449.858,00 atau 97,24% terdiri dari:

- Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp54.600.000,00 terealisasi sebesar Rp54.600.000,00 atau 100%;
- Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp7.056.000,00 terealisasi sebesar Rp7.056.000,00 atau 100%;
- Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp98.280.000,00 terealisasi sebesar Rp98.280.000,00 atau 100 %;
- Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp7.097.160,00 terealisasi sebesar Rp7.097.160,00 atau 100%;
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp696.752,00 terealisasi sebesar Rp483.578,00 atau 69,40%;
- Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp591,00 tereaslisasi sebesar Rp320,00 atau 54,15%;
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp9.861.676,00 tereaslisasi sebesar Rp5.483.520,00 atau 55,60%;
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp196.560,00 terealisasi sebesar Rp112.320,00 atau 57,14%;
- Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp589.680,00 terealisasi sebesar Rp336.960 atau 57,14%;

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan sebesar Rp942.720.000,00 terealisasi sebesar Rp942.720.000,00 atau 100% terdiri dari:

- Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD dianggarkan sebesar Rp342.720.000,00 terealisasi sebesar Rp342.720.000,00 atau 100%;
- Belanja Dana Operasional KDH/WKDH dianggarkan sebesar

Rp600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp600.000.000,00 atau 100%.

g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dianggarkan sebesar Rp4.126.443.269,00 terealisasi sebesar Rp3.829.633.632,00 atau 92,81%.

2. Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp949.751.006.845 terealisasi sebesar Rp806.590.537.922,00 atau 84,93%. Belanja Barang dan Jasa dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada setiap Perangkat Daerah sesuai dengan urusan dan tugas pokok serta fungsinya. Rincian anggaran dan realisasi dari Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel 5.21 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.21
Belanja Barang Dan Jasa Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
				Rp	%	
1	2		3	4	5	6
1	**Belanja Barang**		**114.997.670.667,00**	**73.883.810.932,00**	64,25	**49.472.384.393,00**
	a	Belanja Barang Pakai Habis	114.942.323.267,00	73.847.437.032,00	64,25	49.472.384.393,00
	b	Belanja Barang Tak Habis Pakai	55.347.400,00	36.373.900,00	65,72	0,00
2	**Belanja Jasa**		**275.193.457.779,00**	**247.736.617.487,00**	**90,02**	**154.622.303.618,00**
	a	Belanja Jasa Kantor	182.757.904.299,00	164.577.257.408,00	90,52	114.785.337.162,00
	b	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	58.282.108.660,00	56.767.008.334,00	97,4	27.098.732.543,00
	c	Belanja Sewa Tanah	4.000.000,00	4.000.000,00	100	0,00
	d	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.600.907.500,00	1.398.817.580,00	53,78	1.151.415.825,00
	e	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.339.890.000,00	970.101.276,00	41,46	741.970.500,00
	f	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	68.500.000,00	50.900.000,00	74,31	0,00
	g	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.851.396.320,00	9.913.697.005,00	83,65	0,00
	h	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.845.500.000,00	1.640.884.584,00	88,91	0,00
	i	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	0,00	0,00	0,00	4.740.174.588,00
	j	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	105.000.000,00	105.000.000,00	100	70.000.000,00
	k	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	15.338.251.000,00	12.308.951.300,00	80,25	6.034.673.000,00

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
				Rp	%	
1	2		3	4	5	6
		serta Pendidikan dan Pelatihan				
3	**Belanja Pemeliharaan**		**89.246.599.406,00**	**82.679.159.345,00**	**92,64**	**19.244.558.634,00**
	a	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.717.158.796,00	4.886.558.618,00	85,47	1.850.494.181,00
	b	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.179.065.140,00	37.070.592.127,00	94,62	4.268.340.703,00
	c	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.350.375.470,00	40.722.008.600,00	91,82	13.125.723.750,00
4	**Belanja Perjalanan Dinas**		**76.560.642.900,00**	**62.282.841.671,00**	**81,35**	**48.995.991.179,00**
	a	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	76.560.642.900,00	62.282.841.671,00	81,35	48.995.991.179,00
5	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**		**1.276.475.000,00**	**1.079.335.000,00**	**84,56**	**67.976.778.450,00**
	a	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.276.475.000,00	1.079.335.000,00	84,56	67.976.778.450,00
	b	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Belanja Barang dan Jasa BOS**		**134.634.274.621,00**	**143.758.170.000,00**	**106,8**	**151.247.673.796,00**
	a	Belanja Barang dan Jasa BOS	134.634.274.621,00	143.758.170.000,00	106,8	151.247.673.796,00
7	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**		**257.841.886.472,00**	**195.170.603.487,00**	**75,69**	**185.478.361.835,00**
	a	Belanja Barang dan Jasa BLUD	257.841.886.472,00	195.170.603.487,00	75,69	185.478.361.835,00
	JUMLAH		**949.751.006.845,00**	**806.590.537.922,00**	**84,93**	**677.038.051.905,00**

Berdasarkan tabel 5.21 belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp114.997.670.667,00 terealisasi sebesar Rp73.883.810.932,00 atau 64,25% terdiri dari:

   - Belanja Barang Pakai Habis dianggarkan sebesar Rp114.942.323.267,00

terealisasi sebesar Rp73.847.437.032,00 atau 64,25%, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp49.472.384.393,00 mengalami penurunan sebesar Rp24.375.052.639,00 atau 33,00%. Rincian Belanja Barang Pakai Habis dapat dilihat pada Tabel 5.22 berikut:

`Tabel 5.22
Belanja Barang Habis Pakai Kabupaten Lebak
Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
				Rp	%	(Rp)
1	2		3	4	5	6
1	**Belanja Barang Pakai Habis**					
	-	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	833.916.680,00	821.710.380,00	98,54	0,00
	-	Belanja Bahan-Bahan Kimia	454.698.800,00	432.238.644,00	95,06	0,00
	-	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.314.477.713,00	2.865.675.503,00	86,46	2.407.931.953,00
	-	Belanja Bahan-Bahan Baku	200.000,00	200.000,00	100,00	137.902.000,00
	-	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	132.444.375,00	130.412.875,00	98,47	357.008.300,00
	-	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	6.660.000,00	5.700.000,00	85,59	1.785.000,00
	-	Belanja Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00	276.626.230,00
	-	Belanja Persediaan Bahan Pakai Habis Kegiatan	0,00	0,00	0,00	3.142.358.071,00
	-	Belanja Alat Kedokteran Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	1.584.814.900,00
	-	Belanja Persediaan Makanan Pokok	0,00	0,00	0,00	2.099.651.520,00
	-	Belanja Persediaan Bahan/Material Kegiatan	0,00	0,00	0,00	762.714.500,00
	-	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	67.591.820,00	44.400.000,00	65,69	0,00
	-	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.294.076.220,00	1.125.725.425,00	86,99	0,00
	-	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	474.051.418,00	401.884.464,00	84,78	0,00
	-	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	393.628.000,00	336.912.000,00	85,59	0,00
	-	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	4.503.200,00	4.260.886,00	94,62	0,00

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
				Rp	%	(Rp)
1	2		3	4	5	6
	-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.522.706.457,00	7.119.251.058,00	83,53	5.528.799.526,00
	-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.823.651.775,00	1.633.593.760,00	89,58	0,00
	-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.409.245.340,00	1.177.512.676,00	83,56	5.926.700.243,00
	-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	134.578.000,00	109.600.000,00	81,44	106.413.500,00
	-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	446.450.000,00	365.341.000,00	81,83	222.634.000,00
	-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.785.924.540,00	2.516.307.860,00	90,32	905.222.750,00
	-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.144.968.575,00	2.042.663.640,00	95,23	1.656.247.880,00
	-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	510.205.125,00	488.224.440,00	95,69	318.216.370,00
	-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	29.453.250,00	29.453.250,00	100,00	0,00
	-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	222.401.250,00	217.847.250,00	97,95	0,00
	-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	233.723.000,00	190.945.620,00	81,70	0,00
	-	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.921.689.010,00	5.388.368.029,00	90,99	6.743.378.417,00
	-	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	55.644.778.339,00	26.064.428.567,00	46,84	313.236.503,00
	-	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.940.855.000,00	1.255.566.525,00	64,69	0,00
	-	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	732.650.000,00	578.997.750,00	79,03	0,00

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
				Rp	%	(Rp)
1	2		3	4	5	6
		Belanja makanan dan minuman harian pegawai	0,00	0,00		832.041.890,00
	-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.190.696.380,00	13.225.803.400,00	72,71	5.014.887.820,00
		Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00		5.649.943.350,00
	-	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.576.231.000,00	2.154.383.530,00	83,63	932.645.400,00
	-	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.768.205.000,00	462.627.500,00	26,16	0,00
	-	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.850.155.000,00	1.642.370.000,00	88,77	0,00
	-	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	187.000.000,00	185.850.000,00	99,39	170.835.120,00
	-	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	12.500.000,00	12.400.000,00	99,20	92.977.500,00
	-	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	132.105.000,00	130.680.000,00	98,92	89.807.000,00
	-	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	110.530.000,00	104.385.000,00	94,44	189.593.151,00
	-	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	125.000.000,00	122.457.500,00	97,97	0,00
	-	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	0,00
	-	Belanja Pakaian Penyelamatan	4.700.000,00	4.700.000,00	100,00	0,00
	-	Belanja Pakaian Batik Tradisional	74.618.000,00	51.630.000,00	69,19	16.500.000,00
	-	Belanja Pakaian Olahraga	164.015.000,00	144.554.000,00	88,13	34.180.000,00
	-	Belanja Pakaian Paskibraka	222.490.000,00	214.162.000,00	96,26	0,00
	-	Belanja Pakaian Jas/Safari	33.750.000,00	33.412.500,00	99,00	0,00
	-	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	0,00	0,00	47.935.000,00
	-	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	0,00	65.835.000,00
	-	Belanja Perlengkapan/PakaiaLapangan/Kerja	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00
	-	Belanja pakaian adat daerah	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00
	-	Belanja Pakaian Upacara	0,00	0,00	0,00	28.985.000,00
	-	Belanja Pakaian Peserta	0,00	0,00	0,00	23.250.000,00
	-	Belanja Jasa Service	0,00	0,00	0,00	828.728.593,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	- Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	0,00	0,00	2.179.465.606,00
	- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	707.275.300,00
	- Belanja Penyediaan Kebersihan Kendaraan	0,00	0,00	0,00	32.957.000,00
	JUMLAH	**114.942.323.267,00**	**73.847.437.032,00**	**64,25**	**49.472.384.393,00**

- Belanja Barang Tak Habis Pakai dianggarkan sebesar Rp55.347.400,00 terealisasi sebesar Rp36.373.900,00 atau 65,72%, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp36.373.900,00 atau 100,00%. Rincian Belanja Barang Tak Habis Pakai dapat dilihat pada Tabel 5.23 berikut:

Tabel 5.23
Belanja Barang Tak Habis Pakai
Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**				
	- Belanja Pipa-Pipa Baja	44.235.000,00	25.261.500,00	57,11	0,00
	- Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	11.112.400,00	11.112.400,00	100,00	0,00
	JUMLAH	**55.347.400,00**	**36.373.900,00**	**65,72**	**0,00**

b. Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp275.193.457.779,00 terealisasi sebesar Rp247.736.617.487,00 atau 90,02%. jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp154.622.303.618,00 mengalami kenaikan sebesar Rp93.114.313.869,00 atau 60,22%. Rincian Belanja Jasa adalah sebagai berikut:

- Belanja Jasa Kantor dianggarkan sebesar Rp182.757.904.299,00 terealisasi sebesar Rp164.577.257.408,00 atau 90,05%, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp114.785.337.162,00 mengalami kenaikan sebesar Rp49.791.920.246,00 atau 43,38%. Rincian Belanja Jasa Kantor dapat dilihat pada Tabel 5.24 berikut:

Tabel 5.24
Belanja Jasa Kantor Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2020	
				Rp	%	(Rp)
1	2		3	4	5	6
1	**Belanja Jasa Kantor**					
	-	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.839.220.000,00	5.101.001.300,00	87,36	0,00
	-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.469.050.000,00	6.744.408.000,00	90,30	0,00
	-	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	7.200.000,00	5.400.000,00	75,00	0,00
	-	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.275.554.000,00	1.135.679.300,00	89,03	0,00
	-	Honorarium Rohaniwan	116.800.000,00	93.000.000,00	79,62	0,00
	-	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	190.850.000,00	187.900.000,00	98,45	0,00
	-	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	5.490.000,00	5.190.000,00	94,54	0,00
	-	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
	-	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	477.600.000,00	457.300.000,00	95,75	0,00
	-	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	21.797.340.000,00	21.417.211.250,00	98,26	0,00
	-	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	63.750.170.000,00	53.109.263.792,00	83,31	0,00
	-	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	505.145.000,00	373.755.500,00	73,99	0,00
	-	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	0,00
	-	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.021.200.000,00	1.007.475.000,00	98,66	0,00
	-	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	722.785.000,00	705.205.000,00	97,57	0,00
	-	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	60.000.000,00	59.000.000,00	98,33	0,00
	-	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	287.500.000,00	283.100.000,00	98,47	0,00
	-	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.223.417.000,00	20.298.772.990,00	95,64	0,00
	-	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.845.982.000,00	2.800.341.000,00	98,40	0,00
	-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	254.982.000,00	207.638.000,00	81,43	0,00
	-	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.562.770.000,00	7.159.642.000,00	94,67	0,00

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	REALISASI 2020	
				Rp	%	(Rp)
1	2		3	4	5	6
	-	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.261.008.000,00	5.160.939.500,00	98,10	0,00
	-	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.768.448.000,00	5.702.402.000,00	98,86	0,00
	-	Belanja Jasa Tenaga Supir	524.348.000,00	499.371.000,00	95,24	0,00
	-	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	8.940.000,00	7.000.000,00	78,30	0,00
	-	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	43.500.000,00	36.938.965,00	84,92	0,00
	-	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	107.400.000,00	107.400.000,00	100,00	0,00
	-	Belanja Jasa Tata Rias	9.620.000,00	5.620.000,00	58,42	0,00
	-	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	7.700.000,00	6.300.000,00	81,82	0,00
	-	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	69.920.000,00	52.494.080,00	75,08	0,00
	-	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	98.600.000,00	97.350.000,00	98,73	0,00
	-	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	686.294.000,00	673.982.475,00	98,21	0,00
	-	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.402.400.000,00	2.203.674.750,00	91,73	0,00
	-	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	35.000.000,00	25.000.000,00	71,43	0,00
	-	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	108.915.000,00	79.288.000,00	72,80	0,00
	-	Belanja Jasa Kalibrasi	39.170.000,00	38.370.000,00	97,96	0,00
	-	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.829.940.000,00	1.717.970.000,00	93,88	0,00
	-	Belanja Sertifikasi	0,00	0,00	0,00	388.247.060,00
	-	Belanja Jasa Layanan Medis	0,00	0,00	0,00	7.840.381.566,00
	-	Belanja Penghargaan/Prestasi	0,00	0,00	0,00	962.989.872,00
	-	Belanja Jasa Publikasi/Desiminasi	0,00	0,00	0,00	1.470.239.500,00
	-	Belanja Jasa Distribusi SPPT PBB-P2	0,00	0,00	0,00	438.684.400,00
	-	Belanja Jasa Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	24.200.000,00
	-	Belanja Tagihan Telepon	508.776.000,00	368.201.960,00	72,37	525.061.142,00
	-	Belanja Tagihan Air	77.796.000,00	45.434.143,00	58,40	42.547.373,00
	-	Belanja Tagihan Listrik	14.060.629.299,00	13.025.141.187,00	92,64	13.593.494.893,00
	-	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	436.774.000,00	365.981.600,00	83,79	510.129.000,00
	-	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.281.830.000,00	6.301.167.896,00	86,53	3.421.098.725,00
		Beban Jasa pengumuman	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00
	-	Belanja Paket/Pengiriman	528.040.000,00	515.883.700,00	97,70	13.362.000,00
	-	Belanja Penambahan Daya	30.000.000,00	29.981.200,00	99,94	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.941.000.000,00	1.355.249.920,00	69,82	0,00
	- Belanja Pengolahan Air Limbah	3.250.000,00	2.744.000,00	84,43	0,00
	- Belanja Lembur	5.461.851.000,00	4.988.625.000,00	91,34	0,00
	- Belanja Medical Check Up	2.800.000,00	2.562.900,00	91,53	0,00
	JASA KANTOR LAINNYA				
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (Non Pegawai)	0,00	0,00	0,00	1.479.323.000,00
	- Belanja Jasa Moderator (Non Pegawai)	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	- Belanja Jasa Tim/Kepanitiaan	0,00	0,00	0,00	412.000.000,00
	- Belanja Jasa Tenaga Terampil/Terlatih	0,00	0,00	0,00	899.487.000,00
	- Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0,00	0,00	0,00	8.691.376.921,00
	- Honorarium Moderator	0,00	0,00	0,00	44.500.000,00
	- Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0,00	0,00	0,00	26.536.124.100,00
	- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,00	0,00	0,00	47.444.490.610,00
	JUMLAH	**182.757.904.299,00**	**164.577.257.408,00**	**90,05**	**114.785.337.162,00**

- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dianggarkan sebesar Rp58.282.108.660,00 terealisasi sebesar Rp56.767.008.334,00 atau 97,40%, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp27.098.732.543,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.668.275.791,00 atau 109,48%. Rincian Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dapat dilihat pada Tabel 5.25 berikut:

Tabel 5.25
Belanja Iuran Jasa Asuransi Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**				
	- Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	49.564.584.000,00	49.347.990.100,00	99,56	0,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi	975.959.600,00	908.323.400,00	93,07	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	Peserta PBPU dan BP Kelas 3				
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.646.588.180,00	5.654.255.220,00	85,07	26.363.538.575,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	219.074.880,00	190.478.060,00	86,95	0,00
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	273.852.000,00	237.568.425,00	86,75	0,00
	- Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	602.050.000,00	428.393.129,00	71,16	422.073.753,00
	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00	313.120.215,00
	JUMLAH	**58.282.108.660,00**	**56.767.008.334,00**	**97,40**	**27.098.732.543,00**

- Belanja Sewa Tanah dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00,00 terealisasi sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 100%, dan Tahun Anggaran 2020 tidak ada realisasi;
- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp2.600.907.500,00 terealisasi sebesar Rp1.398.817.580,00 atau 53,78%, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.151.415.825,00 mengalami kenaikan sebesar Rp247.401.755,00 atau 21,49%. Rincian Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Tabel 5.26 berikut:

Tabel 5.26
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Kabupaten Lebak
Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**				
	- Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	501.500.000,00	156.103.000,00	31,13	124.765.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	663.240.000,00	119.079.500,00	17,95	0,00
	- Belanja Sewa Perkakas Bengkel Kayu	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	647.366.000,00	511.672.580,00	79,04	1.026.650.825,00
	- Belanja Sewa Alat Pendingin	104.400.000,00	73.227.500,00	70,14	0,00
	- Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	37.840.000,00	31.840.000,00	84,14	0,00
	- Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat	2.100.000,00	350.000,00	16,67	0,00
	- Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	16.561.500,00	12.339.000,00	74,50	0,00
	- Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	-	-		0,00
	- Belanja Sewa Sumber Tenaga	38.500.000,00	38.115.000,00	99,00	0,00
	- Belanja Sewa Personal Computer	399.300.000,00	282.282.000,00	70,69	0,00
	- Belanja Sewa Peralatan Jaringan	13.200.000,00	2.970.000,00	22,50	0,00
	- Belanja Sewa Elektronik/Electric	31.900.000,00	25.839.000,00	81,00	0,00
	- Belanja Sewa Peralatan Senam	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	**2.600.907.500,00**	**1.398.817.580,00**	**53,782**	**1.151.415.825,00**

- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp2.339.890.000,00 terealisasi sebesar Rp970.101.276,00 atau 41,46%, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp741.970.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp247.401.755,00 atau 21,48%. Rincian Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada Tabel 5.27 berikut:

Tabel 5.27
Belanja Sewa Bangunan Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	**Belanja Sewa Bangunan**				

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	- Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	90.000.000,00	88.500.000,00	98,33	0,00
	- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	308.950.000,00	214.898.776,00	69,56	87.000.000,00
	- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	39.000.000,00	37.342.500,00	95,75	545.410.500,00
	- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	132.000.000,00	130.680.000,00	99,00	0,00
	- Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	112.500.000,00	107.580.000,00	95,63	109.560.000,00
	- Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.328.740.000,00	103.600.000,00	7,80	0,00
	- Belanja Sewa Motel	108.500.000,00	107.700.000,00	99,26	0,00
	- Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	220.200.000,00	179.800.000,00	81,65	0,00
	JUMLAH	**2.339.890.000,00**	**970.101.276,00**	**41,46**	**741.970.500,00**

- Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp68.500.000,00 terealisasi sebesar Rp50.900.000,00 atau 74,31%, dan tidak ada realisasi Tahun Anggaran 2020. Rincian Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada Tabel 5.28 berikut:

Tabel 5.28
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Kabupaten Lebak
Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya				
	- Belanja Sewa Audio Visual	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Sewa Tanaman	56.000.000,00	38.400.000,00	68,57	0,00
	JUMLAH	**68.500.000,00**	**50.900.000,00**	**74,31**	**0,00**

- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan sebesar Rp11.851.396.320,00 terealisasi sebesar Rp9.913.697.005,00 atau 83,65%, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.740.174.588,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.173.522.417,00 atau 52,19%. Rincian Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dapat dilihat pada Tabel 5.29 berikut:

Tabel 5.29
Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi Kabupaten Lebak
Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**11.851.396.320,00**	**9.913.697.005,00**	**83,65**	**4.740.174.588,00**
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	146.180.000,00	117.148.500,00	80,14	189.356.680,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	922.000.000,00	590.057.900,00	64,00	0,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	880.000.000,00	829.286.250,00	94,24	0,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	500.000.000,00	470.385.200,00	94,08	0,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	450.000.000,00	417.470.000,00	92,77	2.696.166.870,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.130.000.000,00	1.929.710.000,00	90,60	0,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
				Rp	%	(Rp)
1	2		3	4	5	6
	-	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	100.000.000,00	93.412.000,00	93,41	0,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	45.000.000,00	43.659.000,00	97,02	0,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	100.000.000,00	95.999.750,00	96,00	0,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.381.000.000,00	823.088.005,00	59,60	402.323.460,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.903.416.320,00	1.690.732.300,00	88,83	0,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	2.500.000.000,00	2.094.876.700,00	83,80	0,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	540.000.000,00	496.587.400,00	91,96	0,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	28.800.000,00	27.600.000,00	95,83	7.500.000,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	943.569.000,00
	-	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-	50.000.000,00	47.493.000,00	94,99	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	Jasa Konsultansi Lingkungan				
	- Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	115.000.000,00	111.191.000,00	96,69	0,00
	- Belanja Jasa Event Organizer	0,00	0,00	0,00	501.258.578,00
	JUMLAH	**11.851.396.320,00**	**9.913.697.005,00**	**83,65**	**4.740.174.588,00**

- Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi dianggarkan sebesar Rp1.845.500.000,00 terealisasi sebesar Rp1.640.884.584,00 atau 88,91%, dan Tahun Anggaran 2020 tidak ada realisasi, Rincian Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi dapat dilihat dari Tabel 5.30 berikut:

Tabel 5.30
Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi Kabupaten Lebak
Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi				
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	75.000.000,00	49.970.000,00	66,63	0,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	240.500.000,00	122.662.800,00	51,00	0,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	80.000.000,00	76.179.000,00	95,22	0,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	120.000.000,00	119.250.000,00	99,38	0,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	160.000.000,00	157.377.200,00	98,36	0,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	330.000.000,00	320.885.000,00	97,24	0,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	740.000.000,00	697.647.834,00	94,28	0,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi	100.000.000,00	96.912.750,00	96,91	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	Perencanaan Kepariwisataan				
	JUMLAH	**1.845.500.000,00**	**1.640.884.584,00**	**88,91**	**0,00**

- Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp105.000.000,00 terealisasi 100% jika dibandingkan dengan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp35.000.000 atau 50%. Rincian Belanja Beasiswa Pendidikan PNS dapat dilihat dari Tabel 5.31 berikut:

Tabel 5.31
Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	**Belanja Beasiswa Pendidikan PNS**	**105.000.000,00**	**105.000.000,00**		**70.000.000,00**
	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	-	-		10.000.000,00
	- Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00	60.000.000,00
	JUMLAH	**105.000.000,00**	**105.000.000,00**	**100,00**	**70.000.000,00**

- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan sebesar Rp15.338.251.000,00 terealisasi sebesar Rp12.308.951.300,00 atau 80,25% jika dibandingkan dengan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebedsar Rp6.274.278.300,00 atau 103,97%. Rincian Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat dari Tabel 5.32 berikut:

Tabel 5.32
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**				
	- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	7.207.103.000,00	5.440.724.300,00	75,49	1.010.323.000,00
	- Belanja Sosialisasi	4.642.748.000,00	4.180.969.000,00	90,05	3.159.450.000,00
	- Belanja Bimbingan Teknis	3.488.400.000,00	2.687.258.000,00	77,03	1.605.460.000,00
	- Belanja Diklat Kepemimpinan	-	-	-	259.440.000,00
	JUMLAH	**15.338.251.000,00**	**12.308.951.300,00**	**80,25**	**6.034.673.000,00**

c. Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp89.246.599.406,00 terealisasi sebesar Rp82.679.159.345,00 atau 92,64% terdiri dari:

- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp5.717.158.796,00 terealisasi sebesar Rp4.886.558.618,00 atau 85,47%, jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp3.036.064.437,00 atau 164,07%. Rincian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dapat dilihat dari Tabel 5.33 berikut:

Tabel 5.33
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**				
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	110.000.000,00	81.757.812,00	74,33	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	134.270.000,00	-	-	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	8.519.000,00	680.000,00	7,98	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.160.448.100,00	2.728.800.471,00	86,34	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	135.700.000,00	103.106.100,00	75,98	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	21.000.000,00	19.267.000,00	91,75	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	333.990.000,00	333.136.364,00	99,74	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	10.000.000,00	-	-	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	194.074.900,00	189.843.500,00	97,82	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	716.100.000,00	691.479.674,00	96,56	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	10.000.000,00	7.700.000,00	77,00	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	222.040.000,00	200.522.200,00	90,31	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	8.626.500,00	8.626.500,00	100,00	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	42.516.800,00	42.266.981,00	99,41	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	89.916.946,00	35.820.000,00	39,84	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	268.640.000,00	250.560.726,00	93,27	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	169.618.750,00	146.791.290,00	86,54	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	0,00	0,00		0,00
	- Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	35.497.800,00	0,00	-	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	**5.717.158.796,00**	**4.886.558.618,00**	**85,47**	**1.850.494.181,00**

- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp39.179.065.140,00 terealisasi sebesar Rp37.070.592.127,00 atau 94,62%, jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp32.802.251.424,00 atau 768,50%. Rincian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dapat dilihat dari Tabel 5.34 berikut:

Tabel 5.34
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**				
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.791.516.040,00	3.593.040.734,00	94,77	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	2.500.000.000,00	2.202.777.804,00	88,11	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	29.613.784.050,00	28.044.092.270,00	94,70	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	252.300.000,00	245.724.000,00	97,39	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.952.911.500,00	2.916.723.319,00	98,77	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	33.553.550,00	33.234.000,00	99,05	0,00
	JUMLAH	**39.179.065.140,00**	**37.070.592.127,00**	**94,62**	**4.268.340.703,00**

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi dianggarkan sebesar Rp44.350.375.470,00 terealisasi sebesar Rp40.722.008.600,00 atau 91,82%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp27.596.284.850,00 atau 210,25%. Rincian Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi dapat dilihat dari Tabel 5.35 berikut:

Tabel 5.35
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**				
	- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	16.899.356.270,00	16.006.535.000,00	94,72	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	1.214.696.650,00	1.213.328.000,00	99,89	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi	8.145.815.850,00	7.007.283.800,00	86,02	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	68.158.000,00	21.415.000,00	31,42	0,00
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan	4.279.325.300,00	3.848.195.300,00	89,93	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya				
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	13.743.023.400,00	12.625.251.500,00	91,87	0,00
	JUMLAH	**44.350.375.470,00**	**40.722.008.600,00**	**91,82**	**13.125.723.750,00**

d. Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp76.560.642.900,00 terealisasi sebesar Rp62.282.841.671,00 atau 81,35% ,jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp13.294.123.704,00 atau 27,13%.

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri , Rincian Belanja Perjalanan Dinas dapat dilihat dari Tabel 5.36 berikut:

Tabel 5.36
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**				
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.618.112.750,00	45.307.310.262,00	81,46	0,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.359.289.800,00	953.971.264,00	70,18	0,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.305.141.700,00	9.701.718.572,00	85,82	23.316.040.920,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.056.364.650,00	1.250.640.863,00	60,82	0,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.221.734.000,00	5.069.200.710,00	81,48	25.672.677.047,00
	JUMLAH	**76.560.642.900,00**	**62.282.841.671,00**	**81,35**	**48.988.717.967,00**

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Ketiga dianggarkan sebesar Rp1.276.475.000,00 terealisasi

sebesar Rp1.079.335.000,00 atau 84,56% dan tahun 2020 tidak ada realisasi.

- Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat daapt dilihat pada Tabel 5.37 berikut :

Tabel 5.37
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**1.276.475.000,00**	**1.079.335.000,00**	**84,56**	**0,00**
	- Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	252.925.000,00	178.854.000,00	70,71	0,00
	- Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.023.550.000,00	900.481.000,00	87,98	0,00
	- Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00		0,00
	JUMLAH	**1.276.475.000,00**	**1.079.335.000,00**	**84,56**	**0,00**

f. Belanja Barang dan Jasa BOS dianggarkan sebesar Rp134.634.274.621,00 terealisasi sebesar Rp143.758.170.000,00 atau 106,78%.

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD dianggarkan sebesar Rp257.841.886.472,00 terealisasi sebesar Rp195.170.603.487,00 atau 75,69%.

3. Belanja Hibah pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp128.949.541.560,00 terealisasi sebesar Rp114.176.801.020,00 atau 88,54%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp41.446.073.010,00 mengalami kenaikan sebesar Rp72.730.728.010,00 atau 175,48%. Rincian realisasi pos belanja hibah dapat dilijat pada tabel 5.38 sebagai berikut :

Tabel 5.38
Belanja Hibah Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	**Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**	**3.330.000.000,00**	**3.217.642.000,00**	**96,63**	**0,00**
	- Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.330.000.000,00	3.217.642.000,00	96,63	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	- Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.330.000.000,00	3.217.642.000,00	96,63	0,00
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	**124.272.323.550,00**	**109.611.941.010,00**	**88,20**	**32.406.855.000,00**
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	**56.206.384.000,00**	**45.791.548.850,00**	**81,47**	**32.406.855.000,00**
	- Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	48.326.384.000,00	45.791.548.850,00	94,75	32.406.855.000,00
	- Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.880.000.000,00	0,00	-	0,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	**8.216.145.000,00**	**5.449.893.500,00**	**66,33**	0,00
	- Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.655.950.000,00	3.374.200.000,00	92,29	0,00
	- Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.560.195.000,00	2.075.693.500,00	45,52	0,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	**59.849.794.550,00**	**58.370.498.660,00**	**97,53**	0,00
	- Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	36.755.006.500,00	36.438.616.500,00	99,14	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	- Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	23.094.788.050,00	21.931.882.160,00	94,96	0,00
	- Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00		0,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**1.347.218.010,00**	**1.347.218.010,00**	**100,00**	**1.347.218.010,00**
	- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.347.218.010,00	1.347.218.010,00	100,00	0,00
	- Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.347.218.010,00	1.347.218.010,00	100,00	0,00
	JUMLAH	**128.949.541.560,00**	**114.176.801.020,00**	**88,54**	**33.754.073.010,00**

a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp3.330.000.000,00 terelaisasi sebesar Rp3.217.642.000,00 atau 96,63% yaitu Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat;

b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp124.272.323.550,00 terelaisasi sebesar Rp109.611.941.010,00 atau 88,20% terdiri dari:

- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp56.206.384.000,00 terealisasi sebesar Rp45.791.548.850,00 atau 81,47% terdiri dari:
  - Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp48.326.384.000,00 terealisasi sebesar Rp45.791.548.850,00 atau 94,75 %;
  - Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diangarkan sebesar Rp7.880.000.000,00 dan

tidak terealisasikan.

- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan sebesar Rp8.216.145.000,00 terealisasi sebesar Rp5.449.893.500,00 atau 66,33% terdiri dari:
  - Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan sebesar Rp3.655.950.000,00 terealisasi sebesar Rp3.374.200.000,00 atau 91,29%;
  - Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan sebesar Rp4.560.195.000,00 terealisasi sebesar Rp2.075.693.500,00 atau 45,52%.
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp59.849.794.550,00 terealisasi sebesar Rp58.370.498.660,00 atau 97,53% terdiri dari:
  - Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp36.755.006.500,00 terealisasi sebesar Rp36.438.616.500,00 atau 99,14%;
  - Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp23.094.788.050,00 terealisasi sebesar Rp21.931.882.160,00 atau 94,96%.

c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp1.347.218.010,00 terelaisasi sebesar Rp1.347.218.010,00 atau 100% yaitu belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terdiri dari:

- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Gerindra sebesar Rp261.977.100,00;
- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Demokrat sebesar Rp222.036.160,00;
- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik PERINDO sebesar

Rp42.598.858,00;

- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar Rp115.193.630,00;
- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik PDI Perjuangan sebesar Rp183.109.724,00;
- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera sebesar Rp129.056.456,00;
- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Partai Nasional Demokrat sebesar Rp108.593.168,00;
- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Partai Golongan Karya sebesar Rp150.315.676,00;
- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Partai Golongan Kebangkitan Bangsa sebesar Rp134.337.238,00.

4. Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp2.959.390.960,00 terealisasi sebesar Rp2.769.790.960,00 atau 93,59% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.429.922.053,50 mengalami penurunan sebesar Rp2.660.131.093,50 atau 48,99%. Bantuan Sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Rincian Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel 5.39 sebagai berikut :

Tabel 5.39
Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
			Rp	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	**BELANJA BANTUAN SOSIAL**	**2.959.390.960,00**	**2.769.790.960,00**	**93,59**	**5.429.922.053,50**
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	**2.959.390.960,00**	**2.769.790.960,00**	**93,59**	**5.429.922.053,50**
	- Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.959.390.960,00	2.769.790.960,00	93,59	0,00

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
				Rp	%	(Rp)
1	2		3	4	5	6
	-	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.959.390.960,00	2.769.790.960,00	93,59	0,00
	-	Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Cacat	0,00	0,00		2.283.500.000,00
	-	Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan	0,00	0,00		3.146.422.053,50
	JUMLAH		**2.959.390.960,00**	**2.769.790.960,00**	**93,59**	**5.429.922.053,50**

a. Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada invidu untuk penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan sebasaer Rp1.437.690.960,00;
b. Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada individu untuk Bantuan/Santunan Kematian Bagi Korban Meninggal Akibat Covid-19 sebesar Rp250.000.000,00;
c. Belanja Bantuan Sosial Uang Bagi Penyandang Disabilitas sebesar Rp1.082.100.000,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp317.634.916.019,00 dan terealisasi sebesar Rp281.854.752.747,00 atau 88,74% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp228.259.512.209,80 mengalami penurunan sebesar Rp53.595.240.537,20 atau 23,48%. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.40 sebagai berikut:

Tabel 5.40
Belanja Modal Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
				Rp	%	
1	2		3	4	5	6
1	**Belanja Tanah**		**6.316.725.660,00**	**6.027.811.248,00**	**95,43**	**312.406.000,00**
	a	Belanja Modal Tanah Persil	5.568.625.660,00	5.409.310.660,00	97,14	312.406.000,00
	b	Belanja Modal Tanah Non Persil	206.100.000,00	201.377.000,00	97,71	0,00
	c	Belanja Modal Lapangan	542.000.000,00	417.123.588,00	76,96	0,00
2	**Belanja Peralatan dan Mesin**		**71.057.017.009,00**	**55.248.493.450,00**	**77,75**	**35.765.508.202,00**

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
				Rp	%	
1	2		3	4	5	6
	a	Belanja Modal Alat Besar	437.407.000,00	400.003.260,00	91,45	0,00
	b	Belanja Modal Alat Angkutan	5.891.332.000,00	3.833.095.000,00	65,06	1.530.812.990,00
	c	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	361.656.800,00	333.867.000,00	92,32	6.746.100,00
	d	Belanja Modal Alat Pertanian	73.562.150,00	48.487.300,00	65,91	40.900.000,00
	e	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.771.943.919,00	1.218.944.380,00	68,79	1.053.643.800,00
	f	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	863.670.725,00	746.549.600,00	86,44	284.254.178,00
	g	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	11.347.574.780,00	7.419.479.266,00	65,38	11.972.983.748,00
	h	Belanja Modal Alat Laboratorium	11.034.438.750,00	10.575.848.300,00	95,84	881.918.544,00
	i	Belanja Modal Komputer	2.249.433.237,00	2.090.128.255,00	92,92	3.620.968.461,00
	j	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	354.464.500,00	247.789.250,00	69,91	31.638.960,00
	k	Belanja Modal Rambu-Rambu	562.882.000,00	380.303.000,00	67,56	334.871.000,00
	l	Belanja Modal Peralatan Olahraga	167.800.000,00	166.355.600,00	99,14	7.743.632.500,00
	m	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	16.215.367.953,00	17.600.712.702,00	108,54	0,00
	n	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	19.725.483.195,00	10.186.930.537,00	51,64	8.263.137.921,00
3	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**		**36.229.710.830,00**	**27.007.051.046,00**	**74,54**	**26.955.577.998,00**
	a	Belanja Modal Bangunan Gedung	30.492.386.880,00	26.310.526.046,00	86,29	26.889.509.998,00
	b	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	66.068.000,00
	c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.687.323.950,00	646.525.000,00	11,37	0,00
4	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**		**197.868.736.387,00**	**187.474.208.785,00**	**94,75**	**101.954.018.113,00**
	a	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	197.196.941.009,00	187.410.960.375,00	95,04	95.223.783.597,00
	b	Belanja Modal Bangunan Air	39.995.378,00	39.713.410,00	99,29	6.730.234.516,00
	c	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	631.800.000,00	23.535.000,00	3,73	0,00
5	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**		**6.162.726.133,00**	**6.097.188.218,00**	**98,94**	**62.953.858.896,80**
	a	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	367.883.000,00	353.697.640,00	96,14	1.838.384.220,00

NO	URAIAN		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
				Rp	%	
1	2		3	4	5	6
	b	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	c	Belanja Modal Tanaman	55.275.000,00	55.275.000,00	100,00	0,00
	d	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.972.657.426,00	5.537.566.458,00	111,36	61.115.474.676,80
	e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	766.760.707,00	150.649.120,00	19,65	0,00
6	**Belanja Modal Aset Lainnya**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.143.000,00**
	a	Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi	0,00	0,00	000	318.143.000,00
	JUMLAH		**317.634.916.019,00**	**281.854.752.747,00**	**88,74**	**228.259.512.209,80**

Adapun rincian belanja modal Pemerintah Kabupaten lebak pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp6.316.725.660,00 terealisasi sebesar Rp6.027.811.248,00 atau 95,43% terdiri dari:
   - Tanah Persil dianggarkan sebesar Rp5.568.625.660,00 terealisasi sebesar Rp5.409.310.660,00 atau 97,14% yaitu merupakan Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal;
   - Belanja Modal Tanah Non Persil dianggarkan sebesar Rp206.100.000,00 terealisasi sebesar Rp201.377.000,00 atau 97,71% yaitu merupakan Belanja Modal Tanah Kering;
   - Belanja Modal Lapangan dianggarkan sebesar Rp542.000.000,00 terealisasi sebesar Rp417.123.588,00 atau 76,96% yaitu merupakan Belanja Modal Tanah untuk Jalan.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp71.057.017.009,00 terealisasi sebesar Rp55.248.493.450,00 atau 77,75% terdiri dari:

   a. Belanja Modal Alat Besar dianggarkan sebesar Rp437.407.000,00 terealisasi sebesar Rp400.003.260,00 atau 91,45% terdiri dari:
      - Belanja Modal Alat Bantu dianggarkan sebesar Rp437.407.000,00 terealisasi sebesar Rp400.003.260,00 atau 91,45% terdiri dari:
        - Belanja Modal Pompa dianggarkan sebesar Rp45.000.000,00 terealisasi sebesar Rp43.800.000,00 atau 97,33%;

- Belanja Modal Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan dianggarkan sebesar Rp5.650.000,00 terealisasi sebesar Rp5.000.000,00 atau 88,50%;
- Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering dianggarkan sebesar Rp130.257.000,00 terealisasi sebesar Rp1290.5130.260,00 atau 99,43%;
- Belanja Modal Alat Bantu Lainnya dianggarkan sebesar Rp256.500.000,00 terealisasi sebesar Rp221.690.000,00 atau 86,43%.

b. Belanja Modal Alat Angkutan dianggarkan sebesar Rp5.891.332.000,00 terealisasi sebesar Rp3.833.095.000,00 atau 65,06% terdiri dari:

➢ Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor dianggarkan sebesar Rp5.437.032.000,00 terealisasi sebesar Rp3.426.300.000,00 atau 63,02% terdiri dari:

- Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dianggarkan sebesar Rp2.943.510.000,00 terealisasi sebesar Rp1.338.800.000,00 atau 45,48%;
- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang dianggarkan sebesar Rp270.000.000,00 terealisasi sebesar Rp250.000.000,00 atau 92,59%;
- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua dianggarkan sebesar Rp461.800.000,00 terealisasi sebesar Rp208.700.000,00 atau 45,19%;
- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga dianggarkan sebesar Rp37.000.000,00 terealisasi sebesar Rp36.900.000,00 atau 99,73%;
- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus dianggarkan sebesar Rp1.724.722.000,00 terealisasi sebesar Rp1.591.900.000,00 atau 92,30%.

➢ Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor dianggarkan sebesar Rp218.300.000,00 terealisasi sebesar Rp212.795.000,00 atau 97,48% yaitu merupakan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya;

➢ Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor dianggarkan sebesar Rp236.000.000,00 terealisasi sebesar Rp194.000.000,00 atau 82,20% yaitu merupakan Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus.

c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur dianggarkan sebesar Rp361.656.800,00 terealisasi sebesar Rp333.867.000,00 atau 92,32% terdiri

dari:

- Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin dianggarkan sebesar Rp18.307.800,00 terealisasi sebesar Rp15.543.000,00 atau 84,90% terdiri dari:
  - Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) dianggarkan sebesar Rp5.372.100,00 terealisasi sebesar Rp2.783.000,00 atau 51,80%;
  - Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools) dianggarkan sebesar Rp12.308.700,00 terealisasi sebesar Rp12.133.000,00 atau 98,57%;
  - Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja dianggarkan sebesar Rp627.000,00 terealisasi sebesar Rp627.000,00 atau 100%;
- Belanja Modal Alat Ukur dianggarkan sebesar Rp343.349.000,00 terealisasi sebesar Rp318.324.000,00 atau 92,71% terdiri dari:
  - Belanja Modal Alat Timbangan/Biara dianggarkan sebesar Rp124.449.000,00 terealisasi sebesar Rp124.449.000,00 atau 100%;
  - Belanja Modal Anak Timbangan/Biara dianggarkan sebesar Rp212.500.000,00 terealisasi sebesar Rp193.875.000,00 atau 91,24%;
  - Belanja Modal Alat Ukur Lainnya dianggarkan sebesar Rp6.400.000,00 tidak terealisasi.

d. Belanja Modal Alat Pertanian dianggarkan sebesar Rp73.562.150,00 terealisasi sebesar Rp48.487.300,00 atau 65,91% terdiri dari:
   - Belanja Modal Alat Pengolahan dianggarkan sebesar Rp73.562.150,00 terealisasi sebesar Rp48.487.300,00 atau 65,91% terdiri dari:
     - Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman dianggarkan sebesar Rp11.937.650,00 terealisasi sebesar Rp11.716.400,00 atau 98,15%;
     - Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak dianggarkan sebesar Rp19.255.500,00 terealisasi sebesar Rp19.107.900,00 atau 99,23%;
     - Belanja Modal Alat Processing dianggarkan sebesar Rp1.797.000,00 terealisasi sebesar Rp1.749.000,00 atau 97,33%;
     - Belanja Modal Alat Produksi Perikanan dianggarkan sebesar Rp129.000,00 terealisasi sebesar Rp129.000,00 atau 100%;

- Belanja Modal Alat Alat Peternakan dianggarkan sebesar Rp40.443.000,00 terealisasi sebesar Rp15.785.000,00 atau 39,03%.

e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp1.771.943.919,00 terealisasi sebesar Rp1.218.944.380,00 atau 68,79%. Terdiri dari:

- Belanja Modal Alat Kantor dianggarkan sebesar Rp559.976.650,00 terealisasi sebesar Rp486.709.560,00 atau 86,92% terdiri dari:
  - Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah dianggarkan sebesar Rp2.548.400,00 terealisasi sebesar Rp1.174.200,00 atau 46,08%;
  - Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor dianggarkan sebesar Rp50.996.000,00 terealisasi sebesar Rp9.988.000,0000 atau 19,59%;
  - Belanja Modal Alat Kantor Lainnya dianggarkan sebesar Rp506.432.250,00 terealisasi sebesar Rp475.547.360,00 atau 93,90%;
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp1.050.205.340,00 terealisasi sebesar Rp573.553.630,00 atau 54,61% terdiri dari:
  - Belanja Modal Mebel dianggarkan sebesar Rp498.406.000,00 terealisasi sebesar Rp49.054.550,00 atau 9,84%;
  - Belanja Modal Alat Pembersih dianggarkan sebesar Rp10.800.000,00 terealisasi sebesar Rp10.800.000,00 atau 100%;
  - Belanja Modal Alat Pendingin dianggarkan sebesar Rp207.661.790,00 terealisasi sebesar Rp203.768.790,00 atau 98,13%;
  - Belanja Modal Alat Dapur dianggarkan sebesar Rp4.481.200,00 terealisasi sebesar Rp4.328.600,00 atau 96,59%;
  - Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dianggarkan sebesar Rp313.546.350,00 terealisasi sebesar Rp290.728.690,00 atau 92,72%;
  - Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran dianggarkan sebesar Rp15.310.000,00 terealisasi sebesar Rp14.873.000,00 atau 97,15%.
- Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat dianggarkan sebesar Rp161.761.929,00 terealisasi sebesar Rp158.681.190,00 atau 98,10% terdiri dari:

- Belanja Modal Meja Kerja Pejabat dianggarkan sebesar Rp57.751.000,00 terealisasi sebesar Rp56.039.060,00 atau 97,04%;
- Belanja Modal Meja Rapat Pejabat dianggarkan sebesar Rp12.250.000,00 terealisasi sebesar Rp12.243.000,00 atau 99,94%;
- Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat dianggarkan sebesar Rp38.578.500,00 terealisasi sebesar Rp38.365.000,00 atau 99,45%;
- Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat dianggarkan sebesar Rp24.640.625,00 terealisasi sebesar Rp24.304.820,00 atau 98,64%;
- Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat dianggarkan sebesar Rp4.262.500,00 terealisasi sebesar Rp4.171.640,00 atau 97,87%;
- Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat dianggarkan sebesar Rp24.279.304,00 terealisasi sebesar Rp23.557.670,00 atau 97,03%.

f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan sebesar Rp863.670.725,00 terealisasi sebesar Rp746.549.600,00 atau 86,44% terdiri dari:

➢ Belanja Modal Alat Studio dianggarkan sebesar Rp765.152.925,00 terealisasi sebesar Rp699.756.600,00 atau 91,45% terdiri dari:

- Belanja Modal Peralatan Studio Audio dianggarkan sebesar Rp246.441.725,00 terealisasi sebesar Rp214.331.500,00 atau 86,97%;
- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film dianggarkan sebesar Rp289.011.700,00 terealisasi sebesar Rp261.005.100,00 atau 90,31%;
- Belanja Modal Alat Studio Lainnya dianggarkan sebesar Rp229.699.500,00 terealisasi sebesar Rp224.420.000,00 atau 97,70%;

➢ Belanja Modal Alat Komunikasi dianggarkan sebesar Rp48.517.800,00 terealisasi sebesar Rp46.793.000,00 atau 96,45%; terdiri dari:

- Belanja Modal Alat Komunikasi Telepon dianggarkan sebesar Rp3.517.800,00 terealisasi sebesar Rp1.793.000,00 atau 50,97%;
- Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional dianggarkan sebesar Rp45.000.000,00 terealisasi sebesar Rp45.000.000,00 atau 100%.

➢ Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi yaitu merupakan Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya, dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 dan tidak terealisasi.

g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp11.347.574.780,00 terealisasi sebesar Rp7.419.479.266,00 atau 65,38% terdiri dari:

- Belanja Modal Alat Kedokteran dianggarkan sebesar Rp10.907.316.680,00 terealisasi sebesar Rp7.129.455.030,00 atau 65,36% terdiri dari:
  - Belanja Modal Alat Kedokteran Umum dianggarkan sebesar Rp10.016.912.780,00 terealisasi sebesar Rp6.588.280.534,00 atau 65,77%;
  - Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi dianggarkan sebesar Rp385.574.500,00 terealisasi sebesar Rp224.078.676,00 atau 58,12%;
  - Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan dianggarkan sebesar Rp504.829.400,00 terealisasi sebesar Rp317.095.820,00 atau 62,81%.
- Belanja Modal Alat Kesehatan umum dianggarkan sebesar Rp440.258.100,00 terealisasi sebesar Rp290.024.236,00 atau 65,88% yaitu merupakan Belanja Modal Alat Kesehatan Umum lainnya.

h. Belanja Modal Alat Laboratorium dianggarkan sebesar Rp11.034.438.750,00 terealisasi sebesar Rp10.575.848.300,00 atau 95,84%. Terdiri dari:

- Belanja Modal Unit Alat Laboratorium dianggarkan sebesar Rp1.332.488.750,00 terealisasi sebesar Rp970.225.100,00 atau 72,81% terdiri dari:
  - Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia dianggarkan sebesar Rp931.516.000,00 terealisasi sebesar Rp759.082.000,00 atau 81,49%;
  - Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi dianggarkan sebesar Rp38.650.000,00 terealisasi sebesar Rp38.650.000,00 atau 100 %;
  - Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi dianggarkan sebesar Rp81.545.000,00 terealisasi sebesar Rp80.059.100,00 atau 98,18%;
  - Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis dianggarkan sebesar Rp41.834.000,00 terealisasi sebesar Rp41.834.000,00 atau 100%;
  - Belanja Modal Alat Laboratorium Lain dianggarkan sebesar Rp188.000.000,00 tidak terealisasi;
  - Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya dianggarkan sebesar

Rp50.943.750,00 terealisasi sebesar Rp50.600.000,00 atau 99,33%.

- Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah dianggarkan sebesar Rp9.701.950.000,00 terealisasi sebesar Rp9.605.623.200,00 atau 99,01% terdiri dari:
  - Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah dianggarkan sebesar Rp493.400.000,00 terealisasi sebesar Rp405.700.000,00 atau 82,23%
  - Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : PKN dianggarkan sebesar Rp800.000,00 terealisasi sebesar Rp800.000,00 atau 100%;
  - Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK dianggarkan sebesar Rp2.750.000,00 terealisasi sebesar Rp1.100.000,00 atau 40%;
  - Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya dianggarkan sebesar Rp9.205.000.000,00 terealisasi sebesar Rp9.198.023.200,00 atau 99,92%.

i. Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp2.249.433.237,00 terealisasi sebesar Rp2.090.128.255,00 atau 92,92% terdiri dari:

- Belanja Modal Komputer Unit dianggarkan sebesar Rp1.528.675.500,00 terealisasi sebesar Rp1.429.886.045,00 atau 93,54% merupakan Belanja Modal Personal Computer;
- Belanja Modal Peralatan Komputer dianggarkan sebesar Rp720.757.737,00 terealisasi sebesar Rp660.242.210,00 atau 91,60 % terdiri dari:
  - Belanja Modal Peralatan Mainframe dianggarkan sebesar Rp25.193.000,00 terealisasi sebesar Rp25.193.000,00 atau 100%;
  - Belanja Modal Peralatan Mini Computer dianggarkan sebesar Rp59.975.000,00 terealisasi sebesar Rp54.725.000,00 atau 91,25%;
  - Belanja Modal Peralatan Personal Computer dianggarkan sebesar Rp509.214.737,00 terealisasi sebesar Rp456.668.110,00 atau 89,68%;
  - Belanja Modal Peralatan Jaringan dianggarkan sebesar Rp111.207.000,00 terealisasi sebesar Rp109.907.100,00 atau 98,83%;
  - Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya dianggarkan sebesar Rp15.168.000,00 terealisasi sebesar Rp13.749.000,00 atau 90,64%.

j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja dianggarkan sebesar Rp354.464.500,00 terealisasi sebesar Rp247.789.250,00 atau 69,91% terdiri dari:
   - Belanja Modal Alat Pelindung dianggarkan sebesar Rp159.839.500,00 terealisasi sebesar Rp69.969.250,00 atau 43,77% terdiri dari:
     - Belanja Modal Baju Pengaman dianggarkan sebesar Rp80.065.000,00 terealisasi sebesar Rp5.200.000,00 atau 6,49%;
     - Belanja Modal Masker dianggarkan sebesar Rp16.887.000,00 terealisasi sebesar Rp5.796.250,00 atau 34,32%;
     - Belanja Modal Topi Kerja dianggarkan sebesar Rp5.588.250,00 terealisasi sebesar Rp5.560.250,00 atau 99,50%;
     - Belanja Modal Sepatu Lapangan dianggarkan sebesar Rp50.499.250,00 terealisasi sebesar Rp46.782.750,00 atau 92,64%;
     - Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya dianggarkan sebesar Rp6.800.000,00 terealisasi sebesar Rp6.630.000,00 atau 97,50%.
   - Belanja Modal Alat SAR dianggarkan sebesar Rp194.625.000,00 terealisasi sebesar Rp177.820.000,00 atau 91,37% terdiri dari:
     - Belanja Modal Alat Penolong dianggarkan sebesar Rp3.125.000,00 terealisasi sebesar Rp2.820.000,00 atau 90,24%;
     - Belanja Modal Alat SAR Lainnya dianggarkan sebesar Rp191.500.000,00 terealisasi sebesar Rp175.000.000,00 atau 91,38%.

k. Belanja Modal Rambu-Rambu dianggarkan sebesar Rp562.882.000,00 terealisasi sebesar Rp380.303.000,00 atau 67,56% merupakan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat yaitu Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar.

l. Belanja Modal Peralatan Olahraga dianggarkan sebesar Rp167.800.000,00 terealisasi sebesar Rp166.355.600,00 atau 99,14% terdiri dari:
   - Belanja Modal Peralatan Olahraga sebesar Rp167.800.000,00 terealisasi sebesar Rp166.355.600,00 atau 99,14% terdiri dari:
     - Belanja Modal Peralatan Permainan dianggarkan sebesar Rp74.800.000,00 terealisasi sebesar Rp73.805.600,00 atau 98,67%;
     - Belanja Modal Peralatan Senam dianggarkan sebesar Rp45.000.000,00 terealisasi sebesar Rp44.550.000,00 atau 99%;
     - Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya dianggarkan sebesar Rp48.000.000,00 terealisasi sebesar Rp48.000.000,00 atau 100%.

m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS dianggarkan sebesar Rp16.215.367.953,00 terealisasi sebesar Rp17.600.712.702,00 atau 108,54%.

n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp19.725.483.195,00 terealisasi sebesar Rp10.186.930.537,00 atau 51,64%

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp36.229.710.830,00 terealisasi sebesar Rp27.007.051.046,00 atau 74,54% terdiri dari:

a. Belanja Modal Bangunan Gedung dianggarkan sebesar Rp30.492.386.880,00 terealisasi sebesar Rp26.310.526.046,00 atau 86,29%, terdiri dari:

- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dianggarkan sebesar Rp29.890.677.730,00 terealisasi sebesar Rp25.729.161.046,00 atau 86,08% terdiri dari:
  - Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor dianggarkan sebesar Rp7.671.747.530,00 terealisasi sebesar Rp4.993.200.126,00 atau 65,09%;
  - Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp488.384.000,00 atau 97,68%;
  - Belanja Modal Bangunan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp898.074.600,00 terealisasi sebesar Rp898.074.600,00 atau 100%;
  - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah dianggarkan sebesar Rp150.000,00 terealisasi sebesar Rp145.199.500,00 atau 96,80%;
  - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dianggarkan sebesar Rp3.500.406.000,00 terealisasi sebesar Rp3.352.974.928,00 atau 95,79%
  - Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar dianggarkan sebesar Rp8.639.144.850,00 terealisasi sebesar Rp8.464.210.000,00 atau 97,98%;
  - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya dianggarkan sebesar Rp2.249.375.000,00 terealisasi sebesar Rp2.152.430.342,00 atau 95,69%;
  - Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum dianggarkan sebesar Rp4.282.433.750,00 terealisasi sebesar Rp4.140.249.550,00 atau 96,68%;
  - Belanja Modal Bangunan Parkir dianggarkan sebesar

Rp1.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.060.558.000,00 atau 96,41%;

- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya dianggarkan sebesar Rp899.496.000,00 terealisasi sebesar Rp33.880.000,00 atau 3,77%.

➢ Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal dianggarkan sebesar Rp601.709.150,00 terealisasi sebesar Rp581.365.000,00 atau 96,62% merupakan Belanja Modal Rumah Negara Golongan III.

b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 tidak terealisasi.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp5.687.323.950,00 terealisasi sebesar Rp646.525.000,00 atau 11,37%.

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dianggarkan sebesar Rp197.868.736.387,00 terealisasi sebesar Rp187.474.208.794,75 atau 94,75%, terdiri dari:

a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan dianggarkan sebesar Rp197.196.941.009,00 terealisasi sebesar Rp187.410.960.375,00 atau 95,04% terdiri dari:

➢ Belanja Modal Jalan dianggarkan sebesar Rp186.854.524.590,00 terealisasi sebesar Rp177.522.286.860,00 atau 95,01% terdiri dari:

- Belanja Modal Jalan Kabupaten dianggarkan sebesar Rp172.298.852.590,00 terealisasi sebesar Rp163.748.745.660,00 atau 95,04%;
- Belanja Modal Jalan Desa dianggarkan sebesar Rp4.926.185.000,00 terealisasi sebesar Rp4.772.899.200,00 atau 96,89%;
- Belanja Modal Jalan Lainnya dianggarkan sebesar Rp9.629.487.000,00 terealisasi sebesar Rp9.000.462.000,00 atau 93,47%.

➢ Belanja Modal Jembatan dianggarkan sebesar Rp10.342.416.419,00 terealisasi sebesar Rp9.888.673.515,00 atau 95,61%, terdiri dari:

- Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten dianggarkan sebesar Rp9.447.392.857,00 Rp terealisasi sebesar Rp9.010.861.000,00 atau 95,38%;
- Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa dianggarkan sebesar Rp895.023.562,00 terealisasi sebesar Rp877.812.515,00 atau 98,08%.

b. Belanja Modal Bangunan Air dianggarkan sebesar Rp39.995.378,00 terealisasi sebesar Rp39.713.410,00 atau 99,29% merupakan Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku;

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp631.800.000,00 terealisais sebesar Rp23.535.000,00 atau 3,73%.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp6.162.726.133,00 terealisasi sebesar Rp6.097.188.218,00 atau 98,94%, terdiri dari:

   a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp367.883.000,00 terealisasi sebesar Rp353.697.640,00 atau 96,14%, terdiri dari:

      - Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak dianggarkan sebesar Rp93.150.000,00 terealisasi sebesar Rp84.220.640,00 atau 90,41% merupakan Belanja Modal Buku Umum;
      - Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro dianggarkan sebesar Rp274.733.000,00 terealisasi sebesar Rp269.477.000,00 atau 98,09% merupakan Belanja Modal Audio Visual.

   b. Belanja Modal Tanaman dianggarkan sebesar Rp55.275.000,00 terealisasi Rp55.275.000,00 atau 100%;

   c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS dianggarkan sebesar Rp4.972.657.426,00 terealisasis sebesar Rp5.537.566.458,00 atau 111,36%;

   d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD dianggarkan sebesar Rp766.760.707,00 terealisasi sebesar Rp150.649.120,00 atau 19,65%.

3. Belanja Tidak Terduga

Akun Belanja Tidak Terduga diperuntukkan bagi keperluan penanganan atas kerusakan sarana prasarana publik yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Daerah Lebak. Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp29.014.066.540,00 dan terealisasi sebesar Rp24.421.516.341,00 atau 84,17%. Rincian realisasi Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada Tabel 5.41 berikut:

Tabel 5.41
Belanja Tidak Terduga Kabupaten Lebak Tahun 2021 Dan 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Penanganan Darurat Pengungsian Ancaman Longsor di Desa Gunungwangun Kec. Cibeber (Biaya Dapur Umum dan BBM selama 3 bulan)	0,00	161.175.000,00
2	Penanganan Normalisasi Sungai Cilegong Desa Cidahu Kec. Banjarsari Akibat Bencana Alam Longsor	0,00	156.560.000,00
3	Penanganan Darurat Bencana Pergerakan Tanah Di Desa Sudamanik Kec. Cimarga (Biaya Posko Dapur 2 bulan dan BBM)	0,00	152.540.000,00
4	Penanganan Darurat Material Longsor Akibat Bencana Banjir Bandang dan Longsor di Kec. Sajira, Muncang, Sobang	0,00	30.895.000,00
5	Bantuan Stimulan Relokasi Mandiri Akibat Bencana Alam Pergerakan Tanah Di Kp. Jampang Cikuning RT. 01, RT. 02 RW 09 Ds. Sudamanik Kecamatan Cimarga Kepada 73 (Tujuh Puluh Tiga) Penerima Bantuan	0,00	1.595.000.000,00
6	Mitigasi Kekeringan Dalam Rangka Menyelamatkan Pertanaman Padi Pada Musim Tanam 2019 (Periode April - September 2019)	0,00	224.330.000,00
7	Penanganan Pasca Bencana Banjir Bandang Di Kecamatan Sajira	0,00	2.442.008.000,00
8	Penanganan Krisis Air Bersih Bencana Alam Kekeringan Di Kabupaten Lebak	0,00	148.800.000,00
9	Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana Kebakaran permukiman di Kampung Leuwidahu Tarikolot Desa Bojongmenteng Kec. Leuwidamar	0,00	237.200.000,00
10	Pengembalian sisa BTT	0,00	(2.447.221.141,00)
I	**BTT UMUM/MURNI**	**0,00**	**8.313.772.349,00**
1	Penanggulangan Darurat Kejadian Bencana Alam Tanah Longsor	0,00	1.006.503.000,00
2	Pengembalian Atas Kelebihan Setoran Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lebak	0,00	3.200.000,00
3	Pengembalian Atas Kelebihan Setoran Kepada Rumah Sakit Misi Lebak	0,00	10.634.000,00
4	Belanja Logistik Bagi Masyarakat Dipengungsian Korban Bencana Alam Banjir Bandang Dan Tanah Longsor Tahun 2020	0,00	564.720.000,00
5	Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Penanggulangan Darurat Kejadian Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor Tahun 2020	0,00	1.195.129.750,00
6	Penanganan Darurat Bencana Longsor (Relokasi Jalur Jalan Di Kadubitung - Bujal)	0,00	328.330.000,00
7	Pengembalian Kelebihan Setoran Yang Masuk Ke Rekening Kas Umum Daerah	0,00	3.130.000,00
8	Pemindahbukuan SILPA Dana Non Kapitasi Jaminan KesehatanNasional (JKN) TA. 2019 Ke Rekening Puskesmas Selaku BLUD Kepada 42 Puskesmas	0,00	1.632.435.500,00
9	Penanggulangan Darurat Kejadian Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor Tahun 2020	0,00	500.000.000,00
10	Pengembalian Kepada PT. Taspen Cabang Serang Atas Double Pemindahbukuan Pada Rekening Kas Umum Daerah	0,00	219.799,00
11	Pengembalian SILPA Dana Desa TA. 2019	0,00	2.278.347.800,00
12	Penanggulangan Darurat Bencana Jembatan Rusak Dan JalanLongsor Di Kecamatan Cibeber	0,00	791.122.500,00
II	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**15.893.098.840,00**	**3.076.696.000,00**
	(BPBD)		

NO	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Tambahan Uang Belanja Tidak Terduga Untuk Penunjang Operasional Percepatan Penanganan COVID-19 Tambahan Uang Belanja Tidak Terduga Untuk Penunjang	0,00	1.248.800.000,00
2	Operasional Percepatan Penanganan COVID-19 (Uang Pendampingan Hukum)	0,00	101.696.000,00
3	Penunjang Operasional Percepatan Penanganan COVID-19 Upaya Meningkatkan Kesiapsiagaan Penanggulangan Dampak Penyebaran Pandemi COVID-19 Di Kab. Lebak	0,00	1.290.500.000,00
4	(Belanja Logistik Bagi Masyarakat Yang Melakukan Isolasi Mandiri Dampak COVID-19)	0,00	176.700.000,00
5	Belanja Logistik Bagi Masyarakat yang Terdampak Covid- 19 yang melakukan Isolasi Mandiri	0,00	259.000.000,00
6	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Stimulan Bencana Alam Tanah Longsor Di Kp. Cikapol Desa Karangnunggal Kec. Cirinten	130.000.000,00	0,00
7	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Infrastruktur Bencana Alam ; Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat sebesar Rp. 128.018.500,00 dan Paket Pekerjaan Jembatan Cikidang Kp. Cisungsang Desa Situmulya sebesar Rp.3.309.886.450,00	3.437.904.950,00	0,00
8	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Infrastruktur Bencana Alam ; Kegiatan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat, Paket Pekerjaan Jalan Cileles-Posko sebesar Rp.195.587.000,00, Paket Pekerjaan Jalan Leuwidamr-Gajrug (Kp. Warunglame) sebesar Rp.159.369.000,00, Paket Pekerjaan sebesar Rp.636.886.000,00, Paket Pekerjaan Jalan Sampay - Gunungkencana (Sampay-Muaradua) sebesar Rp.58.166.000,00 dan Paket Pekerjaan Jalan Gunungkencana-Banjarsari sebesar Rp.227.769.000,00	1.277.727.000,00	0,00
9	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Belanja Pengadaan Logistik Persediaan Bagi Masyarakat Yang Melakukan Isolasi Mandiri Dampak Covid-19 Selama 3 (tiga) Bulan, yaitu Bulan Februari sampai dengan April 2021	396.550.000,00	0,00
10	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Infrastruktur Bencana Alam ; Kegiatan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat, Paket Pekerjaan Jalan Kadubitung-Bujal sebesar Rp.670.672.000,00, dan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jembatan Cikidang, Desa Pasirkuray, Kecamatan Cibeber sebesar Rp.39.700.000,00	710.372.000,00	0,00
11	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Infrastruktur Bencana Alam ; Kegiatan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat, yang dilaksanakan oleh CV. RAJA MULIA Paket Pekerjaan Jalan Sampay - Gunungkencana (Sampay-Muaradua) STA.11+200	747.143.000,00	0,00
12	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Infrastruktur Bencana Alam ; Kegiatan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat, yang dilaksanakan oleh PT. BUMI KARYA SARANAMAS Paket Pekerjaan Jembatan Cikidang Ds. Pasirkuray	3.627.026.550,00	0,00
13	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Infrastruktur Bencana Alam ; Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gunung Gebas Desa Banjar Irigasi Kec. Lebakgedong (Panjang 800 m)	722.155.000,00	0,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)
1	2	3	4
14	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Infrastruktur Bencana Alam ; Kegiatan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat, Pekerjaan Jalan Kp. Lebak Sembada Desa Citorek Kidul Kec. Cibeber (Panjang 40 m)	113.604.000,00	0,00
15	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana / Tanggap Darurat ; Pekerjaan Jalan Rangkasbitung - Sajir STA.11+200, yang dilaksanakan oleh CV MESAYU CITRA WISESA yang berlokasi di Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak	805.816.000,00	0,00
16	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana / Tanggap Darurat ; Pekerjaan Jalan Cigoong - Pasir Melati STA.2+240, yang dilaksanakan oleh CV. RAJA MULYA yang berlokasi di Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak	413.239.000,00	0,00
17	Pembayaran BTT Untuk Penanganan Bencana/Tanggap Darurat ; Pekerjaan Jalan Leuwidamar-Gajrug (Kadubitung-Gajrug) Ds. Sukasari (CV. Makmur Jaya) dan Pekerjaan Jalan Desa Cuping-Nangela Desa Haurgajrug (CV. Raja Mulya) yang berlokasi di Kec. Cipanas Kab. Lebak	201.913.000,00	0,00
18	Pembayaran Dana BTT Untuk Penanggulangan Covid-19 Kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka Penanganan Pasien Covid-19	112.500.000,00	0,00
19	Pembayaran BTT Untuk Penanganan Bencana/Tanggap Darurat; Penaganan Bencana Alam Longsor;Kegiatan Rehabilitasi Jalan Majasari-Ciparasi Kecamatan Sobang Kab. Lebak	140.272.000,00	0,00
20	Pembayaran Dana BTT Untuk Permohonan Penambahan Anggaran Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kab. Lebak Tahun Anggaran 2021	637.185.340,00	0,00
21	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana Banjir Jembatan Cijoro Desa Rangkasbitung Timur Ruas Jalan Cibungur (Sabagi) – Sindangangi	1.128.027.000,00	0,00
22	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana / Tanggap Darurat ; Pekerjaan Rehabilitasi dan Pengembalian Fungsi Jaringan Irigasi Gunung Gebas yang berlokasi di Desa Banjaririgasi Kec. Lebakgedong Kab. Lebak.	63.717.000,00	0,00
23	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana / Tanggap Darurat ; Pekerjaan Rehabilitasi Laboratorium IPA SMPN I Cibeber Kab. Lebak	44.504.545,00	0,00
24	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana / Tanggap Darurat ; Penanganan Kerusakan Alat pada Lebak Data Center yang disebabkan oleh hujan lebat yang disertai petir.	328.495.455,00	0,00
25	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana Banjir Kota Rangkasbitung (sebanyak 5 lokasi yang tersebar di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak)	854.947.000,00	0,00
III	**RSUD Dr. Adjidarmo**	**1.606.662.926,00**	**2.346.873.000,00**
1	Insentif Tenaga Kesehatan BLUD RSUD dr.Adjidarmo	0,00	2.346.873.000,00
2	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (BansosTT) Untuk Biaya Pengobatan dan Perawatan Pasien di RSUD Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak bulan Desember Tahun Anggaran 2020 s/d Nopember Tahun Anggaran 2021	1.606.662.926,00	0,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)
1	2	3	4
IV	**DINAS KESEHATAN**	**2.089.502.125,00**	**25.840.963.000,00**
1	Penyediaan sarana prasarana kesehatan penanganan COVID-19 bagi Masyarakat,Tempat Umum dan Seluruh Petugas Kesehatan Di Kab.Lebak (APD Lengkap bagi petugas kesehatan, disinpektan, penyemprot, multivitamin, Rafid Test, dll)	0,00	10.825.310.000,00
2	Biaya Percepatan Penanganan COVID-19 di Kab. Lebak Bagi Masyarakat, Tempat Umum, Petugas Kesehatan Di 42 Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah Dan Swasta	0,00	14.634.036.000,00
3	Penanggulangan Bencana Nasional COVID-19 UntukTempat Isolasi Mandiri Bagi Pasien OTG/ Pasien Dengan Gejala Ringan	0,00	381.617.000,00
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanggulangan Covid-19 untuk Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Rumah Isolasi; Makan dan Minum Rumah Isolasi; Belanja Internet Rumah Isolasi; Biaya Listrik Rumah Isolasi; Belanja Pembuangan Sampah Medis.	979.539.011,00	0,00
5	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanggulangan Covid-19 untuk Ruang Laboratorium Covid-19 pada Gedung Labkesda Kab. Lebak antara lain : Fisik Bangunan Ruangan Laboratorium PCR; Interior Ruang Laboratorium; Instalasi Pipa Air Bersih/Air Limbar; Instalasi Lampu dan AC; dan Jasa Tenaga Kerja.	165.000.000,00	0,00
6	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanggulangan Covid-19 untuk Pembayaran Anggaran Makan Minum dan BHP Labolatorium PCR Bulan Februari s.d April 2021	97.998.830,00	0,00
7	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Jasa/Insentif/Honorarium Tenga Kesehatan Relawan dan BKO di RSUD Dr. Adjidarmo dan Labkesda Kab. Lebak (Insentif Tenaga Kesehatan) Penanganan Covid-19 Kegiatan BTT PPKM Darurat	846.964.284,00	0,00
V	**DINAS SOSIAL**	**1.620.000.000,00**	**92.123.109.500,00**
1	Dana Operasional Dinas Sosial Untuk Kegiatan Input, Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Warga Terdampak COVID-19	0,00	85.000.000,00
2	Penanganan Masyarakat Terdampak COVID-19 Tahap I Bulan April 2020 Kepada 32.770 KPM	0,00	75.598.303.500,00
3	Kegiatan Pendampingan, Monitoring, Input, Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Sosial (BST) Untuk Warga Terdampak Wabah Covid-19	0,00	403.000.000,00
4	Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap VI dan Tahap VII Kepada 26.156 KPM		16.036.806.000,00
5	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (BansosTT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021	188.000.000,00	0,00
6	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana (BansosTT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 (Bencana Kebakaran di Desa Margamulya Kec. Cileles dan Desa Cikaratuan Kec. Cigemblong)	15.000.000,00	0,00
7	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana (BansosTT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kab. Lebak Tahun Anggaran 2021 (303 Penerima Bantuan tersebar di beberapa Desa dan Kecamatan di Kab. Lebak)	1.032.000.000,00	0,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)
1	2	3	4
8	Pembayaran Dana BTT Untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana (BansosTT) Bantuan Santunan Kematian Bagi Korban Meninggal Akibat Covid-19 di Kab. Lebak (72 Penerima Bantuan tersebar di beberapa Desa dan Kecamatan di Kab. Lebak)	360.000.000,00	0,00
9	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Bantuan Sosial Tidak Terduga (BansosTT) Kejadian Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 (Bencana Kebakaran di Desa Lebak Asih Kecamatan Curugbitung	25.000.000,00	0,00
VI	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	**0,00**	**6.132.600.000,00**
1	Bantuan Sosial Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Lebak. Tahap I Sebanyak 366 UMKM	0,00	3.148.200.000,00
2	Penerima Bantuan Modal Usaha Untuk Pelaku UsahaMikro Kecil dan Menengah Terdampak COVID-19 Di Kab. Lebak Sebanyak 3.622 x @ Rp. 1.000.000	0,00	2.984.400.000,00
VII	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**1.469.821.500,00**	**7.836.902.750,00**
1	Kebutuhan Belanja Tahap I Kegiatan Penegakkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi COVID-19	0,00	1.054.996.200,00
2	Kegiatan Penegakkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi COVID-19 (Kejari Lebak Tahap I)	0,00	3.034.580.300,00
3	Penegakkan Peraturan Bupati Nomor 84 Th. 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Penanganan COVID-19 Sebagaimana Di Ubah Menjadi Peraturan BupatiNomor 87 Th. 2020	0,00	3.012.551.500,00
4	Penegakkan Hukum dan Pendisiplinan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Penetapan Perpanjangan PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19	0,00	734.774.750,00
5	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanggulangan Covid-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penegakkan Hukum dan Pendisiplinan, Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kab. Lebak	197.580.000,00	0,00
6	Pembayaran Dana BTT Untuk Penanggulangan Covid-19 Kegiatan Bidang Penegakkan Hukum dan Pendisiplinan, Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kab. Lebak pada masa PPKM Darurat	576.163.000,00	0,00
7	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanggulangan Covid-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penegakkan Hukum dan Pendisiplinan, Satuan Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kab. Lebak pada masa PPKM Level 4 dan 3 di Kabupaten Lebak	122.045.000,00	0,00
8	Pembayaran Dana BTT Untuk Penanggulangan Covid-19 Kegiatan Bidang Penegakkan Hukum dan Pendisiplinan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kab. Lebak pada masa PPKM Level 3 dan 2	515.523.500,00	0,00
9	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanggulangan Covid-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Penegakkan Hukum dan Pendisiplinan, Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab. Lebak pada Masa PPKM Level Bulan Oktober, Nopember dan Desember 2021	58.510.000,00	0,00
VII	**DINAS PERHUBUNGAN**	**181.900.200,00**	**295.416.200,00**

NO	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Pelaksanaan Kegiatan Peraturan Bupati Lebak Nomor84 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Penanganan COVID-19	0,00	295.416.200,00
2	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanggulangan Covid-19 untuk Pelaksanaan Kegiatan Pos Penyekatan Peniadaan Mudik Idul Fitri Tahun 1442 H Antisipasi Penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Leba	181.900.200,00	0,00
VIII	**PIHAK LAINNYA**	**1.560.530.750,00**	**0,00**
1	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian atas Kelebihan Setoran kepada PT. Amara Cisadane atas Pembayaran Retribusi Laboratorium Lingkungan	868.750,00	0,00
2	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian atas Kelebihan Setoran kepada PT. Mandau Jaya Kontrindo atas Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi	6.906.000,00	0,00
3	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian atas Kesalahan Setoran Yang Masuk Ke Rekening Kas Umum Daerah	975.000,00	0,00
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian atas Kesalahan Setoran Yang Masuk Ke Rekening Kas Umum Daerah	1.080.000,00	0,00
5	Pembayaran Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2021	1.550.701.000,00	0,00
JUMLAH		**24.421.516.341,00**	**145.966.332.799,00**

5.1.1.3 Transfer

Akun Transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten Lebak ke entitas pelaporan lain. Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Lebak menganggarkan untuk Transfer sebesar Rp423.528.068.120,00 dan terealisasi sebesar Rp421.278.285.118,00 atau 99,47%, jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp409.526.945.900,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.751.339.218,00 atau 2,87%. Rincian anggaran dan realisasi Transfer Tdapat dilihat pada tabel 5.42 berikut:

Tabel 5.42
Transfer Kabupaten Lebak Tahun 2021 Dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
1	**Belanja Bagi Hasil**	**15.998.934.500,00**	**15.998.934.500,00**	**100,00**	**13.846.174.700,00**
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	14.325.900.332,00	14.325.900.332,00	100,00	12.179.632.067,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	1.673.034.168,00	1.673.034.168,00	100,00	1.666.542.633,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
	Kepada Pemerintah Desa				
2	**Transfer Bantuan Keuangan**	**407.529.133.620,00**	**405.279.350.618,00**	**99,45**	**395.680.771.200,00**
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	407.529.133.620,00	405.279.350.618,00	99,45	395.680.771.200,00
JUMLAH		**423.528.068.120,00**	**421.278.285.118,00**	**99,47**	**409.526.945.900,00**

Transfer bagi hasil pada Tahun Anggaran 2021 yaitu Transfer Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa yang dianggarkan sebesar Rp15.998.934.500,00 terealisasi sebesar Rp15.998.934.500,00 atau 100%, jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Bagi Hasil Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp13.846.174.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.152.759.800,00 atau 15,55%.

Transfer bagi hasil terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa, dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Kabupaten Lebak Tahun 2021 terealisasi sebesar sebesar Rp14.325.900.332,00 atau 100%, mengalami kenaikan sebesar Rp2.146.268.265,00 atau 17,62% jika dibandingkan dengan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2020 yaitu sebesar Rp12.179.632.067,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dapat dilihat pada tabel 5.43 berikut :

Tabel 5.43
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Malingping	**619.191.000,00**	**619.191.000,00**	**100**	**590.583.160,00**
1	Desa Cilangkahan	42.095.000,00	42.095.000,00	100	39.252.940,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
2	Desa Pagelaran	54.833.000,00	54.833.000,00	100	51.904.940,00
3	Desa Sukaraja	37.952.000,00	37.952.000,00	100	41.156.940,00
4	Desa Malingping Utara	51.599.000,00	51.599.000,00	100	42.251.940,00
5	Desa Bolang	36.154.000,00	36.154.000,00	100	51.929.940,00
6	Desa Cipeundeuy	41.636.000,00	41.636.000,00	100	42.789.940,00
7	Desa Rahong	36.480.000,00	36.480.000,00	100	36.246.940,00
8	Desa Kadujajar	62.088.000,00	62.088.000,00	100	41.827.940,00
9	Desa Kersaratu	47.412.000,00	47.412.000,00	100	43.198.940,00
10	Desa Malingping Selatan	46.768.000,00	46.768.000,00	100	41.798.940,00
11	Desa Sumberwaras	43.884.000,00	43.884.000,00	100	41.588.940,00
12	Desa Sukamanah	37.400.000,00	37.400.000,00	100	47.150.940,00
13	Desa Senanghati	43.926.000,00	43.926.000,00	100	36.937.940,00
14	Desa Sangiang	36.964.000,00	36.964.000,00	100	32.545.940,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Panggarangan	**526.366.000,00**	**526.366.000,00**	**100**	**429.889.340,00**
1	Desa Panggarangan	52.644.000,00	52.644.000,00	100	39.642.940,00
2	Desa Jatake	34.571.000,00	34.571.000,00	100	37.936.940,00
3	Desa Sogong	56.120.000,00	56.120.000,00	100	40.962.940,00
4	Desa Cimandiri	33.123.000,00	33.123.000,00	100	40.663.940,00
5	Desa Gununggede	47.976.000,00	47.976.000,00	100	41.330.940,00
6	Desa Situregen	51.775.000,00	51.775.000,00	100	38.229.940,00
7	Desa Mekarjaya	59.849.000,00	59.849.000,00	100	42.521.940,00
8	Desa Sindangratu	59.280.000,00	59.280.000,00	100	42.264.940,00
9	Desa Hegarmanah	34.131.000,00	34.131.000,00	100	33.424.940,00
10	Desa Sukajadi	47.623.000,00	47.623.000,00	100	35.951.940,00
11	Desa Cibarengkok	49.274.000,00	49.274.000,00	100	36.957.940,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bayah	**603.178.000,00**	**603.178.000,00**	**100**	**530.334.340,00**
1	Desa Bayah Barat	52.836.000,00	52.836.000,00	100	47.908.940,00
2	Desa Sawarna	63.053.000,00	63.053.000,00	100	62.549.940,00
3	Desa Cidikit	61.071.000,00	61.071.000,00	100	49.911.940,00
4	Desa Suwakan	63.617.000,00	63.617.000,00	100	48.654.940,00
5	Desa Cimancak	42.647.000,00	42.647.000,00	100	42.658.940,00
6	Desa Darmasari	48.222.000,00	48.222.000,00	100	49.868.940,00
7	Desa Bayah Timur	45.327.000,00	45.327.000,00	100	39.402.940,00
8	Desa Cisuren	44.218.000,00	44.218.000,00	100	41.325.940,00
9	Desa Pasirgombong	39.615.000,00	39.615.000,00	100	35.008.940,00
10	Desa Sawarna Timur	60.284.000,00	60.284.000,00	100	52.477.940,00
11	Desa Pamubulan	82.288.000,00	82.288.000,00	100	60.564.940,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cipanas	**583.980.000,00**	**583.980.000,00**	**100**	**470.611.627,00**
1	Desa Cipanas	40.993.000,00	40.993.000,00	100	32.631.940,00
2	Desa Girilaya	38.499.000,00	38.499.000,00	100	31.364.940,00
3	Desa Malangsari	38.971.000,00	38.971.000,00	100	32.087.940,00
4	Desa Bintangresmi	41.883.000,00	41.883.000,00	100	33.099.940,00
5	Desa Talagahiyang	35.290.000,00	35.290.000,00	100	29.611.407,00
6	Desa Luhurjaya	48.209.000,00	48.209.000,00	100	36.303.940,00
7	Desa Haurgajrug	61.296.000,00	61.296.000,00	100	43.311.940,00
8	Desa Giriharja	45.674.000,00	45.674.000,00	100	35.084.940,00
9	Desa Sukasari	38.089.000,00	38.089.000,00	100	39.227.940,00
10	Desa Jayapura	38.478.000,00	38.478.000,00	100	31.274.940,00
11	Desa Sipayung	43.243.000,00	43.243.000,00	100	33.802.940,00
12	Desa Bintangsari	36.291.000,00	36.291.000,00	100	30.159.940,00
13	Desa Pasirhaur	37.592.000,00	37.592.000,00	100	30.844.940,00
14	Desa Harumsari	39.472.000,00	39.472.000,00	100	31.803.940,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Muncang	**435.189.000,00**	**435.189.000,00**	**100**	**361.619.280,00**
1	Desa Pasireurih	40.194.000,00	40.194.000,00	100	32.210.940,00
2	Desa Ciminyak	45.423.000,00	45.423.000,00	100	34.844.940,00
3	Desa Muncang	37.533.000,00	37.533.000,00	100	30.857.940,00
4	Desa Leuwicoo	35.064.000,00	35.064.000,00	100	29.515.940,00
5	Desa Sindangwangi	34.269.000,00	34.269.000,00	100	29.085.940,00
6	Desa Cikarang	35.721.000,00	35.721.000,00	100	29.858.940,00
7	Desa Sukanagara	35.122.000,00	35.122.000,00	100	29.545.940,00
8	Desa Pasirnangka	37.221.000,00	37.221.000,00	100	30.647.940,00
9	Desa Jagaraksa	33.650.000,00	33.650.000,00	100	28.773.940,00
10	Desa Tanjungwangi	34.296.000,00	34.296.000,00	100	29.112.940,00
11	Desa Mekarwangi	34.203.000,00	34.203.000,00	100	28.996.940,00
12	Desa Girijagabaya	32.493.000,00	32.493.000,00	100	28.166.940,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Leuwidamar	**520.339.000,00**	**520.339.000,00**	**100**	**405.777.280,00**
1	Desa Kanekes	25.281.000,00	25.281.000,00	100	24.380.940,00
2	Desa Cisimeut	49.761.000,00	49.761.000,00	100	37.220.940,00
3	Desa Cibungur	55.989.000,00	55.989.000,00	100	40.503.940,00
4	Desa Leuwidamar	48.476.000,00	48.476.000,00	100	36.329.940,00
5	Desa Lebakparahiang	45.665.000,00	45.665.000,00	100	34.846.940,00
6	Desa Sangkanwangi	44.308.000,00	44.308.000,00	100	34.365.940,00
7	Desa Nayagati	45.535.000,00	45.535.000,00	100	34.891.940,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
8	Desa Bojongmenteng	44.353.000,00	44.353.000,00	100	34.362.940,00
9	Desa Margawangi	35.920.000,00	35.920.000,00	100	29.964.940,00
10	Desa Wantisari	37.105.000,00	37.105.000,00	100	30.579.940,00
11	Desa Jalupangmulya	44.000.000,00	44.000.000,00	100	34.164.940,00
12	Desa Cisimeut Raya	43.946.000,00	43.946.000,00	100	34.163.940,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bojongmanik	**355.294.000,00**	**355.294.000,00**	**100**	**308.516.460,00**
1	Desa Bojongmanik	40.861.000,00	40.861.000,00	100	39.349.940,00
2	Desa Harjawana	43.671.000,00	43.671.000,00	100	34.028.940,00
3	Desa Kadurahayu	37.022.000,00	37.022.000,00	100	30.541.940,00
4	Desa Cimayang	48.253.000,00	48.253.000,00	100	36.350.940,00
5	Desa Parakanbeusi	35.880.000,00	35.880.000,00	100	39.282.940,00
6	Desa Keboncau	38.786.000,00	38.786.000,00	100	33.481.940,00
7	Desa Mekarmanik	43.745.000,00	43.745.000,00	100	36.555.940,00
8	Desa Mekar Rahayu	34.571.000,00	34.571.000,00	100	30.752.940,00
9	Desa Pasirbitung	32.505.000,00	32.505.000,00	100	28.170.940,00
	Pemerintahan Desa di Kec. Gunungkencana	**498.939.000,00**	**498.939.000,00**	**100**	**403.478.280,00**
1	Desa Gunungkencana	45.033.000,00	45.033.000,00	100	34.491.940,00
2	Desa Cimanyangray	45.731.000,00	45.731.000,00	100	35.275.940,00
3	Desa Gunungkendeng	32.042.000,00	32.042.000,00	100	30.508.940,00
4	Desa Cisampang	40.060.000,00	40.060.000,00	100	32.138.940,00
5	Desa Ciginggang	45.869.000,00	45.869.000,00	100	35.177.940,00
6	Desa Ciakar	48.738.000,00	48.738.000,00	100	36.699.940,00
7	Desa Cicaringin	42.976.000,00	42.976.000,00	100	39.534.940,00
8	Desa Bulakan	38.329.000,00	38.329.000,00	100	31.257.940,00
9	Desa Sukanegara	39.067.000,00	39.067.000,00	100	31.587.940,00
10	Desa Bojongkoneng	40.091.000,00	40.091.000,00	100	32.110.940,00
11	Desa Kramatjaya	45.054.000,00	45.054.000,00	100	34.712.940,00
12	Desa Tanjungsari Indah	35.949.000,00	35.949.000,00	100	29.979.940,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Banjarsari	**812.293.000,00**	**812.293.000,00**	**100**	**650.044.800,00**
1	Desa Kerta	37.772.000,00	37.772.000,00	100	30.880.940,00
2	Desa Bojongjuruh	45.370.000,00	45.370.000,00	100	34.924.940,00
3	Desa Leuwiipuh	41.787.000,00	41.787.000,00	100	33.041.940,00
4	Desa Lebakkeusik	37.781.000,00	37.781.000,00	100	30.941.940,00
5	Desa Cilegongilir	44.917.000,00	44.917.000,00	100	34.695.940,00
6	Desa Keusik	44.695.000,00	44.695.000,00	100	34.514.940,00
7	Desa Cibaturkeusik	35.881.000,00	35.881.000,00	100	29.958.940,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
8	Desa Kumpay	42.543.000,00	42.543.000,00	100	33.439.940,00
9	Desa Jalupanggirang	40.324.000,00	40.324.000,00	100	32.276.940,00
10	Desa Bendungan	42.785.000,00	42.785.000,00	100	33.529.940,00
11	Desa Kertaraharja	44.347.000,00	44.347.000,00	100	36.036.940,00
12	Desa Cisampih	42.041.000,00	42.041.000,00	100	33.177.940,00
13	Desa Gunungsari	38.936.000,00	38.936.000,00	100	31.536.940,00
14	Desa Tamansari	44.414.000,00	44.414.000,00	100	34.343.940,00
15	Desa Cidahu	45.941.000,00	45.941.000,00	100	35.243.940,00
16	Desa Ciruji	40.225.000,00	40.225.000,00	100	32.239.940,00
17	Desa Kaduhauk	32.145.000,00	32.145.000,00	100	27.982.940,00
18	Desa Labanjaya	37.160.000,00	37.160.000,00	100	30.615.940,00
19	Desa Umbuljaya	41.587.000,00	41.587.000,00	100	32.939.940,00
20	Desa Kertarahayu	31.642.000,00	31.642.000,00	100	27.719.940,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cileles	**511.160.000,00**	**511.160.000,00**	**100**	**430.634.280,00**
1	Desa Pasindangan	27.943.000,00	27.943.000,00	100	34.452.940,00
2	Desa Parungkujang	30.579.000,00	30.579.000,00	100	41.505.940,00
3	Desa Cileles	48.495.000,00	48.495.000,00	100	36.420.940,00
4	Desa Cikareo	44.126.000,00	44.126.000,00	100	34.376.940,00
5	Desa Cipadang	50.172.000,00	50.172.000,00	100	37.309.940,00
6	Desa Gumuruh	37.663.000,00	37.663.000,00	100	37.071.940,00
7	Desa Prabugantungan	43.708.000,00	43.708.000,00	100	34.044.940,00
8	Desa Daroyon	38.152.000,00	38.152.000,00	100	31.089.940,00
9	Desa Margamulya	48.104.000,00	48.104.000,00	100	36.359.940,00
10	Desa Mekarjaya	48.037.000,00	48.037.000,00	100	36.324.940,00
11	Desa Kujangsari	45.544.000,00	45.544.000,00	100	35.032.940,00
12	Desa Banjarsari	48.637.000,00	48.637.000,00	100	36.642.940,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cimarga	**705.415.000,00**	**705.415.000,00**	**100**	**559.151.980,00**
1	Desa Sarageni	42.279.000,00	42.279.000,00	100	33.288.940,00
2	Desa Gununganten	44.378.000,00	44.378.000,00	100	34.428.940,00
3	Desa Sudamanik	46.815.000,00	46.815.000,00	100	35.672.940,00
4	Desa Tambak	42.809.000,00	42.809.000,00	100	34.083.940,00
5	Desa Cimarga	48.892.000,00	48.892.000,00	100	36.682.940,00
6	Desa Karyajaya	41.527.000,00	41.527.000,00	100	32.908.940,00
7	Desa Margajaya	49.569.000,00	49.569.000,00	100	36.786.940,00
8	Desa Jayamanik	43.374.000,00	43.374.000,00	100	33.912.940,00
9	Desa Margaluyu	33.555.000,00	33.555.000,00	100	28.634.940,00
10	Desa Margatirta	42.765.000,00	42.765.000,00	100	33.556.940,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
11	Desa Intenjaya	40.774.000,00	40.774.000,00	100	32.415.940,00
12	Desa Mekarjaya	46.324.000,00	46.324.000,00	100	35.367.940,00
13	Desa Jayasari	41.240.000,00	41.240.000,00	100	32.964.940,00
14	Desa Girimukti	32.629.000,00	32.629.000,00	100	28.255.940,00
15	Desa Sangkanmanik	37.332.000,00	37.332.000,00	100	30.705.940,00
16	Desa Sangiangjaya	33.880.000,00	33.880.000,00	100	28.893.940,00
17	Desa Mekarmulya	37.273.000,00	37.273.000,00	100	30.588.940,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sajira	**596.693.000,00**	**596.693.000,00**	**100**	**530.711.100,00**
1	Desa Maraya	32.934.000,00	32.934.000,00	100	32.125.940,00
2	Desa Sajira	42.516.000,00	42.516.000,00	100	33.116.940,00
3	Desa Sukarame	40.735.000,00	40.735.000,00	100	38.367.940,00
4	Desa Calungbungur	31.773.000,00	31.773.000,00	100	37.322.940,00
5	Desa Parungsari	42.905.000,00	42.905.000,00	100	34.698.940,00
6	Desa Sindangsari	47.061.000,00	47.061.000,00	100	37.186.940,00
7	Desa Mekarsari	43.831.000,00	43.831.000,00	100	40.818.940,00
8	Desa Sukamarga	32.666.000,00	32.666.000,00	100	36.200.940,00
9	Desa Pajagan	39.143.000,00	39.143.000,00	100	40.907.940,00
10	Desa Sukajaya	40.426.000,00	40.426.000,00	100	31.967.940,00
11	Desa Sajira Mekar	43.064.000,00	43.064.000,00	100	33.672.940,00
12	Desa Paja	41.031.000,00	41.031.000,00	100	32.528.940,00
13	Desa Margaluyu	32.995.000,00	32.995.000,00	100	31.960.940,00
14	Desa Bungurmekar	39.302.000,00	39.302.000,00	100	34.633.940,00
15	Desa Ciuyah	46.311.000,00	46.311.000,00	100	35.198.940,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Maja	**758.633.000,00**	**758.633.000,00**	**100**	**608.337.160,00**
1	Desa Tanjungsari	45.318.000,00	45.318.000,00	100	34.905.940,00
2	Desa Maja	64.372.000,00	64.372.000,00	100	53.951.940,00
3	Desa Sangiang	41.501.000,00	41.501.000,00	100	45.082.940,00
4	Desa Binong	62.239.000,00	62.239.000,00	100	43.773.940,00
5	Desa Gubugan Cibeureum	43.042.000,00	43.042.000,00	100	33.719.940,00
6	Desa Mekarsari	57.842.000,00	57.842.000,00	100	37.247.940,00
7	Desa Padasuka	45.688.000,00	45.688.000,00	100	47.584.940,00
8	Desa Curugbadak	95.434.000,00	95.434.000,00	100	57.465.940,00
9	Desa Sindangmulya	47.714.000,00	47.714.000,00	100	44.656.940,00
10	Desa Cilangkap	44.152.000,00	44.152.000,00	100	41.972.940,00
11	Desa Pasirkembang	80.963.000,00	80.963.000,00	100	51.435.940,00
12	Desa Pasirkecapi	42.394.000,00	42.394.000,00	100	35.253.940,00
13	Desa Buyut Mekar	37.258.000,00	37.258.000,00	100	43.902.940,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
14	Desa Maja Baru	50.716.000,00	50.716.000,00	100	37.380.940,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Rangkasbitung	**520.662.000,00**	**520.662.000,00**	**100**	**475.121.340,00**
1	Desa Pasirtanjung	42.074.000,00	42.074.000,00	100	39.031.940,00
2	Desa Citeras	53.107.000,00	53.107.000,00	100	46.241.940,00
3	Desa Nameng	43.941.000,00	43.941.000,00	100	40.762.940,00
4	Desa Kolelet Wetan	35.067.000,00	35.067.000,00	100	32.352.940,00
5	Desa Jatimulya	47.425.000,00	47.425.000,00	100	42.516.940,00
6	Desa Mekarsari	54.817.000,00	54.817.000,00	100	49.201.940,00
7	Desa Pabuaran	30.445.000,00	30.445.000,00	100	33.354.940,00
8	Desa RangkasbitungTimur	65.839.000,00	65.839.000,00	100	61.702.940,00
9	Desa Sukamanah	43.418.000,00	43.418.000,00	100	40.542.940,00
10	Desa Cimangeunteung	52.030.000,00	52.030.000,00	100	42.423.940,00
11	Desa Narimbang Mulia	52.499.000,00	52.499.000,00	100	46.987.940,00
	Pemerintahan Desa di Kec. Warunggunung	**500.248.000,00**	**500.248.000,00**	**100**	**428.045.280,00**
1	Desa Sukarendah	51.220.000,00	51.220.000,00	100	39.685.940,00
2	Desa Warunggunung	39.735.000,00	39.735.000,00	100	39.318.940,00
3	Desa Cibuah	37.346.000,00	37.346.000,00	100	36.610.940,00
4	Desa Pasir Tangkil	52.168.000,00	52.168.000,00	100	34.350.940,00
5	Desa Baros	32.546.000,00	32.546.000,00	100	33.539.940,00
6	Desa Banjarsari	31.157.000,00	31.157.000,00	100	33.903.940,00
7	Desa Padasuka	41.924.000,00	41.924.000,00	100	28.264.940,00
8	Desa Sukaraja	34.686.000,00	34.686.000,00	100	41.146.940,00
9	Desa Jagabaya	35.359.000,00	35.359.000,00	100	35.546.940,00
10	Desa Selaraja	63.735.000,00	63.735.000,00	100	39.173.940,00
11	Desa Cempaka	38.249.000,00	38.249.000,00	100	33.297.940,00
12	Desa Sindangsari	42.123.000,00	42.123.000,00	100	33.203.940,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cijaku	**401.551.000,00**	**401.551.000,00**	**100**	**339.312.400,00**
1	Desa Mekarjaya	33.547.000,00	33.547.000,00	100	28.794.940,00
2	Desa Cipalabuh	51.010.000,00	51.010.000,00	100	37.905.940,00
3	Desa Cijaku	44.434.000,00	44.434.000,00	100	34.238.940,00
4	Desa Cibeureum	32.349.000,00	32.349.000,00	100	32.990.940,00
5	Desa Ciapus	41.118.000,00	41.118.000,00	100	39.183.940,00
6	Desa Kandangsapi	40.942.000,00	40.942.000,00	100	38.694.940,00
7	Desa Cihujan	41.568.000,00	41.568.000,00	100	32.926.940,00
8	Desa Cimenga	39.339.000,00	39.339.000,00	100	31.759.940,00
9	Desa Kapunduhan	36.728.000,00	36.728.000,00	100	30.388.940,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
10	Desa Sukasenang	40.516.000,00	40.516.000,00	100	32.426.940,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cikulur	**475.187.000,00**	**475.187.000,00**	**100**	**432.907.220,00**
1	Desa Anggalan	31.666.000,00	31.666.000,00	100	30.845.940,00
2	Desa Muncangkopong	42.765.000,00	42.765.000,00	100	35.028.940,00
3	Desa Sukaharja	34.572.000,00	34.572.000,00	100	29.255.940,00
4	Desa Tamanjaya	36.232.000,00	36.232.000,00	100	30.101.940,00
5	Desa Cigoong Utara	38.520.000,00	38.520.000,00	100	31.326.940,00
6	Desa Muaradua	45.172.000,00	45.172.000,00	100	34.904.940,00
7	Desa Cikulur	43.881.000,00	43.881.000,00	100	34.195.940,00
8	Desa Curugpanjang	27.129.000,00	27.129.000,00	100	40.116.940,00
9	Desa Cigoong Selatan	38.967.000,00	38.967.000,00	100	31.562.940,00
10	Desa Sumurbandung	40.266.000,00	40.266.000,00	100	43.694.940,00
11	Desa Parage	34.076.000,00	34.076.000,00	100	28.986.940,00
12	Desa Sukadaya	33.023.000,00	33.023.000,00	100	32.994.940,00
13	Desa Pasirgintung	28.918.000,00	28.918.000,00	100	29.889.940,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibadak	**609.985.000,00**	**609.985.000,00**	**100**	**533.833.100,00**
1	Desa Tambakbaya	45.807.000,00	45.807.000,00	100	35.157.940,00
2	Desa Kaduagung Timur	46.618.000,00	46.618.000,00	100	54.493.940,00
3	Desa Panancangan	44.742.000,00	44.742.000,00	100	34.813.940,00
4	Desa Cibadak	38.306.000,00	38.306.000,00	100	31.159.940,00
5	Desa Asem	38.237.000,00	38.237.000,00	100	31.235.940,00
6	Desa Cisangu	25.584.000,00	25.584.000,00	100	30.736.940,00
7	Desa Kaduagung Barat	67.996.000,00	67.996.000,00	100	34.185.940,00
8	Desa Bojongcae	39.559.000,00	39.559.000,00	100	31.702.940,00
9	Desa Malabar	34.271.000,00	34.271.000,00	100	29.091.940,00
10	Desa Pasar Keong	27.791.000,00	27.791.000,00	100	37.159.940,00
11	Desa Bojong Leles	32.654.000,00	32.654.000,00	100	40.228.940,00
12	Desa Cimenteng Jaya	31.496.000,00	31.496.000,00	100	27.775.940,00
13	Desa Mekar Agung	44.550.000,00	44.550.000,00	100	37.576.940,00
14	Desa Asem Margaluyu	40.237.000,00	40.237.000,00	100	32.217.940,00
15	Desa Kaduagung Tengah	52.137.000,00	52.137.000,00	100	46.293.940,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibeber	**892.542.000,00**	**892.542.000,00**	**100**	**713.043.680,00**
1	Desa Cibeber	43.243.000,00	43.243.000,00	100	33.799.940,00
2	Desa Citorek Tengah	41.469.000,00	41.469.000,00	100	32.918.940,00
3	Desa Cisungsang	34.815.000,00	34.815.000,00	100	29.384.940,00
4	Desa Kujangjaya	43.895.000,00	43.895.000,00	100	34.150.940,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
5	Desa Kujangsari	31.637.000,00	31.637.000,00	100	27.694.940,00
6	Desa Neglasari	62.719.000,00	62.719.000,00	100	43.892.940,00
7	Desa Mekarsari	42.549.000,00	42.549.000,00	100	33.444.940,00
8	Desa Cikotok	33.524.000,00	33.524.000,00	100	28.697.940,00
9	Desa Sukamulya	44.118.000,00	44.118.000,00	100	34.267.940,00
10	Desa Citorek Timur	35.544.000,00	35.544.000,00	100	29.767.940,00
11	Desa Warungbanten	48.233.000,00	48.233.000,00	100	36.737.940,00
12	Desa Hegarmanah	48.217.000,00	48.217.000,00	100	36.419.940,00
13	Desa Situmulya	34.747.000,00	34.747.000,00	100	29.351.940,00
14	Desa Citorek Kidul	37.676.000,00	37.676.000,00	100	30.886.940,00
15	Desa Cikadu	45.028.000,00	45.028.000,00	100	34.687.940,00
16	Desa Sirnagalih	36.135.000,00	36.135.000,00	100	30.077.940,00
17	Desa Cihambali	37.991.000,00	37.991.000,00	100	31.055.940,00
18	Desa Citorek Barat	43.771.000,00	43.771.000,00	100	34.085.940,00
19	Desa Gunungwangun	34.366.000,00	34.366.000,00	100	29.165.940,00
20	Desa Wanasari	42.236.000,00	42.236.000,00	100	33.280.940,00
21	Desa Citorek Sabrang	33.204.000,00	33.204.000,00	100	28.546.940,00
22	Desa Ciherang	37.425.000,00	37.425.000,00	100	30.723.940,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cilograng	**440.182.000,00**	**440.182.000,00**	**100**	**352.540.400,00**
1	Desa Cilograng	42.746.000,00	42.746.000,00	100	33.418.940,00
2	Desa Cibareno	39.280.000,00	39.280.000,00	100	31.772.940,00
3	Desa Cikamunding	44.715.000,00	44.715.000,00	100	34.570.940,00
4	Desa Cijengkol	44.893.000,00	44.893.000,00	100	42.734.940,00
5	Desa Pasirbungur	41.465.000,00	41.465.000,00	100	33.306.940,00
6	Desa Lebaktipar	56.899.000,00	56.899.000,00	100	41.898.940,00
7	Desa Cikatomas	50.207.000,00	50.207.000,00	100	38.402.940,00
8	Desa Girimukti	34.703.000,00	34.703.000,00	100	29.325.940,00
9	Desa Cireundeu	46.254.000,00	46.254.000,00	100	35.382.940,00
10	Desa Gunungbatu	39.020.000,00	39.020.000,00	100	31.724.940,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Wanasalam	**547.456.000,00**	**547.456.000,00**	**100**	**441.771.220,00**
1	Desa Wanasalam	55.270.000,00	55.270.000,00	100	40.012.940,00
2	Desa Bejod	36.559.000,00	36.559.000,00	100	36.276.940,00
3	Desa Cilangkap	36.207.000,00	36.207.000,00	100	30.115.940,00
4	Desa Cipeucang	38.309.000,00	38.309.000,00	100	31.205.940,00
5	Desa Muara	49.902.000,00	49.902.000,00	100	41.110.940,00
6	Desa Parungpanjang	46.203.000,00	46.203.000,00	100	35.796.940,00
7	Desa Cikeusik	41.606.000,00	41.606.000,00	100	32.986.940,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
8	Desa Katapang	33.942.000,00	33.942.000,00	100	28.923.940,00
9	Desa Cisarap	45.958.000,00	45.958.000,00	100	35.171.940,00
10	Desa Sukatani	43.852.000,00	43.852.000,00	100	34.033.940,00
11	Desa Cipedang	42.680.000,00	42.680.000,00	100	33.512.940,00
12	Desa Parungsari	43.293.000,00	43.293.000,00	100	33.834.940,00
13	Desa Karangpamindangan	33.675.000,00	33.675.000,00	100	28.786.940,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sobang	**359.899.000,00**	**359.899.000,00**	**100**	**300.907.400,00**
1	Desa Ciparasi	37.313.000,00	37.313.000,00	100	30.670.940,00
2	Desa Sobang	32.076.000,00	32.076.000,00	100	28.770.940,00
3	Desa Sukajaya	34.291.000,00	34.291.000,00	100	29.106.940,00
4	Desa Sindanglaya	38.842.000,00	38.842.000,00	100	31.498.940,00
5	Desa Sukamaju	43.441.000,00	43.441.000,00	100	34.022.940,00
6	Desa Hariang	35.134.000,00	35.134.000,00	100	29.550.940,00
7	Desa Majasari	35.333.000,00	35.333.000,00	100	29.641.940,00
8	Desa Sinar Jaya	39.486.000,00	39.486.000,00	100	31.836.940,00
9	Desa Cirompang	32.953.000,00	32.953.000,00	100	28.407.940,00
10	Desa Sukaresmi	31.030.000,00	31.030.000,00	100	27.398.940,00
	Pemerintahan Desa di	**476.594.000,00**	**476.594.000,00**	**100**	**449.914.400,00**
	Kecamatan Curugbitung				
1	Desa Guradog	42.437.000,00	42.437.000,00	100	60.228.940,00
2	Desa Curugbitung	56.680.000,00	56.680.000,00	100	40.677.940,00
3	Desa Candi	54.210.000,00	54.210.000,00	100	42.892.940,00
4	Desa Mayak	47.504.000,00	47.504.000,00	100	41.655.940,00
5	Desa Cipining	50.148.000,00	50.148.000,00	100	45.028.940,00
6	Desa Cilayang	48.491.000,00	48.491.000,00	100	55.959.940,00
7	Desa Ciburuy	54.760.000,00	54.760.000,00	100	50.869.940,00
8	Desa Sekarwangi	33.874.000,00	33.874.000,00	100	37.053.940,00
9	Desa Cidadap	49.059.000,00	49.059.000,00	100	36.675.940,00
10	Desa Lebakasih	39.431.000,00	39.431.000,00	100	38.869.940,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Kalanganyar	**241.243.000,00**	**241.243.000,00**	**100**	**264.661.580,00**
1	Desa Kalanganyar	32.733.000,00	32.733.000,00	100	34.575.940,00
2	Desa Pasirkupa	36.140.000,00	36.140.000,00	100	35.009.940,00
3	Desa Cilangkap	31.294.000,00	31.294.000,00	100	42.628.940,00
4	Desa Aweh	35.744.000,00	35.744.000,00	100	44.677.940,00
5	Desa Sangiangtanjung	30.258.000,00	30.258.000,00	100	35.284.940,00
6	Desa Sukamekarsari	33.442.000,00	33.442.000,00	100	39.543.940,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
7	Desa Cikatapis	41.632.000,00	41.632.000,00	100	32.939.940,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Lebakgedong	**239.813.000,00**	**239.813.000,00**	**100**	**193.184.640,00**
1	Desa Banjaririgasi	41.013.000,00	41.013.000,00	100	33.231.940,00
2	Desa Ciladaeun	39.062.000,00	39.062.000,00	100	31.613.940,00
3	Desa Lebakgedong	42.437.000,00	42.437.000,00	100	33.404.940,00
4	Desa Banjarsari	37.105.000,00	37.105.000,00	100	30.586.940,00
5	Desa Lebaksitu	42.269.000,00	42.269.000,00	100	33.309.940,00
6	Desa Lebaksangka	37.927.000,00	37.927.000,00	100	31.036.940,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cihara	**360.594.000,00**	**360.594.000,00**	**100**	**339.361.460,00**
1	Desa Panyaungan	46.661.000,00	46.661.000,00	100	37.879.940,00
2	Desa Cihara	46.042.000,00	46.042.000,00	100	35.012.940,00
3	Desa Ciparahu	46.217.000,00	46.217.000,00	100	39.748.940,00
4	Desa Pondokpanjang	32.378.000,00	32.378.000,00	100	47.023.940,00
5	Desa Citeupuseun	37.789.000,00	37.789.000,00	100	36.125.940,00
6	Desa Lebakpeundeuy	39.069.000,00	39.069.000,00	100	38.804.940,00
7	Desa Mekarsari	39.927.000,00	39.927.000,00	100	44.490.940,00
8	Desa Karangkamulyan	33.808.000,00	33.808.000,00	100	28.847.940,00
9	Desa Barunai	38.703.000,00	38.703.000,00	100	31.425.940,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cirinten	**415.559.000,00**	**415.559.000,00**	**100**	**337.018.400,00**
1	Desa Datarcae	41.040.000,00	41.040.000,00	100	32.651.940,00
2	Desa Cirinten	42.336.000,00	42.336.000,00	100	40.859.940,00
3	Desa Karangnunggal	35.855.000,00	35.855.000,00	100	29.796.940,00
4	Desa Kadudamas	45.425.000,00	45.425.000,00	100	34.997.940,00
5	Desa Badur	47.572.000,00	47.572.000,00	100	36.072.940,00
6	Desa Parakanlima	43.895.000,00	43.895.000,00	100	34.150.940,00
7	Desa Nanggerang	37.923.000,00	37.923.000,00	100	31.015.940,00
8	Desa Cempaka	42.838.000,00	42.838.000,00	100	33.595.940,00
9	Desa Karoya	40.893.000,00	40.893.000,00	100	32.574.940,00
10	Desa Cibarani	37.782.000,00	37.782.000,00	100	31.300.940,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cigemblong	**317.715.332,00**	**317.715.332,00**	**100**	**298.320.460,00**
1	Desa Peucangpari	39.344.000,00	39.344.000,00	100	37.678.940,00
2	Desa Cibungur	34.668.000,00	34.668.000,00	100	31.128.940,00
3	Desa Mugijaya	39.467.000,00	39.467.000,00	100	31.826.940,00
4	Desa Cikate	30.585.000,00	30.585.000,00	100	30.701.940,00
5	Desa Cigemblong	35.751.000,00	35.751.000,00	100	35.501.940,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
6	Desa Cikadongdong	33.635.000,00	33.635.000,00	100	37.194.940,00
7	Desa Cikaret	32.897.000,00	32.897.000,00	100	34.399.940,00
8	Desa Wangunjaya	28.640.000,00	28.640.000,00	100	26.142.940,00
9	Desa Cikaratuan	42.728.332,00	42.728.332,00	100	33.743.940,00
JUMLAH		**14.325.900.332,00**	**14.325.900.332,00**	**100**	**12.179.632.067,00**

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Tahun 2021 terealisasi sebesar sebesar Rp1.673.034.168, mengalami kenaikan sebesar Rp6.491.535,00 atau 0,38% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.666.542.633,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dapat dilihat pada tabel 5.44 berikut:

Tabel 5.44
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah KabupatenLebak
Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Malingping	**72.310.740,00**	**72.310.740,00**	**100**	**83.887.440,00**
1	Desa Cilangkahan	4.916.410,00	4.916.410,00	100	5.489.960,00
2	Desa Pagelaran	6.403.410,00	6.403.410,00	100	7.657.960,00
3	Desa Sukaraja	4.432.410,00	4.432.410,00	100	5.815.960,00
4	Desa Malingping Utara	6.026.410,00	6.026.410,00	100	6.002.960,00
5	Desa Bolang	4.222.410,00	4.222.410,00	100	7.661.960,00
6	Desa Cipeundeuy	4.862.410,00	4.862.410,00	100	6.095.960,00
7	Desa Rahong	4.260.410,00	4.260.410,00	100	4.973.960,00
8	Desa Kadujajar	7.250.410,00	7.250.410,00	100	5.930.960,00
9	Desa Kersaratu	5.537.410,00	5.537.410,00	100	6.165.960,00
10	Desa Malingping Selatan	5.461.410,00	5.461.410,00	100	5.925.960,00
11	Desa Sumberwaras	5.124.410,00	5.124.410,00	100	5.889.960,00
12	Desa Sukamanah	4.367.410,00	4.367.410,00	100	6.842.960,00
13	Desa Senanghati	5.129.410,00	5.129.410,00	100	5.092.960,00
14	Desa Sangiang	4.316.410,00	4.316.410,00	100	4.339.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Panggarangan	**61.472.510,00**	**61.472.510,00**	**100**	**60.059.560,00**
1	Desa Panggarangan	6.148.410,00	6.148.410,00	100	5.555.960,00
2	Desa Jatake	4.037.410,00	4.037.410,00	100	5.263.960,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
3	Desa Sogong	6.554.410,00	6.554.410,00	100	5.781.960,00
4	Desa Cimandiri	3.868.410,00	3.868.410,00	100	5.730.960,00
5	Desa Gununggede	5.602.410,00	5.602.410,00	100	5.845.960,00
6	Desa Situregen	6.046.410,00	6.046.410,00	100	5.313.960,00
7	Desa Mekarjaya	6.989.410,00	6.989.410,00	100	6.049.960,00
8	Desa Sindangratu	6.923.410,00	6.923.410,00	100	6.005.960,00
9	Desa Hegarmanah	3.986.410,00	3.986.410,00	100	4.490.960,00
10	Desa Sukajadi	5.561.410,00	5.561.410,00	100	4.923.960,00
11	Desa Cibarengkok	5.754.410,00	5.754.410,00	100	5.095.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bayah	**70.442.510,00**	**70.442.510,00**	**100**	**77.269.793,00**
1	Desa Bayah Barat	6.170.410,00	6.170.410,00	100	6.972.960,00
2	Desa Sawarna	7.363.410,00	7.363.410,00	100	9.478.193,00
3	Desa Cidikit	7.132.410,00	7.132.410,00	100	7.315.960,00
4	Desa Suwakan	7.429.410,00	7.429.410,00	100	7.100.960,00
5	Desa Cimancak	4.980.410,00	4.980.410,00	100	6.072.960,00
6	Desa Darmasari	5.631.410,00	5.631.410,00	100	7.308.960,00
7	Desa Bayah Timur	5.293.410,00	5.293.410,00	100	5.514.960,00
8	Desa Cisuren	5.164.410,00	5.164.410,00	100	5.844.960,00
9	Desa Pasirgombong	4.626.410,00	4.626.410,00	100	4.761.960,00
10	Desa Sawarna Timur	7.040.410,00	7.040.410,00	100	7.755.960,00
11	Desa Pamubulan	9.610.410,00	9.610.410,00	100	9.141.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cipanas	**68.201.740,00**	**68.201.740,00**	**100**	**63.325.440,00**
1	Desa Cipanas	4.787.410,00	4.787.410,00	100	4.354.960,00
2	Desa Girilaya	4.496.410,00	4.496.410,00	100	4.137.960,00
3	Desa Malangsari	4.551.410,00	4.551.410,00	100	4.261.960,00
4	Desa Bintangresmi	4.891.410,00	4.891.410,00	100	4.434.960,00
5	Desa Talagahiyang	4.121.410,00	4.121.410,00	100	3.835.960,00
6	Desa Luhurjaya	5.630.410,00	5.630.410,00	100	4.983.960,00
7	Desa Haurgajrug	7.158.410,00	7.158.410,00	100	6.184.960,00
8	Desa Giriharja	5.334.410,00	5.334.410,00	100	4.774.960,00
9	Desa Sukasari	4.448.410,00	4.448.410,00	100	5.484.960,00
10	Desa Jayapura	4.493.410,00	4.493.410,00	100	4.121.960,00
11	Desa Sipayung	5.050.410,00	5.050.410,00	100	4.555.960,00
12	Desa Bintangsari	4.238.410,00	4.238.410,00	100	3.930.960,00
13	Desa Pasirhaur	4.390.410,00	4.390.410,00	100	4.048.960,00
14	Desa Harumsari	4.609.410,00	4.609.410,00	100	4.212.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Muncang	**50.821.920,00**	**50.821.920,00**	**100**	**47.124.520,00**
1	Desa Pasireurih	4.694.410,00	4.694.410,00	100	4.282.960,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
2	Desa Ciminyak	5.304.410,00	5.304.410,00	100	4.733.960,00
3	Desa Muncang	4.383.410,00	4.383.410,00	100	4.050.960,00
4	Desa Leuwicoo	4.094.410,00	4.094.410,00	100	3.820.960,00
5	Desa Sindangwangi	4.002.410,00	4.002.410,00	100	3.746.960,00
6	Desa Cikarang	4.171.410,00	4.171.410,00	100	3.879.960,00
7	Desa Sukanagara	4.101.410,00	4.101.410,00	100	3.825.960,00
8	Desa Pasirnangka	4.346.410,00	4.346.410,00	100	4.014.960,00
9	Desa Jagaraksa	3.929.410,00	3.929.410,00	100	3.693.960,00
10	Desa Tanjungwangi	4.005.410,00	4.005.410,00	100	3.751.960,00
11	Desa Mekarwangi	3.994.410,00	3.994.410,00	100	3.731.960,00
12	Desa Girijagabaya	3.794.410,00	3.794.410,00	100	3.589.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Leuwidamar	**60.766.920,00**	**60.766.920,00**	**100**	**54.690.520,00**
1	Desa Kanekes	2.952.410,00	2.952.410,00	100	2.940.960,00
2	Desa Cisimeut	5.811.410,00	5.811.410,00	100	5.140.960,00
3	Desa Cibungur	6.538.410,00	6.538.410,00	100	5.703.960,00
4	Desa Leuwidamar	5.661.410,00	5.661.410,00	100	4.988.960,00
5	Desa Lebakparahiang	5.333.410,00	5.333.410,00	100	4.733.960,00
6	Desa Sangkanwangi	5.174.410,00	5.174.410,00	100	4.651.960,00
7	Desa Nayagati	5.317.410,00	5.317.410,00	100	4.741.960,00
8	Desa Bojongmenteng	5.179.410,00	5.179.410,00	100	4.651.960,00
9	Desa Margawangi	4.194.410,00	4.194.410,00	100	3.897.960,00
10	Desa Wantisari	4.333.410,00	4.333.410,00	100	4.002.960,00
11	Desa Jalupangmulya	5.138.410,00	5.138.410,00	100	4.617.960,00
12	Desa Cisimeut Raya	5.132.410,00	5.132.410,00	100	4.616.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bojongmanik	**41.492.690,00**	**41.492.690,00**	**100**	**41.734.640,00**
1	Desa Bojongmanik	4.771.410,00	4.771.410,00	100	5.505.960,00
2	Desa Harjawana	5.100.410,00	5.100.410,00	100	4.593.960,00
3	Desa Kadurahayu	4.323.410,00	4.323.410,00	100	3.996.960,00
4	Desa Cimayang	5.635.410,00	5.635.410,00	100	4.991.960,00
5	Desa Parakanbeusi	4.190.410,00	4.190.410,00	100	5.494.960,00
6	Desa Keboncau	4.529.410,00	4.529.410,00	100	4.500.960,00
7	Desa Mekarmanik	5.108.410,00	5.108.410,00	100	5.026.960,00
8	Desa Mekar Rahayu	4.037.410,00	4.037.410,00	100	4.032.960,00
9	Desa Pasirbitung	3.796.410,00	3.796.410,00	100	3.589.960,00
	Pemerintahan Desa di Kec. Gunungkencana	**58.267.920,00**	**58.267.920,00**	**100**	**54.296.520,00**
1	Desa Gunungkencana	5.259.410,00	5.259.410,00	100	4.673.960,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
2	Desa Cimanyangray	5.340.410,00	5.340.410,00	100	4.807.960,00
3	Desa Gunungkendeng	3.742.410,00	3.742.410,00	100	3.990.960,00
4	Desa Cisampang	4.678.410,00	4.678.410,00	100	4.269.960,00
5	Desa Ciginggang	5.356.410,00	5.356.410,00	100	4.790.960,00
6	Desa Ciakar	5.691.410,00	5.691.410,00	100	5.051.960,00
7	Desa Cicaringin	5.018.410,00	5.018.410,00	100	5.537.960,00
8	Desa Bulakan	4.476.410,00	4.476.410,00	100	4.118.960,00
9	Desa Sukanegara	4.562.410,00	4.562.410,00	100	4.175.960,00
10	Desa Bojongkoneng	4.682.410,00	4.682.410,00	100	4.265.960,00
11	Desa Kramatjaya	5.261.410,00	5.261.410,00	100	4.710.960,00
12	Desa Tanjungsari Indah	4.198.410,00	4.198.410,00	100	3.900.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Banjarsari	**94.863.200,00**	**94.863.200,00**	**100**	**86.651.200,00**
1	Desa Kerta	4.411.410,00	4.411.410,00	100	4.054.960,00
2	Desa Bojongjuruh	5.298.410,00	5.298.410,00	100	4.747.960,00
3	Desa Leuwiipuh	4.880.410,00	4.880.410,00	100	4.424.960,00
4	Desa Lebakkeusik	4.412.410,00	4.412.410,00	100	4.064.960,00
5	Desa Cilegongilir	5.245.410,00	5.245.410,00	100	4.708.960,00
6	Desa Keusik	5.219.410,00	5.219.410,00	100	4.677.960,00
7	Desa Cibaturkeusik	4.190.410,00	4.190.410,00	100	3.896.960,00
8	Desa Kumpay	4.968.410,00	4.968.410,00	100	4.492.960,00
9	Desa Jalupanggirang	4.709.410,00	4.709.410,00	100	4.293.960,00
10	Desa Bendungan	4.996.410,00	4.996.410,00	100	4.508.960,00
11	Desa Kertaraharja	5.179.410,00	5.179.410,00	100	4.937.960,00
12	Desa Cisampih	4.909.410,00	4.909.410,00	100	4.447.960,00
13	Desa Gunungsari	4.547.410,00	4.547.410,00	100	4.166.960,00
14	Desa Tamansari	5.186.410,00	5.186.410,00	100	4.647.960,00
15	Desa Cidahu	5.365.410,00	5.365.410,00	100	4.801.960,00
16	Desa Ciruji	4.697.410,00	4.697.410,00	100	4.287.960,00
17	Desa Kaduhauk	3.754.410,00	3.754.410,00	100	3.557.960,00
18	Desa Labanjaya	4.339.410,00	4.339.410,00	100	4.008.960,00
19	Desa Umbuljaya	4.856.410,00	4.856.410,00	100	4.407.960,00
20	Desa Kertarahayu	3.695.410,00	3.695.410,00	100	3.512.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cileles	**59.695.920,00**	**59.695.920,00**	**100**	**58.951.520,00**
1	Desa Pasindangan	3.263.410,00	3.263.410,00	100	4.666.960,00
2	Desa Parungkujang	3.571.410,00	3.571.410,00	100	5.875.960,00
3	Desa Cileles	5.663.410,00	5.663.410,00	100	5.003.960,00
4	Desa Cikareo	5.153.410,00	5.153.410,00	100	4.653.960,00
5	Desa Cipadang	5.859.410,00	5.859.410,00	100	5.156.960,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
6	Desa Gumuruh	4.398.410,00	4.398.410,00	100	5.115.960,00
7	Desa Prabugantungan	5.104.410,00	5.104.410,00	100	4.596.960,00
8	Desa Daroyon	4.455.410,00	4.455.410,00	100	4.090.960,00
9	Desa Margamulya	5.617.410,00	5.617.410,00	100	4.993.960,00
10	Desa Mekarjaya	5.610.410,00	5.610.410,00	100	4.987.960,00
11	Desa Kujangsari	5.318.410,00	5.318.410,00	100	4.765.960,00
12	Desa Banjarsari	5.680.410,00	5.680.410,00	100	5.041.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cimarga	**82.378.970,00**	**82.378.970,00**	**100**	**74.787.320,00**
1	Desa Sarageni	4.937.410,00	4.937.410,00	100	4.466.960,00
2	Desa Gununganten	5.182.410,00	5.182.410,00	100	4.662.960,00
3	Desa Sudamanik	5.467.410,00	5.467.410,00	100	4.875.960,00
4	Desa Tambak	4.999.410,00	4.999.410,00	100	4.603.960,00
5	Desa Cimarga	5.709.410,00	5.709.410,00	100	5.048.960,00
6	Desa Karyajaya	4.849.410,00	4.849.410,00	100	4.401.960,00
7	Desa Margajaya	5.788.410,00	5.788.410,00	100	5.066.960,00
8	Desa Jayamanik	5.065.410,00	5.065.410,00	100	4.573.960,00
9	Desa Margaluyu	3.918.410,00	3.918.410,00	100	3.669.960,00
10	Desa Margatirta	4.994.410,00	4.994.410,00	100	4.512.960,00
11	Desa Intenjaya	4.761.410,00	4.761.410,00	100	4.317.960,00
12	Desa Mekarjaya	5.410.410,00	5.410.410,00	100	4.823.960,00
13	Desa Jayasari	4.816.410,00	4.816.410,00	100	4.411.960,00
14	Desa Girimukti	3.810.410,00	3.810.410,00	100	3.604.960,00
15	Desa Sangkanmanik	4.359.410,00	4.359.410,00	100	4.024.960,00
16	Desa Sangiangjaya	3.956.410,00	3.956.410,00	100	3.713.960,00
17	Desa Mekarmulya	4.352.410,00	4.352.410,00	100	4.004.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sajira	**69.684.150,00**	**69.684.150,00**	**100**	**72.389.400,00**
1	Desa Maraya	3.846.410,00	3.846.410,00	100	4.267.960,00
2	Desa Sajira	4.965.410,00	4.965.410,00	100	4.437.960,00
3	Desa Sukarame	4.757.410,00	4.757.410,00	100	5.337.960,00
4	Desa Calungbungur	3.710.410,00	3.710.410,00	100	5.158.960,00
5	Desa Parungsari	5.010.410,00	5.010.410,00	100	4.708.960,00
6	Desa Sindangsari	5.496.410,00	5.496.410,00	100	5.135.960,00
7	Desa Mekarsari	5.118.410,00	5.118.410,00	100	5.757.960,00
8	Desa Sukamarga	3.814.410,00	3.814.410,00	100	4.966.960,00
9	Desa Pajagan	4.571.410,00	4.571.410,00	100	5.772.960,00
10	Desa Sukajaya	4.721.410,00	4.721.410,00	100	4.240.960,00
11	Desa Sajira Mekar	5.029.410,00	5.029.410,00	100	4.532.960,00
12	Desa Paja	4.791.410,00	4.791.410,00	100	4.336.960,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
13	Desa Margaluyu	3.853.410,00	3.853.410,00	100	4.239.960,00
14	Desa Bungurmekar	4.589.410,00	4.589.410,00	100	4.697.960,00
15	Desa Ciuyah	5.408.410,00	5.408.410,00	100	4.794.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Maja	**88.596.740,00**	**88.596.740,00**	**100**	**86.927.440,00**
1	Desa Tanjungsari	5.292.410,00	5.292.410,00	100	4.744.960,00
2	Desa Maja	7.517.410,00	7.517.410,00	100	8.007.960,00
3	Desa Sangiang	4.846.410,00	4.846.410,00	100	6.488.960,00
4	Desa Binong	7.268.410,00	7.268.410,00	100	6.263.960,00
5	Desa Gubugan Cibeureum	5.026.410,00	5.026.410,00	100	4.540.960,00
6	Desa Mekarsari	6.755.410,00	6.755.410,00	100	5.145.960,00
7	Desa Padasuka	5.335.410,00	5.335.410,00	100	6.916.960,00
8	Desa Curugbadak	11.145.410,00	11.145.410,00	100	8.610.960,00
9	Desa Sindangmulya	5.572.410,00	5.572.410,00	100	6.414.960,00
10	Desa Cilangkap	5.156.410,00	5.156.410,00	100	5.955.960,00
11	Desa Pasirkembang	9.455.410,00	9.455.410,00	100	7.576.960,00
12	Desa Pasirkecapi	4.951.410,00	4.951.410,00	100	4.803.960,00
13	Desa Buyut Mekar	4.351.410,00	4.351.410,00	100	6.285.960,00
14	Desa Maja Baru	5.922.410,00	5.922.410,00	100	5.168.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Rangkasbitung	**60.805.510,00**	**60.805.510,00**	**100**	**67.809.560,00**
1	Desa Pasirtanjung	4.913.410,00	4.913.410,00	100	5.451.960,00
2	Desa Citeras	6.202.410,00	6.202.410,00	100	6.686.960,00
3	Desa Nameng	5.131.410,00	5.131.410,00	100	5.747.960,00
4	Desa Kolelet Wetan	4.095.410,00	4.095.410,00	100	4.306.960,00
5	Desa Jatimulya	5.538.410,00	5.538.410,00	100	6.048.960,00
6	Desa Mekarsari	6.401.410,00	6.401.410,00	100	7.193.960,00
7	Desa Pabuaran	3.555.410,00	3.555.410,00	100	4.478.960,00
8	Desa RangkasbitungTimur	7.689.410,00	7.689.410,00	100	9.335.960,00
9	Desa Sukamanah	5.070.410,00	5.070.410,00	100	5.709.960,00
10	Desa Cimangeunteung	6.076.410,00	6.076.410,00	100	6.032.960,00
11	Desa Narimbang Mulia	6.131.410,00	6.131.410,00	100	6.814.960,00
	Pemerintahan Desa di Kec. Warunggunung	**58.419.920,00**	**58.419.920,00**	**100**	**58.507.520,00**
1	Desa Sukarendah	5.981.410,00	5.981.410,00	100	5.563.960,00
2	Desa Warunggunung	4.640.410,00	4.640.410,00	100	5.500.960,00
3	Desa Cibuah	4.361.410,00	4.361.410,00	100	5.036.960,00
4	Desa Pasir Tangkil	6.092.410,00	6.092.410,00	100	4.648.960,00
5	Desa Baros	3.800.410,00	3.800.410,00	100	4.510.960,00
6	Desa Banjarsari	3.638.410,00	3.638.410,00	100	4.572.960,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
7	Desa Padasuka	4.896.410,00	4.896.410,00	100	3.606.960,00
8	Desa Sukaraja	4.050.410,00	4.050.410,00	100	5.813.960,00
9	Desa Jagabaya	4.129.410,00	4.129.410,00	100	4.853.960,00
10	Desa Selaraja	7.443.410,00	7.443.410,00	100	5.475.960,00
11	Desa Cempaka	4.466.410,00	4.466.410,00	100	4.468.960,00
12	Desa Sindangsari	4.919.410,00	4.919.410,00	100	4.452.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cijaku	**46.894.100,00**	**46.894.100,00**	**100**	**45.774.600,00**
1	Desa Mekarjaya	3.917.410,00	3.917.410,00	100	3.696.960,00
2	Desa Cipalabuh	5.957.410,00	5.957.410,00	100	5.258.960,00
3	Desa Cijaku	5.189.410,00	5.189.410,00	100	4.629.960,00
4	Desa Cibeureum	3.777.410,00	3.777.410,00	100	4.415.960,00
5	Desa Ciapus	4.801.410,00	4.801.410,00	100	5.477.960,00
6	Desa Kandangsapi	4.781.410,00	4.781.410,00	100	5.393.960,00
7	Desa Cihujan	4.854.410,00	4.854.410,00	100	4.404.960,00
8	Desa Cimenga	4.594.410,00	4.594.410,00	100	4.204.960,00
9	Desa Kapunduhan	4.289.410,00	4.289.410,00	100	3.970.960,00
10	Desa Sukasenang	4.731.410,00	4.731.410,00	100	4.319.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cikulur	**55.494.330,00**	**55.494.330,00**	**100**	**58.102.480,00**
1	Desa Anggalan	3.698.410,00	3.698.410,00	100	4.048.960,00
2	Desa Muncangkopong	4.994.410,00	4.994.410,00	100	4.765.960,00
3	Desa Sukaharja	4.037.410,00	4.037.410,00	100	3.775.960,00
4	Desa Tamanjaya	4.231.410,00	4.231.410,00	100	3.920.960,00
5	Desa Cigoong Utara	4.498.410,00	4.498.410,00	100	4.130.960,00
6	Desa Muaradua	5.275.410,00	5.275.410,00	100	4.743.960,00
7	Desa Cikulur	5.124.410,00	5.124.410,00	100	4.622.960,00
8	Desa Curugpanjang	3.168.410,00	3.168.410,00	100	5.637.960,00
9	Desa Cigoong Selatan	4.550.410,00	4.550.410,00	100	4.171.960,00
10	Desa Sumurbandung	4.702.410,00	4.702.410,00	100	6.250.960,00
11	Desa Parage	3.979.410,00	3.979.410,00	100	3.729.960,00
12	Desa Sukadaya	3.856.410,00	3.856.410,00	100	4.416.960,00
13	Desa Pasirgintung	3.377.410,00	3.377.410,00	100	3.884.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibadak	**71.235.150,00**	**71.235.150,00**	**100**	**72.924.400,00**
1	Desa Tambakbaya	5.349.410,00	5.349.410,00	100	4.787.960,00
2	Desa Kaduagung Timur	5.444.410,00	5.444.410,00	100	8.100.960,00
3	Desa Panancangan	5.225.410,00	5.225.410,00	100	4.728.960,00
4	Desa Cibadak	4.473.410,00	4.473.410,00	100	4.102.960,00
5	Desa Asem	4.465.410,00	4.465.410,00	100	4.115.960,00
6	Desa Cisangu	2.987.410,00	2.987.410,00	100	4.029.960,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
7	Desa Kaduagung Barat	7.940.410,00	7.940.410,00	100	4.620.960,00
8	Desa Bojongcae	4.619.410,00	4.619.410,00	100	4.195.960,00
9	Desa Malabar	4.002.410,00	4.002.410,00	100	3.747.960,00
10	Desa Pasar Keong	3.245.410,00	3.245.410,00	100	5.130.960,00
11	Desa Bojong Leles	3.813.410,00	3.813.410,00	100	5.656.960,00
12	Desa Cimenteng Jaya	3.678.410,00	3.678.410,00	100	3.522.960,00
13	Desa Mekar Agung	5.202.410,00	5.202.410,00	100	5.201.960,00
14	Desa Asem Margaluyu	4.699.410,00	4.699.410,00	100	4.283.960,00
15	Desa Kaduagung Tengah	6.088.410,00	6.088.410,00	100	6.695.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibeber	**104.236.020,00**	**104.236.020,00**	**100**	**94.975.120,00**
1	Desa Cibeber	5.050.410,00	5.050.410,00	100	4.554.960,00
2	Desa Citorek Tengah	4.843.410,00	4.843.410,00	100	4.403.960,00
3	Desa Cisungsang	4.065.410,00	4.065.410,00	100	3.798.960,00
4	Desa Kujangjaya	5.126.410,00	5.126.410,00	100	4.614.960,00
5	Desa Kujangsari	3.694.410,00	3.694.410,00	100	3.508.960,00
6	Desa Neglasari	7.324.410,00	7.324.410,00	100	6.284.960,00
7	Desa Mekarsari	4.969.410,00	4.969.410,00	100	4.493.960,00
8	Desa Cikotok	3.915.410,00	3.915.410,00	100	3.680.960,00
9	Desa Sukamulya	5.152.410,00	5.152.410,00	100	4.634.960,00
10	Desa Citorek Timur	4.151.410,00	4.151.410,00	100	3.863.960,00
11	Desa Warungbanten	5.632.410,00	5.632.410,00	100	5.058.960,00
12	Desa Hegarmanah	5.631.410,00	5.631.410,00	100	5.003.960,00
13	Desa Situmulya	4.058.410,00	4.058.410,00	100	3.792.960,00
14	Desa Citorek Kidul	4.400.410,00	4.400.410,00	100	4.055.960,00
15	Desa Cikadu	5.258.410,00	5.258.410,00	100	4.706.960,00
16	Desa Sirnagalih	4.220.410,00	4.220.410,00	100	3.916.960,00
17	Desa Cihambali	4.436.410,00	4.436.410,00	100	4.084.960,00
18	Desa Citorek Barat	5.111.410,00	5.111.410,00	100	4.603.960,00
19	Desa Gunungwangun	4.013.410,00	4.013.410,00	100	3.760.960,00
20	Desa Wanasari	4.932.410,00	4.932.410,00	100	4.465.960,00
21	Desa Citorek Sabrang	3.877.410,00	3.877.410,00	100	3.654.960,00
22	Desa Ciherang	4.370.410,00	4.370.410,00	100	4.027.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cilograng	**51.406.100,00**	**51.406.100,00**	**100**	**48.042.600,00**
1	Desa Cilograng	4.992.410,00	4.992.410,00	100	4.489.960,00
2	Desa Cibareno	4.587.410,00	4.587.410,00	100	4.207.960,00
3	Desa Cikamunding	5.222.410,00	5.222.410,00	100	4.686.960,00
4	Desa Cijengkol	5.242.410,00	5.242.410,00	100	6.085.960,00
5	Desa Pasirbungur	4.842.410,00	4.842.410,00	100	4.470.960,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
6	Desa Lebaktipar	6.645.410,00	6.645.410,00	100	5.942.960,00
7	Desa Cikatomas	5.863.410,00	5.863.410,00	100	5.343.960,00
8	Desa Girimukti	4.052.410,00	4.052.410,00	100	3.787.960,00
9	Desa Cireundeu	5.401.410,00	5.401.410,00	100	4.825.960,00
10	Desa Gunungbatu	4.556.410,00	4.556.410,00	100	4.199.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Wanasalam	**63.933.330,00**	**63.933.330,00**	**100**	**59.622.480,00**
1	Desa Wanasalam	6.454.410,00	6.454.410,00	100	5.619.960,00
2	Desa Bejod	4.269.410,00	4.269.410,00	100	4.979.960,00
3	Desa Cilangkap	4.228.410,00	4.228.410,00	100	3.923.960,00
4	Desa Cipeucang	4.474.410,00	4.474.410,00	100	4.110.960,00
5	Desa Muara	5.827.410,00	5.827.410,00	100	5.807.960,00
6	Desa Parungpanjang	5.395.410,00	5.395.410,00	100	4.896.960,00
7	Desa Cikeusik	4.859.410,00	4.859.410,00	100	4.415.960,00
8	Desa Katapang	3.963.410,00	3.963.410,00	100	3.718.960,00
9	Desa Cisarap	5.367.410,00	5.367.410,00	100	4.789.960,00
10	Desa Sukatani	5.121.410,00	5.121.410,00	100	4.594.960,00
11	Desa Cipedang	4.984.410,00	4.984.410,00	100	4.505.960,00
12	Desa Parungsari	5.055.410,00	5.055.410,00	100	4.560.960,00
13	Desa Karangpamindangan	3.932.410,00	3.932.410,00	100	3.695.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sobang	**42.031.100,00**	**42.031.100,00**	**100**	**39.194.600,00**
1	Desa Ciparasi	4.357.410,00	4.357.410,00	100	4.018.960,00
2	Desa Sobang	3.746.410,00	3.746.410,00	100	3.692.960,00
3	Desa Sukajaya	4.004.410,00	4.004.410,00	100	3.750.960,00
4	Desa Sindanglaya	4.536.410,00	4.536.410,00	100	4.160.960,00
5	Desa Sukamaju	5.073.410,00	5.073.410,00	100	4.592.960,00
6	Desa Hariang	4.103.410,00	4.103.410,00	100	3.826.960,00
7	Desa Majasari	4.126.410,00	4.126.410,00	100	3.842.960,00
8	Desa Sinar Jaya	4.611.410,00	4.611.410,00	100	4.218.960,00
9	Desa Cirompang	3.848.410,00	3.848.410,00	100	3.630.960,00
10	Desa Sukaresmi	3.623.410,00	3.623.410,00	100	3.457.960,00
	Pemerintahan Desa di	**55.659.100,00**	**55.659.100,00**	**100**	**64.727.600,00**
	Kecamatan Curugbitung				
1	Desa Guradog	4.956.410,00	4.956.410,00	100	9.083.960,00
2	Desa Curugbitung	6.619.410,00	6.619.410,00	100	5.733.960,00
3	Desa Candi	6.330.410,00	6.330.410,00	100	6.112.960,00
4	Desa Mayak	5.547.410,00	5.547.410,00	100	5.900.960,00
5	Desa Cipining	5.856.410,00	5.856.410,00	100	6.478.960,00
6	Desa Cilayang	5.663.410,00	5.663.410,00	100	8.351.960,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
7	Desa Ciburuy	6.395.410,00	6.395.410,00	100	7.479.960,00
8	Desa Sekarwangi	3.956.410,00	3.956.410,00	100	5.112.960,00
9	Desa Cidadap	5.729.410,00	5.729.410,00	100	5.047.960,00
10	Desa Lebakasih	4.604.410,00	4.604.410,00	100	5.423.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Kalanganyar	**28.172.870,00**	**28.172.870,00**	**100**	**36.693.720,00**
1	Desa Kalanganyar	3.822.410,00	3.822.410,00	100	4.687.960,00
2	Desa Pasirkupa	4.220.410,00	4.220.410,00	100	4.761.960,00
3	Desa Cilangkap	3.654.410,00	3.654.410,00	100	6.067.960,00
4	Desa Aweh	4.174.410,00	4.174.410,00	100	6.418.960,00
5	Desa Sangiangtanjung	3.533.410,00	3.533.410,00	100	4.809.960,00
6	Desa Sukamekarsari	3.905.410,00	3.905.410,00	100	5.538.960,00
7	Desa Cikatapis	4.862.410,00	4.862.410,00	100	4.407.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Lebakgedong	**28.006.460,00**	**28.006.460,00**	**100**	**25.682.760,00**
1	Desa Banjaririgasi	4.789.410,00	4.789.410,00	100	4.457.960,00
2	Desa Ciladaeun	4.561.410,00	4.561.410,00	100	4.179.960,00
3	Desa Lebakgedong	4.956.410,00	4.956.410,00	100	4.486.960,00
4	Desa Banjarsari	4.333.410,00	4.333.410,00	100	4.004.960,00
5	Desa Lebaksitu	4.936.410,00	4.936.410,00	100	4.470.960,00
6	Desa Lebaksangka	4.429.410,00	4.429.410,00	100	4.081.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cihara	**42.111.690,00**	**42.111.690,00**	**100**	**47.019.640,00**
1	Desa Panyaungan	5.449.410,00	5.449.410,00	100	5.253.960,00
2	Desa Cihara	5.377.410,00	5.377.410,00	100	4.762.960,00
3	Desa Ciparahu	5.397.410,00	5.397.410,00	100	5.573.960,00
4	Desa Pondokpanjang	3.781.410,00	3.781.410,00	100	6.820.960,00
5	Desa Citeupuseun	4.413.410,00	4.413.410,00	100	4.953.960,00
6	Desa Lebakpeundeuy	4.562.410,00	4.562.410,00	100	5.412.960,00
7	Desa Mekarsari	4.662.410,00	4.662.410,00	100	6.386.960,00
8	Desa Karangkamulyan	3.948.410,00	3.948.410,00	100	3.705.960,00
9	Desa Barunai	4.519.410,00	4.519.410,00	100	4.147.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cirinten	**48.529.100,00**	**48.529.100,00**	**100**	**45.381.600,00**
1	Desa Datarcae	4.792.410,00	4.792.410,00	100	4.357.960,00
2	Desa Cirinten	4.944.410,00	4.944.410,00	100	5.764.960,00
3	Desa Karangnunggal	4.187.410,00	4.187.410,00	100	3.868.960,00
4	Desa Kadudamas	5.304.410,00	5.304.410,00	100	4.759.960,00
5	Desa Badur	5.555.410,00	5.555.410,00	100	4.944.960,00
6	Desa Parakanlima	5.126.410,00	5.126.410,00	100	4.614.960,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
7	Desa Nanggerang	4.428.410,00	4.428.410,00	100	4.077.960,00
8	Desa Cempaka	5.002.410,00	5.002.410,00	100	4.519.960,00
9	Desa Karoya	4.775.410,00	4.775.410,00	100	4.344.960,00
10	Desa Cibarani	4.412.410,00	4.412.410,00	100	4.126.960,00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cigemblong	**37.103.458,00**	**37.103.458,00**	**100**	**39.988.640,00**
1	Desa Peucangpari	4.594.410,00	4.594.410,00	100	5.219.960,00
2	Desa Cibungur	4.048.410,00	4.048.410,00	100	4.096.960,00
3	Desa Mugijaya	4.609.410,00	4.609.410,00	100	4.216.960,00
4	Desa Cikate	3.571.410,00	3.571.410,00	100	4.023.960,00
5	Desa Cigemblong	4.175.410,00	4.175.410,00	100	4.846.960,00
6	Desa Cikadongdong	3.928.410,00	3.928.410,00	100	5.136.960,00
7	Desa Cikaret	3.841.410,00	3.841.410,00	100	4.657.960,00
8	Desa Wangunjaya	3.344.410,00	3.344.410,00	100	3.242.960,00
9	Desa Cikaratuan	4.990.178,00	4.990.178,00	100	4.545.960,00
JUMLAH		**1.673.034.168,00**	**1.673.034.168,00**	**100**	**1.666.542.633,00**

Transfer Bantuan Keuangan yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lebak mengalokasikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp407.529.133.620,00 yang terdiri dari Dana Desa (APBN) sebesar Rp294.233.508.000,00, Alokasi Dana Desa (ADD dari APBD yang merupakan kewajiban pemerintah daerah sebesar 10% dari Dana Perimbangan dikurangi DAK) sebesar Rp107.795.625.620,00 serta Bantuan Keuangan Khusus Infrastruktur Perdesaan sebesar Rp5.500.000.000,00. Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp407.529.133.620,00 terealisasi sebesar Rp405.279.350.618,00 atau 99,45% jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2020 yaitu Rp395.680.771.200,00, mengalami kenaikan sebesar Rp9.598.579.418,00 atau 2,42%. Rincian anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dapat dilihat pada tabel 5.45 berikut:

Tabel 5.45
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa
Tahun 2021 Dan 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
	Desa di Kecamatan Malingping	**15.739.138.800,00**	**15.739.138.800,00**	**100**	**15.509.906.000,00**
1	Desa Cilangkahan	1.030.599.700,00	1.030.599.700,00	100	1.032.883.500,00
2	Desa Pagelaran	1.156.525.700,00	1.156.525.700,00	100	1.084.361.500,00
3	Desa Sukaraja	1.187.492.700,00	1.187.492.700,00	100	1.111.178.500,00
4	Desa Malingping Utara	1.099.161.700,00	1.099.161.700,00	100	1.034.852.500,00
5	Desa Bolang	1.086.567.700,00	1.086.567.700,00	100	1.077.606.500,00
6	Desa Cipeundeuy	1.078.509.700,00	1.078.509.700,00	100	1.074.584.500,00
7	Desa Rahong	1.045.026.700,00	1.045.026.700,00	100	1.066.398.500,00
8	Desa Kadujajar	1.162.693.700,00	1.162.693.700,00	100	1.064.766.500,00
9	Desa Kersaratu	1.381.392.700,00	1.381.392.700,00	100	1.287.234.500,00
10	Desa Malingping Selatan	1.007.219.700,00	1.007.219.700,00	100	1.007.364.500,00
11	Desa Sumberwaras	1.203.833.700,00	1.203.833.700,00	100	1.132.844.500,00
12	Desa Sukamanah	1.207.372.700,00	1.207.372.700,00	100	1.290.149.500,00
13	Desa Senanghati	1.069.987.700,00	1.069.987.700,00	100	1.064.996.500,00
14	Desa Sangiang	1.022.754.700,00	1.022.754.700,00	100	1.180.684.500,00
	Desa di Kecamatan Panggarangan	**14.463.977.700,00**	**14.463.977.700,00**	**100**	**13.724.091.500,00**
1	Desa Panggarangan	1.059.980.700,00	1.059.980.700,00	100	1.055.639.500,00
2	Desa Jatake	1.095.172.700,00	1.095.172.700,00	100	1.088.106.500,00
3	Desa Sogong	1.399.597.700,00	1.399.597.700,00	100	1.133.154.500,00
4	Desa Cimandiri	1.148.975.700,00	1.148.975.700,00	100	1.090.078.500,00
5	Desa Gununggede	1.150.898.700,00	1.150.898.700,00	100	1.129.707.500,00
6	Desa Situregen	1.410.055.700,00	1.410.055.700,00	100	1.069.007.500,00
7	Desa Mekarjaya	1.101.784.700,00	1.101.784.700,00	100	1.075.318.500,00
8	Desa Sindangratu	1.774.596.700,00	1.774.596.700,00	100	1.985.608.500,00
9	Desa Hegarmanah	1.316.419.700,00	1.316.419.700,00	100	1.040.235.500,00
10	Desa Sukajadi	1.389.688.700,00	1.389.688.700,00	100	1.072.447.500,00
11	Desa Cibarengkok	1.616.806.700,00	1.616.806.700,00	100	1.984.787.500,00
	Desa di Kecamatan Bayah	**13.290.947.700,00**	**13.290.947.700,00**	**100**	**13.112.428.500,00**
1	Desa Bayah Barat	1.183.951.700,00	1.183.951.700,00	100	1.043.830.500,00
2	Desa Sawarna	1.120.746.700,00	1.120.746.700,00	100	1.074.291.500,00
3	Desa Cidikit	1.737.187.700,00	1.737.187.700,00	100	1.866.686.500,00
4	Desa Suwakan	1.095.688.700,00	1.095.688.700,00	100	1.043.290.500,00
5	Desa Cimancak	1.164.321.700,00	1.164.321.700,00	100	1.154.939.500,00
6	Desa Darmasari	1.036.146.700,00	1.036.146.700,00	100	1.033.194.500,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
7	Desa Bayah Timur	1.182.719.700,00	1.182.719.700,00	100	1.041.513.500,00
8	Desa Cisuren	1.086.673.700,00	1.086.673.700,00	100	1.069.031.500.00
9	Desa Pasirgombong	1.034.545.700,00	1.034.545.700,00	100	1.024.484.500,00
10	Desa Sawarna Timur	1.261.745.700,00	1.261.745.700,00	100	1.329.857.500,00
11	Desa Pamubulan	1.387.219.700,00	1.387.219.700,00	100	1.431.308.500,00
	Desa di Kecamatan Cipanas	**16.739.391.800,00**	**16.739.391.800,00**	**100**	**16.809.961.200,00**
1	Desa Cipanas	1.048.068.700,00	1.048.068.700,00	100	1.033.073.500,00
2	Desa Girilaya	1.091.471.700,00	1.091.471.700,00	100	1.071.919.500,00
3	Desa Malangsari	1.505.548.700,00	1.505.548.700,00	100	1.479.370.500,00
4	Desa Bintangresmi	1.297.851.700,00	1.297.851.700,00	100	1.007.880.700,00
5	Desa Talagahiyang	1.006.312.700,00	1.006.312.700,00	100	1.170.601.500,00
6	Desa Luhurjaya	1.079.950.700,00	1.079.950.700,00	100	1.045.747.500,00
7	Desa Haurgajrug	1.073.404.700,00	1.073.404.700,00	100	1.055.400.500,00
8	Desa Giriharja	1.047.408.700,00	1.047.408.700,00	100	1.042.120.500,00
9	Desa Sukasari	1.899.084.700,00	1.899.084.700,00	100	2.128.388.500,00
10	Desa Jayapura	1.062.550.700,00	1.062.550.700,00	100	1.069.539.500,00
11	Desa Sipayung	1.202.500.700,00	1.202.500.700,00	100	1.269.897.500,00
12	Desa Bintangsari	1.031.624.700,00	1.031.624.700,00	100	1.014.266.500,00
13	Desa Pasirhaur	1.342.470.700,00	1.342.470.700,00	100	1.387.997.500,00
14	Desa Harumsari	1.051.142.700,00	1.051.142.700,00	100	1.033.757.500,00
	Desa di Kecamatan Muncang	**13.143.795.400,00**	**13.143.795.400,00**	**100**	**12.620.725.000,00**
1	Desa Pasireurih	1.098.909.700,00	1.098.909.700,00	100	1.081.100.500,00
2	Desa Ciminyak	1.026.846.700,00	1.026.846.700,00	100	1.027.302.500,00
3	Desa Muncang	1.053.377.700,00	1.053.377.700,00	100	1.051.243.500,00
4	Desa Leuwicoo	1.051.283.700,00	1.051.283.700,00	100	1.058.605.500,00
5	Desa Sindangwangi	1.053.733.700,00	1.053.733.700,00	100	1.065.247.500,00
6	Desa Cikarang	1.033.399.700,00	1.033.399.700,00	100	1.040.883.500,00
7	Desa Sukanagara	1.033.766.700,00	1.033.766.700,00	100	1.038.344.500,00
8	Desa Pasirnangka	1.559.276.700,00	1.559.276.700,00	100	1.044.721.500,00
9	Desa Jagaraksa	1.049.095.700,00	1.049.095.700,00	100	1.040.487.500,00
10	Desa Tanjungwangi	1.050.991.700,00	1.050.991.700,00	100	1.052.078.500,00
11	Desa Mekarwangi	1,062,412,700,00	1.062.412.700,00	100	1.059.596.500,00
12	Desa Girijagabaya	1,070,700,700,00	1.070.700.700,00	100	1.061.113.500,00
	Desa di Kecamatan Leuwidamar	**16.301.290.400,00**	**14.051.507.400,00**	**86,2**	**13.375.285.000,00**
1	Desa Kanekes	2,704,305,700,00	454.522.700,00	17	482.527.500,00
2	Desa Cisimeut	1.531.835.700,00	1.531.835.700,00	100	1.095.054.500,00
3	Desa Cibungur	1.078.283.700,00	1.078.283.700,00	100	1.067.347.500,00
4	Desa Leuwidamar	1.830.597.700,00	1.830.597.700,00	100	2.117.241.500,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
5	Desa Lebakparahiang	1.043.020.700,00	1.043.020.700,00	100	1.040.531.500,00
6	Desa Sangkanwangi	1.146.651.700,00	1.146.651.700,00	100	1.117.275.500,00
7	Desa Nayagati	1.213.872.700,00	1.213.872.700,00	100	1.119.519.500,00
8	Desa Bojongmenteng	1.062.040.700,00	1.062.040.700,00	100	1.057.915.500,00
9	Desa Margawangi	1.032.291.700,00	1.032.291.700,00	100	1.042.837.500,00
10	Desa Wantisari	1.152.265.700,00	1.152.265.700,00	100	1.038.611.500,00
11	Desa Jalupangmulya	1.390.872.700,00	1.390.872.700,00	100	1.078.746.500,00
12	Desa Cisimeut Raya	1.115.251.700,00	1.115.251.700,00	100	1.117.676.500,00
	Desa di Kecamatan Bojongmanik	**11.284.232.300,00**	**11.284.232.300,00**	**100**	**11.161.540.500,00**
1	Desa Bojongmanik	1.320.393.700,00	1.320.393.700,00	100	1.025.684.500,00
2	Desa Harjawana	1.054.770.700,00	1.054.770.700,00	100	1.032.204.500,00
3	Desa Kadurahayu	1.598.294.700,00	1.598.294.700,00	100	1.755.942.500,00
4	Desa Cimayang	1.114.194.700,00	1.114.194.700,00	100	1.071.014.500,00
5	Desa Parakanbeusi	1.089.565.700,00	1.089.565.700,00	100	1.067.647.500,00
6	Desa Keboncau	1.086.989.700,00	1.086.989.700,00	100	1.076.143.500,00
7	Desa Mekarmanik	1.382.644.700,00	1.382.644.700,00	100	1.375.929.500,00
8	Desa Mekar Rahayu	1.026.430.700,00	1.026.430.700,00	100	1.039.972.500,00
9	Desa Pasirbitung	1.610.947.700,00	1.610.947.700,00	100	1.717.001.500,00
	Desa di Kecamatan Gunungkencana	**14.565.687.400,00**	**14.565.687.400,00**	**100**	**13.011.919.000,00**
1	Desa Gunungkencana	1.038.592.700,00	1.038.592.700,00	100	1.041.484.500,00
2	Desa Cimanyangray	1.069.421.700,00	1.069.421.700,00	100	1.056.911.500,00
3	Desa Gunungkendeng	1.019.949.700,00	1.019.949.700,00	100	1.027.075.500,00
4	Desa Cisampang	1.371.692.700,00	1.371.692.700,00	100	1.102.480.500,00
5	Desa Ciginggang	1.438.256.700,00	1.438.256.700,00	100	1.116.450.500,00
6	Desa Ciakar	1.096.912.700,00	1.096.912.700,00	100	1.084.790.500,00
7	Desa Cicaringin	1.063.663.700,00	1.063.663.700,00	100	1.074.818.500,00
8	Desa Bulakan	1.079.204.700,00	1.079.204.700,00	100	1.070.382.500,00
9	Desa Sukanegara	1.554.817.700,00	1.554.817.700,00	100	1.036.488.500,00
10	Desa Bojongkoneng	1.336.191.700,00	1.336.191.700,00	100	1.052.059.500,00
11	Desa Kramatjaya	1.112.864.700,00	1.112.864.700,00	100	1.242.104.500,00
12	Desa Tanjungsari Indah	1.384.118.700,00	1.384.118.700,00	100	1.106.872.500,00
	Desa di Kecamatan Banjarsari	**22.422.155.000,00**	**22.422.155.000,00**	**100**	**22.630.944.000,00**
1	Desa Kerta	1.322.723.700,00	1.322.723.700,00	100	1.443.766.500,00
2	Desa Bojongjuruh	1.059.967.700,00	1.059.967.700,00	100	1.069.794.500,00
3	Desa Leuwiipuh	1.033.069.700,00	1.033.069.700,00	100	1.038.884.500,00
4	Desa Lebakkeusik	1.042.125.700,00	1.042.125.700,00	100	1.035.625.500,00
5	Desa Cilegongilir	1.029.896.700,00	1.029.896.700,00	100	1.032.117.500,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
6	Desa Keusik	1.079.631.700,00	1.079.631.700,00	100	1.083.744.500,00
7	Desa Cibaturkeusik	1.028.703.700,00	1.028.703.700,00	100	1.024.268.500,00
8	Desa Kumpay	1.371.600.700,00	1.371.600.700,00	100	1.085.165.500,00
9	Desa Jalupanggirang	1.065.449.700,00	1.065.449.700,00	100	1.081.916.500,00
10	Desa Bendungan	1.083.594.700,00	1.083.594.700,00	100	1.209.767.500,00
11	Desa Kertaraharja	1.224.390.700,00	1.224.390.700,00	100	1.195.262.500,00
12	Desa Cisampih	1.069.067.700,00	1.069.067.700,00	100	1.068.838.500,00
13	Desa Gunungsari	1.065.130.700,00	1.065.130.700,00	100	1.069.239.500,00
14	Desa Tamansari	1.022.294.700,00	1.022.294.700,00	100	1.028.963.500,00
15	Desa Cidahu	1.017.384.700,00	1.017.384.700,00	100	1.026.794.500,00
16	Desa Ciruji	1.606.346.700,00	1.606.346.700,00	100	1.792.314.500,00
17	Desa Kaduhauk	1.073.079.700,00	1.073.079.700,00	100	1.096.385.500,00
18	Desa Labanjaya	1.054.284.700,00	1.054.284.700,00	100	1.060.142.500,00
19	Desa Umbuljaya	1.071.336.700,00	1.071.336.700,00	100	1.084.918.500,00
20	Desa Kertarahayu	1.102.074.700,00	1.102.074.700,00	100	1.103.033.500,00
	Desa di Kecamatan Cileles	**14.986.779.400,00**	**14.986.779.400,00**	**100**	**15.019.669.000,00**
1	Desa Pasindangan	1.802.422.700,00	1.802.422.700,00	100	1.994.430.500,00
2	Desa Parungkujang	1.186.284.700,00	1.186.284.700,00	100	1.169.863.500,00
3	Desa Cileles	1.037.541.700,00	1.037.541.700,00	100	1.031.392.500,00
4	Desa Cikareo	1.446.054.700,00	1.446.054.700,00	100	1.583.497.500,00
5	Desa Cipadang	1.193.946.700,00	1.193.946.700,00	100	1.083.063.500,00
6	Desa Gumuruh	1.125.568.700,00	1.125.568.700,00	100	1.275.835.500,00
7	Desa Prabugantungan	1.143.513.700,00	1.143.513.700,00	100	1.046.313.500,00
8	Desa Daroyon	1.363.198.700,00	1.363.198.700,00	100	1.071.759.500,00
9	Desa Margamulya	1.094.042.700,00	1.094.042.700,00	100	1.071.283.500,00
10	Desa Mekarjaya	1.087.024.700,00	1.087.024.700,00	100	1.094.702.500,00
11	Desa Kujangsari	1.323.070.700,00	1.323.070.700,00	100	1.540.929.500,00
12	Desa Banjarsari	1.184.109.700,00	1.184.109.700,00	100	1.056.597.500,00
	Desa di Kecamatan Cimarga	**20.285.687.900,00**	**20.285.687.900,00**	**100**	**19.147.848.500,00**
1	Desa Sarageni	1.025.404.700,00	1.025.404.700,00	100	1.048.653.500,00
2	Desa Gununganten	1.084.099.700,00	1.084.099.700,00	100	1.073.917.500,00
3	Desa Sudamanik	1.456.008.700,00	1.456.008.700,00	100	1.057.142.500,00
4	Desa Tambak	1.471.190.700,00	1.471.190.700,00	100	1.193.580.500,00
5	Desa Cimarga	1.342.849.700,00	1.342.849.700,00	100	1.050.799.500,00
6	Desa Karyajaya	1.117.044.700,00	1.117.044.700,00	100	1.106.008.500,00
7	Desa Margajaya	1.210.475.700,00	1.210.475.700,00	100	1.067.672.500,00
8	Desa Jayamanik	1.091.452.700,00	1.091.452.700,00	100	1.070.002.500,00
9	Desa Margaluyu	1.077.971.700,00	1.077.971.700,00	100	1.067.828.500,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
10	Desa Margatirta	1.098.390.700,00	1.098.390.700,00	100	1.083.593.500,00
11	Desa Intenjaya	1.156.971.700,00	1.156.971.700,00	100	1.163.005.500,00
12	Desa Mekarjaya	1.123.591.700,00	1.123.591.700,00	100	1.148.706.500,00
13	Desa Jayasari	1.053.552.700,00	1.053.552.700,00	100	1.047.255.500,00
14	Desa Girimukti	1.047.868.700,00	1.047.868.700,00	100	1.033.661.500,00
15	Desa Sangkanmanik	1.431.488.700,00	1.431.488.700,00	100	1.762.122.500,00
16	Desa Sangiangjaya	1.092.021.700,00	1.092.021.700,00	100	1.072.042.500,00
17	Desa Mekarmulya	1.405.303.700,00	1.405.303.700,00	100	1.101.855.500,00
	Desa di Kecamatan Sajira	**17.843.768.500,00**	**17.843.768.500,00**	**100**	**18.077.661.500,00**
1	Desa Maraya	1.352.740.700,00	1.352.740.700,00	100	1.383.852.500,00
2	Desa Sajira	1.453.459.700,00	1.453.459.700,00	100	1.621.189.500,00
3	Desa Sukarame	1.071.127.700,00	1.071.127.700,00	100	1.054.049.500,00
4	Desa Calungbungur	1.081.568.700,00	1.081.568.700,00	100	1.051.768.500,00
5	Desa Parungsari	1.032.945.700,00	1.032.945.700,00	100	1.039.398.500,00
6	Desa Sindangsari	1.081.765.700,00	1.081.765.700,00	100	1.086.857.500,00
7	Desa Mekarsari	1.029.845.700,00	1.029.845.700,00	100	1.185.721.500,00
8	Desa Sukamarga	1.081.958.700,00	1.081.958.700,00	100	1.212.625.500,00
9	Desa Pajagan	1.071.512.700,00	1.071.512.700,00	100	1.045.119.500,00
10	Desa Sukajaya	1.041.223.700,00	1.041.223.700,00	100	1.046.339.500,00
11	Desa Sajira Mekar	1.054.589.700,00	1.054.589.700,00	100	1.032.341.500,00
12	Desa Paja	1.020.825.700,00	1.020.825.700,00	100	1.031.786.500,00
13	Desa Margaluyu	1.526.405.700,00	1.526.405.700,00	100	1.193.167.500,00
14	Desa Bungurmekar	1.810.922.700,00	1.810.922.700,00	100	1.909.878.500,00
15	Desa Ciuyah	1.132.875.700,00	1.132.875.700,00	100	1.183.565.500,00
	Desa di Kecamatan Maja	**17.193.185.800,00**	**17.193.185.800,00**	**100**	**17.842.393.000,00**
1	Desa Tanjungsari	1.067.453.700,00	1.067.453.700,00	100	1.227.190.500,00
2	Desa Maja	2.078.841.700,00	2.078.841.700,00	100	2.388.341.500,00
3	Desa Sangiang	1.038.762.700,00	1.038.762.700,00	100	1.037.164.500,00
4	Desa Binong	1.073.207.700,00	1.073.207.700,00	100	1.066.790.500,00
5	Desa Gubugan Cibeureum	1.018.498.700,00	1.018.498.700,00	100	1.033.442.500,00
6	Desa Mekarsari	1.327.394.700,00	1.327.394.700,00	100	1.053.041.500,00
7	Desa Padasuka	1.203.162.700,00	1.203.162.700,00	100	1.136.270.500,00
8	Desa Curugbadak	1.154.034.700,00	1.154.034.700,00	100	1.067.878.500,00
9	Desa Sindangmulya	1.141.688.700,00	1.141.688.700,00	100	1.056.997.500,00
10	Desa Cilangkap	1.043.617.700,00	1.043.617.700,00	100	1.193.369.500,00
11	Desa Pasirkembang	1.044.166.700,00	1.044.166.700,00	100	1.052.371.500,00
12	Desa Pasirkecapi	1.937.665.700,00	1.937.665.700,00	100	2.470.178.500,00
13	Desa Buyut Mekar	1.038.822.700,00	1.038.822.700,00	100	1.031.816.500,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
14	Desa Maja Baru	1.025.867.700,00	1.025.867.700,00	100	1.027.539.500,00
	Desa di Kecamatan Rangkasbitung	**13.294.085.700,00**	**13.294.085.700,00**	**100**	**12.726.530.500,00**
1	Desa Pasirtanjung	1.179.586.700,00	1.179.586.700,00	100	1.075.193.500,00
2	Desa Citeras	1.835.576.700,00	1.835.576.700,00	100	1.901.429.500,00
3	Desa Nameng	1.176.412.700,00	1.176.412.700,00	100	1.214.704.500,00
4	Desa Kolelet Wetan	1.026.055.700,00	1.026.055.700,00	100	1.025.709.500,00
5	Desa Jatimulya	1.143.715.700,00	1.143.715.700,00	100	1.044.584.500,00
6	Desa Mekarsari	1.123.584.700,00	1.123.584.700,00	100	1.033.956.500,00
7	Desa Pabuaran	1.046.086.700,00	1.046.086.700,00	100	1.053.253.500,00
8	Desa Rangkasbitung Timur	1.321.801.700,00	1.321.801.700,00	100	1.229.291.500,00
9	Desa Sukamanah	1.148.430.700,00	1.148.430.700,00	100	1.057.151.500,00
10	Desa Cimangeunteung	1.141.598.700,00	1.141.598.700,00	100	1.061.108.500,00
11	Desa Narimbang Mulia	1.151.235.700,00	1.151.235.700,00	100	1.030.147.500,00
	Desa di Kecamatan Warunggunung	**13.946.084.400,00**	**13.946.084.400,00**	**100**	**13.009.301.000,00**
1	Desa Sukarendah	1.149.939.700,00	1.149.939.700,00	100	1.053.676.500,00
2	Desa Warunggunung	1.620.739.700,00	1.620.739.700,00	100	1.031.477.500,00
3	Desa Cibuah	1.139.515.700,00	1.139.515.700,00	100	1.055.815.500,00
4	Desa Pasir Tangkil	1.048.836.700,00	1.048.836.700,00	100	1.031.831.500,00
5	Desa Baros	1.001.518.700,00	1.001.518.700,00	100	1.017.758.500,00
6	Desa Banjarsari	1.178.386.700,00	1.178.386.700,00	100	1.217.510.500,00
7	Desa Padasuka	1.407.832.700,00	1.407.832.700,00	100	1.072.581.500,00
8	Desa Sukaraja	1.185.547.700,00	1.185.547.700,00	100	1.242.940.500,00
9	Desa Jagabaya	1.051.927.700,00	1.051.927.700,00	100	1.040.472.500,00
10	Desa Selaraja	1.116.631.700,00	1.116.631.700,00	100	1.177.028.500,00
11	Desa Cempaka	1.025.612.700,00	1.025.612.700,00	100	1.040.496.500,00
12	Desa Sindangsari	1.019.594.700,00	1.019.594.700,00	100	1.027.711.500,00
	Desa di Kecamatan Cijaku	**11.752.520.000,00**	**11.752.520.000,00**	**100**	**11.017.016.000,00**
1	Desa Mekarjaya	1.331.535.700,00	1.331.535.700,00	100	1.069.562.500,00
2	Desa Cipalabuh	1.085.428.700,00	1.085.428.700,00	100	1.093.439.500,00
3	Desa Cijaku	1.031.059.700,00	1.031.059.700,00	100	1.054.456.500,00
4	Desa Cibeureum	1.099.074.700,00	1.099.074.700,00	100	1.142.541.500,00
5	Desa Ciapus	1.098.537.700,00	1.098.537.700,00	100	1.099.849.500,00
6	Desa Kandangsapi	1.199.149.700,00	1.199.149.700,00	100	1.104.051.500,00
7	Desa Cihujan	1.091.705.700,00	1.091.705.700,00	100	1.123.365.500,00
8	Desa Cimenga	1.643.439.700,00	1.643.439.700,00	100	1.145.891.500,00
9	Desa Kapunduhan	1.096.968.700,00	1.096.968.700,00	100	1.096.034.500,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
10	Desa Sukasenang	1.075.619.700,00	1.075.619.700,00	100	1.087.823.500,00
	Desa di Kecamatan Cikulur	**16.879.622.100,00**	**16.879.622.100,00**	**100**	**18.672.202.500,00**
1	Desa Anggalan	1.069.875.700,00	1.069.875.700,00	100	1.061.738.500,00
2	Desa Muncangkopong	1.040.855.700,00	1.040.855.700,00	100	1.046.086.500,00
3	Desa Sukaharja	1.012.905.700,00	1.012.905.700,00	100	1.034.654.500,00
4	Desa Tamanjaya	1.008.781.700,00	1.008.781.700,00	100	1.161.820.500,00
5	Desa Cigoong Utara	1.977.706.700,00	1.977.706.700,00	100	2.538.530.500,00
6	Desa Muaradua	1.152.518.700,00	1.152.518.700,00	100	1.078.986.500,00
7	Desa Cikulur	2.584.536.700,00	2.584.536.700,00	100	3.298.876.500,00
8	Desa Curugpanjang	1.059.018.700,00	1.059.018.700,00	100	1.052.504.500,00
9	Desa Cigoong Selatan	1.026.016.700,00	1.026.016.700,00	100	1.176.056.500,00
10	Desa Sumurbandung	1.187.071.700,00	1.187.071.700,00	100	1.093.416.500,00
11	Desa Parage	1.644.847.700,00	1.644.847.700,00	100	1.857.543.500,00
12	Desa Sukadaya	1.083.713.700,00	1.083.713.700,00	100	1.090.829.500,00
13	Desa Pasirgintung	1.031.772.700,00	1.031.772.700,00	100	1.181.158.500,00
	Desa di Kecamatan Cibadak	**18.418.204.120,00**	**18.418.204.118,00**	**100**	**18.521.861.500,00**
1	Desa Tambakbaya	1.187.322.700,00	1.187.322.700,00	100	1.108.777.500,00
2	Desa Kaduagung Timur	1.405.932.700,00	1.405.932.700,00	100	1.026.178.500,00
3	Desa Panancangan	1.020.729.700,00	1.020.729.700,00	100	1.015.533.500,00
4	Desa Cibadak	1.119.456.700,00	1.119.456.700,00	100	1.044.838.500,00
5	Desa Asem	1.024.008.700,00	1.024.008.700,00	100	1.021.868.500,00
6	Desa Cisangu	1.048.266.700,00	1.048.266.700,00	100	1.047.100.500,00
7	Desa Kaduagung Barat	1.032.241.700,00	1.032.241.700,00	100	1.018.910.500,00
8	Desa Bojongcae	1.640.355.700,00	1.640.355.700,00	100	1.838.952.500,00
9	Desa Malabar	1.029.301.700,00	1.029.301.700,00	100	1.029.509.500,00
10	Desa Pasar Keong	1.110.390.700,00	1.110.390.700,00	100	1.022.464.500,00
11	Desa Bojong Leles	1.903.632.700,00	1.903.632.700,00	100	2.237.841.500,00
12	Desa Cimenteng Jaya	1.408.469.320,00	1.408.469.318,00	100	1.747.183.500,00
13	Desa Mekar Agung	1.333.001.700,00	1.333.001.700,00	100	1.033.202.500,00
14	Desa Asem Margaluyu	1.057.784.700,00	1.057.784.700,00	100	1.199.552.500,00
15	Desa Kaduagung Tengah	1.097.308.700,00	1.097.308.700,00	100	1.129.947.500,00
	Desa di Kecamatan Cibeber	**24.800.390.400,00**	**24.800.390.400,00**	**100**	**24.061.828.000,00**
1	Desa Cibeber	1.276.109.700,00	1.276.109.700,00	100	1.289.982.500,00
2	Desa Citorek Tengah	1.130.427.700,00	1.130.427.700,00	100	1.090.670.500,00
3	Desa Cisungsang	1.322.149.700,00	1.322.149.700,00	100	1.046.298.500,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
4	Desa Kujangjaya	1.030.058.700,00	1.030.058.700,00	100	1.031.208.500,00
5	Desa Kujangsari	1.101.543.700,00	1.101.543.700,00	100	1.102.457.500,00
6	Desa Neglasari	1.395.188.700,00	1.395.188.700,00	100	1.075.643.500,00
7	Desa Mekarsari	1.360.949.700,00	1.360.949.700,00	100	1.043.846.500,00
8	Desa Cikotok	1.073.065.700,00	1.073.065.700,00	100	1.089.048.500,00
9	Desa Sukamulya	1.054.457.700,00	1.054.457.700,00	100	1.053.458.500,00
10	Desa Citorek Timur	1.106.439.700,00	1.106.439.700,00	100	1.103.647.500,00
11	Desa Warungbanten	1.084.837.700,00	1.084.837.700,00	100	1.047.460.500,00
12	Desa Hegarmanah	1.048.571.700,00	1.048.571.700,00	100	1.039.180.500,00
13	Desa Situmulya	1.108.546.700,00	1.108.546.700,00	100	1.097.511.500,00
14	Desa Citorek Kidul	1.110.898.700,00	1.110.898.700,00	100	1.089.831.500,00
15	Desa Cikadu	1.067.899.700,00	1.067.899.700,00	100	1.051.280.500,00
16	Desa Sirnagalih	1.090.861.700,00	1.090.861.700,00	100	1.222.901.500,00
17	Desa Cihambali	1.065.788.700,00	1.065.788.700,00	100	1.214.900.500,00
18	Desa Citorek Barat	1.122.837.700,00	1.122.837.700,00	100	1.108.498.500,00
19	Desa Gunungwangun	1.027.396.700,00	1.027.396.700,00	100	1.036.267.500,00
20	Desa Wanasari	1.094.114.700,00	1.094.114.700,00	100	1.106.227.500,00
21	Desa Citorek Sabrang	1.088.360.700,00	1.088.360.700,00	100	1.092.016.500,00
22	Desa Ciherang	1.039.884.700,00	1.039.884.700	100	1.029.489.500,00
	Desa di Kecamatan Cilograng	**12.226.238.000,00**	**12.226.238.000,00**	**100**	**12.245.745.000,00**
1	Desa Cilograng	1.072.352.700,00	1.072.352.700,00	100	1.050.954.500,00
2	Desa Cibareno	1,033,365,700	1.033.365.700,00	100	1.030.207.500,00
3	Desa Cikamunding	1.675.129.700,00	1.675.129.700,00	100	1.680.574.500,00
4	Desa Cijengkol	1.151.230.700,00	1.151.230.700,00	100	1.099.379.500,00
5	Desa Pasirbungur	1.371.640.700,00	1.371.640.700,00	100	1.200.475.500,00
6	Desa Lebaktipar	1.079.673.700,00	1.079.673.700,00	100	1.061.070.500,00
7	Desa Cikatomas	1.079.841.700,00	1.079.841.700,00	100	1.203.266.500,00
8	Desa Girimukti	1.531.822.700,00	1.531.822.700,00	100	1.635.594.500,00
9	Desa Cireundeu	1.211.418.700,00	1.211.418.700,00	100	1.267.710.500,00
10	Desa Gunungbatu	1.019.761.700,00	1.019.761.700,00	100	1.016.511.500,00
	Desa di Kecamatan Wanasalam	**15.452.689.100,00**	**15.452.689.100,00**	**100**	**14.659.884.500,00**
1	Desa Wanasalam	1.192.678.700,00	1.192.678.700,00	100	1.094.463.500,00
2	Desa Bejod	1.176.774.700,00	1.176.774.700,00	100	1.095.456.500,00
3	Desa Cilangkap	1.061.724.700,00	1.061.724.700,00	100	1.042.647.500,00
4	Desa Cipeucang	1.056.675.700,00	1.056.675.700,00	100	1.054.164.500,00
5	Desa Muara	1.304.046.700,00	1.304.046.700,00	100	1.130.981.500,00
6	Desa Parungpanjang	1.391.048.700,00	1.391.048.700,00	100	1.272.531.500,00
7	Desa Cikeusik	1.345.044.700,00	1.345.044.700,00	100	1.052.861.500,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
8	Desa Katapang	1.375.730.700,00	1.375.730.700,00	100	1.262.151.500,00
9	Desa Cisarap	1.069.137.700,00	1.069.137.700,00	100	1.056.646.500,00
10	Desa Sukatani	1.228.577.700,00	1.228.577.700,00	100	1.134.618.500,00
11	Desa Cipedang	1.066.650.700,00	1.066.650.700,00	100	1.059.142.500,00
12	Desa Parungsari	1.064.790.700,00	1.064.790.700,00	100	1.248.798.500,00
13	Desa Karangpamindangan	1.119.807.700,00	1.119.807.700,00	100	1.155.420.500,00
	Desa di Kecamatan Sobang	**12.451.516.000,00**	**12.451.516.000,00**	**100**	**10.928.292.000,00**
1	Desa Ciparasi	1.107.096.700,00	1.107.096.700,00	100	1.062.686.500,00
2	Desa Sobang	1.628.391.700,00	1.628.391.700,00	100	1.077.596.500,00
3	Desa Sukajaya	1.052.323.700,00	1.052.323.700,00	100	1.049.694.500,00
4	Desa Sindanglaya	1.511.109.700,00	1.511.109.700,00	100	1.052.814.500,00
5	Desa Sukamaju	1.118.007.700,00	1.118.007.700,00	100	1.074.781.500,00
6	Desa Hariang	1.652.440.700,00	1.652.440.700,00	100	1.117.336.500,00
7	Desa Majasari	1.144.236.700,00	1.144.236.700,00	100	1.268.161.500,00
8	Desa Sinar Jaya	1.077.406.700,00	1.077.406.700,00	100	1.101.559.500,00
9	Desa Cirompang	1.068.634.700,00	1.068.634.700,00	100	1.056.143.500,00
10	Desa Sukaresmi	1.091.867.700,00	1.091.867.700,00	100	1.067.517.500,00
	Desa di Kecamatan Curug bitung	**11.133.246.000,00**	**11.133.246.000,00**	**100**	**11.446.991.000,00**
1	Desa Guradog	1.089.830.700,00	1.089.830.700,00	100	1.088.694.500,00
2	Desa Curugbitung	1.569.164.700,00	1.569.164.700,00	100	1.984.849.500,00
3	Desa Candi	1.025.023.700,00	1.025.023.700,00	100	1.018.291.500,00
4	Desa Mayak	1.032.356.700,00	1.032.356.700,00	100	1.027.853.500,00
5	Desa Cipining	1.051.282.700,00	1.051.282.700,00	100	1.051.447.500,00
6	Desa Cilayang	1.051.272.700,00	1.051.272.700,00	100	1.051.053.500,00
7	Desa Ciburuy	1.146.543.700,00	1.146.543.700,00	100	1.052.731.500,00
8	Desa Sekarwangi	1.069.069.700,00	1.069.069.700,00	100	1.054.282.500,00
9	Desa Cidadap	1.063.667.700,00	1.063.667.700,00	100	1.063.750.500,00
10	Desa Lebakasih	1.035.033.700,00	1.035.033.700,00	100	1.054.036.500,00
	Desa di Kecamatan Kalanganyar	**8.439.330.900,00**	**8.439.330.900,00**	**100**	**8.144.633.500,00**
1	Desa Kalanganyar	1.036.321.700,00	1.036.321.700,00	100	1.046.330.500,00
2	Desa Pasirkupa	1.199.276.700,00	1.199.276.700,00	100	1.119.100.500,00
3	Desa Cilangkap	1.128.367.700,00	1.128.367.700,00	100	1.182.469.500,00
4	Desa Aweh	1.124.134.700,00	1.124.134.700,00	100	1.035.407.500,00
5	Desa Sangiangtanjung	1.522.643.700,00	1.522.643.700,00	100	1.163.161.500,00
6	Desa Sukamekarsari	1.125.239.700,00	1.125.239.700,00	100	1.174.134.500,00
7	Desa Cikatapis	1.303.346.700,00	1.303.346.700,00	100	1.424.029.500,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
	Desa di Kecamatan Lebakgedong	**7.745.565.200,00**	**7.745.565.200,00**	**100**	**6.406.715.000,00**
1	Desa Banjaririgasi	1.935.259.700,00	1.935.259.700,00	100	1.101.959.500,00
2	Desa Ciladaeun	1.056.103.700,00	1.056.103.700,00	100	1.057.325.500,00
3	Desa Lebakgedong	1.068.645.700,00	1.068.645.700,00	100	1.068.387.500,00
4	Desa Banjarsari	1.551.511.700,00	1.551.511.700,00	100	1.047.859.500,00
5	Desa Lebaksitu	1.064.221.700,00	1.064.221.700,00	100	1.065.098.500,00
6	Desa Lebaksangka	1.069.822.700,00	1.069.822.700,00	100	1.066.084.500,00
	Desa di Kecamatan Cihara	**10.329.972.300,00**	**10.329.972.300,00**	**100**	**10.368.720.500,00**
1	Desa Panyaungan	1.111.945.700,00	1.111.945.700,00	100	1.078.329.500,00
2	Desa Cihara	1.046.125.700,00	1.046.125.700,00	100	1.055.165.500,00
3	Desa Ciparahu	1.119.729.700,00	1.119.729.700,00	100	1.100.351.500,00
4	Desa Pondokpanjang	1.198.697.700,00	1.198.697.700,00	100	1.235.727.500,00
5	Desa Citeupuseun	1.052.664.700,00	1.052.664.700,00	100	1.056.204.500,00
6	Desa Lebakpeundeuy	1.101.667.700,00	1.101.667.700,00	100	1.088.496.500,00
7	Desa Mekarsari	1.134.267.700,00	1.134.267.700,00	100	1.095.741.500,00
8	Desa Karangkamulyan	1.457.533.700,00	1.457.533.700,00	100	1.546.613.500,00
9	Desa Barunai	1.107.339.700,00	1.107.339.700,00	100	1.112.090.500,00
	Desa di Kecamatan Cirinten	**11.387.399.000,00**	**11.387.399.000,00**	**100**	**10.646.221.000,00**
1	Desa Datarcae	1.069.807.700,00	1.069.807.700,00	100	1.050.319.500,00
2	Desa Cirinten	1.141.624.700,00	1.141.624.700,00	100	1.105.971.500,00
3	Desa Karangnunggal	1.020.248.700,00	1.020.248.700,00	100	1.021.962.500,00
4	Desa Kadudamas	1.392.347.700,00	1.392.347.700,00	100	1.065.546.500,00
5	Desa Badur	1.363.315.700,00	1.363.315.700,00	100	1.063.761.500,00
6	Desa Parakanlima	1.120.790.700,00	1.120.790.700,00	100	1.093.066.500,00
7	Desa Nanggerang	1.119.434.700,00	1.119.434.700,00	100	1.078.309.500,00
8	Desa Cempaka	1.054.355.700,00	1.054.355.700,00	100	1.061.998.500,00
9	Desa Karoya	1.053.538.700,00	1.053.538.700,00	100	1.046.438.500,00
10	Desa Cibarani	1.051.934.700,00	1.051.934.700,00	100	1.058.846.500,00
	Desa di Kecamatan Cigemblong	**11.012.232.300,00**	**11.012.232.300,00**	**100**	**10.780.456.500,00**
1	Desa Peucangpari	1.091.614.700,00	1.091.614.700,00	100	1.081.529.500,00
2	Desa Cibungur	1.045.092.700,00	1.045.092.700,00	100	1.029.756.500,00
3	Desa Mugijaya	1.400.167.700,00	1.400.167.700,00	100	1.464.636.500,00
4	Desa Cikate	1.631.426.700,00	1.631.426.700,00	100	1.747.249.500,00
5	Desa Cigemblong	1.083.119.700,00	1.083.119.700,00	100	1.063.729.500,00
6	Desa Cikadongdong	1.125.167.700,00	1.125.167.700,00	100	1.090.446.500,00
7	Desa Cikaret	1.112.794.700,00	1.112.794.700,00	100	1.095.330.500,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021			REALISASI TAHUN 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
8	Desa Wangunjaya	1.405.312.700,00	1.405.312.700,00	100	1.121.981.500,00
9	Desa Cikaratuan	1.117.535.700,00	1.117.535.700,00	100	1.085.796.500,00
	JUMLAH	**407.529.133.620,00**	**405.279.350.618,00**	**99,45**	**395.680.771.200,00**

5.1.1.4 Surplus/Defisit

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021, mengalami defisit anggaran sebesar Rp(277.970.304.122,00) tetapi pada realisasinya mengalami surplus sebesar Rp253.022.590,00 dengan rincian surplus/defisit dapat dilihat pada Tabel 5.46 sebagai berikut:

Tabel 5.46
Surplus/Defisit Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021		REALISASI 2020
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Daerah	2.642.438.919.107,00	2.643.719.867.031,00	100,05	2.547.087.060.222,00
2	Belanja Daerah	2.920.409.223.229,00	2.643.466.844.441,00	90,52	2.497.002.959.536,30
SURPLUS/ DEFISIT		**(277.970.304.122,00)**	**253.022.590,00**	**(0,09)**	**50.084.100.685,70**

5.1.1.5 Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Lebak terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak yang perlu dibayar kembali yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk Tahun Anggaran 2021 yang diperoleh dari pemggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) audited Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp288.086.981.713,05 dan terealisasi sebesar Rp296.833.959.123,05. Penerimaan pembiayaan dari penggunaan SiLPA tidak terealisasi 100% dikarenakan pada Tahun 2021 terdapat koreksi sisa kas Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2020 sebesar Rp4.885.000,00.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah. Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.000.000.000,00 atau 47,37%. Rincian dari Pengeluaran Pembiayaan dapat dilihat pada Tabel 5.47 sebagai berikut:

Tabel 5.47
Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
1	Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Multatuli	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	33,33	15.000.000.000,00
2	Penyertaan modal pada BPR Warunggunung	0,00	0,00	0,00	3.105.000.000,00
3	Penyertaan modal pada LKM Rangkasbitung	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
J U M L A H		**19.000.000.000,00**	**9.000.000.000,00**	**47,37**	**19.605.000.000,00**

5.1.1.6 SiLPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Angaran 2021. SiLPA untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp288.086.981.713,05. Apabila dibandingkan dengan realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp296.838.844.123,05 mengalami penurunan sebesar Rp8.751.862.410,00 atau 2,95%. Rincian SiLPA untuk Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 5.48 berikut:

Tabel 5.48
Rincian SiLPA Kabupaten Lebak Tahun 2021 Dan 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1	**Pelampauan Penerimaan PAD**	**25.260.900.769,00**	**38.563.146.644,00**
	Pajak Daerah	34.702.968.633,00	21.044.003.318,00
	Retribusi Daerah	62.442.122,00	1.654.770.965,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	(658.452.876,00)	0,00
	Lain-Lain Pad Yang Sah	(8.846.057.110,00)	15.864.372.361,00
2	**Pelampauan Penerimaan Transfer**	**5.380.076.295,00**	**(22.524.101.431,00)**
	Transfer Pemerintah Pusat	5.380.076.295,00	(15.489.140.844,00)
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	(7.034.960.587,00)
3	**Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**(29.360.029.140,00)**	**30.319.303.044,00**
4	Pendapatan Hibah	(37.798.799.140,00)	(1.419.217.456,00)
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.438.770.000,00	31.738.520.500,00
	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya	**276.942.378.788,00**	**246.637.735.740,10**
	Belanja Pegawai	76.197.072.852,00	96.666.911.438,67
	Belanja Barang Dan Jasa	143.160.468.923,00	68.076.997.481,00
	Belanja Hibah	14.772.740.540,00	2.836.791.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	189.600.000,00	1.190.277.946,50
	Belanja Modal	35.780.163.272,00	30.464.509.664,53
	Belanja Tidak Terduga	4.592.550.199,00	44.988.172.209,40
	Belanja Bantuan Keuangan	2.249.783.002,00	2.414.076.000,00
5	**Kegiatan Lanjutan**	**0,00**	**3.974.220.125,00**
	Dinas Kesehatan	**0,00**	**898.074.600,00**
	A. Belanja Modal	**0,00**	**898.074.600,00**
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pembangunan Gedung Puskesmas Parungsari Kec. Wanasalam (Dak Afirmasi)	0.00	898.074.600,00
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	**0,00**	**3.076.145.525,00**
	A. Belanja Barang Dan Jasa	**0,00**	**30.000.000,00**
	Transportasi	0,00	30.000.000,00
	B. Belanja Modal	**0,00**	**3.046.145.525,00**
	Pembangunan Jalan	**0,00**	**1.668.042.750,00**
	Belanja Modal Jalan Kabupaten Pamatang Rawu Desa Cipadang - Kp. Cempaka Desa Pasindangan	0,00	1.668.042.750,00
	Rehabilitasi Jalan	**0,00**	**510.169.160,00**
	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota (Cirinten - Pasarkupa)	0,00	510.169.160,00
	Pembangunan Jembatan	**0,00**	**867,933,615.00**
	Jembatan Gantung Permanen Sungai Cimadur Kp. Suwakan Kp. Ramadi/Suramadi (Bangunan Atas) Ds. Suwakan	0,00	602,460,800.00
	Jembatan Gantung Permanen Sungai Cilancar Kp. Lebak Kalian (Bangunan Atas) Ds. Pasirgintung	0,00	265,472,815.00
6	**Pembiayaan Netto**	**9.863.655.001,05**	**(131.459.999,05)**

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
	JUMLAH	288.086.981.713,05	296.838.844.123,05

5.1.2 Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5.1.2.1 Pendapatan - LO

Pendapatan - LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 merupakan Pendapatan yang akan diterima dalam periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.867.837.976.851,92 mengalami kenaikan sebesar Rp84.188.178.210,31 atau 3,02% jika dibandingkan dengan Pendapatan – LO pada Tahun 2020 sebesar Rp2.783.649.798.641,61. Rincian Pendapatan – LO dapat dilihat pada tabel 5.49 berikut:

Tabel 5.49
Pendapatan – LO Kabupaten Lebak
Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	PENDAPATAN – LO	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Asli Daerah	380.809.554.719,72	356.224.836.285,61	24.584.718.434,11
2	Pendapatan Transfer	2.024.263.731.595,00	2.003.151.186.622,00	21.112.544.973,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	462.764.690.537,20	424.273.775.734,00	38.490.914.803,20
JUMLAH		**2.867.837.976.851,92**	**2.783.649.798.641,61**	**84.188.178.210,31**

1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 merupakan Pendapatan Asli Daerah untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp380.809.554.719,72 Jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah – LO pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp356.224.836.285,61 mengalami kenaikan sebesar Rp24.584.718.434,11 atau 6,90%. Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.50 sebagai berikut:

Tabel 5.50
Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	4	5
1	Pajak Daerah	155.653.499.793,58	135.239.825.380,00	20.413.674.413,58
2	Retribusi Daerah	15.300.294.135,00	15.377.430.561,83	(77.136.426,83)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	7.350.206.202,30	5.231.517.851,00	2.118.688.351,30
4	Lain Lain PAD yang Sah	202.505.554.588,84	200.376.062.492,78	2.129.492.096,06
JUMLAH		**380.809.554.719,72**	**356.224.836.285,61**	**24.584.718.434,11**

1.a. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 merupakan Pendapatan Pajak Daerah untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang dihitung berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan SPPT PBB yang telah diterbitkan. Pendapatan Pajak Daerah – LO Kabupaten Lebak Tahun 2021 sebesar Rp155.653.499.793,58 mengalami kenaikan sebesar Rp20.413.674.413,58 atau 15,09%, jika dibandingkan dengan pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2020 sebesar Rp135.239.825.380,00. Rincian dari masing-masing obyek Pendapatan Pajak Daerah - LO dapat dilihat pada tabel 5.51 berikut:

Tabel 5.51
Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	PAJAK DAERAH	TAHUN 2021 (RP)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	4	5
1	**Pajak Hotel – LO**	**382.538.222,00**	**246.638.315,00**	**135.899.907,00**
	Hotel – LO	337.086.089,00	183.763.864,00	153.322.225,00
	Wisma Pariwisata – LO	800.000,00	1.050.000,00	(250.000,00)
	Rumah Penginapan dan sejenisnya – LO	19.712.133,00	27.965.951,00	(8.253.818,00)
	Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) – LO	24.940.000,00	33.858.500,00	(8.918.500,00)
2	**Pajak Restoran – LO**	**4.962.447.896,00**	**4.725.210.233,00**	**237.237.663,00**
	Rumah Makan – LO	1.772.041.963,00	2.178.322.233,00	(406.280.270,00)
	Warung – LO	34.675.000,00	57.578.200,00	(22.903.200,00)
	Jasa Boga/ Katering – LO	3.155.730.933,00	2.489.309.800,00	666.421.133,00
3	**Pajak Hiburan – LO**	**43.843.069,00**	**77.384.200,00**	**(33.541.131,00)**
	Tontonan Film/Bioskop	4.453.750,00	27.840.750,00	(23.387.000,00)

NO	PAJAK DAERAH	TAHUN 2021 (RP)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	4	5
	Diskotik. Karaoke. Klab Malam dan sejenisnya – LO	0,00	7.181.250,00	(7.181.250,00)
	Pacuan Kuda. Kendaraan Bermotor. Permainan Ketangkasan – LO	32.297.819,00	30.412.200,00	1.885.619,00
	Pertandingan Olahraga – LO	7.091.500,00	11.950.000,00	(4.858.500,00)
4	**Pajak Reklame – LO**	**1.038.289.802,58**	**789.954.948,00**	**248.334.854,58**
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron – LO	1.038.289.802,58	739.079.674,00	299.210.128,58
	Pajak Reklame Kain – LO	0,00	24.458.194,00	(24.458.194,00)
	Pajak Reklame Melekat	0,00	26.417.080,00	(26.417.080,00)
	Pajak Reklame Berjalan	0,00	0,00	0,00
5	**Pajak Penerangan Jalan – LO**	**17.633.838.540,00**	**18.509.889.286,00**	**(876.050.746,00)**
	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri – LO	17.633.838.540,00	18.509.889.286,00	(876.050.746,00)
6	**Pajak Parkir – LO**	**451.052.400,00**	**487.410.300,00**	**(36.357.900,00)**
	Pajak Parkir – LO	451.052.400,00	487.410.300,00	(36.357.900,00)
7	**Pajak Air Tanah – LO**	**547.427.475,00**	**293.265.628,00**	**254.161.847,00**
	Pajak Air Bawah Tanah – LO	547.427.475,00	293.265.628,00	254.161.847,00
8	**Pajak Sarang Burung Walet – LO**	**13.630.000,00**	**15.530.000,00**	**(1.900.000,00)**
	Pajak Sarang Burung Walet – LO	13.630.000,00	15.530.000,00	(1.900.000,00)
9	**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO**	**33.104.101.590,00**	**27.688.580.611,00**	**5.415.520.979,00**
	Batu Kapur – LO	26.433.046.863,00	21.270.659.010,00	5.162.387.853,00
	Bentonit – LO	509.568.131,00	421.902.449,00	87.665.682,00
	Feldspar – LO	0,00	0,00	0,00
	Granit/Andesit – LO	0,00	26.749.474,00	(26.749.474,00)
	Pasir Kuarsa – LO	1.477.629.286,00	1.299.106.669,00	178.522.617,00
	Tanah Liat – LO	3.324.233.160,00	2.690.032.284,00	634.200.876,00
	Zeolit – LO	4.036.500,00	5.460.000,00	(1.423.500,00)
	Tanah/Pasir Urug – LO	0,00	55.485.000,00	(55.485.000,00)
	Pasir Darat – LO	1.355.587.650,00	1.919.185.725,00	(563.598.075,00)
10	**Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) – LO**	**33.601.322.489,00**	**30.871.315.352,00**	**2.730.007.137,00**
	PBB P2 – LO	33.601.322.489,00	30.871.315.352,00	2.730.007.137,00
11	**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO**	**63.875.008.310,00**	**51.534.646.507,00**	**12.340.361.803,00**
	BPHTB - Pemindahan Hak – LO	63.875.008.310,00	51.534.646.507,00	12.340.361.803,00
	BPHTB - Pemberian Hak Baru – LO	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**155.653.499.793,58**	**135.239.825.380,00**	**20.413.674.413,58**

1.b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 merupakan Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang dihitung berdasarkan retribusi atas jasa yang telah diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak sebesar Rp15.300.294.135,00 mengalami penurunan sebesar Rp77.136.426,83 atau 0,50% jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada Tahun 2020 sebesar Rp15.377.430.561,83. Rincian dari masing-masing obyek retribusi daerah dapat dilihat pada tabel 5.52 berikut:

Tabel 5.52
Pendapatan Retribusi – LO Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	URAIAN		TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN/ PENURUNAN
			Rp	(Rp)	
1	2		3	4	5
1	**Retribusi Jasa Umum – LO**		**5.272.389.608,00**	**4.450.244.299,00**	**822.145.309,00**
	a	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	301.605.000,00	25.771.000,00	275.834.000,00
	b	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	423.082.700,00	384.970.000,00	38.112.700,00
	c	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	271.680.000,00	233.020.000,00	38.660.000,00
	d	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	2.399.768.802,00	2.253.684.300,00	146.084.502,00
	e	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	963.595.000,00	683.138.000,00	280.457.000,00
	f	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	23.400.500,00	18.003.000,00	5.397.500,000
	g	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	92.217.606,00	78.378.000,00	13.839.606,000
	h	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	797.040.000,00	773.279.999,00	23.760.001,00
2	**Retribusi Jasa Usaha – LO**		**3.606.662.137,00**	**3.578.931.989,83**	**27.730.147,17**
	A	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	1.530.527.042,00	1.636.877.262,83	(106.350.220,83)
	B	Retribusi Tempat Pelelangan – LO	1.242.847.535,00	1.201.122.000,00	41.725.535,00
	C	Retribusi Terminal – LO	285.634.000,00	307.585.000,00	(21.951.000,00)
	D	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	24.760.000,00	34.560.000,00	(9.800.000,00)
	E	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO	149.250.000,00	42.962.727,00	106.287.273,00

	F	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	373.643.560,00	355.825.000,00	17.818.560,00
3		**Retribusi Perizinan Tertentu – LO**	**6.421.242.390,00**	**7.348.254.273,00**	**(927.011.883,00)**
	A	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	6.300.112.390,00	7.173.764.273,00	(873.651.883,00)
	B	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LO	22.530.000,00	52.490.000,00	(29.960.000,00)
	C	Retribusi Izin Usaha Perikanan – LO	98.600.000,00	122.000.000,00	(23.400.000,00)
	JUMLAH		**15.300.294.135,00**	**15.377.430.561,83**	**(77.136.426,83)**

1.c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 merupakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp Rp7.350.206.202,30 mengalami kenaikan sebesar Rp2.118.688.351,30 atau 40,50% jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp5.231.517.851,00. Rincian dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dapat dilihat pada Tabel 5.53 sebagai berikut**:**

Tabel 5.53
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO
Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	5
1	BJB	3.598.485.746,00	3.533.837.788,00	64.647.958,00
2	PT. BPR Lebak Sejahtera	1.408.997.905,00	1.697.680.063,00	(288.682.158,00)
3	PT. LKM Rangkasbitung	275.273.341,00	0,00	275.273.341,00
4	Keuntungan hasil perhitungan investasi BUMD	2.067.449.210,30	0,00	2.067.449.210,30
Jumlah		**7.350.206.202,30**	**5.231.517.851,00**	**2.118.688.351,30**

1.d Lain Lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 merupakan Pendapatan Lain – Lain PAD Yang Sah untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp202.505.554.588,84 mengalami kenaikan sebesar Rp2.129.492.096,06 atau 1,06% jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp200.376.062.492,78. Rincian dari masing-masing obyek Pendapatan Lain – Lain PAD Yang Sah dapat dilihat padaTabel

5.54 berikut:

Tabel 5.54
Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah – LO Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN		TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUAN
1	2		3	4	5
1	**Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**		**186.463.000,00**	**300.226.000,00**	**(113.736.000,000**
	a	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
	b	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	162.808.000,00	300.226.000,00	(137.418.000,00)
	c	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	23.655.000,00	0,00	23.655.000,00
2	**Jasa Giro**		**3.423.402.912,00**	**3.803.142.379,00**	**(379.739.467,00)**
	A	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.273.420.592,00	3.803.142.379,00	(529.721.787,00)
	B	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	149.982.320,00	0,00	149.982.320,00
3	**Pendapatan Bunga**		**5.498.630.143,00**	**10.192.530.382,00**	**(4.693.900.239,00)**
	a	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.498.630.143,00	10.192.530.382,00	(4.693.900.239,00)
4	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**		**370.809.401,00**	**251.937.496,00**	**118.871.905,00**
	a	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	370.809.401,00	251.937.496,00	118.871.905,00
5	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**		**2.646.959.587,84**	**2.355.700.587,78**	**291.259.000,06**
	a	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.098.644,00	3.026.740,00	(1.928.096,00)
	b	Pendapatan Denda Pajak Restoran	35.515.411,00	15.587.819,00	19.927.592,00
	c	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	284.224,00	1.727.480,00	(1.443.256,00)
	d	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	27.000,00	(27.000,00)
	e	Pendapatan Denda Pajak Reklame	3.457.313,00	0,00	3.457.313,00
	f	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	112.658,00	0,00	112.658,00
	g	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	99.600,00	0,00	99.600,00
	h	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	74.247.935,00	4.523.587,00	69.724.348,00
	i	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.532.143.802,84	2.330.807.961,78	201.335.841,06

NO	URAIAN		TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUAN
1	2		3	4	5
6	**Pendapatan Denda Retribusi Daerah**		**1.539.338,00**	**0,00**	**1.539.338,00**
	a	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	1.539.338,00	0,00	1.539.338,00
7	**Pendapatan dari Pengembalian**		**1.742.434.846,00**	**3.447.201.713,00**	**(1.704.766.867,00)**
	a	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	529.611.155,00	2.504.634.845,00	(1.975.023.690,00)
	b	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.203.679.378,00	942.566.868,00	261.112.510,00
	c	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
	d	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.022.191,00	0,00	3.022.191,00
	e	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	6.122.122,00	0,00	6.122.122,00
8	**Pendapatan BLUD**		**188.630.695.361,00**	**179.949.348.935,00**	**8.681.346.426,00**
	a	Pendapatan BLUD	188.630.695.361,00	179.949.348.935,00	8.681.346.426,00
9	**Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**		**4.620.000,00**	**75.975.000,00**	**(71.355.000,00)**
	a	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	4.620.000,00	75.975.000,00	(71.355.000,00)
JUMLAH			**202.505.554.588,84**	**200.376.062.492,78**	**2.129.492.096,06**

2. Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan transfer merupakan penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer - LO diakui pada saat diterimanya kas di Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi dalam hal kaitannya dengan kurang salur.

Pendapatan Transfer – LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 merupakan Pendapatan Transfer untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.024.263.731.595,00 mengalami kenaikan sebesar

Rp21.112.544.973,00 atau 1,05% jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer – LO pada Tahun 2020 sebesar Rp2.003.151.186.622,00. Rincian masing-masing obyek dari Pendapatan Transfer – LO dapat dilihat pada Tabel 5.55 sebagai berikut:

Tabel 5.55
Pendapatan Transfer – LO Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	5
1	Transfer Pemerintah Pusat	1.844.377.914.056,00	1.810.614.299.407,00	33.763.614.649,00
2	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	179.885.817.539,00	192.536.887.215,00	(12.651.069.676,00)
JUMLAH		**2.024.263.731.595,00**	**2.003.151.186.622,00**	**21.112.544.973,00**

2.a. Transfer Pemerintah Pusat - LO

Transfer Pemerintah Pusat – LO merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.844.377.914.056,00, jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer – LO Tahun 2020 sebesar Rp1.810.614.299.407,00 mengalami kenaikan sebesar Rp33.763.614.649,00 atau 1,86%. Rincian masing-masing obyek Transfer Dana Perimbangan - LO dapat dilihat pada Tabel 5.56 sebagai berikut:

Tabel 5.56
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– LOTahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN		TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2		3	4	5
1	**Dana Perimbangan – LO**		**1.534.182.905.056,00**	**1.494.912.370.407,00**	**39.270.534.649,00**
	a	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) -LO**	**87.218.798.085,00**	**51.651.295.493,00**	**35.567.502.592,00**
		DBH Pajak Bumi dan Bangunan – LO	19.589.359.005,00	6.259.702.600,00	13.329.656.405,00
		DBH PPh Pasal 21 – LO	62.088.969.224,00	43.513.064.643,00	18.575.904.581,00
		DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN – LO	2.040.685.755,00	0,00	2.040.685.755,00
		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) – LO	213.516,00	3.710.000,00	(3.496.484,00)

NO	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	5
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) - Pengusahaan Panas Bumi – LO	181.973.897,00	133.961.800,00	48.012.097,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent – LO	300.873.300,00	349.977.900,00	(49.104.600,00)
	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty – LO	1.334.866.020,00	536.154.700,00	798.711.320,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) – LO	324.238.218,00	70.124.850,00	254.113.368,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan – LO	1.357.619.150,00	784.599.000,00	573.020.150,00
b	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) – LO**	**1.013.013.728.000,00**	**1.014.388.131.000,00**	**(1.374.403.000,00)**
	Dana Alokasi Umum -LO	1.013.013.728.000,00	1.014.388.131.000,00	(1.374.403.000,00
c	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO**	**154.561.604.359,00**	**131.207.853.806,00**	**23.353.750.553,00**
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD – LO	806.352.400,00	525.008.000,00	281.344.400,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD – LO	22.924.531.950,00	12.847.146.220,00	10.077.385.730,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP – LO	18.084.526.548,00	10.269.979.000,00	7.814.547.548,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB – LO	704.695.558,00	299.773.000,00	404.922.558,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah – LO	170.592.400,00	0,00	170.592.400,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar – LO	3.491.871.296,00	10.704.273.830,00	(7.212.402.534,00)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian – LO	5.297.195.068,00	0,00	5.297.195.068,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB – LO	6.108.907.818,00	0,00	6.108.907.818,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting LO	637.000.000,00	0,00	637.000.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB – LO	1.081.563.000,00	15.135.525.386,00	(14.053.962.386,00)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB) – LO	215.325.000,00	4.212.350.270,00	(3.997.025.270,00)

NO	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	5
	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian – LO	6.178.060.619,00	1.744.349.000,00	4.433.711.619,00
	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan – LO	1.075.754.600,00	579.986.700,00	495.767.900,00
	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan – LO	2.367.842.602,00	1.209.411.600,00	1.158.431.002,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan – LO	30.978.254.000,00	23.355.630.000,00	7.622.624.000,00
	DAK Reguler Bidang Air Minum – LO	0,00	17.072.701.000,00	(17.072.701.000,00)
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan – LO	12.646.818.000,00	10.102.784.000,00	2.544.034.000,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan – LO	17.948.786.000,00	8.123.528.000,00	9.825.258.000,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan – LO	12.447.572.500,00	3.400.000.000,00	9.047.572.500,00
	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan – LO	2.812.137.100,00	1.847.079.800,00	965.057.300,00
	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler – LO	5.797.678.900,00	4.009.559.000,00	1.788.119.900,00
	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan – LO	2.786.139.000,00	5.768.769.000,00	(2.982.630.000,00)
	d Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	**279.388.774.612,00**	**297.665.090.108,00**	**(18.276.315.496,00)**
	DAK Non Fisik-TPG PNSD – LO	218.823.849.200,00	207.508.948.000,00	11.314.901.200,00
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD – LO	343.800.000,00	0,00	343.800.000,00
	DAK Non Fisik-TKG PNSD – LO	6.274.806.100,00	8.202.977.000,00	(1.928.170.900,00)
	DAK Non Fisik-BOP PAUD – LO	14.203.100.000,00	15.604.200.000,00	(1.401.100.000,00)
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan – LO	4.514.300.000,00	0,00	4.514.300.000,00
	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum – LO	539.908.000,00	0,00	539.908.000,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK – LO	20.846.387.881,00	48.919.273.000,00	(28.072.885.119,00)
	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan – LO	0,00	8.051.136.622,00	(8.051.136.622,00)
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB – LO	8.305.726.230,00	0,00	8.305.726.230,00
	DAK Non Fisik-PK2UKM – LO	345.304.000,00	0,00	345.304.000,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	5
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan – LO	2.626.038.201,00	4.125.267.336,00	(1.499.229.135,00)
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan – LO	962.578.000,00	236.730.150,00	725.847.850,00
	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS – LO	0,00	417.358.000,00	(417.358.000,00)
	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal – LO	372.462.000,00	0,00	372.462.000,00
	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak – LO	383.515.000,00	4.599.200.000,00	(4.215.685.000,00)
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian – LO	847.000.000,00	0,00	847.000.000,00
2	**Dana Insentif Daerah (DID) – LO**	**18.211.284.000,00**	**28.301.537.000,00**	**(10.090.253.000,00)**
	a DID – LO	18.211.284.000,00	28.301.537.000,00	(10.090.253.000,00)
3	**Dana Desa – LO**	**291.983.725.000,00**	**287.400.392.000,00**	**4.583.333.000,00**
	a Dana Desa – LO	291.983.725.000,00	287.400.392.000,00	4.583.333.000,00
	JUMLAH	**1.844.377.914.056,00**	**1.810.614.299.407,00**	**33.763.614.649,00**

2.b Pendapatan Transfer antar Daerah – LO

Pendapataan Transfer antar Daerah – LO Merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Kota/ Kabupaten. Pendapatan Transfer antar Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 adalah sebesar Rp179.885.817.539,00 jika dibandingkan dengan pendapatan Transfer - LO Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp192.536.887.215,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.651.069.676,00 atau 6,57%, penurunan tersebut dikarenakan adanya hak pendapatan transfer daerah pemerintah kabupaten lebak yang lebih kecil dari tahun sebelumnya. Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.57 sebagai berikut::

Tabel 5.57
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO
Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	URAIAN	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	5
1	**Pendapatan Bagi Hasil**	**154.885.817.539,00**	**127.536.887.215,00**	**27.348.930.324,00**
	a Pendapatan Bagi Hasil Pajak	154.885.817.539,00	127.536.887.215,00	27.348.930.324,00

NO	URAIAN		REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2		3	4	5
		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	23.970.642.735,00	22.965.901.470,00	1.004.741.265,00
		Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.438.338.480,00	18.813.183.840,00	3.625.154.640,00
		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.394.849.457,00	30.727.060.240,00	667.789.217,00
		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	752.451.231,00	571.083.921,00	181.367.310,00
		Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	76.329.535.636,00	54.459.657.744,00	21.869.877.892,00
2		**Bantuan Keuangan**	**25.000.000.000,00**	**65.000.000.000,00**	**(40.000.000.000,00)**
	A	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	25.000.000.000,00	65.000.000.000,00	(40.000.000.000,00)
	JUMLAH		**179.885.817.539,00**	**192.536.887.215,00**	**(12.651.069.676,00)**

3. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 sebesar Rp462.764.690.537,20 mengalami kenaikan sebesar Rp38.490.914.803,20 atau 9,07% jika dibandingkan dengan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Tahun 2020 sebesar Rp424.273.775.734,00. Rincian dapat dilihat pada Tabel 5.58 sebagai berikut:

Tabel 5.58
Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO
Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	5
1	**Pendapatan Hibah**	**298.392.620.537,20**	**238.092.955.234,00**	**60.299.665.303,20**
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	272.917.953.684,00	238.092.955.234,00	34.824.998.450,00
	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	11.605.900.334,00	0,00	11.605.900.334,00
	Pendapatan Hibah dari Daerah Lainnya	13.868.766.519,20	0,00	13.868.766.519,20
2	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**164.261.070.000,00**	**186.180.820.500,00**	**(21.919.750.500,00)**
	Lain-lain Pendapatan	164.261.070.000,00	186.180.820.500,00	(21.919.750.500,00)

NO	URAIAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	5
3	**Pendapatan Yang Tidak Bisa Dikelompokan**	**111.000.000,00**	0,00	**111.000.000,00**
	Pendapatan Yang Tidak Bisa Dikelompokan	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00
	JUMLAH	**462.764.690.537,20**	**424.273.775.734,00**	**38.490.914.803,20**

Secara terinci untuk masing-masing Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah–LO sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah - LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 adalah sebesar Rp298.392.620.537,20 yang merupakan hibah dari Pemerintah Pusat, hibah dari Pemerintah Daerah lainnya dan Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dengan rincian sebagai berikut:
   - Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2021 adalah sebesar Rp272.917.953.684,00, terdiri dari:
     - Pendapatan Hibah *Project Flood Management in Selested River Basin* (FMSRB) sebesar Rp37.756.463.068,00;
     - Pendapatan Hibah Air Minum Perdesaan sebesar Rp1.150.000.000,00;
     - Pendapatan Air minum perkotaan (PDAM) sebesar Rp2.865.000.000,00;
     - Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat lainya sebesar Rp231.146.490.616,00 terdiri dari:
       a. Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp216.007,394,545,00 yang merupakan hibah dari Pemerintah Pusat berupa aset tetap yang berasal dari :
          - Kemeterian Pendidikan sebesar Rp3.645.050.000,00 berupa aset tetap peralatan dan mesin;
          - Kementerian PUPR sebesar Rp212.362.344.545,00 berupa aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp209.800.000,00 gedung dan bangunan sebesar Rp7.397.963.769,00, jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp204.754.580.776,00.
       b. Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp15.139.096.071,00 yang merupakan hibah dari Pemerintah Pusat berupa obat – obatan dan alat kontrasepsi dari BKKBN sebesar Rp11.367.425.396,00 dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp3.771.670.675,00;

- Pendapatan Hibah Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp11.605.900.334,00, yang merupakan hibah dari pihak swasta berupa aset;
- Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp13.868.766.519,20 berupa obat – obatan dari Pemerintah Propinsi Banten.

2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah pendapatan lain-lain dari Dana BOS berdasarkan Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Negeri dan Swasta, Pendidikan Menengah Swasta dan Sekolah Khusus Swasta Se- Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021. Pendapatan Lain-lain Pemerintah Kabupaten Lebak – LO Tahun 2021 dari Dana BOS untuk Pendidikan Dasar dan Menengah Negeri sebesar Rp164.261.070.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp21.919.750.500,00 atau 11,77%.
3. Pendapatan Yang Tidak Bisa Dikelompokan adalah akun yang menampung pendapatan yang belum terdapat kode rekening sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Pendapatan Yang Tidak Bisa Dikelompokan pada Tahun 2021 sebesar Rp111.000.000,00 merupakan anakan dari ternak sapi dan kerbau.

5.1.2.2 **Beban** – LO

Beban merupakan pengeluaran atau konsumsi aset atau kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban - LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.738.175.985.435,73 mengalami penurunan sebesar Rp122.807.658.988,74 atau 4,29% jika dibandingkan dengan Beban pada Tahun 2020 sebesar Rp2.860.983.644.424,47 Rincian Beban Pemerintah Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Tabel 5.59 sebagai berikut:

Tabel 5.59
Beban - LO Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO	BEBAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5
1	Beban Pegawai	992.113.480.333,00	989.334.771.659,00	2.778.708.674,00
2	Beban Persediaan	142.202.483.351,82	81.575.745.160,00	60.626.738.191,82
3	Beban Jasa Kantor	164.998.596.641,00	116.954.827.943,00	48.043.768.698,00

NO	BEBAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5
4	Beban Premi Asuransi	56.809.725.545,62	27.295.574.724,29	29.514.150.821,33
5	Beban Sewa	2.424.943.856,00	1.893.386.325,00	531.557.531,00
6	Beban Perjalanan Dinas	62.282.841.671,00	48.988.717.967,00	13.294.123.704,00
7	Beban Pendidikan PNS	12.413.951.300,00	6.104.673.000,00	6.309.278.300,00
8	Beban Jasa Konsultasi	5.972.942.639,00	4.521.167.118,00	1.451.775.521,00
9	Beban Barang Dana BOS	143.869.925.616,52	151.485.843.796,00	(7.615.918.179,48)
10	Beban Barang dan Jasa BLUD	175.232.778.872,02	175.725.201.432,62	(492.422.560,60)
11	Beban Hibah	143.046.699.175,20	279.133.238.181,00	(136.086.539.005,80)
12	Beban Bantuan Sosial	2.769.790.960,00	5.429.922.053,50	(2.660.131.093,50)
13	Beban Transfer	422.484.948.765,20	409.526.945.900,00	12.958.002.865,20
14	Beban Penyusutan	367.047.109.080,64	378.709.454.849,39	(11.662.345.768,75)
15	Beban Amortisasi	589.493.720,18	91.283.521,49	498.210.198,69
16	Beban Penyisihan Piutang	6.870.051.016,96	1.289.539.412,92	5.580.511.604,04
17	Beban Tidak Terduga	23.544.912.000,98	140.365.097.964,00	(116.820.185.963,02)
18	Beban Penghapusan	694.251.615,35	18.288.321.772,02	(17.594.070.156,67)
19	Beban Aset Ekstrakomptabel	10.843.757.856,85	11.333.039.428,04	(489.281.571,19)
20	Beban Kerugian Investasi	1.963.301.418,39	12.936.892.217,20	(10.973.590.798,81)
JUMLAH		**2.738.175.985.435,73**	**2.860.983.644.424,47**	**(122.807.658.988,74)**

1. Beban Pegawai -LO

Beban Pegawai merupakan pengeluaran atau kewajiban Pemerintah Kabupaten Lebak untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 sebesar Rp992.113.480.333,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.778.708.674,00 atau 0,28% jika dibandingkan dengan Beban Pegawai pada Tahun 2020 sebesar Rp989.334.771.659,00. Rincian dari masing-masing Beban Pegawai - LO Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 5.60 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.60
Beban Pegawai – LO Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	3	4	5	6
1	**Beban Gaji dan Tunjangan ASN – LO**	**616.529.855.120,00**	**630.990.959.759,00**	**(14.461.104.639,00)**
	a Beban Gaji Pokok ASN – LO	463.128.074.035,00	467.632.066.193,00	(4.503.992.158,00)

NO	URAIAN		TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	3		4	5	6
	b	Beban Tunjangan Keluarga ASN – LO	44.694.651.523,00	45.923.151.973,00	(1.228.500.450,00)
	c	Beban Tunjangan Jabatan ASN – LO	8.033.387.500,00	8.333.705.000,00	(300.317.500,00)
	d	Beban Tunjangan Fungsional ASN – LO	33.341.250.000,00	34.709.532.000,00	(1.368.282.000,00)
	e	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN – LO	5.880.620.000,00	5.154.173.000,00	726.447.000,00
	f	Beban Tunjangan Beras ASN – LO	27.459.226.868,00	23.915.847.900,00	3.543.378.968,00
	g	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN – LO	479.475.879,00	420.140.654,00	59.335.225,00
	h	Beban Pembulatan Gaji ASN – LO	6.680.595,00	6.457.480,00	223.115,00
	i	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN – LO	29.723.532.982,00	35.894.144.621,00	(6.170.611.639,00)
	j	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN – LO	945.763.564,00	958.260.235,00	(12.496.671,00)
	k	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN – LO	2.837.192.174,00	2.874.780.703,00	(37.588.529,00)
	l	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN – LO	0,00	5.168.700.000,00	(5.168.700.000,00)
2	**Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO**		**98.852.414.567,00**	**96.997.444.416,00**	**1.854.970.151,00**
	a	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN – LO	94.258.664.567,00	87.451.652.257,00	6.807.012.310,00
	b	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN – LO	4.593.750.000,00	3.733.180.000,00	860.570.000,00
	c	Tunjangan PPh bagi Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja – LO	0,00	5.812.612.159,00	(5.812.612.159,00)
3	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – LO**		**244.059.087.163,00**	**237.197.884.309,00**	**6.861.202.854,00**
	a	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah – LO	5.715.892.339,00	4.707.578.662,00	1.008.313.677,00

NO	URAIAN		TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	3		4	5	6
	b	Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – LO	657.790.068,00	645.169.297,00	12.620.771,00
	c	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD – LO	222.578.120.456,00	200.156.235.400,00	22.421.885.056,00
	d	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD – LO	6.010.378.300,00	8.965.664.800,00	(2.955.286.500,00)
	e	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD – LO	583.500.000,00	618.000.000,00	(34.500.000,00)
	f	Beban Honorarium – LO	8.513.406.000,00	22.105.236.150,00	(13.591.830.150,00)
4		**Beban Gaji dan Tunjangan DPRD LO**	**27.726.319.993,00**	**19.136.408.940,00**	**8.589.911.053,00**
	a	Beban Uang Representasi DPRD – LO	1.110.585.000,00	955.080.000,00	155.505.000,00
	b	Beban Tunjangan Keluarga DPRD - LO	151.071.900,00	128.041.200,00	23.030.700,00
	c	Beban Tunjangan Beras DPRD – LO	162.401.280,00	161.564.160,00	837.120,00
	d	Beban Uang Paket DPRD – LO	95.140.500,00	95.508.000,00	(367.500,00)
	e	Beban Tunjangan Jabatan DPRD - LO	1.610.348.250,00	1.384.866.000,00	225.482.250,00
	f	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD – LO	132.366.150,00	0,00	132.366.150,00
	g	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD - LO	17.356.500,00	18.087.300,00	(730.800,00)
	h	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	8.805.300.000,00	8.820.000.000,00	(14.700.000,00)
	i	Beban Tunjangan Reses DPRD – LO	2.190.300.000,00	2.190.300.000,00	0,00
	j	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD – LO	163.217.817,00	143.043.180,00	20.174.637,00
	k	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	7.294.232.596,00	133.919.100,00	7.160.313.496,00
	l	Beban Tunjangan Transportasi DPRD – LO	5.994.000.000,00	5.106.000.000,00	888.000.000,00

NO	URAIAN		TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	3		4	5	6
5		**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH - LO**	**173.449.858,00**	**143.573.568,00**	**29.876.290,00**
	a	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH – LO	54.600.000,00	46.800.000,00	7.800.000,00
	b	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH – LO	7.056.000,00	6.048.000,00	1.008.000,00
	c	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH – LO	98.280.000,00	84.240.000,00	14.040.000,00
	d	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH – LO	7.097.160,00	6.083.280,00	1.013.880,00
	e	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH – LO	483.578,00	402.048,00	81.530,00
	f	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH – LO	320,00	240,00	80,00
	g	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH - LO	5.483.520,00	0,00	5.483.520,00
	h	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH - LO	112.320,00	0,00	112.320,00
	i	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH - LO	336.960,00	0,00	336.960,00
6		**Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH - LO**	**942.720.000,00**	**955.320.000,00**	**(12.600.000,00)**
	a	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD – LO	342.720.000,00	355.320.000,00	(12.600.000,00)
	b	Beban Dana Operasional KDH/WKDH - LO	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
7		**Beban Pegawai BLUD – LO**	**3.829.633.632,00**	**3.913.180.667,00**	**(83.547.035,00)**
	a	Beban Pegawai BLUD – LO	3.829.633.632,00	3.913.180.667,00	(83.547.035,00)
	JUMLAH		**992.113.480.333,00**	**989.334.771.659,00**	**2.778.708.674,00**

Berdasarkan tabel di atas beban pegawai - LO pada Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Beban Gaji dan Tunjangan ASN - LO sebesar Rp616.529.855.120,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.461.104.639,00 atau 2.29% jika dibandingakan dengan

Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2020 sebesar Rp630.990.959.759,00. Beban Gaji dan Tunjangan tersebut terdiri dari:

a. Beban Gaji Pokok ASN – LO sebesar Rp463.128.074.035,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.503.992.158,00 atau 0,96% jika dibandingkan dengan Beban Gaji Pokok ASN tahun 2020 sebesar Rp467.632.066.193,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Beban Gaji PNS– LO sebesar Rp453.798.301.135,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.833.765.058,00 atau sebesar 2,96% Jika dibandingkan dengan Beban Gaji PNS Tahun 2020 sebesar Rp467.632.066.193,00;
   - Beban Gaji PPPK – LO sebesar Rp9.329.772.900,00.

b. Beban Tunjangan Keluarga ASN – LO sebesar Rp44.694.651.523,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.228.500.450,00 atau 0,96% jika dibandingakan dengan Beban Tunjangan Keluarga ASN tahun 2020 sebesar Rp45.923.151.973,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Beban Tunjangan Keluarga PNS – LO sebesar Rp43.973.729.757,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.949.422.216,00 atau 0,96% dari Beban Tunjangan Keluarga PNS Tahun 2020 sebesar Rp45.923.151.973,00;
   - Beban Tunjangan keluarga PPPK – LO sebesar Rp720.921.766,00.

c. Beban Tunjangan Jabatan ASN – LO sebesar Rp8.033.387.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp300.317.500,00 atau 3,60% dari Beban Tunjangan Jabatan ASN – LO Tahun 2020 sebesar Rp8.333.705.000,00;

d. Beban Tunjangan Fungsional ASN – LO sebesar Rp33.341.250.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.368.282.000,00 atau 3,94% dari Beban Tunjangan Fungsional ASN - LO Tahun 2020 sebesar Rp 34.709.532.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Beban Tunjangan Fungsional PNS – LO sebesar Rp33.322.670.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.386.862.000,00 atau 4% dari Beban Tunjangan Fungsional PNS - LO Tahun 2020 sebesar Rp34.709.532.000,00;
   - Beban Tunjangan Fungsional PPPK – LO sebesar Rp18.580.000,00.

e. Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN – LO sebesar Rp5.880.620.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp726.447.000,00 atau 14,94% dari Beban

Tunjangan Fungsional Umum ASN - LO Tahun 2020 sebesar Rp5.154.173.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS – LO sebesar Rp5.307.315.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp153.142.000,00 atau 2,97% dari Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS - LO Tahun 2020 sebesar Rp.5.154.173.000,00;
- Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK – LO sebesar Rp573.305.000,00.

f. Beban Tunjangan Beras ASN – LO sebesar Rp27.459.226.868,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.543.378.968,00 atau 14,81% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Beras ASN – LO Tahun 2020 sebesar Rp23.915.847.900,00 terdiri dari ;

- Beban Tunjangan Beras PNS – LO sebesar Rp26.864.296.568,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.948.448.668,00 atau 12,33% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Beras PNS – LO Tahun 2020 sebesar Rp23.915.847.900,00;
- Beban Tunjangan Beras PPPK – LO sebesar Rp594.930.300,00

g. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN – LO sebesar Rp479.475.879,00 mengalami kenaikan sebesar Rp59.335.225,00 atau 14,22% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN – LO Tahun 2020 sebesar Rp420.140.654,00;

h. Beban Pembulatan Gaji ASN – LO sebesar Rp6.680.595,00 mengalami kenaikan sebesar Rp223.115,00 atau 3,45% jika dibandingkan dengan Beban Pembulatan Gaji ASN – LO Tahun 2020 sebesar Rp6.457.480,00 terdiri dari:

- Beban Pembulatan Gaji PNS – LO sebesar Rp6.519.428,00 mengalami kenaikan sebesar Rp61.948,00 atau 0,96% jika dibandingkan dengan Beban Pembulatan Gaji PNS – LO Tahun 2020 sebesar Rp6.457.480,00;
- Beban Pembulatan Gaji PPPK – LO sebesar Rp161.167,00.

i. Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN – LO sebesar Rp29.723.532.982,00 mengalami Penurunan sebesar Rp6.170.611.639,00 atau 17,20% jika dibandingkan dengan Beban Iuran jaminan Kesehatan ASN – LO Tahun 2020 sebesar Rp35.894.144.621,00 terdiri dari:

- Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS – LO sebesar Rp29.605.850.938,00 mengalami Penurunan sebesar Rp6.288.293.683,00 atau 17,52% jika dibandingkan dengan Beban Iuran jaminan Kesehatan PNS – LO Tahun 2020 sebesar Rp35.894.144.621,00;
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK – LO sebesar Rp117.682.044,00.

j. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN – LO sebesar Rp945.763.564,00 mengalami Penurunan sebesar Rp12.496.671,00 atau 1,30% jika dibandingkan dengan Beban Iuran jaminan Kecelakaan Kerja ASN – LO Tahun 2020 sebesar Rp958.260.235,00 terdiri dari:

- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS – LO sebesar Rp939.670.117,00, mengalami Penurunan sebesar Rp18.590.118,00 atau 1,94% jika dibandingkan dengan Beban Iuran jaminan Kecelakaan Kerja ASN – LO Tahun 2020 sebesar Rp958.260.235,00;
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK – LO sebesar Rp6.093.447,00.

k. Beban Iuran Jaminan Kematian ASN – LO Rp2.837.192.174,00 mengalami Penurunan sebesar Rp37.588.529,00 atau 1,31% jika dibandingkan dengan Beban Iuran jaminan Kematian ASN – LO Tahun 2020 sebesar Rp2.874.780.703,00 terdiri dari:

- Beban Iuran Jaminan Kematian PNS – LO sebesar Rp2.818.451.030,00, mengalami Penurunan sebesar Rp56.329.673,00 atau 1,96% jika dibandingkan dengan Beban Iuran jaminan Kematian ASN – LO Tahun 2020 sebesar Rp2.874.780.703,00;
- Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK – LO sebesar Rp18.741.144,00 ;

l. Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN – LO Tahun 2021 tidak ada, tetapi pada tahun 202o sebesar Rp5.168.700.000,00.

2. Beban Tambahan Penghasilan ASN– LO sebesar Rp98.852.414.567,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.854.970.151,00 atau 1,91% jika dibandingkan dengan Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO Tahun 2020 sebesar Rp96.997.444.416,00 terdiri dari:

a. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN – LO sebesar Rp94.258.664.567,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.807.012.310,00 atau 7,78% jika dibandingkan dengan Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Beban Kerja ASN – LO Tahun 2020 sebesar Rp87.451.652.257,00 terdiri dari:

- Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS – LO sebesar Rp91.961.664.567, mengalami kenaikan sebesar Rp4.510.012.310,00 atau 5,15% jika dibandingkan dengan Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS – LO Tahun 2020 sebesar Rp87.451.652.257,00;
- Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK – LO sebesar Rp2.297.000.000,00.

b. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN – LO sebesar Rp4.593.750.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp860.570.000,00 atau 23,05% jika dibandingkan dengan Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN – LO Tahun 2020 sebesar Rp3.733.180.000,00;

c. Tunjangan PPh bagi Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja – LO Tahun 2021 tidak ada, tetapi Tahun 2021 Tunjangan PPh bagi Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja – LO adalah sebesar Rp5.812.612.159,00.

3. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN– LO sebesar Rp244.059.087.163,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.859.852.854,00 atau 2,89% jika dibandingkan dengan Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Liannya PNS – LO Tahun 2020 sebesar Rp237.199.234.309,00 terdiri dari:

a. Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah – LO sebesar Rp5.715.892.339,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.008.313.677,00 atau 21,42% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah– LO Tahun 2020 sebesar Rp4.707.578.622,00 terdiri dari:

- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel – LO sebesar Rp14.851.250 mengalami kenaikan sebesar Rp155.500,00 atau 1,06% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel– LO Tahun 2020 sebesar Rp14.695.750,00;
- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran – LO sebesar Rp226.250.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.500.000,00 atau 11,04% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas

Pemungutan Pajak Restoran – LO Tahun 2020 sebesar Rp203.750.000,00;

- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame – LO sebesar Rp38.744.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1863.000,00 atau 5,05% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame – LO Tahun 2020 sebesar Rp36.881.000,00 ;
- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan – LO sebesar Rp900.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp22.500.000,00 atau 2,44% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan – LO Tahun 2020 sebesar Rp922.500.000,00;
- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir – LO sebesar Rp26.930.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.958.749,00 atau 79,88% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir– LO Tahun 2020 sebesar Rp14.971.251,00;
- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah – LO sebesar Rp14.203.125,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.765.625,00 atau 50,50% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah– LO Tahun 2020 sebesar Rp9.437.500,00;
- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet – LO sebesar Rp600.464,00 mengalami kenaikan sebesar Rp299.928,00 atau 99,80% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet– LO Tahun 2020 sebesar Rp300.536,00;
- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO sebesar Rp1.231.855.625,00 mengalami kenaikan sebesar Rp140.538.750,00 atau 12,88% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan– LO Tahun 2020 sebesar Rp1.091.316.875,00;
- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan – LO sebesar Rp1.165.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.000.000,00 atau 1,30% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan– LO Tahun 2020 sebesar Rp1.150.000.000,00;

- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan – LO sebesar Rp2.097.457.875,00 mengalami kenaikan sebesar Rp844.857.875,00 atau 67,45% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan– LO Tahun 2020 sebesar Rp1.252.600.000,00.

b. Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp657.790.068,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.620.771,00 atau 1,96% jika dibandingkan dengan Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – LO Tahun 2020 sebesar Rp645.169.297,00 terdiri dari;

- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan – LO sebesar Rp13.236.750,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.059.750,00 atau 1.024,62% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan – LO Tahun 2020 sebesar Rp1.177.000,00;
- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO sebesar Rp19.648.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.431.500,00 atau 14,12% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Persampahan/Kebersihan – LO Tahun 2020 sebesar Rp17.217.000,00;
- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO sebesar Rp6.794.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.001.100,00 atau 37,06% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO Tahun 2020 sebesar Rp10.795.500,00;
- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar – LO sebesar Rp93.989.325,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.728.600,00 atau 1,87% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pelayanan Pasar – LO Tahun 2020 sebesar Rp92.260.725,00;
- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor – LO sebesar Rp35.055.000,00 mengalami kenaikan

sebesar Rp9.345.000,00 atau 36,35% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor – LO Tahun 2020 sebesar Rp25.710.000,00;

- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah – LO sebesar Rp1.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp100.000,00 atau 11,11% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah – LO Tahun 2020 sebesar Rp900.000,00;
- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO sebesar Rp2.621.600,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.391.500,00 atau 113,12% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/tera Ulang – LO Tahun 2020 sebesar Rp1.230.100,00;
- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO sebesar Rp35.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.900.000,00 atau 9,03% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO Tahun 2020 sebesar Rp32.100.000,00;
- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah – LO sebesar Rp49.614.975,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.409.822,00 atau 23,70% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemakaian Kekayaan Daerah – LO Tahun 2020 sebesar Rp65.024.797,00;
- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan – LO sebesar Rp61.886.330,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.754.780,00 atau 4,66% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Tempat Pelelangan – LO Tahun 2020 sebesar Rp59.131.550,00;
- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal – LO sebesar Rp12.390.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp485.625,00

atau 4,08% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Terminal – LO Tahun 2020 sebesar Rp11.904.375,00;

- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan – LO sebesar Rp1.230.000 mengalami penurunan sebesar Rp482.000,00 atau 28,15% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha – Rumah Potong Hewan – LO Tahun 2020 sebesar Rp1.712.000,00;
- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO sebesar Rp694.688,00 mengalami kenaikan sebesar Rp694.688,00 atau 100% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha – Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO Tahun 2020;
- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO sebesar Rp18.642.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.121.250,00 atau 6,40% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha – Penjualan Produk Usaha Daerah – LO Tahun 2020 sebesar Rp17.521.250,00;
- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan – LO sebesar Rp300.000.000,00, tidak mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan eban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan – LO Tahun 2020 sebesar Rp300.000.000,00;
- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LO sebesar Rp1.056.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.329.000,00 atau 55,72% jika dibandingkan dengan Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LO Tahun 2020 sebesar Rp2.385.000,00;
- Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan – LO sebesar Rp4.930.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.170.000,00 atau 19,18% jika dibandingkan dengan Beban

Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Usaha Perikanan – LO Tahun 2020 sebesar Rp6,100.000,00.

c. Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD – LO sebesar Rp222.578.120.456,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.421.885.056,00 atau 11,20% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD – LO Tahun 2020 sebesar Rp200.156.235.400,00;

d. Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD – LO sebesar Rp6.010.378.300,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.955.286.500,00 atau 32,96% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD – LO Tahun 2020 sebesar Rp8.965.664.800,00;

e. Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD – LO sebesar Rp583.500.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp34.500.000,00 atau 5,58% jika dibandingkan dengan Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD – LO Tahun 2020 sebesar Rp618.000.000,00;

f. Beban Honorarium – LO sebesar Rp8.513.406.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.591.830.150,00 atau 61,49% jika dibandingkan dengan Beban Honorarium – LO Tahun 2020 sebesar Rp22.105.236.150,00 terdiri dari:

- Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan – LO sebesar Rp7.910.576.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.367.471.350,00 atau 20,90% jika dibandingkan dengan Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan – LO Tahun 2020 sebesar Rp6.543.104.650,00;
- Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa – LO sebesar Rp602.830.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp28.762.500,00 atau 5,01%, jika dibandingkan dengan Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa – LO Tahun 2020 sebesar Rp574.067.500,00 .

4. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD – LO sebesar Rp27.726.319.993,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.589.911.053,00 atau 44,89% jika dibandingkan dengan Beban Gaji dan Tunjangan DPRD – LO Tahun 2020 sebesar Rp19.136.408.940,00.terdiri dari:

a. Beban Uang Representasi DPRD – LO sebesar Rp1.110.585.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp155.505.000,00 atau 16,28% jika dibandingkan dengan Beban Uang Representasi DPRD – LO Tahun 2020 sebesar Rp955.080.000,00;

b. Beban Tunjangan Keluarga DPRD – LO sebesar Rp151.071.900,00 mengalami

kenaikan sebesar Rp23.030.700,00 atau 17,99% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Keluarga DPRD – LO Tahun 2020 sebesar Rp128.041.200,00;

c. Beban Tunjangan Beras DPRD – LO sebesar Rp162.401.280,00 mengalami kenaikan sebesar Rp837.120,00 atau 0,52% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Beras DPRD – LO Tahun 2020 sebesar Rp161.564.160,00;
d. Beban Uang Paket DPRD – LO sebesar Rp95.140.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp367.500,00 atau 0,38% jika dibandingkan dengan Beban Uang Paket DPRD – LO Tahun 2020 sebesar Rp95.508.000,00;
e. Beban Tunjangan Jabatan DPRD – LO sebesar Rp1.610.348.250,00 mengalami kenaikan sebesar Rp225.482.250,00 atau 16,28% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Jabatan DPRD – LO Tahun 2020 sebesar Rp1.384.866.000,00;
f. Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD – LO sebesar Rp132.366.150,00 mengalami kenaikan sebesar Rp132.366.150,00 atau 100% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD – LO Tahun 2020;
g. Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD – LO sebesar Rp17.356.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp730.800,00 atau 4,04% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD – LO Tahun 2020 sebesar Rp18.087.300,00;
h. Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD – LO sebesar Rp8.805.300.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.700.000,00 atau 0,17% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD – LO Tahun 2020 sebesar Rp8.820.000,00;
i. Beban Tunjangan Reses DPRD – LO sebesar Rp2.190.300.000,00, mengalami kenaikan 100% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Reses DPRD – LO Tahun 2020;
j. Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD – LO sebeaar Rp163.217.817,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.174.637,00 atau 14,10% jika dibandingkan dengan Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD – LO Tahun 2020 sebesar Rp143.043.180,00;
k. Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD – LO sebesar Rp7.294.232.596,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.160.313.496,00 atau

5346,75% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD – LO Tahun 2020 sebesar Rp133.919.100,00 dengan rincian :

- Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD – LO sebesar Rp133.704.468,00;
- Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD – LO sebesar Rp382.032,00;
- Beban Jaminan Kematian DPRD – LO sebesar Rp1.146.096,00;
- Beban Tunjangan Perumahan DPRD – LO sebesar Rp7.159.000.000,00.

l. Beban Tunjangan Transportasi DPRD – LO sebeaar Rp5.994.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp888.000.000,00 atau 17,39% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Transportasi DPRD – LO Tahun 2020 sebesar Rp5.106.000.000,00;

5. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH – LO sebesar Rp173.449.858,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.876.290,00 atau 20,81% jika dibandingkan dengan Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH – LO Tahun 2020 sebesar Rp143.573.568,00. Terdiri dari:
   a. Beban Gaji Pokok KDH/WKDH – LO sebesar Rp54.600.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.800.000,00 atau 16,67% jika dibandingkan dengan Beban Gaji Pokok KDH/WKDH – LO Tahun 2020 sebesar Rp46.800.000,00;
   b. Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH – LO sebesar Rp7.056.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.008.000,00 atau 16,67% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH – LO Tahun 2020 sebesar Rp6.048.000,00;
   c. Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH – LO sebesar Rp98.280.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.040.000,00 atau 16,67% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH – LO Tahun 2020 sebesar Rp84.240.000,00;
   d. Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH – LO sebesar Rp7.097.160,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.013.880,00 atau 16,67% jika dibandingkan dengan Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH – LO Tahun 2020 sebesar Rp6.083.280,00;
   e. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH – LO sebesar Rp483.578,00 mengalami kenaikan sebesar Rp81.530,00 atau 20,28% jika

dibandingkan dengan Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH – LO Tahun 2020 sebesar Rp402.048,00;

f. Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH – LO sebesar Rp320,00 mengalami kenaikan sebesar Rp80,00 atau 33,33% jika dibandingkan dengan Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH – LO Tahun 2020 sebesar Rp240,00;

g. Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH – LO sebesar Rp5.483.520,00 mengalami kenaikan sebesar 100% jika dibandingkan Tahun 2020;

h. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH – LO sebesar Rp112.320,00 mengalami kenaikan sebesar 100% jika dibandingkan Tahun 2020;

i. Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH – LO sebesar Rp336.960 mengalami kenaikan sebesar 100% jika dibandingkan Tahun 2020;

6. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD – LO serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah – LO sebesar Rp942.720.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.600.000,00 atau 1,32% jika dibandingkan dengan Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD – LO serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah – LO Tahun 2020 sebesar Rp955.320.000,00 terdiri dari:

   a. Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD – LO sebesar Rp342.720.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.600.000,00 atau 3,55% jika dibandingkan dengan Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD – LO Tahun 2020 sebesar Rp355.320.000,00;

   b. Beban Dana Operasional KDH/WKDH – LO sebesar Rp600.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar 100% jika dibandingkan Tahun 2020;

      Beban Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) – LO sebesar Rp3.829.633.632,00 mengalami penurunan sebesar Rp83.847.035,00 atau 2,14% jika dibandingkan dengan Beban Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)– LO Tahun 2020 sebesar Rp.3.913.180.667,00.

2. Beban Persediaan – LO

Beban Persediaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 sebesar Rp142.202.483.351,82 mengalami kenaikan sebesar Rp60.626.738.191,82 atau 74,32% jika dibandingkan dengan Beban Persediaan pada Tahun 2020 sebesar

Rp81.575.745.160,00 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.61 sebagai berikut:

Tabel 5.61
Beban Persediaan – LO Pemerintah Kabupaten Lebak
Tahun 2021 dan 2020

NO	BEBAN PERSEDIAAN		TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2		3	4	5
1	**Beban Barang Pakai Habis**		**90.197.826.530,82**	**62.579.529.526,00**	**27.618.297.004,82**
	a	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	303.635.200,00	179.755.530,00	123.879.670,00
	b	Beban Bahan-Bahan Kimia	387.382.544,00	328.057.603,00	59.324.941,00
	c	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.865.675.503,00	0,00	2.865.675.503,00
	d	Beban Bahan-Bahan Baku	200.000,00	0,00	200.000,00
	e	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	224.836.675,00	316.059.500,00	(91.222.825,00)
	f	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	5.700.000,00	1.785.000,00	3.915.000,00
	g	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	1.631.142.725,00	(1.631.142.725,00)
	h	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	276.626.230,00	(276.626.230,00)
	i	Beban Persediaan Bahan Pakai Habis Kegiatan	0,00	3.101.688.071,00	(3.101.688.071,00)
	j	Beban Alat Kedokteran Habis Pakai	0,00	1.584.814.900,00	(1.584.814.900,00)
	k	Beban Persediaan Makanan Pokok	0,00	1.713.310.583,00	(1.713.310.583,00)
	l	Belanja Persediaan Bahan/Material Kegiatan	0,00	7.085.566.413,00	(7.085.566.413,00)
	m	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	47.663.000,00	0,00	47.663.000,00
	n	Beban Bahan-Bahan Lainnya	436.509.425,00	0,00	436.509.425,00
	o	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	433.114.274,00	0,00	433.114.274,00
	p	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	336.912.000,00	0,00	336.912.000,00
	q	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	4.260.886,00	0,00	4.260.886,00
	r	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.416.842.874,00	5.338.948.224,00	2.077.894.650,00
	s	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.592.337.165,00	0,00	1.592.337.165,00
	t	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.208.083.344,00	4.185.060.282,00	(2.976.976.938,00)
	u	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	108.360.000,00	106.353.500,00	2.006.500,00

NO	BEBAN PERSEDIAAN		TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2		3	4	5
	v	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	363.541.000,00	0,00	363.541.000,00
	w	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.683.932.832,62	903.997.160,00	1.779.935.672,62
	x	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.997.506.040,00	0,00	1.997.506.040,00
	y	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	452.764.800,00	316.371.870,00	136.392.930,00
	z	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	29.453.250,00	0,00	29.453.250,00
	aa	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	32.608.800,00	0,00	32.608.800,00
	ab	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	216.307.250,00	0,00	216.307.250,00
	ac	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	438.317.440,00	0,00	438.317.440,00
	ad	Beban Obat-Obatan-Obat	36.837.087.121,00	16.157.291.652,00	20.679.795.469,00
	ae	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	11.796.128.042,20	0,00	11.796.128.042,20
	af	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.255.566.525,00	0,00	1.255.566.525,00
	ag	Beban Natura dan Pakan-Pakan	511.370.350,00	0,00	511.370.350,00
	ah	Beban makanan dan minuman harian pegawai	0,00	832.041.890,00	(832.041.890,00)
	ai	Beban Makanan dan Minuman Rapat	13.225.803.400,00	5.014.887.820,00	8.210.915.580,00
	aj	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	5.649.943.350,00	(5.649.943.350,00)
	ak	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.154.383.530,00	932.645.400,00	1.221.738.130,00
	al	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	462.627.500,00	0,00	462.627.500,00

NO	BEBAN PERSEDIAAN		TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2		3	4	5
	am	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.353.884.760,00	0,00	1.353.884.760,00
	an	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	185.850.000,00	170.835.120,00	15.014.880,00
	ao	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	12.400.000,00	92.977.500,00	(80.577.500,00)
	ap	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	130.680.000,00	89.807.000,00	40.873.000,00
	aq	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	104.385.000,00	189.593.151,00	(85.208.151,00)
	ar	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	122.457.500,00	0,00	122.457.500,00
	as	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
	at	Beban Pakaian Penyelamatan	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
	au	Beban Pakaian Batik Tradisional	51.630.000,00	16.500.000,00	35.130.000,00
	av	Beban Pakaian Olahraga	144.554.000,00	34.180.000,00	110.374.000,00
	aw	Beban Pakaian Paskibraka	214.162.000,00	0,00	214.162.000,00
	ax	Beban Pakaian Jas/Safari	33.412.500,00	0,00	33.412.500,00
	ay	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	47.935.000,00	(47.935.000,00)
	az	Beban pakaian kerja lapangan	0,00	65.835.000,00	(65.835.000,00)
	ba	Beban Perlengkapan/PakaiaLapangan/Kerja	0,00	10.400.000,00	(10.400.000,00)
	bb	Beban pakaian adat daerah	0,00	32.500.000,00	(32.500.000,00)
	bc	Beban Pakaian Upacara	0,00	28.985.000,00	(28.985.000,00)
	bd	Beban Pakaian Peserta	0,00	23.250.000,00	(23.250.000,00)
	be	Beban Jasa Service	0,00	828.728.593,00	(828.728.593,00)
	bf	Beban Penggantian Suku Cadang	0,00	2.143.491.206,00	(2.143.491.206,00)
	bg	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	2.407.931.953,00	(2.407.931.953,00)
	bh	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	707.275.300,00	(707.275.300,00)
	bi	Beban Penyediaan Kebersihan Kendaraan	0,00	32.957.000,00	(32.957.000,00)
2	**Beban Barang Tak Pakai Habis**		**36.373.900,00**	**0,00**	**36.373.900,00**
	a	Beban Pipa-Pipa Baja	25.261.500,00	**0,00**	25.261.500,00
	b	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	11.112.400,00	**0,00**	11.112.400,00
3	**Beban Pemeliharaan**		**51.968.282.921,00**	**18.996.215.634,00**	**32.972.067.287,00**

NO	BEBAN PERSEDIAAN		TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2		3	4	5
	a	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.886.558.618,00	1.797.289.181,00	3.089.269.437,00
	b	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.359.715.703,00	4.073.202.703,00	2.286.513.000,00
	c	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.722.008.600,00	13.125.723.750,00	27.596.284.850,00
JUMLAH			**142.202.483.351,82**	**81.575.745.160,00**	**60.626.738.191,82**

3. Beban Jasa Kantor – LO

Beban Jasa Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 yaitu sebesar Rp164.998.596.641,00 mengalami penurunan sebesar Rp48.043.768.698,00 atau 41,08% jika dibandingkan dengan Beban Jasa Kantor pada Tahun 2020 sebesar Rp116.954.827.943,00 Rincian dari beban jasa kantor dapat dilihat pada Tabel 5.62 sebagai berikut:

Tabel 5.62
Beban Jasa Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO.	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	5
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.101.001.300,00	0,00	5.101.001.300,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.744.408.000,00	0,00	6.744.408.000,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.135.679.300,00	0,00	1.135.679.300,00
5	Honorarium Rohaniwan	93.000.000,00	0,00	93.000.000,00
6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	187.900.000,00	0,00	187.900.000,00
7	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	5.190.000,00	0,00	5.190.000,00
8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	400.000,00	0,00	400.000,00
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	457.300.000,00	0,00	457.300.000,00
10	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	21.378.181.250,00	0,00	21.378.181.250,00
11	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	53.158.638.792,00	0,00	53.158.638.792,00

NO.	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	5
12	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	375.555.500,00	0,00	375.555.500,00
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
14	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.007.475.000,00	0,00	1.007.475.000,00
15	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	713.045.000,00	0,00	713.045.000,00
16	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	55.891.570,00	0,00	55.891.570,00
17	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	299.100.000,00	0,00	299.100.000,00
18	Beban Jasa Tenaga Administrasi	20.552.203.140,00	0,00	20.552.203.140,00
19	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	2.815.066.000,00	0,00	2.815.066.000,00
20	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	207.638.000,00	0,00	207.638.000,00
21	Beban Jasa Tenaga Ahli	7.235.117.000,00	0,00	7.235.117.000,00
22	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	5.229.538.000,00	0,00	5.229.538.000,00
23	Beban Jasa Tenaga Keamanan	5.738.383.000,00	0,00	5.738.383.000,00
24	Beban Jasa Tenaga Supir	510.336.000,00	0,00	510.336.000,00
25	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
26	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	36.938.965,00	0,00	36.938.965,00
27	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	107.400.000,00	0,00	107.400.000,00
28	Beban Jasa Tata Rias	5.620.000,00	0,00	5.620.000,00
29	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
30	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	52.494.080,00	0,00	52.494.080,00
31	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan	92.850.000,00	0,00	92.850.000,00
32	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	673.982.475,00	0,00	673.982.475,00
33	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	2.203.674.750,00	0,00	2.203.674.750,00
34	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
35	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	79.288.000,00	0,00	79.288.000,00
36	Beban Jasa Kalibrasi	38.370.000,00	0,00	38.370.000,00
37	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.717.970.000,00	0,00	1.717.970.000,00
38	Beban Sertifikasi	0,00	388.247.060,00	(388.247.060,00)
39	Beban Jasa Layanan Medis	0,00	7.840.381.566,00	(7.840.381.566,00)
40	Beban Penghargaan/Prestasi	0,00	962.989.872,00	(962.989.872,00)
41	Beban Jasa Publikasi/Desiminasi	0,00	1.470.239.500,00	(1.470.239.500,00)

NO.	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	5
42	BBeban Jasa Distribusi SPPT PBB-P2	0,00	438.684.400,00	(438.684.400,00)
43	Belanja Jasa Kepegawaian	0,00	24.200.000,00	(24.200.000,00)
44	Beban Persediaan dokumen/administrasi tender	0,00	222.634.000,00	(222.634.000,00)
45	Beban Penggandaan	0,00	1.921.062.052,00	(1.921.062.052,00)
46	Beban Tagihan Telepon	345.896.132,00	550.341.311,00	(204.445.179,00)
47	Beban Tagihan Air	48.545.943,00	42.626.218,00	5.919.725,00
48	Beban Tagihan Listrik	13.015.790.965,00	13.533.779.489,00	(517.988.524,00)
49	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	366.461.600,00	510.129.000,00	(143.667.400,00)
50	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.263.020.159,00	3.423.163.594,00	2.839.856.565,00
51	Beban Jasa pengumuman	0,00	47.000.000,00	(47.000.000,00)
52	Beban Paket/Pengiriman	515.883.700,00	13.362.000,00	502.521.700,00
53	Beban Penambahan Daya	29.981.200,00	0,00	29.981.200,00
54	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.355.249.920,00	0,00	1.355.249.920,00
55	Beban Pengolahan Air Limbah	2.744.000,00	0,00	2.744.000,00
56	Beban Lembur	4.988.625.000,00	0,00	4.988.625.000,00
57	Beban Medical Check Up	2.562.900,00	0,00	2.562.900,00
	JASA KANTOR LAINNYA			
58	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (Non Pegawai)	0,00	1.475.823.000,00	(1.475.823.000,00)
59	Belanja Jasa Moderator (Non Pegawai)	0,00	600.000,00	(600.000,00)
60	Belanja Jasa Tim/Kepanitiaan	0,00	412.000.000,00	(412.000.000,00)
61	Belanja Jasa Tenaga Terampil/Terlatih	0,00	873.027.000,00	(873.027.000,00)
62	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0,00	8.690.976.921,00	(8.690.976.921,00)
63	Honorarium Moderator	0,00	44.500.000,00	(44.500.000,00)
64	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	0,00	25.731.246.100,00	(25.731.246.100,00)
65	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,00	48.337.814.860,00	(48.337.814.860,00)
JUMLAH		**164.998.596.641,00**	**116.954.827.943,00**	**48.043.768.698,00**

4. Beban Premi Asuransi – LO

Beban Premi Asuransi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 sebesar Rp56.809.725.545,62 mengalami kenaikan sebesar Rp29.514.150.821,33 atau 108,13% jika dibandingkan dengan Beban Premi Asuransi pada Tahun 2020 sebesar Rp27.295.574.724,29. Rincian dari Beban Premi Asuransi dapat dilihat pada Tabel 5.63 dengan rincian berikut:

Tabel 5.63
Beban Premi Asuransi – LO Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO.	BEBAN IURAN JAMINAN / ASURANSI	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	5
1	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	49.347.990.100,00	0,00	49.347.990.100,00
2	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	908.323.400,00	0,00	908.323.400,00
3	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.678.066.180,00	26.431.118.085,00	(20.753.051.905,00)
4	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	208.306.220,00	0,00	208.306.220,00
5	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	259.853.625,00	0,00	259.853.625,00
6	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	407.186.020,62	0,00	407.186.020,62
7	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	587.934.924,29	(587.934.924,29)
8	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	0,00	276.521.715,00	(276.521.715,00)
JUMLAH		**56.809.725.545,62**	**27.295.574.724,29**	**29.514.150.821,33**

5. Beban Sewa – LO

Beban Sewa Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 sebesar Rp2.424.943.856,00 mengalami kenaikan sebesar Rp531.557.531,00 atau 28,07% jika dibandingkan dengan Beban Sewa pada Tahun 2020 sebesar Rp1.893.386.325,00. Rincian Beban Sewa dapat dilihat pada Tabel 5.64 sebagai berikut:

Tabel 5.64
Beban Sewa Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO.	BEBAN SEWA	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	5
1	**Beban Sewa Tanah**	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
	Beban Sewa Lapangan Lainnya	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2	**Beban Sewa Peralatan dan Mesin**	**1.398.817.580,00**	**0,00**	**1.398.817.580,00**
	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	156.103.000,00	0,00	156.103.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	119.079.500,00	0,00	119.079.500,00
	Beban Sewa Perkakas Bengkel Kayu	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	511.672.580,00	0,00	511.672.580,00
	Beban Sewa Alat Pendingin	73.227.500,00	0,00	73.227.500,00

NO.	BEBAN SEWA	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	5
	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	31.840.000,00	0,00	31.840.000,00
	Beban Sewa Meja Kerja Pejabat	350.000,00	0,00	350.000,00
	Beban Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	12.339.000,00	0,00	12.339.000,00
	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
	Beban Sewa Sumber Tenaga	38.115.000,00	0,00	38.115.000,00
	Beban Sewa Personal Computer	282.282.000,00	0,00	282.282.000,00
	Beban Sewa Peralatan Jaringan	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00
	Beban Sewa Elektronik/Electric	25.839.000,00	0,00	25.839.000,00
	Beban Sewa Peralatan Senam	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3	**Beban Sewa Gedung dan Bangunan**	**971.226.276,00**	**741.970.500,00**	**229.255.776,00**
	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	89.625.000,00	545.410.500,00	(455.785.500,00)
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	214.898.776,00	87.000.000,00	127.898.776,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	37.342.500,00	0,00	37.342.500,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	130.680.000,00	0,00	130.680.000,00
	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	107.580.000,00	109.560.000,00	(1.980.000,00)
	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	103.600.000,00	0,00	103.600.000,00
	Beban Sewa Motel	107.700.000,00	0,00	107.700.000,00
	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	179.800.000,00	0,00	179.800.000,00
4	**Beban Sewa Aset Tetap Lainnya**	**50.900.000,00**	**0,00**	**50.900.000,00**
	Beban Sewa Audio Visual	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
	Beban Sewa Tanaman	38.400.000,00	0,00	38.400.000,00
5	**Beban Sewa Sarana Mobilitas**	**0,00**	**124.765.000,00**	**(124.765.000,00)**
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	124.765.000,00	(124.765.000,00)
6	**Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**0,00**	**1.026.650.825,00**	**(1.026.650.825,00)**
	Beban sewa meja kursi	0,00	183.485.500,00	(183.485.500,00)
	Beban N sewa komputer dan printer	0,00	377.379.000,00	(377.379.000,00)
	Beban sewa proyektor	0,00	11.880.000,00	(11.880.000,00)
	Beban sewa generator	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)
	Beban sewa tenda, soundsystem dan dekorasi	0,00	327.751.325,00	(327.751.325,00)
	Beban sewa AC duduk	0,00	52.200.000,00	(52.200.000,00)
	Beban sewa bunga,pot bunga gedung kantor	0,00	45.580.000,00	(45.580.000,00)
	Beban sewa karangan bunga (Ucapan Selamat)	0,00	2.125.000,00	(2.125.000,00)

NO.	BEBAN SEWA	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	5
	Belanja sewa dekorasi taman	0,00	6.250.000,00	(6.250.000,00)
JUMLAH		**2.424.943.856,00**	**1.893.386.325,00**	**531.557.531,00**

6. Beban Perjalanan Dinas – LO

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp62.282.841.671,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.294.123.704,00 atau 27,14% jika dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2020 sebesar Rp48.988.717.967,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas dapat dilihat pada Tabel 5.65 sebagai berikut:

Tabel 5.65
Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO.	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	5
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	**62.282.841.671,00**	**48.988.717.967,00**	**13.294.123.704,00**
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	45.307.310.262,00	0,00	45.307.310.262,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	953.971.264,00	0,00	953.971.264,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.701.718.572,00	23.316.040.920,00	(13.614.322.348,00)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.250.640.863,00	0,00	1.250.640.863,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.069.200.710,00	25.672.677.047,00	(20.603.476.337,00)
JUMLAH		**62.282.841.671,00**	**48.988.717.967,00**	**13.294.123.704,00**

7. Beban Pendidikan PNS – LO

Beban Pendidikan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp12.413.951.300,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.309.278.300,00 atau 103,35% jika dibandingkan dengan Beban Pendidikan PNS pada Tahun 2020 sebesar Rp6.104.673.000,00. Rincian Beban Pendidikan PNS dapat dilihat pada Tabel 5.66 sebagai berikut:

Tabel 5.66
Beban Pendidikan PNS – LO Pemerintah Kabupaten Lebak
Tahun 2021 dan 2020

NO.	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	5
1	**Beban Beasiswa Pendidikan PNS**	**105.000.000,00**	**70.000.000,00**	**35.000.000,00**
	Beban beasiswa tugas belajar S1	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)
	Beban beasiswa tugas belajar S2	105.000.000,00	60.000.000,00	45.000.000,00
2	**Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis**	**12.308.951.300,00**	**6.034.673.000,00**	**6.274.278.300,00**
	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	5.440.724.300,00	1.010.323.000,00	4.430.401.300,00
	Beban sosialisasi	4.180.969.000,00	3.159.450.000,00	1.021.519.000,00
	Beban bimbingan teknis	2.687.258.000,00	1.605.460.000,00	1.081.798.000,00
	Beban pendidikan dan pelatihan	0	259.440.000,00	(259.440.000,00)
JUMLAH		**12.413.951.300,00**	**6.104.673.000,00**	**6.309.278.300,00**

8. Beban Jasa Konsultasi – LO

Beban Jasa Konsultasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 sebesar Rp5.972.942.639,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.451.775.521,00 atau 32,11% jika dibandingkan dengan Beban Jasa Konsultasi pada Tahun 2020 sebesar Rp4.521.167.118,00. Rincian Beban Jasa Konsultasi dapat dilihat pada Tabel 5.67 sebagai berikut:

Tabel 5.67
Beban Jasa Konsultasi Pemerintah Kabupaten Lebak
Tahun 2021 dan 2020

NO.	BEBAN JASA KONSULTASI	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	5
1	**Beban Jasa Konsultansi Konstruksi**	**4.428.970.805,00**	**3.068.839.540,00**	**1.360.131.265,00**
2	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	117.148.500,00	189.356.680,00	(72.208.180,00)
3	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	300.238.900,00	0,00	300.238.900,00

NO.	BEBAN JASA KONSULTASI	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	5
4	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	470.385.200,00	0,00	470.385.200,00
5	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	417.470.000,00	0,00	417.470.000,00
6	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.916.210.000,00	2.477.159.400,00	(560.949.400,00)
7	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	93.412.000,00	0,00	93.412.000,00
8	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	511.700.505,00	402.323.460,00	109.377.045,00
9	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	127.208.300,00	0,00	127.208.300,00
10	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	359.204.400,00	0,00	359.204.400,00
11	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
12	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
13	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	47.493.000,00	0,00	47.493.000,00
14	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
15	**Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi**	**1.543.971.834,00**	**1.452.327.578,00**	**91.644.256,00**
16	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	49.970.000,00	0,00	49.970.000,00
17	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	122.662.800,00	943.569.000,00	(820.906.200,00)
18	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	76.179.000,00	7.500.000,00	68.679.000,00

NO.	BEBAN JASA KONSULTASI	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	5
19	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	119.250.000,00	0,00	119.250.000,00
20	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	157.377.200,00	0,00	157.377.200,00
21	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	320.885.000,00	0,00	320.885.000,00
22	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	697.647.834,00	501.258.578,00	196.389.256,00
JUMLAH		**5.972.942.639,00**	**4.521.167.118,00**	**1.451.775.521,00**

9. Beban Barang Dana BOS – LO

Beban Barang Dana Bos - LO milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 sebesar Rp143.869.925.616,52 mengalami penurunan sebesar Rp7.615.918.179,48 atau 5,03% jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp151.485.843.796,00.

10. Beban Barang dan Jasa BLUD – LO

Beban Barang dan Jasa BLUD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 sebesar Rp175.232.778.872,02 mengalami penurunan sebesar Rp492.422.560,60 atau 0,28% jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp175.725.201.432,62. Beban Barang dan Jasa BLUD merupakan beban barang dan jasa dari RSUD dr.Adjidarmo dan 42 Puskesmas.

11. Beban Hibah – LO

Beban Hibah - LO pada Tahun 2021 sebesar Rp143.046.699.175,20 Jika dibandingkan dengan Beban Hibah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp279.133.238.181,00 mengalami penurunan sebesar Rp136.086.539.005,80 atau 48,75%. Rincian pos Beban hibah -LO dapat dilihat pada tabel 5.68 sebagai berikut:

Tabel 5.68
Beban Hibah – LO Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2021 (RP)	TAHUN 2020 (RP)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	5
1.	**Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat**	**3.217.642.000,00**	**0,00**	**3.217.642.000,00**
	a. Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.217.642.000,00	0,00	3.217.642.000,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021 (RP)	TAHUN 2020 (RP)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	5
2.	**Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**109.702.974.105,20**	**32.406.855.000,00**	**77.296.119.105,20**
	a. **Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**45.791.548.850,00**	**0,00**	**45.791.548.850,00**
	b. **Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**5.449.893.500,00**	**32.406.855.000,00**	**(26.956.961.500,00)**
	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.374.200.000,00	32.406.855.000,00	(29.032.655.000,00)
	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.075.693.500,00	0,00	2.075.693.500,00
	c. **Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**58.461.531.755,20**	**0,00**	**58.461.531.755,20**
	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	36.438.616.500,00	0,00	36.438.616.500,00
	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.022.915.255,20	0,00	22.022.915.255,20
3.	**Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**	**1.347.218.010,00**	**1.347.218.010,00**	**0,00**
	a. Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.347.218.010,00	1.347.218.010,00	0,00
4.	**Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**28.778.865.060,00**	**245.379.165.171,00**	**(216.600.300.111,00)**
	a. Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.079.335.000,00	0,00	1.079.335.000,00
	b. Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	178.854.000,00	0,00	178.854.000,00
	c. Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	900.481.000,00	0,00	900.481.000,00
5.	**Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**27.699.530.060,00**	**245.379.165.171,00**	**(217.679.635.111,00)**
	a. Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	27.699.530.060,00	245.379.165.171,00	(217.679.635.111,00)
	JUMLAH	**143.046.699.175,20**	**279.133.238.181,00**	**(136.086.539.005,80)**

12. Beban Bantuan Sosial – LO

Beban Bantuan Sosial – LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 yaitu sebesar Rp2.769.790.960,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.660.131.093,50 atau 48,99% jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2020 sebesar

Rp5.429.922.053,50 yaitu merupakan Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu.

13. Beban Transfer – LO

Beban Transfer – LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 sebesar Rp422.484.948.765,20 mengalami kenaikan sebesar Rp12.985.002.865,20 atau 3,16% jika dibandingkan dengan Beban Transfer pada Tahun 2020 sebesar Rp409.526.945.900,00 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.69 sebagai berikut:

Tabel 5.69
Beban Transfer – LO Pemerintah Kabupaten Lebak
Tahun 2021 dan 2020

NO.	URAIAN	TAHUN 2021 (RP)	TAHUN 2020 (RP)	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	5
1	**Beban Bagi Hasil**	**17.205.598.147,20**	**13.846.174.700,00**	**3.359.423.447,20**
	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	**15.691.796.863,50**	**12.179.632.067,00**	**3,512.164.796,50**
	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	15.691.796.863,50	12.179.632.067,00	3.512.164.796,50
	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	**1.513.801.283,70**	**1.666.542.633,00**	**(152.741.349,30)**
	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.513.801.283,70	1.666.542.633,00	(152.741.349,30)
2	**Beban Bantuan Keuangan**	**405.279.350.618,00**	**395.680.771.200,00**	**9.598.579.418,00**
	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	405.279.350.618,00	395.680.771.200,00	9.598.579.418,00
JUMLAH		**422.484.948.765,20**	**409.526.945.900,00**	**12.985.002.865,20**

Beban Transfer Bagi Hasil pendapatan kepada Pemerintah Desa pada Tahun Anggaran2021 yaitu sebesar Rp 17.205.598.147,20 jika dibandingkan dengan realisasi Beban Transfer - LO Bagi Hasil Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp13.846.174.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.359.423.447,20 atau 24,26%.

Beban Transfer bagi hasil terdiri dari Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa, dan Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Kabupaten Lebak Tahun 2021 sebesar Rp15.691.796.863,50 mengalami kenaikan sebesar Rp3.512.164.796,50 atau 28,84% jika dibandingkan dengan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2020 yaitu sebesar Rp12.179.632.067,00. Rincian Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dapat dilihat pada table Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak untuk setiap Pemerintah Desa dapat dilihat pada tabel 5.70 sebagai berikut:

Tabel 5.70
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	6
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Malingping	**663,258,600.00**	**590,583,160.00**	**72,675,440.00**
1	Desa Cilangkahan	45,360,400.00	39,252,940.00	6,107,460.00
2	Desa Pagelaran	58,446,400.00	51,904,940.00	6,541,460.00
3	Desa Sukaraja	39,801,400.00	41,156,940.00	(1,355,540.00)
4	Desa Malingping Utara	56,517,400.00	42,251,940.00	14,265,460.00
5	Desa Bolang	35,237,400.00	51,929,940.00	(16,692,540.00)
6	Desa Cipeundeuy	44,025,400.00	42,789,940.00	1,235,460.00
7	Desa Rahong	39,035,400.00	36,246,940.00	2,788,460.00
8	Desa Kadujajar	69,639,400.00	41,827,940.00	27,811,460.00
9	Desa Kersaratu	51,111,400.00	43,198,940.00	7,912,460.00
10	Desa Malingping Selatan	50,614,400.00	41,798,940.00	8,815,460.00
11	Desa Sumberwaras	47,076,400.00	41,588,940.00	5,487,460.00
12	Desa Sukamanah	37,819,400.00	47,150,940.00	(9,331,540.00)
13	Desa Senanghati	48,136,400.00	36,937,940.00	11,198,460.00
14	Desa Sangiang	40,437,400.00	32,545,940.00	7,891,460.00
	Pemerintahan Desa diKecamatan Panggarangan	**578,032,400.00**	**429,889,340.00**	**148,143,060.00**
1	Desa Panggarangan	58,379,400.00	39,642,940.00	18,736,460.00
2	Desa Jatake	36,298,400.00	37,936,940.00	(1,638,540.00)
3	Desa Sogong	62,412,400.00	40,962,940.00	21,449,460.00
4	Desa Cimandiri	33,910,400.00	40,663,940.00	(6,753,540.00)
5	Desa Gununggede	52,216,400.00	41,330,940.00	10,885,460.00
6	Desa Situregen	57,606,400.00	38,229,940.00	19,376,460.00
7	Desa Mekarjaya	66,707,400.00	42,521,940.00	24,185,460.00
8	Desa Sindangratu	66,056,400.00	42,264,940.00	23,791,460.00
9	Desa Hegarmanah	36,728,400.00	33,424,940.00	3,303,460.00
10	Desa Sukajadi	52,941,400.00	35,951,940.00	16,989,460.00

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	6
11	Desa Cibarengkok	54,775,400.00	36,957,940.00	17,817,460.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bayah	**651,716,400.00**	**530,334,340.00**	**121,382,060.00**
1	Desa Bayah Barat	56,830,400.00	47,908,940.00	8,921,460.00
2	Desa Sawarna	66,354,400.00	62,549,940.00	3,804,460.00
3	Desa Cidikit	66,627,400.00	49,911,940.00	16,715,460.00
4	Desa Suwakan	70,061,400.00	48,654,940.00	21,406,460.00
5	Desa Cimancak	45,309,400.00	42,658,940.00	2,650,460.00
6	Desa Darmasari	50,674,400.00	49,868,940.00	805,460.00
7	Desa Bayah Timur	49,342,400.00	39,402,940.00	9,939,460.00
8	Desa Cisuren	47,548,400.00	41,325,940.00	6,222,460.00
9	Desa Pasirgombong	43,197,400.00	35,008,940.00	8,188,460.00
10	Desa Sawarna Timur	65,093,400.00	52,477,940.00	12,615,460.00
11	Desa Pamubulan	90,677,400.00	60,564,940.00	30,112,460.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cipanas	**645,479,600.00**	**470,611,627.00**	**174,867,973.00**
1	Desa Cipanas	45,424,400.00	32,631,940.00	**12,792,460.00**
2	Desa Girilaya	42,600,400.00	31,364,940.00	**11,235,460.00**
3	Desa Malangsari	43,029,400.00	32,087,940.00	**10,941,460.00**
4	Desa Bintangresmi	46,428,400.00	33,099,940.00	**13,328,460.00**
5	Desa Talagahiyang	38,995,400.00	29,611,407.00	**9,383,993.00**
6	Desa Luhurjaya	53,593,400.00	36,303,940.00	**17,289,460.00**
7	Desa Haurgajrug	68,334,400.00	43,311,940.00	**25,022,460.00**
8	Desa Giriharja	50,708,400.00	35,084,940.00	**15,623,460.00**
9	Desa Sukasari	40,389,400.00	39,227,940.00	**1,161,460.00**
10	Desa Jayapura	42,593,400.00	31,274,940.00	**11,318,460.00**
11	Desa Sipayung	47,965,400.00	33,802,940.00	**14,162,460.00**
12	Desa Bintangsari	40,117,400.00	30,159,940.00	**9,957,460.00**
13	Desa Pasirhaur	41,585,400.00	30,844,940.00	**10,740,460.00**
14	Desa Harumsari	43,714,400.00	31,803,940.00	**11,910,460.00**
	Pemerintahanan Desa di Kecamatan Muncang	**481,103,800.00**	**361,619,280.00**	**119,484,520.00**
1	Desa Pasireurih	44,522,400.00	32,210,940.00	12,311,460.00
2	Desa Ciminyak	50,448,400.00	34,844,940.00	15,603,460.00
3	Desa Muncang	41,510,400.00	30,857,940.00	10,652,460.00
4	Desa Leuwicoo	38,733,400.00	29,515,940.00	9,217,460.00
5	Desa Sindangwangi	37,838,400.00	29,085,940.00	8,752,460.00
6	Desa Cikarang	39,475,400.00	29,858,940.00	9,616,460.00
7	Desa Sukanagara	38,798,400.00	29,545,940.00	9,252,460.00
8	Desa Pasirnangka	41,167,400.00	30,647,940.00	10,519,460.00

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	6
9	Desa Jagaraksa	37,136,400.00	28,773,940.00	8,362,460.00
10	Desa Tanjungwangi	37,866,400.00	29,112,940.00	8,753,460.00
11	Desa Mekarwangi	37,775,400.00	28,996,940.00	8,778,460.00
12	Desa Girijagabaya	35,831,400.00	28,166,940.00	7,664,460.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Leuwidamar	**577,324,800.00**	**405,777,280.00**	**171,547,520.00**
1	Desa Kanekes	27,691,400.00	24,380,940.00	3,310,460.00
2	Desa Cisimeut	55,323,400.00	37,220,940.00	18,102,460.00
3	Desa Cibungur	62,349,400.00	40,503,940.00	21,845,460.00
4	Desa Leuwidamar	53,919,400.00	36,329,940.00	17,589,460.00
5	Desa Lebakparahiang	50,748,400.00	34,846,940.00	15,901,460.00
6	Desa Sangkanwangi	49,166,400.00	34,365,940.00	14,800,460.00
7	Desa Nayagati	50,577,400.00	34,891,940.00	15,685,460.00
8	Desa Bojongmenteng	49,223,400.00	34,362,940.00	14,860,460.00
9	Desa Margawangi	39,699,400.00	29,964,940.00	9,734,460.00
10	Desa Wantisari	41,038,400.00	30,579,940.00	10,458,460.00
11	Desa Jalupangmulya	48,827,400.00	34,164,940.00	14,662,460.00
12	Desa Cisimeut Raya	48,760,400.00	34,163,940.00	14,596,460.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bojongmanik	**388,662,600.00**	**308,516,460.00**	**80,146,140.00**
1	Desa Bojongmanik	43,806,400.00	39,349,940.00	4,456,460.00
2	Desa Harjawana	48,448,400.00	34,028,940.00	14,419,460.00
3	Desa Kadurahayu	40,943,400.00	30,541,940.00	10,401,460.00
4	Desa Cimayang	53,638,400.00	36,350,940.00	17,287,460.00
5	Desa Parakanbeusi	37,634,400.00	39,282,940.00	(1,648,540.00)
6	Desa Keboncau	42,499,400.00	33,481,940.00	9,017,460.00
7	Desa Mekarmanik	47,994,400.00	36,555,940.00	11,438,460.00
8	Desa Mekar Rahayu	37,852,400.00	30,752,940.00	7,099,460.00
9	Desa Pasirbitung	35,845,400.00	28,170,940.00	7,674,460.00
	Pemerintahan Desa di Kec. Gunungkencana	**551,239,800.00**	**403,478,280.00**	**147,761,520.00**
1	Desa Gunungkencana	50,040,400.00	34,491,940.00	15,548,460.00
2	Desa Cimanyangray	50,738,400.00	35,275,940.00	15,462,460.00
3	Desa Gunungkendeng	34,764,400.00	30,508,940.00	4,255,460.00
4	Desa Cisampang	44,371,400.00	32,138,940.00	12,232,460.00
5	Desa Ciginggang	50,930,400.00	35,177,940.00	15,752,460.00
6	Desa Ciakar	54,164,400.00	36,699,940.00	17,464,460.00
7	Desa Cicaringin	46,393,400.00	39,534,940.00	6,858,460.00
8	Desa Bulakan	42,412,400.00	31,257,940.00	11,154,460.00
9	Desa Sukanegara	43,258,400.00	31,587,940.00	11,670,460.00

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	6
10	Desa Bojongkoneng	44,416,400.00	32,110,940.00	12,305,460.00
11	Desa Kramatjaya	50,018,400.00	34,712,940.00	15,305,460.00
12	Desa Tanjungsari Indah	39,731,400.00	29,979,940.00	9,751,460.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Banjarsari	**899,646,000.00**	**650,044,800.00**	**249,601,200.00**
1	Desa Kerta	41,801,400.00	30,880,940.00	10,920,460.00
2	Desa Bojongjuruh	50,364,400.00	34,924,940.00	15,439,460.00
3	Desa Leuwiipuh	46,321,400.00	33,041,940.00	13,279,460.00
4	Desa Lebakkeusik	41,799,400.00	30,941,940.00	10,857,460.00
5	Desa Cilegongilir	49,852,400.00	34,695,940.00	15,156,460.00
6	Desa Keusik	49,615,400.00	34,514,940.00	15,100,460.00
7	Desa Cibaturkeusik	39,652,400.00	29,958,940.00	9,693,460.00
8	Desa Kumpay	47,175,400.00	33,439,940.00	13,735,460.00
9	Desa Jalupanggirang	44,669,400.00	32,276,940.00	12,392,460.00
10	Desa Bendungan	47,455,400.00	33,529,940.00	13,925,460.00
11	Desa Kertaraharja	48,854,400.00	36,036,940.00	12,817,460.00
12	Desa Cisampih	46,607,400.00	33,177,940.00	13,429,460.00
13	Desa Gunungsari	43,106,400.00	31,536,940.00	11,569,460.00
14	Desa Tamansari	49,303,400.00	34,343,940.00	14,959,460.00
15	Desa Cidahu	51,006,400.00	35,243,940.00	15,762,460.00
16	Desa Ciruji	44,555,400.00	32,239,940.00	12,315,460.00
17	Desa Kaduhauk	35,439,400.00	27,982,940.00	7,456,460.00
18	Desa Labanjaya	41,099,400.00	30,615,940.00	10,483,460.00
19	Desa Umbuljaya	46,095,400.00	32,939,940.00	13,155,460.00
20	Desa Kertarahayu	34,871,400.00	27,719,940.00	7,151,460.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cileles	**560,543,800.00**	**430,634,280.00**	**129,909,520.00**
1	Desa Pasindangan	28,819,400.00	34,452,940.00	(5,633,540.00)
2	Desa Parungkujang	30,567,400.00	41,505,940.00	(10,938,540.00)
3	Desa Cileles	53,923,400.00	36,420,940.00	17,502,460.00
4	Desa Cikareo	48,938,400.00	34,376,940.00	14,561,460.00
5	Desa Cipadang	55,813,400.00	37,309,940.00	18,503,460.00
6	Desa Gumuruh	40,326,400.00	37,071,940.00	3,254,460.00
7	Desa Prabugantungan	48,491,400.00	34,044,940.00	14,446,460.00
8	Desa Daroyon	42,228,400.00	31,089,940.00	11,138,460.00
9	Desa Margamulya	53,451,400.00	36,359,940.00	17,091,460.00
10	Desa Mekarjaya	53,374,400.00	36,324,940.00	17,049,460.00
11	Desa Kujangsari	50,557,400.00	35,032,940.00	15,524,460.00
12	Desa Banjarsari	54,052,400.00	36,642,940.00	17,409,460.00

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	6
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cimarga	**781,855,800.00**	**559,151,980.00**	**222,703,820.00**
1	Desa Sarageni	46,879,400.00	33,288,940.00	13,590,460.00
2	Desa Gununganten	49,240,400.00	34,428,940.00	14,811,460.00
3	Desa Sudamanik	51,998,400.00	35,672,940.00	16,325,460.00
4	Desa Tambak	47,365,400.00	34,083,940.00	13,281,460.00
5	Desa Cimarga	54,359,400.00	36,682,940.00	17,676,460.00
6	Desa Karyajaya	46,027,400.00	32,908,940.00	13,118,460.00
7	Desa Margajaya	55,178,400.00	36,786,940.00	18,391,460.00
8	Desa Jayamanik	48,104,400.00	33,912,940.00	14,191,460.00
9	Desa Margaluyu	37,049,400.00	28,634,940.00	8,414,460.00
10	Desa Margatirta	47,424,400.00	33,556,940.00	13,867,460.00
11	Desa Intenjaya	45,198,400.00	32,415,940.00	12,782,460.00
12	Desa Mekarjaya	51,455,400.00	35,367,940.00	16,087,460.00
13	Desa Jayasari	45,658,400.00	32,964,940.00	12,693,460.00
14	Desa Girimukti	35,981,400.00	28,255,940.00	7,725,460.00
15	Desa Sangkanmanik	41,292,400.00	30,705,940.00	10,586,460.00
16	Desa Sangiangjaya	37,397,400.00	28,893,940.00	8,503,460.00
17	Desa Mekarmulya	41,245,400.00	30,588,940.00	10,656,460.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sajira	**649,829,000.00**	**530,711,100.00**	**119,117,900.00**
1	Desa Maraya	35,522,400.00	32,125,940.00	3,396,460.00
2	Desa Sajira	47,211,400.00	33,116,940.00	14,094,460.00
3	Desa Sukarame	43,862,400.00	38,367,940.00	5,494,460.00
4	Desa Calungbungur	32,956,400.00	37,322,940.00	(4,366,540.00)
5	Desa Parungsari	47,351,400.00	34,698,940.00	12,652,460.00
6	Desa Sindangsari	51,976,400.00	37,186,940.00	14,789,460.00
7	Desa Mekarsari	47,178,400.00	40,818,940.00	6,359,460.00
8	Desa Sukamarga	34,307,400.00	36,200,940.00	(1,893,540.00)
9	Desa Pajagan	41,335,400.00	40,907,940.00	427,460.00
10	Desa Sukajaya	44,863,400.00	31,967,940.00	12,895,460.00
11	Desa Sajira Mekar	47,771,400.00	33,672,940.00	14,098,460.00
12	Desa Paja	45,493,400.00	32,528,940.00	12,964,460.00
13	Desa Margaluyu	35,634,400.00	31,960,940.00	3,673,460.00
14	Desa Bungurmekar	42,890,400.00	34,633,940.00	8,256,460.00
15	Desa Ciuyah	51,474,400.00	35,198,940.00	16,275,460.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Maja	**832,631,463.30**	**608,337,160.00**	**224,294,303.30**
1	Desa Tanjungsari	50,304,400.00	34,905,940.00	15,398,460.00
2	Desa Maja	69,852,400.00	53,951,940.00	15,900,460.00

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	6
3	Desa Sangiang	43,360,400.00	45,082,940.00	(1,722,540.00)
4	Desa Binong	69,406,400.00	43,773,940.00	25,632,460.00
5	Desa Gubugan Cibeureum	47,733,400.00	33,719,940.00	14,013,460.00
6	Desa Mekarsari	65,356,400.00	37,247,940.00	28,108,460.00
7	Desa Padasuka	48,020,400.00	47,584,940.00	435,460.00
8	Desa Curugbadak	107,675,263.30	57,465,940.00	50,209,323.30
9	Desa Sindangmulya	51,171,400.00	44,656,940.00	6,514,460.00
10	Desa Cilangkap	47,326,400.00	41,972,940.00	5,353,460.00
11	Desa Pasirkembang	91,007,400.00	51,435,940.00	39,571,460.00
12	Desa Pasirkecapi	46,597,400.00	35,253,940.00	11,343,460.00
13	Desa Buyut Mekar	38,345,400.00	43,902,940.00	(5,557,540.00)
14	Desa Maja Baru	56,474,400.00	37,380,940.00	19,093,460.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Rangkasbitung	**561,161,400.00**	**475,121,340.00**	**86,040,060.00**
1	Desa Pasirtanjung	45,382,400.00	39,031,940.00	6,350,460.00
2	Desa Citeras	57,528,400.00	46,241,940.00	11,286,460.00
3	Desa Nameng	47,326,400.00	40,762,940.00	6,563,460.00
4	Desa Kolelet Wetan	38,122,400.00	32,352,940.00	5,769,460.00
5	Desa Jatimulya	51,275,400.00	42,516,940.00	8,758,460.00
6	Desa Mekarsari	59,011,400.00	49,201,940.00	9,809,460.00
7	Desa Pabuaran	32,164,400.00	33,354,940.00	(1,190,540.00)
8	Desa RangkasbitungTimur	69,998,400.00	61,702,940.00	8,295,460.00
9	Desa Sukamanah	46,725,400.00	40,542,940.00	6,182,460.00
10	Desa Cimangeunteung	57,016,400.00	42,423,940.00	14,592,460.00
11	Desa Narimbang Mulia	56,610,400.00	46,987,940.00	9,622,460.00
	Pemerintahan Desa di Kec. Warunggunung	**547,549,800.00**	**428,045,280.00**	**119,504,520.00**
1	Desa Sukarendah	56,602,400.00	39,685,940.00	16,916,460.00
2	Desa Warunggunung	42,414,400.00	39,318,940.00	3,095,460.00
3	Desa Cibuah	40,033,400.00	36,610,940.00	3,422,460.00
4	Desa Pasir Tangkil	58,934,400.00	34,350,940.00	24,583,460.00
5	Desa Baros	34,734,400.00	33,539,940.00	1,194,460.00
6	Desa Banjarsari	32,929,400.00	33,903,940.00	(974,540.00)
7	Desa Padasuka	47,526,400.00	28,264,940.00	19,261,460.00
8	Desa Sukaraja	35,746,400.00	41,146,940.00	(5,400,540.00)
9	Desa Jagabaya	37,794,400.00	35,546,940.00	2,247,460.00
10	Desa Selaraja	72,259,400.00	39,173,940.00	33,085,460.00
11	Desa Cempaka	41,870,400.00	33,297,940.00	8,572,460.00
12	Desa Sindangsari	46,704,400.00	33,203,940.00	13,500,460.00

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	6
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cijaku	**441,020,000.00**	**339,312,400.00**	**101,707,600.00**
1	Desa Mekarjaya	37,004,400.00	28,794,940.00	8,209,460.00
2	Desa Cipalabuh	56,725,400.00	37,905,940.00	18,819,460.00
3	Desa Cijaku	49,351,400.00	34,238,940.00	15,112,460.00
4	Desa Cibeureum	34,608,400.00	32,990,940.00	1,617,460.00
5	Desa Ciapus	44,161,400.00	39,183,940.00	4,977,460.00
6	Desa Kandangsapi	44,049,400.00	38,694,940.00	5,354,460.00
7	Desa Cihujan	46,074,400.00	32,926,940.00	13,147,460.00
8	Desa Cimenga	43,557,400.00	31,759,940.00	11,797,460.00
9	Desa Kapunduhan	40,611,400.00	30,388,940.00	10,222,460.00
10	Desa Sukasenang	44,876,400.00	32,426,940.00	12,449,460.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cikulur	**516,927,200.00**	**432,907,220.00**	**84,019,980.00**
1	Desa Anggalan	34,224,400.00	30,845,940.00	3,378,460.00
2	Desa Muncangkopong	47,106,400.00	35,028,940.00	12,077,460.00
3	Desa Sukaharja	38,178,400.00	29,255,940.00	8,922,460.00
4	Desa Tamanjaya	40,057,400.00	30,101,940.00	9,955,460.00
5	Desa Cigoong Utara	42,634,400.00	31,326,940.00	11,307,460.00
6	Desa Muaradua	50,123,400.00	34,904,940.00	15,218,460.00
7	Desa Cikulur	48,673,400.00	34,195,940.00	14,477,460.00
8	Desa Curugpanjang	26,582,400.00	40,116,940.00	(13,534,540.00)
9	Desa Cigoong Selatan	43,138,400.00	31,562,940.00	11,575,460.00
10	Desa Sumurbandung	42,127,400.00	43,694,940.00	(1,567,540.00)
11	Desa Parage	37,619,400.00	28,986,940.00	8,632,460.00
12	Desa Sukadaya	35,444,400.00	32,994,940.00	2,449,460.00
13	Desa Pasirgintung	31,017,400.00	29,889,940.00	1,127,460.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibadak	**665,664,000.00**	**533,833,100.00**	**131,830,900.00**
1	Desa Tambakbaya	50,857,400.00	35,157,940.00	15,699,460.00
2	Desa Kaduagung Timur	47,681,400.00	54,493,940.00	(6,812,540.00)
3	Desa Panancangan	49,608,400.00	34,813,940.00	14,794,460.00
4	Desa Cibadak	42,404,400.00	31,159,940.00	11,244,460.00
5	Desa Asem	42,302,400.00	31,235,940.00	11,066,460.00
6	Desa Cisangu	26,692,400.00	30,736,940.00	(4,044,540.00)
7	Desa Kaduagung Barat	78,631,400.00	34,185,940.00	44,445,460.00
8	Desa Bojongcae	43,844,400.00	31,702,940.00	12,141,460.00
9	Desa Malabar	37,840,400.00	29,091,940.00	8,748,460.00
10	Desa Pasar Keong	28,044,400.00	37,159,940.00	(9,115,540.00)

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	6
11	Desa Bojong Leles	33,421,400.00	40,228,940.00	(6,807,540.00)
12	Desa Cimenteng Jaya	34,676,400.00	27,775,940.00	6,900,460.00
13	Desa Mekar Agung	48,773,400.00	37,576,940.00	11,196,460.00
14	Desa Asem Margaluyu	44,574,400.00	32,217,940.00	12,356,460.00
15	Desa Kaduagung Tengah	56,311,400.00	46,293,940.00	10,017,460.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibeber	**988,822,800.00**	**713,043,680.00**	**275,779,120.00**
1	Desa Cibeber	47,966,400.00	33,799,940.00	14,166,460.00
2	Desa Citorek Tengah	45,952,400.00	32,918,940.00	13,033,460.00
3	Desa Cisungsang	38,451,400.00	29,384,940.00	9,066,460.00
4	Desa Kujangjaya	48,700,400.00	34,150,940.00	14,549,460.00
5	Desa Kujangsari	34,870,400.00	27,694,940.00	7,175,460.00
6	Desa Neglasari	69,976,400.00	43,892,940.00	26,083,460.00
7	Desa Mekarsari	47,181,400.00	33,444,940.00	13,736,460.00
8	Desa Cikotok	36,997,400.00	28,697,940.00	8,299,460.00
9	Desa Sukamulya	48,952,400.00	34,267,940.00	14,684,460.00
10	Desa Citorek Timur	39,274,400.00	29,767,940.00	9,506,460.00
11	Desa Warungbanten	53,529,400.00	36,737,940.00	16,791,460.00
12	Desa Hegarmanah	53,578,400.00	36,419,940.00	17,158,460.00
13	Desa Situmulya	38,374,400.00	29,351,940.00	9,022,460.00
14	Desa Citorek Kidul	41,681,400.00	30,886,940.00	10,794,460.00
15	Desa Cikadu	49,991,400.00	34,687,940.00	15,303,460.00
16	Desa Sirnagalih	39,941,400.00	30,077,940.00	9,863,460.00
17	Desa Cihambali	42,036,400.00	31,055,940.00	10,980,460.00
18	Desa Citorek Barat	48,560,400.00	34,085,940.00	14,474,460.00
19	Desa Gunungwangun	37,942,400.00	29,165,940.00	8,776,460.00
20	Desa Wanasari	46,827,400.00	33,280,940.00	13,546,460.00
21	Desa Citorek Sabrang	36,632,400.00	28,546,940.00	8,085,460.00
22	Desa Ciherang	41,404,400.00	30,723,940.00	10,680,460.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cilograng	**486,145,000.00**	**352,540,400.00**	**133,604,600.00**
1	Desa Cilograng	47,431,400.00	33,418,940.00	14,012,460.00
2	Desa Cibareno	43,481,400.00	31,772,940.00	11,708,460.00
3	Desa Cikamunding	49,628,400.00	34,570,940.00	15,057,460.00
4	Desa Cijengkol	48,082,400.00	42,734,940.00	5,347,460.00
5	Desa Pasirbungur	45,864,400.00	33,306,940.00	12,557,460.00
6	Desa Lebaktipar	63,177,400.00	41,898,940.00	21,278,460.00
7	Desa Cikatomas	55,621,400.00	38,402,940.00	17,218,460.00
8	Desa Girimukti	38,325,400.00	29,325,940.00	8,999,460.00
9	Desa Cireundeu	51,363,400.00	35,382,940.00	15,980,460.00

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	6
10	Desa Gunungbatu	43,169,400.00	31,724,940.00	11,444,460.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Wanasalam	**604,787,200.00**	**441,771,220.00**	**163,015,980.00**
1	Desa Wanasalam	61,563,400.00	40,012,940.00	21,550,460.00
2	Desa Bejod	39,127,400.00	36,276,940.00	2,850,460.00
3	Desa Cilangkap	40,023,400.00	30,115,940.00	9,907,460.00
4	Desa Cipeucang	42,398,400.00	31,205,940.00	11,192,460.00
5	Desa Muara	54,656,400.00	41,110,940.00	13,545,460.00
6	Desa Parungpanjang	51,211,400.00	35,796,940.00	15,414,460.00
7	Desa Cikeusik	46,109,400.00	32,986,940.00	13,122,460.00
8	Desa Katapang	37,467,400.00	28,923,940.00	8,543,460.00
9	Desa Cisarap	51,042,400.00	35,171,940.00	15,870,460.00
10	Desa Sukatani	48,672,400.00	34,033,940.00	14,638,460.00
11	Desa Cipedang	47,329,400.00	33,512,940.00	13,816,460.00
12	Desa Parungsari	48,020,400.00	33,834,940.00	14,185,460.00
13	Desa Karangpamindangan	37,165,400.00	28,786,940.00	8,378,460.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sobang	**397,592,000.00**	**300,907,400.00**	**96,684,600.00**
1	Desa Ciparasi	41,277,400.00	30,670,940.00	10,606,460.00
2	Desa Sobang	35,182,400.00	28,770,940.00	6,411,460.00
3	Desa Sukajaya	37,861,400.00	29,106,940.00	8,754,460.00
4	Desa Sindanglaya	42,997,400.00	31,498,940.00	11,498,460.00
5	Desa Sukamaju	48,164,400.00	34,022,940.00	14,141,460.00
6	Desa Hariang	38,812,400.00	29,550,940.00	9,261,460.00
7	Desa Majasari	39,040,400.00	29,641,940.00	9,398,460.00
8	Desa Sinar Jaya	43,724,400.00	31,836,940.00	11,887,460.00
9	Desa Cirompang	36,351,400.00	28,407,940.00	7,943,460.00
10	Desa Sukaresmi	34,180,400.00	27,398,940.00	6,781,460.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Curugbitung	**510,311,000.00**	**449,914,400.00**	**60,396,600.00**
1	Desa Guradog	41,246,400.00	60,228,940.00	(18,982,540.00)
2	Desa Curugbitung	63,170,400.00	40,677,940.00	22,492,460.00
3	Desa Candi	59,622,400.00	42,892,940.00	16,729,460.00
4	Desa Mayak	51,559,400.00	41,655,940.00	9,903,460.00
5	Desa Cipining	54,114,400.00	45,028,940.00	9,085,460.00
6	Desa Cilayang	49,690,400.00	55,959,940.00	(6,269,540.00)
7	Desa Ciburuy	58,579,400.00	50,869,940.00	7,709,460.00
8	Desa Sekarwangi	35,624,400.00	37,053,940.00	(1,429,540.00)
9	Desa Cidadap	54,569,400.00	36,675,940.00	17,893,460.00

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	6
10	Desa Lebakasih	42,134,400.00	38,869,940.00	3,264,460.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Kalanganyar	**253,346,800.00**	**264,661,580.00**	**(11,314,780.00)**
1	Desa Kalanganyar	34,742,400.00	34,575,940.00	166,460.00
2	Desa Pasirkupa	38,880,400.00	35,009,940.00	3,870,460.00
3	Desa Cilangkap	31,212,400.00	42,628,940.00	(11,416,540.00)
4	Desa Aweh	36,297,400.00	44,677,940.00	(8,380,540.00)
5	Desa Sangiangtanjung	31,514,400.00	35,284,940.00	(3,770,540.00)
6	Desa Sukamekarsari	34,548,400.00	39,543,940.00	(4,995,540.00)
7	Desa Cikatapis	46,151,400.00	32,939,940.00	13,211,460.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Lebakgedong	**265,474,400.00**	**193,184,640.00**	**72,289,760.00**
1	Desa Banjaririgasi	45,319,400.00	33,231,940.00	12,087,460.00
2	Desa Ciladaeun	43,245,400.00	31,613,940.00	11,631,460.00
3	Desa Lebakgedong	47,050,400.00	33,404,940.00	13,645,460.00
4	Desa Banjarsari	41,036,400.00	30,586,940.00	10,449,460.00
5	Desa Lebaksitu	46,862,400.00	33,309,940.00	13,552,460.00
6	Desa Lebaksangka	41,960,400.00	31,036,940.00	10,923,460.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cihara	**388,570,600.00**	**339,361,460.00**	**49,209,140.00**
1	Desa Panyaungan	51,329,400.00	37,879,940.00	13,449,460.00
2	Desa Cihara	51,180,400.00	35,012,940.00	16,167,460.00
3	Desa Ciparahu	50,374,400.00	39,748,940.00	10,625,460.00
4	Desa Pondokpanjang	31,607,400.00	47,023,940.00	(15,416,540.00)
5	Desa Citeupuseun	40,688,400.00	36,125,940.00	4,562,460.00
6	Desa Lebakpeundeuy	41,698,400.00	38,804,940.00	2,893,460.00
7	Desa Mekarsari	41,534,400.00	44,490,940.00	(2,956,540.00)
8	Desa Karangkamulyan	37,317,400.00	28,847,940.00	8,469,460.00
9	Desa Barunai	42,840,400.00	31,425,940.00	11,414,460.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cirinten	**458,918,000.00**	**337,018,400.00**	**121,899,600.00**
1	Desa Datarcae	45,477,400.00	32,651,940.00	12,825,460.00
2	Desa Cirinten	45,311,400.00	40,859,940.00	4,451,460.00
3	Desa Karangnunggal	39,655,400.00	29,796,940.00	9,858,460.00
4	Desa Kadudamas	50,418,400.00	34,997,940.00	15,420,460.00
5	Desa Badur	52,852,400.00	36,072,940.00	16,779,460.00
6	Desa Parakanlima	48,700,400.00	34,150,940.00	14,549,460.00
7	Desa Nanggerang	41,959,400.00	31,015,940.00	10,943,460.00
8	Desa Cempaka	47,507,400.00	33,595,940.00	13,911,460.00
9	Desa Karoya	45,312,400.00	32,574,940.00	12,737,460.00

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	6
10	Desa Cibarani	41,723,400.00	31,300,940.00	10,422,460.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cigemblong	**344,182,600.20**	**298,320,460.00**	**45,862,140.20**
1	Desa Peucangpari	42,283,400.00	37,678,940.00	4,604,460.00
2	Desa Cibungur	37,892,400.00	31,128,940.00	6,763,460.00
3	Desa Mugijaya	43,702,400.00	31,826,940.00	11,875,460.00
4	Desa Cikate	32,912,400.00	30,701,940.00	2,210,460.00
5	Desa Cigemblong	38,291,400.00	35,501,940.00	2,789,460.00
6	Desa Cikadongdong	35,296,400.00	37,194,940.00	(1,898,540.00)
7	Desa Cikaret	34,984,400.00	34,399,940.00	584,460.00
8	Desa Wangunjaya	31,480,068.20	26,142,940.00	5,337,128.20
9	Desa Cikaratuan	47,339,732.00	33,743,940.00	13,595,792.00
JUMLAH		**15,691,796,863.50**	**12,179,632,067.00**	**3,512,164,796.50**

Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Tahun 2021 sebesar Rp1.513.801.283,70 mengalami penurunan sebesar Rp152.741.349,30 atau 9,17% jika dibandingkan dengan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.666.542.633,00. Rincian Beban Bagi Hasil Retribusi Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dapat dilihat pada tabel 5.71 berikut:

Tabel 5.71
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah – LO
Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	6
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Malingping	**64,251,768.00**	**83,887,440.00**	**(19,635,672.00)**
1	Desa Cilangkahan	4,389,412.00	5,489,960.00	(1,100,548.00)
2	Desa Pagelaran	5,667,412.00	7,657,960.00	(1,990,548.00)
3	Desa Sukaraja	3,872,412.00	5,815,960.00	(1,943,548.00)
4	Desa Malingping Utara	5,452,412.00	6,002,960.00	(550,548.00)
5	Desa Bolang	3,477,412.00	7,661,960.00	(4,184,548.00)
6	Desa Cipeundeuy	4,275,412.00	6,095,960.00	(1,820,548.00)
7	Desa Rahong	3,782,412.00	4,973,960.00	(1,191,548.00)
8	Desa Kadujajar	6,688,412.00	5,930,960.00	757,452.00
9	Desa Kersaratu	4,946,412.00	6,165,960.00	(1,219,548.00)
10	Desa Malingping Selatan	4,893,412.00	5,925,960.00	(1,032,548.00)
11	Desa Sumberwaras	4,558,412.00	5,889,960.00	(1,331,548.00)

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	6
12	Desa Sukamanah	3,704,412.00	6,842,960.00	(3,138,548.00)
13	Desa Senanghati	4,642,412.00	5,092,960.00	(450,548.00)
14	Desa Sangiang	3,901,412.00	4,339,960.00	(438,548.00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Panggarangan	**55,737,532.00**	**60,059,560.00**	**(4,322,028.00)**
1	Desa Panggarangan	5,619,412.00	5,555,960.00	63,452.00
2	Desa Jatake	3,529,412.00	5,263,960.00	(1,734,548.00)
3	Desa Sogong	6,004,412.00	5,781,960.00	222,452.00
4	Desa Cimandiri	3,313,412.00	5,730,960.00	(2,417,548.00)
5	Desa Gununggede	5,043,412.00	5,845,960.00	(802,548.00)
6	Desa Situregen	5,541,412.00	5,313,960.00	227,452.00
7	Desa Mekarjaya	6,414,412.00	6,049,960.00	364,452.00
8	Desa Sindangratu	6,353,412.00	6,005,960.00	347,452.00
9	Desa Hegarmanah	3,555,412.00	4,490,960.00	(935,548.00)
10	Desa Sukajadi	5,093,412.00	4,923,960.00	169,452.00
11	Desa Cibarengkok	5,269,412.00	5,095,960.00	173,452.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bayah	**63,033,532.00**	**77,269,793.00**	**(14,236,261.00)**
1	Desa Bayah Barat	5,501,412.00	6,972,960.00	(1,471,548.00)
2	Desa Sawarna	6,449,412.00	9,478,193.00	(3,028,781.00)
3	Desa Cidikit	6,433,412.00	7,315,960.00	(882,548.00)
4	Desa Suwakan	6,752,412.00	7,100,960.00	(348,548.00)
5	Desa Cimancak	4,396,412.00	6,072,960.00	(1,676,548.00)
6	Desa Darmasari	4,926,412.00	7,308,960.00	(2,382,548.00)
7	Desa Bayah Timur	4,765,412.00	5,514,960.00	(749,548.00)
8	Desa Cisuren	4,603,412.00	5,844,960.00	(1,241,548.00)
9	Desa Pasirgombong	4,170,412.00	4,761,960.00	(591,548.00)
10	Desa Sawarna Timur	6,296,412.00	7,755,960.00	(1,459,548.00)
11	Desa Pamubulan	8,738,412.00	9,141,960.00	(403,548.00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cipanas	**62,170,768.00**	**63,325,440.00**	**(1,154,672.00)**
1	Desa Cipanas	4,373,412.00	4,354,960.00	18,452.00
2	Desa Girilaya	4,102,412.00	4,137,960.00	(35,548.00)
3	Desa Malangsari	4,145,412.00	4,261,960.00	(116,548.00)
4	Desa Bintangresmi	4,469,412.00	4,434,960.00	34,452.00
5	Desa Talagahiyang	3,755,412.00	3,835,960.00	(80,548.00)
6	Desa Luhurjaya	5,156,412.00	4,983,960.00	172,452.00
7	Desa Haurgajrug	6,571,412.00	6,184,960.00	386,452.00
8	Desa Giriharja	4,880,412.00	4,774,960.00	105,452.00

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	6
9	Desa Sukasari	3,920,412.00	5,484,960.00	(1,564,548.00)
10	Desa Jayapura	4,101,412.00	4,121,960.00	(20,548.00)
11	Desa Sipayung	4,617,412.00	4,555,960.00	61,452.00
12	Desa Bintangsari	3,864,412.00	3,930,960.00	(66,548.00)
13	Desa Pasirhaur	4,004,412.00	4,048,960.00	(44,548.00)
14	Desa Harumsari	4,208,412.00	4,212,960.00	(4,548.00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Muncang	**46,331,944.00**	**47,124,520.00**	**(792,576.00)**
1	Desa Pasireurih	4,286,412.00	4,282,960.00	3,452.00
2	Desa Ciminyak	4,854,412.00	4,733,960.00	120,452.00
3	Desa Muncang	3,997,412.00	4,050,960.00	(53,548.00)
4	Desa Leuwicoo	3,730,412.00	3,820,960.00	(90,548.00)
5	Desa Sindangwangi	3,645,412.00	3,746,960.00	(101,548.00)
6	Desa Cikarang	3,802,412.00	3,879,960.00	(77,548.00)
7	Desa Sukanagara	3,736,412.00	3,825,960.00	(89,548.00)
8	Desa Pasirnangka	3,963,412.00	4,014,960.00	(51,548.00)
9	Desa Jagaraksa	3,577,412.00	3,693,960.00	(116,548.00)
10	Desa Tanjungwangi	3,647,412.00	3,751,960.00	(104,548.00)
11	Desa Mekarwangi	3,638,412.00	3,731,960.00	(93,548.00)
12	Desa Girijagabaya	3,452,412.00	3,589,960.00	(137,548.00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Leuwidamar	**55,564,944.00**	**54,690,520.00**	**874,424.00**
1	Desa Kanekes	2,671,412.00	2,940,960.00	(269,548.00)
2	Desa Cisimeut	5,323,412.00	5,140,960.00	182,452.00
3	Desa Cibungur	5,996,412.00	5,703,960.00	292,452.00
4	Desa Leuwidamar	5,187,412.00	4,988,960.00	198,452.00
5	Desa Lebakparahiang	4,883,412.00	4,733,960.00	149,452.00
6	Desa Sangkanwangi	4,731,412.00	4,651,960.00	79,452.00
7	Desa Nayagati	4,866,412.00	4,741,960.00	124,452.00
8	Desa Bojongmenteng	4,736,412.00	4,651,960.00	84,452.00
9	Desa Margawangi	3,823,412.00	3,897,960.00	(74,548.00)
10	Desa Wantisari	3,952,412.00	4,002,960.00	(50,548.00)
11	Desa Jalupangmulya	4,699,412.00	4,617,960.00	81,452.00
12	Desa Cisimeut Raya	4,693,412.00	4,616,960.00	76,452.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Bojongmanik	**37,503,708.00**	**41,734,640.00**	**(4,230,932.00)**
1	Desa Bojongmanik	4,242,412.00	5,505,960.00	(1,263,548.00)
2	Desa Harjawana	4,663,412.00	4,593,960.00	69,452.00
3	Desa Kadurahayu	3,942,412.00	3,996,960.00	(54,548.00)
4	Desa Cimayang	5,160,412.00	4,991,960.00	168,452.00

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	6
5	Desa Parakanbeusi	3,660,412.00	5,494,960.00	(1,834,548.00)
6	Desa Keboncau	4,099,412.00	4,500,960.00	(401,548.00)
7	Desa Mekarmanik	4,628,412.00	5,026,960.00	(398,548.00)
8	Desa Mekar Rahayu	3,652,412.00	4,032,960.00	(380,548.00)
9	Desa Pasirbitung	3,454,412.00	3,589,960.00	(135,548.00)
	Pemerintahan Desa di Kec. Gunungkencana	**53,093,944.00**	**54,296,520.00**	**(1,202,576.00)**
1	Desa Gunungkencana	4,815,412.00	4,673,960.00	141,452.00
2	Desa Cimanyangray	4,883,412.00	4,807,960.00	75,452.00
3	Desa Gunungkendeng	3,360,412.00	3,990,960.00	(630,548.00)
4	Desa Cisampang	4,271,412.00	4,269,960.00	1,452.00
5	Desa Ciginggang	4,900,412.00	4,790,960.00	109,452.00
6	Desa Ciakar	5,210,412.00	5,051,960.00	158,452.00
7	Desa Cicaringin	4,487,412.00	5,537,960.00	(1,050,548.00)
8	Desa Bulakan	4,084,412.00	4,118,960.00	(34,548.00)
9	Desa Sukanegara	4,164,412.00	4,175,960.00	(11,548.00)
10	Desa Bojongkoneng	4,275,412.00	4,265,960.00	9,452.00
11	Desa Kramatjaya	4,813,412.00	4,710,960.00	102,452.00
12	Desa Tanjungsari Indah	3,827,412.00	3,900,960.00	(73,548.00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Banjarsari	**86,612,240.00**	**86,651,200.00**	**(38,960.00)**
1	Desa Kerta	4,024,412.00	4,054,960.00	(30,548.00)
2	Desa Bojongjuruh	4,847,412.00	4,747,960.00	99,452.00
3	Desa Leuwiipuh	4,459,412.00	4,424,960.00	34,452.00
4	Desa Lebakkeusik	4,024,412.00	4,064,960.00	(40,548.00)
5	Desa Cilegongilir	4,797,412.00	4,708,960.00	88,452.00
6	Desa Keusik	4,774,412.00	4,677,960.00	96,452.00
7	Desa Cibaturkeusik	3,819,412.00	3,896,960.00	(77,548.00)
8	Desa Kumpay	4,541,412.00	4,492,960.00	48,452.00
9	Desa Jalupanggirang	4,301,412.00	4,293,960.00	7,452.00
10	Desa Bendungan	4,567,412.00	4,508,960.00	58,452.00
11	Desa Kertaraharja	4,708,412.00	4,937,960.00	(229,548.00)
12	Desa Cisampih	4,485,412.00	4,447,960.00	37,452.00
13	Desa Gunungsari	4,150,412.00	4,166,960.00	(16,548.00)
14	Desa Tamansari	4,743,412.00	4,647,960.00	95,452.00
15	Desa Cidahu	4,908,412.00	4,801,960.00	106,452.00
16	Desa Ciruji	4,289,412.00	4,287,960.00	1,452.00
17	Desa Kaduhauk	3,415,412.00	3,557,960.00	(142,548.00)
18	Desa Labanjaya	3,957,412.00	4,008,960.00	(51,548.00)
19	Desa Umbuljaya	4,436,412.00	4,407,960.00	28,452.00

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	6
20	Desa Kertarahayu	3,360,412.00	3,512,960.00	(152,548.00)
	Pemrintahan Desa di Kecamatan Cileles	**54,065,944.00**	**58,951,520.00**	**(4,885,576.00)**
1	Desa Pasindangan	2,812,412.00	4,666,960.00	(1,854,548.00)
2	Desa Parungkujang	3,001,412.00	5,875,960.00	(2,874,548.00)
3	Desa Cileles	5,187,412.00	5,003,960.00	183,452.00
4	Desa Cikareo	4,710,412.00	4,653,960.00	56,452.00
5	Desa Cipadang	5,369,412.00	5,156,960.00	212,452.00
6	Desa Gumuruh	3,906,412.00	5,115,960.00	(1,209,548.00)
7	Desa Prabugantungan	4,667,412.00	4,596,960.00	70,452.00
8	Desa Daroyon	4,066,412.00	4,090,960.00	(24,548.00)
9	Desa Margamulya	5,142,412.00	4,993,960.00	148,452.00
10	Desa Mekarjaya	5,136,412.00	4,987,960.00	148,452.00
11	Desa Kujangsari	4,865,412.00	4,765,960.00	99,452.00
12	Desa Banjarsari	5,200,412.00	5,041,960.00	158,452.00
	Pemerintahan Desa diKecamatan Cimarga	**75,260,004.00**	**74,787,320.00**	**472,684.00**
1	Desa Sarageni	4,511,412.00	4,466,960.00	44,452.00
2	Desa Gununganten	4,738,412.00	4,662,960.00	75,452.00
3	Desa Sudamanik	5,003,412.00	4,875,960.00	127,452.00
4	Desa Tambak	4,561,412.00	4,603,960.00	(42,548.00)
5	Desa Cimarga	5,229,412.00	5,048,960.00	180,452.00
6	Desa Karyajaya	4,430,412.00	4,401,960.00	28,452.00
7	Desa Margajaya	5,307,412.00	5,066,960.00	240,452.00
8	Desa Jayamanik	4,630,412.00	4,573,960.00	56,452.00
9	Desa Margaluyu	3,569,412.00	3,669,960.00	(100,548.00)
10	Desa Margatirta	4,565,412.00	4,512,960.00	52,452.00
11	Desa Intenjaya	4,350,412.00	4,317,960.00	32,452.00
12	Desa Mekarjaya	4,951,412.00	4,823,960.00	127,452.00
13	Desa Jayasari	4,396,412.00	4,411,960.00	(15,548.00)
14	Desa Girimukti	3,466,412.00	3,604,960.00	(138,548.00)
15	Desa Sangkanmanik	3,975,412.00	4,024,960.00	(49,548.00)
16	Desa Sangiangjaya	3,602,412.00	3,713,960.00	(111,548.00)
17	Desa Mekarmulya	3,970,412.00	4,004,960.00	(34,548.00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sajira	**62,756,180.00**	**72,389,400.00**	**(9,633,220.00)**
1	Desa Maraya	3,436,412.00	4,267,960.00	(831,548.00)
2	Desa Sajira	4,543,412.00	4,437,960.00	105,452.00
3	Desa Sukarame	4,245,412.00	5,337,960.00	(1,092,548.00)
4	Desa Calungbungur	3,212,412.00	5,158,960.00	(1,946,548.00)

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	6
5	Desa Parungsari	4,561,412.00	4,708,960.00	(147,548.00)
6	Desa Sindangsari	5,006,412.00	5,135,960.00	(129,548.00)
7	Desa Mekarsari	4,565,412.00	5,757,960.00	(1,192,548.00)
8	Desa Sukamarga	3,335,412.00	4,966,960.00	(1,631,548.00)
9	Desa Pajagan	4,015,412.00	5,772,960.00	(1,757,548.00)
10	Desa Sukajaya	4,318,412.00	4,240,960.00	77,452.00
11	Desa Sajira Mekar	4,598,412.00	4,532,960.00	65,452.00
12	Desa Paja	4,378,412.00	4,336,960.00	41,452.00
13	Desa Margaluyu	3,446,412.00	4,239,960.00	(793,548.00)
14	Desa Bungurmekar	4,140,412.00	4,697,960.00	(557,548.00)
15	Desa Ciuyah	4,952,412.00	4,794,960.00	157,452.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Maja	**80,293,180.20**	**86,927,440.00**	**(6,634,259.80)**
1	Desa Tanjungsari	4,841,412.00	4,744,960.00	96,452.00
2	Desa Maja	6,750,412.00	8,007,960.00	(1,257,548.00)
3	Desa Sangiang	4,220,412.00	6,488,960.00	(2,268,548.00)
4	Desa Binong	6,673,412.00	6,263,960.00	409,452.00
5	Desa Gubugan Cibeureum	4,594,412.00	4,540,960.00	53,452.00
6	Desa Mekarsari	6,269,412.00	5,145,960.00	1,123,452.00
7	Desa Padasuka	4,668,412.00	6,916,960.00	(2,248,548.00)
8	Desa Curugbadak	10,328,824.20	8,610,960.00	1,717,864.20
9	Desa Sindangmulya	4,956,412.00	6,414,960.00	(1,458,548.00)
10	Desa Cilangkap	4,584,412.00	5,955,960.00	(1,371,548.00)
11	Desa Pasirkembang	8,738,412.00	7,576,960.00	1,161,452.00
12	Desa Pasirkecapi	4,492,412.00	4,803,960.00	(311,548.00)
13	Desa Buyut Mekar	3,743,412.00	6,285,960.00	(2,542,548.00)
14	Desa Maja Baru	5,431,412.00	5,168,960.00	262,452.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Rangkasbitung	**54,298,532.00**	**67,809,560.00**	**(13,511,028.00)**
1	Desa Pasirtanjung	4,390,412.00	5,451,960.00	(1,061,548.00)
2	Desa Citeras	5,561,412.00	6,686,960.00	(1,125,548.00)
3	Desa Nameng	4,579,412.00	5,747,960.00	(1,168,548.00)
4	Desa Kolelet Wetan	3,682,412.00	4,306,960.00	(624,548.00)
5	Desa Jatimulya	4,958,412.00	6,048,960.00	(1,090,548.00)
6	Desa Mekarsari	5,711,412.00	7,193,960.00	(1,482,548.00)
7	Desa Pabuaran	3,123,412.00	4,478,960.00	(1,355,548.00)
8	Desa RangkasbitungTimur	6,791,412.00	9,335,960.00	(2,544,548.00)
9	Desa Sukamanah	4,522,412.00	5,709,960.00	(1,187,548.00)
10	Desa Cimangeunteung	5,500,412.00	6,032,960.00	(532,548.00)

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	6
11	Desa Narimbang Mulia	5,477,412.00	6,814,960.00	(1,337,548.00)
	Pemerintahan Desa di Kec. Warunggunung	**52,827,944.00**	**58,507,520.00**	**(5,679,576.00)**
1	Desa Sukarendah	5,451,412.00	5,563,960.00	(112,548.00)
2	Desa Warunggunung	4,111,412.00	5,500,960.00	(1,389,548.00)
3	Desa Cibuah	3,877,412.00	5,036,960.00	(1,159,548.00)
4	Desa Pasir Tangkil	5,653,412.00	4,648,960.00	1,004,452.00
5	Desa Baros	3,366,412.00	4,510,960.00	(1,144,548.00)
6	Desa Banjarsari	3,198,412.00	4,572,960.00	(1,374,548.00)
7	Desa Padasuka	4,556,412.00	3,606,960.00	949,452.00
8	Desa Sukaraja	3,488,412.00	5,813,960.00	(2,325,548.00)
9	Desa Jagabaya	3,662,412.00	4,853,960.00	(1,191,548.00)
10	Desa Selaraja	6,927,412.00	5,475,960.00	1,451,452.00
11	Desa Cempaka	4,039,412.00	4,468,960.00	(429,548.00)
12	Desa Sindangsari	4,495,412.00	4,452,960.00	42,452.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cijaku	**42,523,120.00**	**45,774,600.00**	**(3,251,480.00)**
1	Desa Mekarjaya	3,565,412.00	3,696,960.00	(131,548.00)
2	Desa Cipalabuh	5,457,412.00	5,258,960.00	198,452.00
3	Desa Cijaku	4,748,412.00	4,629,960.00	118,452.00
4	Desa Cibeureum	3,352,412.00	4,415,960.00	(1,063,548.00)
5	Desa Ciapus	4,275,412.00	5,477,960.00	(1,202,548.00)
6	Desa Kandangsapi	4,263,412.00	5,393,960.00	(1,130,548.00)
7	Desa Cihujan	4,435,412.00	4,404,960.00	30,452.00
8	Desa Cimenga	4,193,412.00	4,204,960.00	(11,548.00)
9	Desa Kapunduhan	3,911,412.00	3,970,960.00	(59,548.00)
10	Desa Sukasenang	4,320,412.00	4,319,960.00	452.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cikulur	**49,934,356.00**	**58,102,480.00**	**(8,168,124.00)**
1	Desa Anggalan	3,310,412.00	4,048,960.00	(738,548.00)
2	Desa Muncangkopong	4,540,412.00	4,765,960.00	(225,548.00)
3	Desa Sukaharja	3,677,412.00	3,775,960.00	(98,548.00)
4	Desa Tamanjaya	3,858,412.00	3,920,960.00	(62,548.00)
5	Desa Cigoong Utara	4,105,412.00	4,130,960.00	(25,548.00)
6	Desa Muaradua	4,824,412.00	4,743,960.00	80,452.00
7	Desa Cikulur	4,684,412.00	4,622,960.00	61,452.00
8	Desa Curugpanjang	2,620,412.00	5,637,960.00	(3,017,548.00)
9	Desa Cigoong Selatan	4,153,412.00	4,171,960.00	(18,548.00)
10	Desa Sumurbandung	4,099,412.00	6,250,960.00	(2,151,548.00)
11	Desa Parage	3,624,412.00	3,729,960.00	(105,548.00)

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	6
12	Desa Sukadaya	3,431,412.00	4,416,960.00	(985,548.00)
13	Desa Pasirgintung	3,004,412.00	3,884,960.00	(880,548.00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibadak	**64,260,180.00**	**72,924,400.00**	**(8,664,220.00)**
1	Desa Tambakbaya	4,894,412.00	4,787,960.00	106,452.00
2	Desa Kaduagung Timur	4,660,412.00	8,100,960.00	(3,440,548.00)
3	Desa Panancangan	4,774,412.00	4,728,960.00	45,452.00
4	Desa Cibadak	4,083,412.00	4,102,960.00	(19,548.00)
5	Desa Asem	4,073,412.00	4,115,960.00	(42,548.00)
6	Desa Cisangu	2,598,412.00	4,029,960.00	(1,431,548.00)
7	Desa Kaduagung Barat	7,511,412.00	4,620,960.00	2,890,452.00
8	Desa Bojongcae	4,219,412.00	4,195,960.00	23,452.00
9	Desa Malabar	3,645,412.00	3,747,960.00	(102,548.00)
10	Desa Pasar Keong	2,748,412.00	5,130,960.00	(2,382,548.00)
11	Desa Bojong Leles	3,265,412.00	5,656,960.00	(2,391,548.00)
12	Desa Cimenteng Jaya	3,342,412.00	3,522,960.00	(180,548.00)
13	Desa Mekar Agung	4,704,412.00	5,201,960.00	(497,548.00)
14	Desa Asem Margaluyu	4,292,412.00	4,283,960.00	8,452.00
15	Desa Kaduagung Tengah	5,446,412.00	6,695,960.00	(1,249,548.00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cibeber	**95,196,064.00**	**94,975,120.00**	**220,944.00**
1	Desa Cibeber	4,617,412.00	4,554,960.00	62,452.00
2	Desa Citorek Tengah	4,424,412.00	4,403,960.00	20,452.00
3	Desa Cisungsang	3,703,412.00	3,798,960.00	(95,548.00)
4	Desa Kujangjaya	4,687,412.00	4,614,960.00	72,452.00
5	Desa Kujangsari	3,360,412.00	3,508,960.00	(148,548.00)
6	Desa Neglasari	6,727,412.00	6,284,960.00	442,452.00
7	Desa Mekarsari	4,542,412.00	4,493,960.00	48,452.00
8	Desa Cikotok	3,565,412.00	3,680,960.00	(115,548.00)
9	Desa Sukamulya	4,711,412.00	4,634,960.00	76,452.00
10	Desa Citorek Timur	3,782,412.00	3,863,960.00	(81,548.00)
11	Desa Warungbanten	5,151,412.00	5,058,960.00	92,452.00
12	Desa Hegarmanah	5,155,412.00	5,003,960.00	151,452.00
13	Desa Situmulya	3,696,412.00	3,792,960.00	(96,548.00)
14	Desa Citorek Kidul	4,013,412.00	4,055,960.00	(42,548.00)
15	Desa Cikadu	4,811,412.00	4,706,960.00	104,452.00
16	Desa Sirnagalih	3,847,412.00	3,916,960.00	(69,548.00)
17	Desa Cihambali	4,047,412.00	4,084,960.00	(37,548.00)
18	Desa Citorek Barat	4,673,412.00	4,603,960.00	69,452.00
19	Desa Gunungwangun	3,655,412.00	3,760,960.00	(105,548.00)

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	6
20	Desa Wanasari	4,507,412.00	4,465,960.00	41,452.00
21	Desa Citorek Sabrang	3,528,412.00	3,654,960.00	(126,548.00)
22	Desa Ciherang	3,986,412.00	4,027,960.00	(41,548.00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cilograng	**46,828,120.00**	**48,042,600.00**	**(1,214,480.00)**
1	Desa Cilograng	4,565,412.00	4,489,960.00	75,452.00
2	Desa Cibareno	4,186,412.00	4,207,960.00	(21,548.00)
3	Desa Cikamunding	4,776,412.00	4,686,960.00	89,452.00
4	Desa Cijengkol	4,658,412.00	6,085,960.00	(1,427,548.00)
5	Desa Pasirbungur	4,416,412.00	4,470,960.00	(54,548.00)
6	Desa Lebaktipar	6,080,412.00	5,942,960.00	137,452.00
7	Desa Cikatomas	5,354,412.00	5,343,960.00	10,452.00
8	Desa Girimukti	3,691,412.00	3,787,960.00	(96,548.00)
9	Desa Cireundeu	4,942,412.00	4,825,960.00	116,452.00
10	Desa Gunungbatu	4,156,412.00	4,199,960.00	(43,548.00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Wanasalam	**58,254,356.00**	**59,622,480.00**	**(1,368,124.00)**
1	Desa Wanasalam	5,920,412.00	5,619,960.00	300,452.00
2	Desa Bejod	3,791,412.00	4,979,960.00	(1,188,548.00)
3	Desa Cilangkap	3,854,412.00	3,923,960.00	(69,548.00)
4	Desa Cipeucang	4,083,412.00	4,110,960.00	(27,548.00)
5	Desa Muara	5,272,412.00	5,807,960.00	(535,548.00)
6	Desa Parungpanjang	4,929,412.00	4,896,960.00	32,452.00
7	Desa Cikeusik	4,439,412.00	4,415,960.00	23,452.00
8	Desa Katapang	3,609,412.00	3,718,960.00	(109,548.00)
9	Desa Cisarap	4,911,412.00	4,789,960.00	121,452.00
10	Desa Sukatani	4,684,412.00	4,594,960.00	89,452.00
11	Desa Cipedang	4,556,412.00	4,505,960.00	50,452.00
12	Desa Parungsari	4,621,412.00	4,560,960.00	60,452.00
13	Desa Karangpamindangan	3,580,412.00	3,695,960.00	(115,548.00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Sobang	**38,295,120.00**	**39,194,600.00**	**(899,480.00)**
1	Desa Ciparasi	3,974,412.00	4,018,960.00	(44,548.00)
2	Desa Sobang	3,393,412.00	3,692,960.00	(299,548.00)
3	Desa Sukajaya	3,647,412.00	3,750,960.00	(103,548.00)
4	Desa Sindanglaya	4,140,412.00	4,160,960.00	(20,548.00)
5	Desa Sukamaju	4,636,412.00	4,592,960.00	43,452.00
6	Desa Hariang	3,738,412.00	3,826,960.00	(88,548.00)
7	Desa Majasari	3,759,412.00	3,842,960.00	(83,548.00)
8	Desa Sinar Jaya	4,209,412.00	4,218,960.00	(9,548.00)

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	6
9	Desa Cirompang	3,501,412.00	3,630,960.00	(129,548.00)
10	Desa Sukaresmi	3,294,412.00	3,457,960.00	(163,548.00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Curugbitung	**49,440,120.00**	**64,727,600.00**	**(15,287,480.00)**
1	Desa Guradog	4,072,412.00	9,083,960.00	(5,011,548.00)
2	Desa Curugbitung	6,075,412.00	5,733,960.00	341,452.00
3	Desa Candi	5,747,412.00	6,112,960.00	(365,548.00)
4	Desa Mayak	4,982,412.00	5,900,960.00	(918,548.00)
5	Desa Cipining	5,235,412.00	6,478,960.00	(1,243,548.00)
6	Desa Cilayang	4,855,412.00	8,351,960.00	(3,496,548.00)
7	Desa Ciburuy	5,676,412.00	7,479,960.00	(1,803,548.00)
8	Desa Sekarwangi	3,463,412.00	5,112,960.00	(1,649,548.00)
9	Desa Cidadap	5,249,412.00	5,047,960.00	201,452.00
10	Desa Lebakasih	4,082,412.00	5,423,960.00	(1,341,548.00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Kalanganyar	**24,635,884.00**	**36,693,720.00**	**(12,057,836.00)**
1	Desa Kalanganyar	3,371,412.00	4,687,960.00	(1,316,548.00)
2	Desa Pasirkupa	3,763,412.00	4,761,960.00	(998,548.00)
3	Desa Cilangkap	3,066,412.00	6,067,960.00	(3,001,548.00)
4	Desa Aweh	3,553,412.00	6,418,960.00	(2,865,548.00)
5	Desa Sangiangtanjung	3,068,412.00	4,809,960.00	(1,741,548.00)
6	Desa Sukamekarsari	3,370,412.00	5,538,960.00	(2,168,548.00)
7	Desa Cikatapis	4,442,412.00	4,407,960.00	34,452.00
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Lebakgedong	**25,559,472.00**	**25,682,760.00**	**(123,288.00)**
1	Desa Banjaririgasi	4,364,412.00	4,457,960.00	(93,548.00)
2	Desa Ciladaeun	4,163,412.00	4,179,960.00	(16,548.00)
3	Desa Lebakgedong	4,528,412.00	4,486,960.00	41,452.00
4	Desa Banjarsari	3,951,412.00	4,004,960.00	(53,548.00)
5	Desa Lebaksitu	4,510,412.00	4,470,960.00	39,452.00
6	Desa Lebaksangka	4,041,412.00	4,081,960.00	(40,548.00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cihara	**37,599,708.00**	**47,019,640.00**	**(9,419,932.00)**
1	Desa Panyaungan	4,947,412.00	5,253,960.00	(306,548.00)
2	Desa Cihara	4,924,412.00	4,762,960.00	161,452.00
3	Desa Ciparahu	4,864,412.00	5,573,960.00	(709,548.00)
4	Desa Pondokpanjang	3,118,412.00	6,820,960.00	(3,702,548.00)
5	Desa Citeupuseun	3,937,412.00	4,953,960.00	(1,016,548.00)
6	Desa Lebakpeundeuy	4,042,412.00	5,412,960.00	(1,370,548.00)
7	Desa Mekarsari	4,045,412.00	6,386,960.00	(2,341,548.00)

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN / PENURUNAN
1	2	3	4	6
8	Desa Karangkamulyan	3,595,412.00	3,705,960.00	(110,548.00)
9	Desa Barunai	4,124,412.00	4,147,960.00	(23,548.00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cirinten	**44,205,120.00**	**45,381,600.00**	**(1,176,480.00)**
1	Desa Datarcae	4,377,412.00	4,357,960.00	19,452.00
2	Desa Cirinten	4,390,412.00	5,764,960.00	(1,374,548.00)
3	Desa Karangnunggal	3,819,412.00	3,868,960.00	(49,548.00)
4	Desa Kadudamas	4,851,412.00	4,759,960.00	91,452.00
5	Desa Badur	5,085,412.00	4,944,960.00	140,452.00
6	Desa Parakanlima	4,687,412.00	4,614,960.00	72,452.00
7	Desa Nanggerang	4,040,412.00	4,077,960.00	(37,548.00)
8	Desa Cempaka	4,572,412.00	4,519,960.00	52,452.00
9	Desa Karoya	4,362,412.00	4,344,960.00	17,452.00
10	Desa Cibarani	4,018,412.00	4,126,960.00	(108,548.00)
	Pemerintahan Desa di Kecamatan Cigemblong	**33,267,499.50**	**39,988,640.00**	**(6,721,140.50)**
1	Desa Peucangpari	4,093,412.00	5,219,960.00	(1,126,548.00)
2	Desa Cibungur	3,656,412.00	4,096,960.00	(440,548.00)
3	Desa Mugijaya	4,207,412.00	4,216,960.00	(9,548.00)
4	Desa Cikate	3,184,412.00	4,023,960.00	(839,548.00)
5	Desa Cigemblong	3,710,412.00	4,846,960.00	(1,136,548.00)
6	Desa Cikadongdong	3,433,412.00	5,136,960.00	(1,703,548.00)
7	Desa Cikaret	3,393,412.00	4,657,960.00	(1,264,548.00)
8	Desa Wangunjaya	3,030,435.50	3,242,960.00	(212,524.50)
9	Desa Cikaratuan	4,558,180.00	4,545,960.00	12,220.00
JUMLAH		**1,513,801,283.70**	**1,666,542,633.00**	**(152,741,349.30)**

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada Tahun 2021 sebesar Rp405.279.350.618,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.598.579.418,00 atau 2,43%jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp395.680.771.200,00 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.72 berikut:

Tabel 5.72
Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa - LO
Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN /PENURUNAN
1	2	3	4	5
	Desa di Kecamatan Malingping	**15.739.138.800,00**	**15.509.906.000,00**	**229.232.800,00**

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN /PENURUNAN
1	2	3	4	5
1	Desa Cilangkahan	1.030.599.700,00	1.032.883.500,00	(2.283.800,00)
2	Desa Pagelaran	1.156.525.700,00	1.084.361.500,00	72.164.200,00
3	Desa Sukaraja	1.187.492.700,00	1.111.178.500,00	76.314.200,00
4	Desa Malingping Utara	1.099.161.700,00	1.034.852.500,00	64.309.200,00
5	Desa Bolang	1.086.567.700,00	1.077.606.500,00	8.961.200,00
6	Desa Cipeundeuy	1.078.509.700,00	1.074.584.500,00	3.925.200,00
7	Desa Rahong	1.045.026.700,00	1.066.398.500,00	(21.371.800,00)
8	Desa Kadujajar	1.162.693.700,00	1.064.766.500,00	97.927.200,00
9	Desa Kersaratu	1.381.392.700,00	1.287.234.500,00	94.158.200,00
10	Desa Malingping Selatan	1.007.219.700,00	1.007.364.500,00	(144.800,00)
11	Desa Sumberwaras	1.203.833.700,00	1.132.844.500,00	70.989.200,00
12	Desa Sukamanah	1.207.372.700,00	1.290.149.500,00	(82.776.800,00)
13	Desa Senanghati	1.069.987.700,00	1.064.996.500,00	4.991.200,00
14	Desa Sangiang	1.022.754.700,00	1.180.684.500,00	(157.929.800,00)
	Desa di Kecamatan Panggarangan	**14.463.977.700,00**	**13.724.091.500,00**	**739.886.200,00**
1	Desa Panggarangan	1.059.980.700,00	1.055.639.500,00	4.341.200,00
2	Desa Jatake	1.095.172.700,00	1.088.106.500,00	7.066.200,00
3	Desa Sogong	1.399.597.700,00	1.133.154.500,00	266.443.200,00
4	Desa Cimandiri	1.148.975.700,00	1.090.078.500,00	58.897.200,00
5	Desa Gununggede	1.150.898.700,00	1.129.707.500,00	21.191.200,00
6	Desa Situregen	1.410.055.700,00	1.069.007.500,00	341.048.200,00
7	Desa Mekarjaya	1.101.784.700,00	1.075.318.500,00	26.466.200,00
8	Desa Sindangratu	1.774.596.700,00	1.985.608.500,00	(211.011.800,00)
9	Desa Hegarmanah	1.316.419.700,00	1.040.235.500,00	276.184.200,00
10	Desa Sukajadi	1.389.688.700,00	1.072.447.500,00	317.241.200,00
11	Desa Cibarengkok	1.616.806.700,00	1.984.787.500,00	(367.980.800,00)
	Desa di Kecamatan Bayah	13.290.947.700,00	13.112.428.500,00	178.519.200,00
1	Desa Bayah Barat	1.183.951.700,00	1.043.830.500,00	140.121.200,00
2	Desa Sawarna	1.120.746.700,00	1.074.291.500,00	46.455.200,00
3	Desa Cidikit	1.737.187.700,00	1.866.686.500,00	(129.498.800,00)
4	Desa Suwakan	1.095.688.700,00	1.043.290.500,00	52.398.200,00
5	Desa Cimancak	1.164.321.700,00	1.154.939.500,00	9.382.200,00
6	Desa Darmasari	1.036.146.700,00	1.033.194.500,00	2.952.200,00
7	Desa Bayah Timur	1.182.719.700,00	1.041.513.500,00	141.206.200,00
8	Desa Cisuren	1.086.673.700,00	1.069.031.500,00	17.642.200,00
9	Desa Pasirgombong	1.034.545.700,00	1.024.484.500,00	10.061.200,00
10	Desa Sawarna Timur	1.261.745.700,00	1.329.857.500,00	(68.111.800,00)

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN /PENURUNAN
1	2	3	4	5
11	Desa Pamubulan	1.387.219.700,00	1.431.308.500,00	(44.088.800,00)
	Desa di Kecamatan Cipanas	**16.739.391.800,00**	**16.809.961.200,00**	**(70.569.400,00)**
1	Desa Cipanas	1.048.068.700,00	1.033.073.500,00	14.995.200,00
2	Desa Girilaya	1.091.471.700,00	1.071.919.500,00	19.552.200,00
3	Desa Malangsari	1.505.548.700,00	1.479.370.500,00	26.178.200,00
4	Desa Bintangresmi	1.297.851.700,00	1.007.880.700,00	289.971.000,00
5	Desa Talagahiyang	1.006.312.700,00	1.170.601.500,00	(164.288.800,00)
6	Desa Luhurjaya	1.079.950.700,00	1.045.747.500,00	34.203.200,00
7	Desa Haurgajrug	1.073.404.700,00	1.055.400.500,00	18.004.200,00
8	Desa Giriharja	1.047.408.700,00	1.042.120.500,00	5.288.200,00
9	Desa Sukasari	1.899.084.700,00	2.128.388.500,00	(229.303.800,00)
10	Desa Jayapura	1.062.550.700,00	1.069.539.500,00	(6.988.800,00)
11	Desa Sipayung	1.202.500.700,00	1.269.897.500,00	(67.396.800,00)
12	Desa Bintangsari	1.031.624.700,00	1.014.266.500,00	17.358.200,00
13	Desa Pasirhaur	1.342.470.700,00	1.387.997.500,00	(45.526.800,00)
14	Desa Harumsari	1.051.142.700,00	1.033.757.500,00	17.385.200,00
	Desa di Kecamatan Muncang	**13.143.795.400,00**	**12.620.725.000,00**	**523.070.400,00**
1	Desa Pasireurih	1.098.909.700,00	1.081.100.500,00	17.809.200,00
2	Desa Ciminyak	1.026.846.700,00	1.027.302.500,00	(455.800,00)
3	Desa Muncang	1.053.377.700,00	1.051.243.500,00	2.134.200,00
4	Desa Leuwicoo	1.051.283.700,00	1.058.605.500,00	(7.321.800,00)
5	Desa Sindangwangi	1.053.733.700,00	1.065.247.500,00	(11.513.800,00)
6	Desa Cikarang	1.033.399.700,00	1.040.883.500,00	(7.483.800,00)
7	Desa Sukanagara	1.033.766.700,00	1.038.344.500,00	(4.577.800,00)
8	Desa Pasirnangka	1.559.276.700,00	1.044.721.500,00	514.555.200,00
9	Desa Jagaraksa	1.049.095.700,00	1.040.487.500,00	8.608.200,00
10	Desa Tanjungwangi	1.050.991.700,00	1.052.078.500,00	(1.086.800,00)
11	Desa Mekarwangi	1.062.412.700,00	1.059.596.500,00	2.816.200,00
12	Desa Girijagabaya	1.070.700.700,00	1.061.113.500,00	9.587.200,00
	Desa di Kecamatan Leuwidamar	**14.051.507.400,00**	**13.375.285.000,00**	**676.222.400,00**
1	Desa Kanekes	454.522.700,00	482.527.500,00	(28.004.800,00)
2	Desa Cisimeut	1.531.835.700,00	1.095.054.500,00	436.781.200,00
3	Desa Cibungur	1.078.283.700,00	1.067.347.500,00	10.936.200,00
4	Desa Leuwidamar	1.830.597.700,00	2.117.241.500,00	(286.643.800,00)
5	Desa Lebakparahiang	1.043.020.700,00	1.040.531.500,00	2.489.200,00
6	Desa Sangkanwangi	1.146.651.700,00	1.117.275.500,00	29.376.200,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN /PENURUNAN
1	2	3	4	5
7	Desa Nayagati	1.213.872.700,00	1.119.519.500,00	94.353.200,00
8	Desa Bojongmenteng	1.062.040.700,00	1.057.915.500,00	4.125.200,00
9	Desa Margawangi	1.032.291.700,00	1.042.837.500,00	(10.545.800,00)
10	Desa Wantisari	1.152.265.700,00	1.038.611.500,00	113.654.200,00
11	Desa Jalupangmulya	1.390.872.700,00	1.078.746.500,00	312.126.200,00
12	Desa Cisimeut Raya	1.115.251.700,00	1.117.676.500,00	(2.424.800,00)
	Desa di Kecamatan Bojongmanik	**11.284.232.300,00**	**11.161.540.500,00**	**122.691.800,00**
1	Desa Bojongmanik	1.320.393.700,00	1.025.684.500,00	294.709.200,00
2	Desa Harjawana	1.054.770.700,00	1.032.204.500,00	22.566.200,00
3	Desa Kadurahayu	1.598.294.700,00	1.755.942.500,00	(157.647.800,00)
4	Desa Cimayang	1.114.194.700,00	1.071.014.500,00	43.180.200,00
5	Desa Parakanbeusi	1.089.565.700,00	1.067.647.500,00	21.918.200,00
6	Desa Keboncau	1.086.989.700,00	1.076.143.500,00	10.846.200,00
7	Desa Mekarmanik	1.382.644.700,00	1.375.929.500,00	6.715.200,00
8	Desa Mekar Rahayu	1.026.430.700,00	1.039.972.500,00	(13.541.800,00)
9	Desa Pasirbitung	1.610.947.700,00	1.717.001.500,00	(106.053.800,00)
	Desa di Kecamatan Gunungkencana	**14.565.687.400,00**	**13.011.919.000,00**	**1.553.768.400,00**
1	Desa Gunungkencana	1.038.592.700,00	1.041.484.500,00	(2.891.800,00)
2	Desa Cimanyangray	1.069.421.700,00	1.056.911.500,00	12.510.200,00
3	Desa Gunungkendeng	1.019.949.700,00	1.027.075.500,00	(7.125.800,00)
4	Desa Cisampang	1.371.692.700,00	1.102.480.500,00	269.212.200,00
5	Desa Ciginggang	1.438.256.700,00	1.116.450.500,00	321.806.200,00
6	Desa Ciakar	1.096.912.700,00	1.084.790.500,00	12.122.200,00
7	Desa Cicaringin	1.063.663.700,00	1.074.818.500,00	(11.154.800,00)
8	Desa Bulakan	1.079.204.700,00	1.070.382.500,00	8.822.200,00
9	Desa Sukanegara	1.554.817.700,00	1.036.488.500,00	518.329.200,00
10	Desa Bojongkoneng	1.336.191.700,00	1.052.059.500,00	284.132.200,00
11	Desa Kramatjaya	1.112.864.700,00	1.242.104.500,00	(129.239.800,00)
12	Desa Tanjungsari Indah	1.384.118.700,00	1.106.872.500,00	277.246.200,00
	Desa di Kecamatan Banjarsari	**22.422.155.000,00**	**22.630.944.000,00**	**(208.789.000,00)**
1	Desa Kerta	1.322.723.700,00	1.443.766.500,00	(121.042.800,00)
2	Desa Bojongjuruh	1.059.967.700,00	1.069.794.500,00	(9.826.800,00)
3	Desa Leuwiipuh	1.033.069.700,00	1.038.884.500,00	(5.814.800,00)
4	Desa Lebakkeusik	1.042.125.700,00	1.035.625.500,00	6.500.200,00
5	Desa Cilegongilir	1.029.896.700,00	1.032.117.500,00	(2.220.800,00)
6	Desa Keusik	1.079.631.700,00	1.083.744.500,00	(4.112.800,00)

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN /PENURUNAN
1	2	3	4	5
7	Desa Cibaturkeusik	1.028.703.700,00	1.024.268.500,00	4.435.200,00
8	Desa Kumpay	1.371.600.700,00	1.085.165.500,00	286.435.200,00
9	Desa Jalupanggirang	1.065.449.700,00	1.081.916.500,00	(16.466.800,00)
10	Desa Bendungan	1.083.594.700,00	1.209.767.500,00	(126.172.800,00)
11	Desa Kertaraharja	1.224.390.700,00	1.195.262.500,00	29.128.200,00
12	Desa Cisampih	1.069.067.700,00	1.068.838.500,00	229.200,00
13	Desa Gunungsari	1.065.130.700,00	1.069.239.500,00	(4.108.800,00)
14	Desa Tamansari	1.022.294.700,00	1.028.963.500,00	(6.668.800,00)
15	Desa Cidahu	1.017.384.700,00	1.026.794.500,00	(9.409.800,00)
16	Desa Ciruji	1.606.346.700,00	1.792.314.500,00	(185.967.800,00)
17	Desa Kaduhauk	1.073.079.700,00	1.096.385.500,00	(23.305.800,00)
18	Desa Labanjaya	1.054.284.700,00	1.060.142.500,00	(5.857.800,00)
19	Desa Umbuljaya	1.071.336.700,00	1.084.918.500,00	(13.581.800,00)
20	Desa Kertarahayu	1.102.074.700,00	1.103.033.500,00	(958.800,00)
	Desa di Kecamatan Cileles	**14.986.779.400,00**	**15.019.669.000,00**	**(32.889.600,00)**
1	Desa Pasindangan	1.802.422.700,00	1.994.430.500,00	(192.007.800,00)
2	Desa Parungkujang	1.186.284.700,00	1.169.863.500,00	16.421.200,00
3	Desa Cileles	1.037.541.700,00	1.031.392.500,00	6.149.200,00
4	Desa Cikareo	1.446.054.700,00	1.583.497.500,00	(137.442.800,00)
5	Desa Cipadang	1.193.946.700,00	1.083.063.500,00	110.883.200,00
6	Desa Gumuruh	1.125.568.700,00	1.275.835.500,00	(150.266.800,00)
7	Desa Prabugantungan	1.143.513.700,00	1.046.313.500,00	97.200.200,00
8	Desa Daroyon	1.363.198.700,00	1.071.759.500,00	291.439.200,00
9	Desa Margamulya	1.094.042.700,00	1.071.283.500,00	22.759.200,00
10	Desa Mekarjaya	1.087.024.700,00	1.094.702.500,00	(7.677.800,00)
11	Desa Kujangsari	1.323.070.700,00	1.540.929.500,00	(217.858.800,00)
12	Desa Banjarsari	1.184.109.700,00	1.056.597.500,00	127.512.200,00
	Desa di Kecamatan Cimarga	**20.285.687.900,00**	**19.147.848.500,00**	**1.137.839.400,00**
1	Desa Sarageni	1.025.404.700,00	1.048.653.500,00	(23.248.800,00)
2	Desa Gununganten	1.084.099.700,00	1.073.917.500,00	10.182.200,00
3	Desa Sudamanik	1.456.008.700,00	1.057.142.500,00	398.866.200,00
4	Desa Tambak	1.471.190.700,00	1.193.580.500,00	277.610.200,00
5	Desa Cimarga	1.342.849.700,00	1.050.799.500,00	292.050.200,00
6	Desa Karyajaya	1.117.044.700,00	1.106.008.500,00	11.036.200,00
7	Desa Margajaya	1.210.475.700,00	1.067.672.500,00	142.803.200,00
8	Desa Jayamanik	1.091.452.700,00	1.070.002.500,00	21.450.200,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN /PENURUNAN
1	2	3	4	5
9	Desa Margaluyu	1.077.971.700,00	1.067.828.500,00	10.143.200,00
10	Desa Margatirta	1.098.390.700,00	1.083.593.500,00	14.797.200,00
11	Desa Intenjaya	1.156.971.700,00	1.163.005.500,00	(6.033.800,00)
12	Desa Mekarjaya	1.123.591.700,00	1.148.706.500,00	(25.114.800,00)
13	Desa Jayasari	1.053.552.700,00	1.047.255.500,00	6.297.200,00
14	Desa Girimukti	1.047.868.700,00	1.033.661.500,00	14.207.200,00
15	Desa Sangkanmanik	1.431.488.700,00	1.762.122.500,00	(330.633.800,00)
16	Desa Sangiangjaya	1.092.021.700,00	1.072.042.500,00	19.979.200,00
17	Desa Mekarmulya	1.405.303.700,00	1.101.855.500,00	303.448.200,00
	Desa di Kecamatan Sajira	**17.843.768.500,00**	**18.077.661.500,00**	**(233.893.000,00)**
1	Desa Maraya	1.352.740.700,00	1.383.852.500,00	(31.111.800,00)
2	Desa Sajira	1.453.459.700,00	1.621.189.500,00	(167.729.800,00)
3	Desa Sukarame	1.071.127.700,00	1.054.049.500,00	17.078.200,00
4	Desa Calungbungur	1.081.568.700,00	1.051.768.500,00	29.800.200,00
5	Desa Parungsari	1.032.945.700,00	1.039.398.500,00	(6.452.800,00)
6	Desa Sindangsari	1.081.765.700,00	1.086.857.500,00	(5.091.800,00)
7	Desa Mekarsari	1.029.845.700,00	1.185.721.500,00	(155.875.800,00)
8	Desa Sukamarga	1.081.958.700,00	1.212.625.500,00	(130.666.800,00)
9	Desa Pajagan	1.071.512.700,00	1.045.119.500,00	26.393.200,00
10	Desa Sukajaya	1.041.223.700,00	1.046.339.500,00	(5.115.800,00)
11	Desa Sajira Mekar	1.054.589.700,00	1.032.341.500,00	22.248.200,00
12	Desa Paja	1.020.825.700,00	1.031.786.500,00	(10.960.800,00)
13	Desa Margaluyu	1.526.405.700,00	1.193.167.500,00	333.238.200,00
14	Desa Bungurmekar	1.810.922.700,00	1.909.878.500,00	(98.955.800,00)
15	Desa Ciuyah	1.132.875.700,00	1.183.565.500,00	(50.689.800,00)
	Desa di Kecamatan Maja	**17.193.185.800,00**	**17.842.393.000,00**	**(649.207.200,00)**
1	Desa Tanjungsari	1.067.453.700,00	1.227.190.500,00	(159.736.800,00)
2	Desa Maja	2.078.841.700,00	2.388.341.500,00	(309.499.800,00)
3	Desa Sangiang	1.038.762.700,00	1.037.164.500,00	1.598.200,00
4	Desa Binong	1.073.207.700,00	1.066.790.500,00	6.417.200,00
5	Desa Gubugan Cibeureum	1.018.498.700,00	1.033.442.500,00	(14.943.800,00)
6	Desa Mekarsari	1.327.394.700,00	1.053.041.500,00	274.353.200,00
7	Desa Padasuka	1.203.162.700,00	1.136.270.500,00	66.892.200,00
8	Desa Curugbadak	1.154.034.700,00	1.067.878.500,00	86.156.200,00
9	Desa Sindangmulya	1.141.688.700,00	1.056.997.500,00	84.691.200,00
10	Desa Cilangkap	1.043.617.700,00	1.193.369.500,00	(149.751.800,00)

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN /PENURUNAN
1	2	3	4	5
11	Desa Pasirkembang	1.044.166.700,00	1.052.371.500,00	(8.204.800,00)
12	Desa Pasirkecapi	1.937.665.700,00	2.470.178.500,00	(532.512.800,00)
13	Desa Buyut Mekar	1.038.822.700,00	1.031.816.500,00	7.006.200,00
14	Desa Maja Baru	1.025.867.700,00	1.027.539.500,00	(1.671.800,00)
	Desa di Kecamatan Rangkasbitung	**13.294.085.700,00**	**12.726.530.500,00**	**567.555.200,00**
1	Desa Pasirtanjung	1.179.586.700,00	1.075.193.500,00	104.393.200,00
2	Desa Citeras	1.835.576.700,00	1.901.429.500,00	(65.852.800,00)
3	Desa Nameng	1.176.412.700,00	1.214.704.500,00	(38.291.800,00)
4	Desa Kolelet Wetan	1.026.055.700,00	1.025.709.500,00	346.200,00
5	Desa Jatimulya	1.143.715.700,00	1.044.584.500,00	99.131.200,00
6	Desa Mekarsari	1.123.584.700,00	1.033.956.500,00	89.628.200,00
7	Desa Pabuaran	1.046.086.700,00	1.053.253.500,00	(7.166.800,00)
8	Desa Rangkasbitung Timur	1.321.801.700,00	1.229.291.500,00	92.510.200,00
9	Desa Sukamanah	1.148.430.700,00	1.057.151.500,00	91.279.200,00
10	Desa Cimangeunteung	1.141.598.700,00	1.061.108.500,00	80.490.200,00
11	Desa Narimbang Mulia	1.151.235.700,00	1.030.147.500,00	121.088.200,00
	Desa di Kecamatan Warunggunung	**13.946.084.400,00**	**13.009.301.000,00**	**936.783.400,00**
1	Desa Sukarendah	1.149.939.700,00	1.053.676.500,00	96.263.200,00
2	Desa Warunggunung	1.620.739.700,00	1.031.477.500,00	589.262.200,00
3	Desa Cibuah	1.139.515.700,00	1.055.815.500,00	83.700.200,00
4	Desa Pasir Tangkil	1.048.836.700,00	1.031.831.500,00	17.005.200,00
5	Desa Baros	1.001.518.700,00	1.017.758.500,00	(16.239.800,00)
6	Desa Banjarsari	1.178.386.700,00	1.217.510.500,00	(39.123.800,00)
7	Desa Padasuka	1.407.832.700,00	1.072.581.500,00	335.251.200,00
8	Desa Sukaraja	1.185.547.700,00	1.242.940.500,00	(57.392.800,00)
9	Desa Jagabaya	1.051.927.700,00	1.040.472.500,00	11.455.200,00
10	Desa Selaraja	1.116.631.700,00	1.177.028.500,00	(60.396.800,00)
11	Desa Cempaka	1.025.612.700,00	1.040.496.500,00	(14.883.800,00)
12	Desa Sindangsari	1.019.594.700,00	1.027.711.500,00	(8.116.800,00)
	Desa di Kecamatan Cijaku	**11.752.520.000,00**	**11.017.016.000,00**	**735.504.000,00**
1	Desa Mekarjaya	1.331.535.700,00	1.069.562.500,00	261.973.200,00
2	Desa Cipalabuh	1.085.428.700,00	1.093.439.500,00	(8.010.800,00)
3	Desa Cijaku	1.031.059.700,00	1.054.456.500,00	(23.396.800,00)
4	Desa Cibeureum	1.099.074.700,00	1.142.541.500,00	(43.466.800,00)
5	Desa Ciapus	1.098.537.700,00	1.099.849.500,00	(1.311.800,00)

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN /PENURUNAN
1	2	3	4	5
6	Desa Kandangsapi	1.199.149.700,00	1.104.051.500,00	95.098.200,00
7	Desa Cihujan	1.091.705.700,00	1.123.365.500,00	(31.659.800,00)
8	Desa Cimenga	1.643.439.700,00	1.145.891.500,00	497.548.200,00
9	Desa Kapunduhan	1.096.968.700,00	1.096.034.500,00	934.200,00
10	Desa Sukasenang	1.075.619.700,00	1.087.823.500,00	(12.203.800,00)
	Desa di Kecamatan Cikulur	**16.879.622.100,00**	**18.672.202.500,00**	**(1.792.580.400,00)**
1	Desa Anggalan	1.069.875.700,00	1.061.738.500,00	8.137.200,00
2	Desa Muncangkopong	1.040.855.700,00	1.046.086.500,00	(5.230.800,00)
3	Desa Sukaharja	1.012.905.700,00	1.034.654.500,00	(21.748.800,00)
4	Desa Tamanjaya	1.008.781.700,00	1.161.820.500,00	(153.038.800,00)
5	Desa Cigoong Utara	1.977.706.700,00	2.538.530.500,00	(560.823.800,00)
6	Desa Muaradua	1.152.518.700,00	1.078.986.500,00	73.532.200,00
7	Desa Cikulur	2.584.536.700,00	3.298.876.500,00	(714.339.800,00)
8	Desa Curugpanjang	1.059.018.700,00	1.052.504.500,00	6.514.200,00
9	Desa Cigoong Selatan	1.026.016.700,00	1.176.056.500,00	(150.039.800,00)
10	Desa Sumurbandung	1.187.071.700,00	1.093.416.500,00	93.655.200,00
11	Desa Parage	1.644.847.700,00	1.857.543.500,00	(212.695.800,00)
12	Desa Sukadaya	1.083.713.700,00	1.090.829.500,00	(7.115.800,00)
13	Desa Pasirgintung	1.031.772.700,00	1.181.158.500,00	(149.385.800,00)
	Desa di Kecamatan Cibadak	**18.418.204.118,00**	**18.521.861.500,00**	**(103.657.382,00)**
1	Desa Tambakbaya	1.187.322.700,00	1.108.777.500,00	78.545.200,00
2	Desa Kaduagung Timur	1.405.932.700,00	1.026.178.500,00	379.754.200,00
3	Desa Panancangan	1.020.729.700,00	1.015.533.500,00	5.196.200,00
4	Desa Cibadak	1.119.456.700,00	1.044.838.500,00	74.618.200,00
5	Desa Asem	1.024.008.700,00	1.021.868.500,00	2.140.200,00
6	Desa Cisangu	1.048.266.700,00	1.047.100.500,00	1.166.200,00
7	Desa Kaduagung Barat	1.032.241.700,00	1.018.910.500,00	13.331.200,00
8	Desa Bojongcae	1.640.355.700,00	1.838.952.500,00	(198.596.800,00)
9	Desa Malabar	1.029.301.700,00	1.029.509.500,00	(207.800,00)
10	Desa Pasar Keong	1.110.390.700,00	1.022.464.500,00	87.926.200,00
11	Desa Bojong Leles	1.903.632.700,00	2.237.841.500,00	(334.208.800,00)
12	Desa Cimenteng Jaya	1.408.469.318,00	1.747.183.500,00	(338.714.182,00)
13	Desa Mekar Agung	1.333.001.700,00	1.033.202.500,00	299.799.200,00
14	Desa Asem Margaluyu	1.057.784.700,00	1.199.552.500,00	(141.767.800,00)
15	Desa Kaduagung Tengah	1.097.308.700,00	1.129.947.500,00	(32.638.800,00)
	Desa di Kecamatan Cibeber	**24.800.390.400,00**	**24.061.828.000,00**	**738.562.400,00**

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN /PENURUNAN
1	2	3	4	5
1	Desa Cibeber	1.276.109.700,00	1.289.982.500,00	(13.872.800,00)
2	Desa Citorek Tengah	1.130.427.700,00	1.090.670.500,00	39.757.200,00
3	Desa Cisungsang	1.322.149.700,00	1.046.298.500,00	275.851.200,00
4	Desa Kujangjaya	1.030.058.700,00	1.031.208.500,00	(1.149.800,00)
5	Desa Kujangsari	1.101.543.700,00	1.102.457.500,00	(913.800,00)
6	Desa Neglasari	1.395.188.700,00	1.075.643.500,00	319.545.200,00
7	Desa Mekarsari	1.360.949.700,00	1.043.846.500,00	317.103.200,00
8	Desa Cikotok	1.073.065.700,00	1.089.048.500,00	(15.982.800,00)
9	Desa Sukamulya	1.054.457.700,00	1.053.458.500,00	999.200,00
10	Desa Citorek Timur	1.106.439.700,00	1.103.647.500,00	2.792.200,00
11	Desa Warungbanten	1.084.837.700,00	1.047.460.500,00	37.377.200,00
12	Desa Hegarmanah	1.048.571.700,00	1.039.180.500,00	9.391.200,00
13	Desa Situmulya	1.108.546.700,00	1.097.511.500,00	11.035.200,00
14	Desa Citorek Kidul	1.110.898.700,00	1.089.831.500,00	21.067.200,00
15	Desa Cikadu	1.067.899.700,00	1.051.280.500,00	16.619.200,00
16	Desa Sirnagalih	1.090.861.700,00	1.222.901.500,00	(132.039.800,00)
17	Desa Cihambali	1.065.788.700,00	1.214.900.500,00	(149.111.800,00)
18	Desa Citorek Barat	1.122.837.700,00	1.108.498.500,00	14.339.200,00
19	Desa Gunungwangun	1.027.396.700,00	1.036.267.500,00	(8.870.800,00)
20	Desa Wanasari	1.094.114.700,00	1.106.227.500,00	(12.112.800,00)
21	Desa Citorek Sabrang	1.088.360.700,00	1.092.016.500,00	(3.655.800,00)
22	Desa Ciherang	1.039.884.700,00	1.029.489.500,00	10.395.200,00
	Desa di Kecamatan Cilograng	**12.226.238.000,00**	**12.245.745.000,00**	**(19.507.000,00)**
1	Desa Cilograng	1.072.352.700,00	1.050.954.500,00	21.398.200,00
2	Desa Cibareno	1.033.365.700,00	1.030.207.500,00	3.158.200,00
3	Desa Cikamunding	1.675.129.700,00	1.680.574.500,00	(5.444.800,00)
4	Desa Cijengkol	1.151.230.700,00	1.099.379.500,00	51.851.200,00
5	Desa Pasirbungur	1.371.640.700,00	1.200.475.500,00	171.165.200,00
6	Desa Lebaktipar	1.079.673.700,00	1.061.070.500,00	18.603.200,00
7	Desa Cikatomas	1.079.841.700,00	1.203.266.500,00	(123.424.800,00)
8	Desa Girimukti	1.531.822.700,00	1.635.594.500,00	(103.771.800,00)
9	Desa Cireundeu	1.211.418.700,00	1.267.710.500,00	(56.291.800,00)
10	Desa Gunungbatu	1.019.761.700,00	1.016.511.500,00	3.250.200,00
	Desa di Kecamatan Wanasalam	**15.452.689.100,00**	**14.659.884.500,00**	**792.804.600,00**
1	Desa Wanasalam	1.192.678.700,00	1.094.463.500,00	98.215.200,00
2	Desa Bejod	1.176.774.700,00	1.095.456.500,00	81.318.200,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN /PENURUNAN
1	2	3	4	5
3	Desa Cilangkap	1.061.724.700,00	1.042.647.500,00	19.077.200,00
4	Desa Cipeucang	1.056.675.700,00	1.054.164.500,00	2.511.200,00
5	Desa Muara	1.304.046.700,00	1.130.981.500,00	173.065.200,00
6	Desa Parungpanjang	1.391.048.700,00	1.272.531.500,00	118.517.200,00
7	Desa Cikeusik	1.345.044.700,00	1.052.861.500,00	292.183.200,00
8	Desa Katapang	1.375.730.700,00	1.262.151.500,00	113.579.200,00
9	Desa Cisarap	1.069.137.700,00	1.056.646.500,00	12.491.200,00
10	Desa Sukatani	1.228.577.700,00	1.134.618.500,00	93.959.200,00
11	Desa Cipedang	1.066.650.700,00	1.059.142.500,00	7.508.200,00
12	Desa Parungsari	1.064.790.700,00	1.248.798.500,00	(184.007.800,00)
13	Desa Karangpamindangan	1.119.807.700,00	1.155.420.500,00	(35.612.800,00)
	Desa di Kecamatan Sobang	**12.451.516.000,00**	**10.928.292.000,00**	**1.523.224.000,00**
1	Desa Ciparasi	1.107.096.700,00	1.062.686.500,00	44.410.200,00
2	Desa Sobang	1.628.391.700,00	1.077.596.500,00	550.795.200,00
3	Desa Sukajaya	1.052.323.700,00	1.049.694.500,00	2.629.200,00
4	Desa Sindanglaya	1.511.109.700,00	1.052.814.500,00	458.295.200,00
5	Desa Sukamaju	1.118.007.700,00	1.074.781.500,00	43.226.200,00
6	Desa Hariang	1.652.440.700,00	1.117.336.500,00	535.104.200,00
7	Desa Majasari	1.144.236.700,00	1.268.161.500,00	(123.924.800,00)
8	Desa Sinar Jaya	1.077.406.700,00	1.101.559.500,00	(24.152.800,00)
9	Desa Cirompang	1.068.634.700,00	1.056.143.500,00	12.491.200,00
10	Desa Sukaresmi	1.091.867.700,00	1.067.517.500,00	24.350.200,00
	Desa di Kecamatan Curug bitung	**11.133.246.000,00**	**11.446.991.000,00**	**(313.745.000,00)**
1	Desa Guradog	1.089.830.700,00	1.088.694.500,00	1.136.200,00
2	Desa Curugbitung	1.569.164.700,00	1.984.849.500,00	(415.684.800,00)
3	Desa Candi	1.025.023.700,00	1.018.291.500,00	6.732.200,00
4	Desa Mayak	1.032.356.700,00	1.027.853.500,00	4.503.200,00
5	Desa Cipining	1.051.282.700,00	1.051.447.500,00	(164.800,00)
6	Desa Cilayang	1.051.272.700,00	1.051.053.500,00	219.200,00
7	Desa Ciburuy	1.146.543.700,00	1.052.731.500,00	93.812.200,00
8	Desa Sekarwangi	1.069.069.700,00	1.054.282.500,00	14.787.200,00
9	Desa Cidadap	1.063.667.700,00	1.063.750.500,00	(82.800,00)
10	Desa Lebakasih	1.035.033.700,00	1.054.036.500,00	(19.002.800,00)
	Desa di Kecamatan Kalanganyar	**8.439.330.900,00**	**8.144.633.500,00**	**294.697.400,00**
1	Desa Kalanganyar	1.036.321.700,00	1.046.330.500,00	(10.008.800,00)

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN /PENURUNAN
1	2	3	4	5
2	Desa Pasirkupa	1.199.276.700,00	1.119.100.500,00	80.176.200,00
3	Desa Cilangkap	1.128.367.700,00	1.182.469.500,00	(54.101.800,00)
4	Desa Aweh	1.124.134.700,00	1.035.407.500,00	88.727.200,00
5	Desa Sangiangtanjung	1.522.643.700,00	1.163.161.500,00	359.482.200,00
6	Desa Sukamekarsari	1.125.239.700,00	1.174.134.500,00	(48.894.800,00)
7	Desa Cikatapis	1.303.346.700,00	1.424.029.500,00	(120.682.800,00)
	Desa di Kecamatan Lebakgedong	**7.745.565.200,00**	**6.406.715.000,00**	**1.338.850.200,00**
1	Desa Banjaririgasi	1.935.259.700,00	1.101.959.500,00	833.300.200,00
2	Desa Ciladaeun	1.056.103.700,00	1.057.325.500,00	(1.221.800,00)
3	Desa Lebakgedong	1.068.645.700,00	1.068.387.500,00	258.200,00
4	Desa Banjarsari	1.551.511.700,00	1.047.859.500,00	503.652.200,00
5	Desa Lebaksitu	1.064.221.700,00	1.065.098.500,00	(876.800,00)
6	Desa Lebaksangka	1.069.822.700,00	1.066.084.500,00	3.738.200,00
	Desa di Kecamatan Cihara	10.329.972.300,00	10.368.720.500,00	(38.748.200,00)
1	Desa Panyaungan	1.111.945.700,00	1.078.329.500,00	33.616.200,00
2	Desa Cihara	1.046.125.700,00	1.055.165.500,00	(9.039.800,00)
3	Desa Ciparahu	1.119.729.700,00	1.100.351.500,00	19.378.200,00
4	Desa Pondokpanjang	1.198.697.700,00	1.235.727.500,00	(37.029.800,00)
5	Desa Citeupuseun	1.052.664.700,00	1.056.204.500,00	(3.539.800,00)
6	Desa Lebakpeundeuy	1.101.667.700,00	1.088.496.500,00	13.171.200,00
7	Desa Mekarsari	1.134.267.700,00	1.095.741.500,00	38.526.200,00
8	Desa Karangkamulyan	1.457.533.700,00	1.546.613.500,00	(89.079.800,00)
9	Desa Barunai	1.107.339.700,00	1.112.090.500,00	(4.750.800,00)
	Desa di Kecamatan Cirinten	**11.387.399.000,00**	**10.646.221.000,00**	**741.178.000,00**
1	Desa Datarcae	1.069.807.700,00	1.050.319.500,00	19.488.200,00
2	Desa Cirinten	1.141.624.700,00	1.105.971.500,00	35.653.200,00
3	Desa Karangnunggal	1.020.248.700,00	1.021.962.500,00	(1.713.800,00)
4	Desa Kadudamas	1.392.347.700,00	1.065.546.500,00	326.801.200,00
5	Desa Badur	1.363.315.700,00	1.063.761.500,00	299.554.200,00
6	Desa Parakanlima	1.120.790.700,00	1.093.066.500,00	27.724.200,00
7	Desa Nanggerang	1.119.434.700,00	1.078.309.500,00	41.125.200,00
8	Desa Cempaka	1.054.355.700,00	1.061.998.500,00	(7.642.800,00)
9	Desa Karoya	1.053.538.700,00	1.046.438.500,00	7.100.200,00
10	Desa Cibarani	1.051.934.700,00	1.058.846.500,00	(6.911.800,00)
	Desa di Kecamatan Cigemblong	**11.012.232.300,00**	**10.780.456.500,00**	**231.775.800,00**

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	KENAIKAN /PENURUNAN
1	2	3	4	5
1	Desa Peucangpari	1.091.614.700,00	1.081.529.500,00	10.085.200,00
2	Desa Cibungur	1.045.092.700,00	1.029.756.500,00	15.336.200,00
3	Desa Mugijaya	1.400.167.700,00	1.464.636.500,00	(64.468.800,00)
4	Desa Cikate	1.631.426.700,00	1.747.249.500,00	(115.822.800,00)
5	Desa Cigemblong	1.083.119.700,00	1.063.729.500,00	19.390.200,00
6	Desa Cikadongdong	1.125.167.700,00	1.090.446.500,00	34.721.200,00
7	Desa Cikaret	1.112.794.700,00	1.095.330.500,00	17.464.200,00
8	Desa Wangunjaya	1.405.312.700,00	1.121.981.500,00	283.331.200,00
9	Desa Cikaratuan	1.117.535.700,00	1.085.796.500,00	31.739.200,00
JUMLAH		**405.279.350.618,00**	**395.680.771.200,00**	**9.598.579.418,00**

14. Beban Penyusutan - LO

Beban Penyusutan - LO terhadap Aset Tetap pada Tahun 2021 merupakan penyusutan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Lebak yang terdapat pada seluruh Perangkat Daerah sebesar Rp367.047.109.080,64 mengalami penurunan sebesar Rp11.662.345.768,75 atau 3,08% jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp378.709.454.849,39 Setelah dilakukan. Beban Penyusutan per jenis aset dapat dilihat pada Tabel 5.73 sebagai berikut:

Tabel 5.73
Beban Penyusutan - LO Pemerintah Kabupaten Lebak
Tahun 2021 dan 2020

NO	JENIS ASET TETAP	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	4	5
1	Peralatan dan Mesin	67,412,044,046.48	94.056.085.180,48	(26,644,041,134.00)
2	Gedung dan Bangunan	43,332,435,678.60	36.055.955.864,62	7,276,479,813.98
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	256,302,629,355.56	245.784.994.416,94	10,517,634,938.62
4	Aset Lain – Lain	0,00	2.812.419.387,35	(2.812.419.387,35)
JUMLAH		**367.047.109.080,64**	**378.709.454.849,39**	**(11.662.345.768,75)**

15. Beban Amortisasi – LO

Beban amortisasi - LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 sebesar Rp589.493.720,18 mengalami kenaikan sebesar Rp498.210.198,69 atau 545,278% jika dibandingkan dengan Beban Amortisasi pada Tahun 2020 sebesar Rp91.283.521,49.

16. Beban Penyisihan Piutang - LO

Beban Penyisihan Piutang - LO Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 sebesar Rp6.870.051.016,96 yang merupakan beban penyisihan atas piutang pajak piutang retribusi dan piutang lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp5.580.511.604,04 atau 432,75% jika dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun 2020 sebesar Rp1.289.539.412,92. Adapun rincian beban penyisihan piutang dapat dilihat pada Tabel 5.74 sebagai berikut:

Tabel 5.74
Beban Penyisihan Piutang - LO Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	4	5
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	3.726.330.904,76	615.601.906,02	3.110.728.998,74
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	5.624.765,06	2.980.716,75	2.644.048,31
3	Beban Penyisihan Piutang Denda Pajak	3.137.977.522,14	214.823.782,18	2.923.153.739,96
4	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil dari Provinsi	0,00	227.998.397,82	(227.998.397,82)
5	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	117.825,00	228.134.610,14	(228.016.785,14)
JUMLAH		**1.894.893.809,66**	**1.289.539.412,92**	**605.354.396,75**

17. Beban Tidak Terduga – LO

Beban Tidak Terduga - LO Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 sebesar Rp23.544.912.000,98 yaitu merupakan beban tidak terduga yang diperuntukan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID – 19, penanganan bencana alam banjir bandang dan tanah longsor serta pengembalian - pengembalian yang tidak bertujuan untuk menambah Aset Pemerintah Daerah. Jika dibandingkan dengan beban tidak terduga Tahun 2020 sebesar Rp140.365.097.964,00 mengalami penurunan sebesar Rp116.820.185.963,02 atau 83,23%. Dari Beban Tidak Terduga ada yang di reklas sebesar Rp876.604.340,02 untuk membayar Kekurangan Pengadaan Tanah yang dimohon oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak, dan tanah tersebut digunakan untuk Relokasi Korban Bencana Alam, berlokasi di Desa Bintangsari Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak denga Luas Lahan 18.519 m2 SPH Nomor: 834.3/SPH-36.02.AT.02.02/VIII/2021 dan 834.4/SPH-36.02.AT.02.02/VIII/2021 tanggal 4

Agustus 2021 sebesar Rp637.185.340,02 dan reklas ke persediaan (Obat-obatan) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp239.419.000,00.

18. Beban Penghapusan - LO

Beban Penghapusan - LO Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 sebesar Rp694.251.615,35 merupakan Beban atas aset yang akan dimusnahkan dari nilai perolehan sebesar Rp1.411.682.010,00 dan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp717.430.394,65. Jika dibandingkan denganbeban penghapusan pada Tahun 2020 sebesar Rp18.288.321.772,02 mengalami penurunan sebesar Rp7.594.070.056,67 atau 81,62%.

19. Beban Aset Ekstrakomptabel - LO

Beban Aset Ekstrakomptabel - LO Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 sebesar Rp10.843.757.856,85 merupakan pengadaan belanja modal yang secara kapitalisasi tidak memenuhi kriteria sebagai aset dan di reklas menjadi beban aset ekstrakomptabel, mengalami penurunan sebesar Rp489.281.571,19 atau 4,32% jika dibandingkan dengan Beban Aset Ekstrakomptabel - LO Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun 2020 sebesar Rp11.333.039.428,04 dan terdiri dari:

1. Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.950.064.634,58;
   Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.893.693.222,27.

20. Beban Kerugian Investasi - LO

Pemerintah Kabupaten Lebak melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah. Penghitungan nilai investasi atas Penyertaan modal yang telah dilakukan menggunakan 2 (dua) metode yaitu Cost methode dan Equity methode sehingga berdasarkan perhitungan tersebut pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lebak mengalami beban kerugian sebesar Rp1.963.301.418,39.

5.1.2.3 Surplus/Defisit

Surplus/Defisit Laporan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan - LO dengan Beban. Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp130.112.402.101,18 yang diperoleh dari:

1. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp129.661.991.416,19 adalah merupakan adalah merupakan hasil Pendapatan – LO sebesar Rp2.867.976.851,92

dikurangi dengan Beban - LO sebesar Rp2.738.175.985.435,73;

2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp450.410.684,99 adalah merupakan hasil penjualan aset dimana hasil penjualan lebih kecil nilai bukunya dan terdiri dari:
   a. Peralatan dan Mesin dengan Nilai Perolehan sebesar Rp6.933.343.835,29 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp(6.880.415.426,19) dengan hasil penjualan yang diterima di kas daerah adalah sebesar Rp376.565.720,00, surplus Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp323.637.310,90;
   b. Aset Tetap Lainnya (Ternak) dengan nilai perolehan sebesar Rp154.059.400,00 dan hasil penjualan yang diterima di kas daerah adalah sebesar Rp154.059.400,00, surplus Penjualan Aset Tetap Lainnya Rp154.059.400,00;
   c. Aset Lain-lain (rusak berat) dengan nilai perolehan Rp353.568.168,24 dan Akumulasi Penyusutan Rp(353.568.168,24) dengan nilai penjualan sebesar Rp54.463.635,00, surplus Penjualan Peralatan dan Mesin Rp54.463.635,90.
   d. Peralatan dan Mesin dengan Nilai Perolehan sebesar Rp584.561.515,76 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp(526.767.669,24) dengan hasil penjualan yang diterima di kas daerah adalah sebesar Rp26.192.703,00, defisit Penjualan Peralatan dan MesinRp31.601.143,52 ;
   e. Aset Tetap Lainnya (Ternak) dengan nilai perolehan sebesar Rp39.593.174,00 dan hasil penjualan yang diterima di kas daerah adalah sebesar Rp16.779.611,00, defisit Penjualan Peralatan dan Mesin Rp22.813.563,00;
   f. Aset Lain-lain (rusak berat) dengan nilai perolehan Rp155.000.000,00 dan Akumulasi Penyusutan Rp(116.071.428,61) dengan nilai penjualan sebesar Rp11.593.617,00, defisit Penjualan Aset Lain-Lain Rp27.334.954,39.

5.1.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional (LO) dengan Neraca yang menggambarkan kenaikan maupun penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 dipengaruhi oleh Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan

kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar terdiri dari Koreksi Kas, Koreksi Piutang, Koreksi Penyisihan Piutang, Koreksi Akumulasi Penyusutan, Koreksi Aset Tetap Tanah, Koreksi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin, Koreksi Aset Tetap Gedung Dan Bangunan, Koreksi Aset Jalan Irigasi Dan Jembatan, Koreksi Aset Tetap lainnya, Koreksi Aset Lainnya dan RK PPKD. Rincian Laporan Perubahan ERkuitas dapat dilihat pada Tabel 5.75 berikut:

Tabel 5.75
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	2021	2020
1	2	3	4
1	**EKUITAS AWAL**	**4.519.373.640.594,81**	**4.223.192.052.617,76**
2	**SURPLUS / DEFISIT - LO**	**130.112.402.101,18**	**(77.377.204.885,86)**
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :**	**(59.832.822.837,41)**	**373.558.792.862,41**
	Koreksi kas	(4.885.000,00)	0,00
	Koreksi Persediaan	0,00	42.238.000,00
	Koreksi Piutang	3.427.436.281,00	(3.325.347.751,00)
	Koreksi Penyisihan Piutang	1.585.527.097,56	14.712.562.049,78
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	(43.261.667.085,89)	354.568.519.406,63
	Koreksi utang	(2.269.877.428,30)	(3.189.381.693,00)
	Koreksi atas Aset Tanah	(53.028.706,60)	933.911.000,00
	Koreksi atas Aset Peralatan Mesin	(1.840.746.499,58)	9.426.895.750,00
	Koreksi Gedung dan Bangunan	(22.786.171.673,33)	0,00
	Koreksi atas aset Aset Tetap Lainnya	(734.278.876,84)	(24.527.300,00)
	Koreksi Jalan Irigasi Dan Jembatan	6.518.970.168,95	17.257.400,00
	Koreksi atas Kontruksi Dalam Pekerjaan	(399.313.550,00)	396.666.000,00
	Koreksi atas aset Lainnya (Aset lain-lain)	(14.787.564,38)	0,00
4	**RKPPKD**	**(30,00)**	**0,50**
5	**LAIN-LAIN**		
6	**EKUITAS AKHIR**	**4.589.653.219.828,58**	**4.519.373.640.594,81**

5.1.3.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lebak untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.519.373.640.594,81 yang merupakan ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lebak untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 hasil audit BPK- RI.

5.1.3.2 Surplus/Defisit (LO)

Surplus/Defisit – LO pada Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp130.112.402.101,18merupakan Defisit dari Laporan Operasional Tahun 2021.

5.1.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas pada Tahun 2021. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp(59.832.822.837,41) dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi Kas sebesar Rp(4.885.000,00) adalah koreksi kas dana BOS Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan;
2. Koreksi Piutang sebesar Rp3.427.436.281,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Koreksi Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp75.975.000,00 dikarenakan sudah terbayar pada tahun sebelumnya dan Piutang Hasil Penjualan Aset Tahun 2020 sebesar Rp970.419.255,00;
   b. Koreksi Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotann (PBBP2) dikarenakan adanya ketetapan baru Tahun sebelumnya sebesar Rp2.532.992.026,00.
3. Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp1.585.527.097,56 adalah koreksi penyisihan piutang yang dikarenakan nilai Penyisihan Piutang Tahun 2021 lebih kecil dibandingkan Tahun 2020 sehingga tidak menjadi beban penyisihan piutang namun dikoreksi pada Ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

   a. Dinas Kesehatan, koreksi penyisihan piutang BLUD sebesar Rp65.788.311,43

dan terdiri dari penyisihan piutang pada Puskesmas sebesar Rp34.106.941,50 dan penyisihan piutang RSUD dr.Adjidarmo sebesar Rp31.681.369,93;

b. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, koreksi penyisihan piutang lainnya sebesar Rp36.366,06 merupakan penyisihan piutang belanja;
c. Badan Keuangan dan Aset Daerah, koreksi penyisian piutang Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp141.397.915,74 dan koreksi penyisihan piutang Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp379.875,00;
d. Badan Pendapatan Daerah, koreksi penyisian piutang pajak sebesar Rp1.377.924.629,33.

4. Koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp(43.261.667.085,89) adalah koreksi akumulasi penyusutan sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah sehingga pada aplikasi ATISIBADA dilakukan mapping dan adanya perubahan kebijakan Akuntansi Nomor 149 Tahun 2020.
5. Koreksi Utang sebesar Rp(2.269.877.428,30) adalah koreksi kurang catat utang pelampauan bagi hasil pajak dan retribusi kepada Pemerintahan Desa Tahun 2020,
6. Koreksi atas Aset Tanah sebesar Rp(53.028.706,60) adalah koreksi lebih catat Aset Tanah pada Dinas Pendidikan.
7. Koreksi atas Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp(1.840.746.499,58) merupakan koreksi pembukuan dikarenakan adanya reklas dan hibah, yang terdapat pada Perangkat Daerah sebagai berikut;
   a. Dinas Pendidikan, sebesar Rp(2.629.073.780,12);
   b. Dinas Kesehatan, sebesar Rp(334.618.791,49);
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebesar Rp(23.947.000,00);
   d. Dinas Sosial, sebesar Rp(26.675.000,00);
   e. Dinas Lingkungan Hidup, sebesar Rp(34.155.000,00);
   f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,sebesar Rp(1.578.050,04);
   g. Dinas Perhubungan, sebesar Rp1.574.310.879,07;
   h. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, sebesar Rp(6.000.000,00);
   i. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebesar Rp(19.717.500,00);
   j. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sebesar Rp(236.882.250,00);

k. Dinas Peternakan, sebesar Rp(883.400,00);
l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebesar Rp(20.895.700,00);
m. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebesar Rp(3.000.000,00);
n. Sekretariat DPRD, sebesar Rp(1.400.000,00);
o. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebesar Rp(76.230.907,00).

8. Koreksi atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp(22.786.171.673,33) merupakan koreksi pembukuan dikarenakan adanya reklas dan hibah yang terdapat pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan, sebesar Rp(16.886.259.583,00);
b. Dinas Kesehatan, sebesar Rp(1.339.882.306,00);
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebesar Rp(214.573.491,00);
d. Dinas Tenaga Kerja, sebesar Rp(43.198.846,00);Dinas Lingkungan Hidup, sebesar Rp148.882.525,17;
e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebesar Rp(40.943.000,00);
f. Dinas Perhubungan, sebesar Rp(330.958.622,42);
g. Dinas Kepemudaan Olahraga, sebesar Rp(172.892.900,00);
h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebesar Rp(14.355.000,00);
i. Dinas Perikanan, sebesar Rp(236.675.488,00);
j. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sebesar Rp(2.116.499.958,95);
k. Dinas Pertanian, sebesar Rp(246.206.700,00);
l. Dinas Peternakan, sebesar Rp(76.700.000,00);
m. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebesar Rp(81.960.000,00);
n. Badan Keuangan dan Aset Daerah, sebesar Rp(32.000.000,00);
o. Badan Pendapatan Daerah, sebesar Rp130.600.000,00);
p. Sekretariat Daerah, sebesar Rp(148.115.500,00)
q. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebesar Rp(44.500.000,00);
r. Kecamatan Rangkasbitung, sebesar Rp(71.750.000,00);
s. Kecamatan Cibadak, sebesar Rp(82.350.000,00);
t. Kecamatan Warunggunung, sebesar Rp(55.650.000,00);
u. Kecamatan Cimarga, sebesar Rp(110.000.000,00);
v. Kecamatan Sajira, sebesar Rp(45.000.000,00);

w. Kecamatan Gunung Kencana, sebesar Rp(25.000.000,00);
x. Kecamatan Cileles, sebesar Rp(44.000.000,00);
y. Kecamatan Banjarsari, sebesar Rp(80.000.000,00);
z. Kecamatan Malingping, sebesar Rp(54.850.000,00);
aa. Kecamatan Wanasalam, sebesar Rp(48.000.000);
bb. Kecamatan Pangarangan, sebesar Rp(23.500.000,00);
cc. Kecamatan Cibeber, sebesar Rp(25.000.000,00);
dd. Kecamatan Cilograng, sebesar Rp(42.000.000,00).

9. Koreksi atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp(734.278.876,84) merupakan koreksi pembukuan dikarenakan adanya reklas dan hibah yang terdapat pada Perangkat Daerah sebagai berikut;
   a. Dinas Pendidikan, sebesar Rp1.262.236.175,32;
   b. Dinas Perhubungan, sebesar Rp(2.143.340.172,16);
   c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebesar Rp(13.744.880,00);
   d. Dinas Perikanan, sebesar Rp23.055.000,00;
   e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sebesar Rp136.365.000,00;
   f. Badan Pendapatan Daerah, sebesar Rp1.150.000,00.
10. Koreksi Jalan Irigasi dan Jembatan sebesar Rp6.518.970.168,95 merupakan koreksi pembukuan dikarenakan adanya reklas dan hibah yang terdapat pada Perangkat Daerah sebagai berikut;
   a. Dinas Pendidikan, sebesar Rp3.856.769.228,00;
   b. Dinas Perhubungan, sebesar Rp588.930.320,00;
   c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sebesar Rp2.073.270.620,95.
11. Koreksi atas Kontruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp(399.313.550,00) merupakan merupakankoreksi pembukuan dikarenakan adanya reklas dan hibah yang terdapat pada Perangkat Daerah sebagai berikut;
   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebesar Rp(302.400.800,00);
   b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sebesar Rp(96.912.750,00).
12. Koreksi atas aset Lainnya (Aset lain-lain) sebesar Rp(14.787.564,38) merupakan koreksi pembukuan dikarenakan adanya reklas dan hibah yang terdapat pada Perangkat Daerah sebagai berikut;
   a. Dinas Pendidikan, sebesar Rp66.202.435,62;

b. Dinas Tenaga Kerja, sebesar Rp(7.000.000,00);
c. Dinas Lingkungan Hidup, sebesar Rp(73.965.000,00);
d. Dinas Perikanan, sebesar Rp(25.000,00);

5.1.3.4 RK – PPKD

RK-PPKD sebesar Rp(30,00) adalah kurang mencatat Bank Jabar Banten pengembalian sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2021 dari Dinas Pendidikan pada tanggal 24 Desember 2021 dan Bank Jabar Banten sudah menyetujui akan menyetorkan atas kekurangan tersebut.

5.1.3.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 yaitu sebesar Rp4.589.653.219.828,58 mengalami kenaikan sebesar Rp70.279.579.233,77 atau 1,56% jika dibandingkan dengan Ekuitas Akhir padaTahun 2020 sebesar Rp4.519.373.640.594,81. Nilai Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas sama dengan nilai Ekuitas pada Neraca.

5.1.4 Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang memuat informasi tentang Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada akhir periode pelaporan.

5.1.4.1 Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp4.611.617.075.217,17 mengalami kenaikan sebesar Rp68.919.677.534,68 atau 1,52% jika dibandingkan dengan nilai aset pada Tahun 2020 sebesar Rp4.542.697.397.682,49. Rincian aset dapat dilihat pada Tabel 5.76 sebagai berikut:

Tabel 5.76

Rincian Aset Kabupaten Lebak Tahun 2021

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	KENAIAKAN/ PENURUNAN	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Aset Lancar	444.300.274.729,09	483.215.881.840,29	(38.915.607.111,20)	(8,05)
2	Investasi Jangka Panjang	146.156.999.489,43	137.052.851.697,52	9.104.147.791,91	6,64
3	Aset Tetap	3.998.669.774.910,66	3.898.888.002.753,23	99.781.772.157,43	2,56
4	Aset Lainnya	22.490.026.087,99	23.540.661.391,45	(1.050.635.303,46)	(4,46)
JUMLAH		**4.611.617.075.217,17**	**4.542.697.397.682,49**	**68.919.677.534,68**	**1,52**

1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, serta aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 sebesar Rp444.300.274.729,09 mengalami penurunan sebesar Rp38.915.607.111,20 atau 8,05% jika dibandingkan dengan jumlah aset lancar Tahun 2020 sebesar Rp483.215.881.840,29 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.77 sebagai berikut:

Tabel 5.77
Rincian Aset Lancar Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	KENAIKAN/PENURUNAN	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	**Kas dan Setara Kas**	**288.809.487.009,05**	**296.838.844.123,05**	**(8.029.357.114,00)**	**(2,70)**
	a. Kas di Kas Daerah	219.255.765.517,00	209.798.226.340,00	9.457.539.177,00	4,51
	b. Kas di Bendahara Penerimaan	9.975.000,00	8.501.095,00	1.473.905,00	17,34
	c. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	6.400.000,00	(6.400.000,00)	(100,00)
	d. Kas di BLUD	68.379.564.093,85	83,960,067,243.85	(15.580.503.150,00)	(18,56)
	e. Kas Dana BOS	425.385.284,20	3.065.649.444,20	(2.640.264.160,00)	(86,12)
	f. Kas Lainnya	738.797.114,00	0,00	738.797.114,00	100,00
2	**Piutang**	**71.514.380.503,00**	**107.411.864.546,56**	**(35.897.484.043,56)**	**(33,42)**
	a. Piutang Pajak Daerah	37.666.516.958,00	36.382.276.604,00	1.284.240.354,00	3,53
	b. Piutang Retribusi	98.913.908,00	42.790.146,00	56.123.762,00	131,16
	c. Piutang Lain- lain PAD yang Sah	10.583.391.375,78	14.273.044.380,94	(3.689.653.005,16)	(25,85)
	d. Piutang Transfer Antar Daerah	36.768.343.405,00	65.047.926.553,00	(28.279.583.148,00)	(43,47)
	f. Piutang Lainnya	23.565.000,00	7.273.212,00	16.291.788,00	224,00
	g. Penyisihan Piutang	(13.626.350.143,78)	(8.341.446.349,38)	(5.284.903.794,40)	63,36

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	KENAIKAN/PENURUNAN	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
3	Beban di Bayar di Muka	290.012.460,51	269.930.352,13	20.082.108,38	7,44
4	Persediaan	83.686.394.756,53	78.695.242.818,55	4.991.151.937,98	6,34
J U M L A H		444.300.274.729,09	483.215.881.840,29	(38.915.607.111,20)	(8,05)

1.a. Kas dan Setara Kas

Akun Kas dan Setara Kas meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah dalam bentuk rekening giro dan rekening kas yang dipersamakan dengan Kas Daerah.

Kas di Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp219.255.765.517,00 merupakan saldo pada Rekening Kas Umum Daerah pada PT Bank BJB Cabang Rangkasbitung dengan Nomor rekening 0190030032635 atas nama Kas Umum Daerah Kab. Lebak sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.801-BKAD/2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Satun Kerja Perangkat Daerah di Lingkunagn Pemerintahan Kabupaten Lebak. terdapat kas yang dibatasi (restriced Cash) pada Kas di Kas Daerah sebesar Rp35.732.675.983,00 berupa:

1. Silpa DAK Fisik sebesar Rp398.962.230,00;
2. Silpa DAK Non Fisik sebesar Rp35.333.713.753,00.

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung saldo Kas diBendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021. Kas yang masih terdapat di bendahara penerimaan sampai Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.975.000,00 yaitu :

1. Kas di bendahara penerimaan pada Dinas Perhubungan atas retribusi terminal sebesar Rp48.000,00;
2. Kas di bendahara penerimaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas retribusi pelayanan pasar sebesar Rp9.927.000,00.

Kas di Bendahara Penerimaan tersebut telah disetor masing-masing seluruhnya senilai Rp9.975.000,00, pada tanggal 4 Januari 2022 sebesar Rp9.948.000,00, tanggal 5 Januari 2022 sebesar Rp8.000,00, tanggal 6 Januari 2022 sebesar Rp14.000,00 dan tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp5.000,00

Kas di BLUD merupakan akun untuk menampung saldo kas BLUD RSUD dr. Adjidarmo dan BLUD 42 Puskesmas di Kabupaten Lebak. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp68.379.564.093,85 terdiri dari:

1. Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Adjidarmo sebesar Rp46.919.109.204,00 terdiri dari saldo rekening berikut:
   a. Saldo di Bank Jabar Banten dengan Rekening Giro Nomor 0072438401001 sebesar Rp21.805.691.154,00;
   b. Saldo di Bank Negara Indonesia Nomor Rekening 0833978914 Rp193.985.090,00;
   c. Saldo di Bank Negara Indonesia Nomor Rekening 6812345600 sebesar Rp1.000.000;
   d. Saldo di Bank Rakyat Indonesia Nomor Rekening 008001019088532 sebesar Rp918.432.960,00;
   e. Deposito di Bank Jabar Banten sebesar Rp14.000.000.000,00 terdapat pada 3 Nomor Bilyet Giro yaitu:
      - No. A. 653306 dan No. Ref 2018IDR000026 sebesar Rp2.000.000.000,00;
      - No. A. 637727 dan No. Ref 2020IDR000026 sebesar Rp 2.000.000.000,00;
      - No. A. 756722 dan No. Ref 2020IDR000362 sebesar Rp10.000.000.000,00.
   f. Deposito di Bank Rakyat Indonesia Nomor Rekening 008001003430408 sebesar Rp10.000.000.000,00.
2. Kas di Badan Layanan Umum Daerah 42 Puskesmas sebesar Rp21.460.454.888,85 seluruhnya pada PT Bank Jabar Banten dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.78 sebagai beriku:

Tabel 5.78
Kas di Badan Layanan Umun Daerah Puskesman
Tahun 2021

NO	BLUD PUSKESMAS	SALDO BANK	NOMOR REKENING
1	2	3	
1	Bojongjuruh	766.415.004,00	009283588101
2	Bayah	186.569.575,00	0092835995101
3	Bojongmanik	534.605.876,00	0092835286101
4	Cibadak	885.362.288,00	0092834621101
5	Mandala	287.877.948,00	0092834492101
6	Cibeber	235.141.107,00	0092836061101
7	Cisungsang	226.312.664,00	0092836118101

NO	BLUD PUSKESMAS	SALDO BANK	NOMOR REKENING
1	2	3	
8	Citorek	157.896.977,00	0092836134101
9	Cigemblong	309.238.302,00	0092835898101
10	Cijaku	395.745.482,00	0092835871101
11	Cikulur	884.792.378,00	0092834875101
12	Pamandegan	381.453.643,00	0092834931101
13	Cileles	183.362.168,00	0092835472101
14	Prabugantungan	275.031.506,00	0092835448101
15	Cilograng	249.704.247,00	0092836045101
16	Cimarga	414.360.784,00	0092835121101
17	Sarageni	65.882.044,00	0092835162101
18	Cipanas	339.652.011,83	0092835308101
19	Cirinten	846.302.822,00	0092835405101
20	Curug bitung	722.628.722,00	0092835006101
21	Gunungkencana	1.314.265.015,00	0092835510101
22	Sajira	454.932.485,00	0092835049101
23	Pajagan	481.338.252,00	0092835065101
24	Leuwidamar	470.021.720,00	0092835197101
25	Cisimeut	551.576.248,00	0092835243101
26	Maja	383.174.644,00	0092834980101
27	Cipeundeuy	72.580.052,00	0092835669101
28	Muncang	807.925.214,00	0092835081101
29	Panggarangan	800204904	0092835911101
30	Rangkasbitung	683.081.418,00	0092834069101
31	Kolelet	41.363.994,00	0092834581101
32	Mekarsari	60.367.012,00	0092834565100
33	Sobang	763.992.774,00	0092835375101
34	Malingping	1.450.479.648,00	0092835634101
35	Binuangeun	811.741.155,00	0092835707101
36	Parungsari	606.356.023,00	0092835820101
37	Baros	390.382.814,00	0092834808100
38	Warunggunung	1.055.357.881,00	0092834670101
39	Cihara	227.544.678,00	0092835960101
40	Banjarsari	1.393.468.711,00	0092835571101
41	Lebakgedong	216.366.341,02	0092835340101
42	Kalanganyar	75.598.357,00	0092834425101
JUMLAH		**21.460.454.888,85**	

Kas di Bendahara BOS merupakan kas Dana BOS pada 208 Satuan Pendidikan Negeri (138 SD dan 70 SMP) yang terdapat di Kabupaten Lebak. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp425.385.284,20 dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Kas Tunai di Bendahara BOS SD sebesar Rp179.783.557,00;
b. Saldo Kas Tunai di Bendahara BOS SMP sebesar Rp245.601.727,20.

Kas Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo kas ygn tidak termasuk dalam Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD dan Kas di Bendahara BOS. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp738.797.114,00 berupa pajak pusat dan daerah yang belum di setor oleh Bendahara BOS sampai dengan 31 Desember 2021. Nilai pajak tersebut terdiri dari Rp557.915.773,00 untuk Sekolah Dasar Rp476.740.190,00 pajak pusat dan Rp81.175.583,00 pajak daerah dan sebesar Rp180.881.341,00 untuk Sekolah Menengah Pertama Rp143.451.020,00 pajak pusat dan Rp37.430.321,00 pajak daerah. Seluruh nilai pajak tersebut telah disetorkan pada periode bulan Februari 2022.

1.b. Piutang

Piutang Pendapatan merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Pendapatan Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi, dan lainnya) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Total Piutang Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 sebesar Rp85.140.730.646,78 mengalami penurunan sebesar Rp30.612.580.249,16 atau 26,45% dibandingkan dengan Piutang Tahun 2020 sebesar Rp115.753.310.895,94 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.79 terdiri dari:

Tabel 5.79
Piutang Pendapatan Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021

NO	JENIS PIUTANG	TAHUN 2021 (RP)	TAHUN 2020 (RP)	KENAIKAN/PENURUNAN	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Pajak Daerah	37.666.516.958,00	36.382.276.604,00	1.284.240.354,00	3,53
2	Piutang Retribusi	98.913.908,00	42.790.146,00	56.123.762,00	131,16
3	Piutang Lain- lain PAD yang Sah	10.583.391.375,78	14.273.044.380,94	(3.689.653.005,16)	(25,85)
4	Piutang Transfer Antar Daerah	36.768.343.405,00	65.047.926.553,00	(28.279.583.148,00)	(43,47)
5	Piutang Lainnya	23.565.000,00	7.273.212,00	16.291.788,00	224,00

NO	JENIS PIUTANG	TAHUN 2021 (RP)	TAHUN 2020 (RP)	KENAIKAN/PENURUNAN	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
JUMLAH		85.140.730.646,78	115.753.310.895,94	(30.612.580.249,16)	(26,45)

Piutang Pajak yaitu akun untuk menampung saldo tagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Saldo Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 sebesar Rp37.666.516.958,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.284.240.354,00 atau 3,53% dibandingkan dengan Piutang Tahun 2020 sebesar Rp36.382.276.604,00. Rincian Piutang Pajak dapat dilihat pada Tabel 5.80 sebagai berikut:

Tabel 5.80
Piutang Pajak Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021

NO	JENIS PAJAK	SALDO AWAL 2020	MUTASI		SALDO AKHIR 2021
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel	45.106.289,00	396.949.930,00	365.169.359,00	76.886.860,00
2	Pajak Restoran	510.957.096,00	5.040.967.915,00	5.275.155.975,00	276.769.036,00
3	Pajak Hiburan	23.494.000,00	46.279.769,00	48.059.769,00	21.714.000,00
4	Pajak Penerangan Jalan	1.336.810.142,00	17.633.838.540,00	18.970.648.682,00	0,00
5	Pajak Parkir	90.482.400,00	481.564.500,00	563.946.900,00	8.100.000,00
6	Pajak Air Tanah	53.350.068,00	590.322.903,00	590.974.903,00	52.698.068,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	13.830.000,00	13.830.000,00	0,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	12.964.783.696,00	33.259.594.395,00	39.686.694.061,00	6.537.684.030,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	21.357.292.913,00	35.809.845.755,00	26.474.473.704,00	30.692.664.964,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	63.838.409.310,00	63.838.409.310,00	0,00
JUMLAH		36.382.276.604,00	157.111.603.017,00	155.827.362.663,00	37.666.516.958,00

Perubahan atas kenaikan dan penurunan piutang dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan piutang pajak diperoleh dari jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan;
2. Pengurangan piutang pajak diperoleh dari pembayaran atas piutang tahun lalu dan pembayaran SKP tahun berjalan.

Piutang Retribusi merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Retribusi Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 sebesar Rp98.913.908,00 mengalami

kenaikan sebesar Rp56.123.762,00 atau 131,16% dibandingkan dengan Piutang Tahun 2020 sebesar Rp42.790.146,00 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.81 sebagai berikut:

Tabel 5.81
Piutang Retribusi Kabupaten Lebak Tahun 2021

NO	URAIAN	SALDO AWAL (2020)	MUTASI		SALDO AKHIR (2021)
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	26.383.296,00	797.040.000,00	797.040.000,00	26.383.296,00
2	Retribusi Penyewaan Bangunan	16.406.850,00	64.260.562,00	8.136.800,00	72.530.612,00
JUMLAH		**42.790.146,00**	**861.300.562,00**	**805.176.800,00**	**98.913.908,00**

Piutang Lain-lain PAD yang sah Tahun 2021 merupakan akun untuk menampung Piutang Denda Pajak dan Piutang Pendapatan BLUD. Saldo Piutang lain-lain PAD yang sah Pemerintah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.583.391.375,78 mengalami penurunan sebesar Rp3.689.653.005,20 atau 25,85% dibandingkan dengan Piutang Tahun 2020 sebesar Rp14.273.044.380,94 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.82 sebagai berikut:

Tabel 5.82
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Kabupaten Lebak Tahun 2021

NO	URAIAN	SALDO AWAL 2020	MUTASI		SALDO AKHIR 2021
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Pendapatan Denda (PBBP2) - Pajak Bumi dan Bangunan,Pedesaan dan	8.103.722.741,94	2.532.143.802,84	425.118.543,00	10.210.748.001,78
2	Piutang Dinas Kesehatan (BLUD 42 Puskesmas)	342.052.000,00	3.549.200,00	342.052.000,00	3.549.200,00
3	Piutang BLUD RSUD dr Adjidarmo	5.827.269.639,00	112.453.863.181,00	117.912.038.646,00	369.094.174,00
JUMLAH		**14.273.044.380,94**	**114.989.556.183,84**	**118.679.209.189,00**	**10.583.391.375,78**

Piutang Transfer Antar Daerah meupakan Piutang Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp36.768.343.405,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 973/Kep.78-Huk/2022 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Periode Bulan Januari Sampai Dengan November, Periode Bulan Desember dan Pelampauan Atas Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2021 Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten. Saldo Piutang Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2021 sebesar

Rp36.768.343.405,00 mengalami penurunan sebesar Rp28.279.583.148,00 atau 43,47% dibandingkan dengan Piutang Tahun 2020 sebesar Rp65.047.926.553,00 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.83 sebagai berikut:

Tabel 5.83
Piutang Transfer Antar Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021

NO	URAIAN	SALDO AWAL 2020	MUTASI		SALDO AKHIR 2021
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.003.804.550,00	8.796.484.050,00	17.003.804.550,00	8.796.484.050,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.180.647.490,00	6.369.919.235,00	12.180.647.490,00	6.369.919.235,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.341.388.255,00	9.792.508.255,00	22.341.388.254,00	9.792.508.256,00
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	374.678.794,00	265.667.915,00	374.678.795,00	265.667.914,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	13.147.407.464,00	11.543.763.950,00	13.147.407.464,00	11.543.763.950,00
JUMLAH		**65.047.926.553,00**	**36.768.343.405,00**	**65.047.926.553,00**	**36.768.343.405,00**

Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 merupakan akun untuk menampung piutang selain Piutang Pendapatan. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.565.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.291.788,00 atau 224% jika dibandingkan dengan Piutang Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp7.273.212,00. Saldo Piutang Lainnya tersebut adalah pengembalian belanja dari Pihak Ketiga karena Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan pada Kecamatan Sobang yang pembayarannya terealisasi sebelum Perubahan APBD, tetapi setelah Perubahan APBD kegiatan tersebut dihapuskan.

Penyisihan Piutang dilakukan terhadap piutang daerah agar aset daerah berupa piutang terjaga sehingga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyisihan Piutang dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyisihan dan Penghapusan Piutang serta Penyisihan Dana Bergulir. Penyisihan piutang per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13.626.350.143,78 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.84 sebagai berikut:

Tabel 5.84
Penyisihan Piutang Kabupaten Lebak Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	KENAIKAN/PENURUNAN	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	7.351.919.534,68	3.625.588.629,92	3.726.330.904,76	102,78
2	Penyisihan Piutang Retribusi	34.988.777,81	29.364.012,75	5.624.765,06	19,16
3	Penyisihan Piutang Lain- lain PAD yang Sah	6.055.482.289,27	4.361.217.707,89	1.694.264.581,38	38,85
4	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	183.841.717,03	325.239.632,77	(141.397.915,74)	(43,47)
5	Penyisihan Piutang Lainnya	117.825,00	36.366,06	81.458,94	224,00
JUMLAH		**13.626.350.143,78**	**8.341.446.349,38**	**5.284.903.794,40**	**63,36**

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.351.919.534,68 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.85 sebagai berikut:

Tabel 5.85
Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2021

NO	JENIS PIUTANG	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG				TOTAL PENYISIHAN PIUTANG
			MACET (> 5 TAHUN)	DIRAGUKAN (2–5 TAHUN)	KURANG LANCAR (1-2 TAHUN)	LANCAR 0-1 TAHUN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pajak Hotel	76.886.860,00	7.436.512,00	956.500,00	1.578.000,00	258.786,74	10.229.798,74
2	Pajak Restoran	276.769.036,00	51.860.569,00	59.992.191,50	8.134.856,50	117.877,60	120.105.494,60
3	Pajak Hiburan	21.714.000,00	7.344.000,00	1.125.000,00	1.230.000,00	900,00	9.698.100,00
4	Pajak Parkir	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00
5	Pajak Air Tanah	52.698.068,00	0,00	20.702.984,00	970.350,00	7.943,00	21.681.277,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	6.537.684.030,00	106.765.400,00	52.395.250,00	30.650.046,30	30.098.138,34	219.908.834,64
7	Pajak Bumi dan Bangunan	30.692.664.964,00	3.625.533.840,00	1.987.883.381,50	1.298.233.669,90	50.545.138,31	6.962.196.029,71
JUMLAH		**37,666,516,958.00**	**3.807.040.321,00**	**2.123.055.307,00**	**1.340.796.922,70**	**81.026.983,99**	**7.351.919.534,68**

Penyisihan Piutang Retribusi merupakan akun untuk menampung Penyisihan Piutang Retribusi. Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp34.988.777,81 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.86 sebagai berikut:

Tabel 5.86
Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2021

NO	JENIS PIUTANG	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG				TOTAL PENYISIHAN PIUTANG
			MACET (> 12 BULAN)	DIRAGUKAN (3 – 12 BULAN)	KURANG LANCAR (1 – 3 BULAN)	LANCAR (0 – 1 BULAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Retribusi Izin Menara (PUPR)	26.383.296,00	26.383.296,00	0,00	0,00	0,00	26.383.296,00
2	Retribusi Rumah Susun	72.530.612,00	8.284.250,00	0,00	0,00	321.231,81	8.605.481,81
JUMLAH		**98.913.908,00**	**34.667.546,00**	**0,00**	**0,00**	**321.231,81**	**34.988.777,81**

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Penyisihan Piutang Denda Pajak dari Denda (PBBP2) – Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan, Piutang Dinas Kesehatan (BLUD 42 Puskesmas) dan Piutang BLUD RSUD dr Adjidarmo. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.055.482.289,27 dengan rincian Penyisihan Piutang Denda Pajak dari Denda (PBBP2) – Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp5.859.047.669,12 dan Penyisihan Piutang Dinas Kesehatan (BLUD 42 Puskesmas) dan Piutang BLUD RSUD dr Adjidarmo sebesar Rp196.434.620,15 dapat dilihat pada Tabel 5.87 sebagai berikut:

Tabel 5.87
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2021

NO	JENIS PIUTANG	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG				TOTAL PENYISIHAN PIUTANG
			MACET (> 5 TAHUN)	DIRAGUKAN (2–5 TAHUN)	KURANG LANCAR (1-2 TAHUN)	LANCAR 0-1 TAHUN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Denda (PBBP2) – Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan	10.210.748.001,78	4.418.235.873,60	1.076.950.728,38	363.861.067,14	0,00	5.859.047.669,12
JUMLAH		**8.119.828.432,56**	**4.418.235.873,60**	**1.076.950.728,38**	**363.861.067,14**	**0,00**	**5.859.047.669,12**

NO	JENIS PIUTANG	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG				TOTAL PENYISIHAN PIUTANG
			MACET (> 12 BULAN)	DIRAGUKAN (3 – 12 BULAN)	KURANG LANCAR (1 – 3 BULAN)	LANCAR (0 – 1 BULAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jasa Layanan BLUD RSUD dr Adjidarmo	369.094.174,00	84.661.790,00	107.547.415,50	4.064.190,40	143.478,25	196.416.874,15
2	Jasa Layanan BLUD Dinkes	3.549.200,00	0,00	0,00	0,00	17.746,00	17.746,00
JUMLAH		**372.643.374,00**	**84.661.790,00**	**107.547.415,50**	**4.064.190,40**	**161.224,25**	**196.434.620,15**

Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah meupakan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2021 dari pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pelampauan Tahun 2021 yang belum di terima di Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2021. Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp183.841.717,03 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.88 sebagai berikut:

Tabel 5.88
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2021

NO	JENIS PIUTANG	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG				TOTAL PENYISIHAN PIUTANG
			MACET (> 12 BULAN)	DIRAGUKAN (3-12 BULAN)	KURANG LANCAR (1 – 3 BULAN)	LANCAR (0 – 1 BULAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bagi Hasil Pajak Provinsi	36.768.343.405,00	0,00	0,00	0,00	183.841.717,03	183.841.717,03
JUMLAH		**36.768.343.405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.841.717,03**	**183.841.717,03**

Penyisihan Piutang Lainnya merupakan akun untuk menampung piutang selain Piutang Pendapatan. Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp117.825,00 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.89 sebagai berikut:

Tabel 5.89
Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2021

NO	JENIS PIUTANG	NILAI PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG				TOTAL PENYISIHAN PIUTANG
			MACET (> 12 BULAN)	DIRAGUKAN (3-12 BULAN)	KURANG LANCAR (1 – 3 BULAN)	LANCAR (0 – 1 BULAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Belanja Kecamatan Sobang	23.565.000,00	117.825,00	0,00	0,00	0,00	117.825,00
JUMLAH		**23.565.000,00**	**117.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.825,00**

1.c. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya pada Tahun 2021 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode Tahun Anggaran 2021 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. Belanja Dibayar Dimuka Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 sebesar Rp290.012.460,51 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.90 sebagai berikut:

Tabel 5.90
Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021

NO	URAIAN	TANGGAL KONTRAK	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	KENAIKAN/PENURUNAN	
					JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Sewa Gedung (3 Kantor UPT Bapenda)	11 Oktober 2020 s.d 5 Oktober 2021	66.375.000,00	67.500.000,00	(1.125.000,00)	(1,67)
2	Asuransi BMD (Asuransi Kendaraan Bermotor dan Asuransi Gedung Negara)	Terdapat pada Lampiran	223.637.460,51	202.430.352,13	21.207.108,38	10,48
JUMLAH		**-**	**290.012.460,51**	**269.930.352,13**	**20.082.108,38**	**7,44**

1.d. Persediaan

Persediaan merupakan catatan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Lebak dan barang - barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pengukuran Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila persediaan diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehanan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa diperhitungkan sebagai pengurang biaya perolehan;
2. Harga pokok produksi apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
3. Nilai wajar, apabila persediaan diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction);

4. Persediaan berupa hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar;

5. Perhitungan pencatatan persediaan menggunakan metode FIFO (First in First Out)/Metode Masuk Pertama Keluar Pertama yaitu bahwa persediaan yang diperoleh lebih awal, dianggap dikeluarkan lebih awal pula dengan demikian persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan akhir.

Persediaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 sebesar Rp83.686.394.756,53 mengalami kanaikan sebesar Rp4.991.151.937,98 atau 6,34% dibandingkan dengan Persediaan Tahun 2020 sebesar Rp78.695.242.818,55 dengan rincian data dilihat pada Tabel 5.91 sebagai berikut:

Tabel 5.91
Rincian Persediaan Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	KENAIKAN/PENURUNAN	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.568.000,00	0,00	4.568.000,00	100,00
2	Persediaan Bahan Kimia	104.945.500,00	0,00	104,945,500.00	100,00
3	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
4	Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	116.275.000,00	56,216,800.00	60.058.200,00	106,83
5	Persediaan Bahan Makanan	1.226.909.000,00	0,00	1.226.909.000,00	100,00
6	Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan	94.268.860,00	35.97.400,00	58.294.460,00	162,04
7	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.253.344.500,00	1.566.644.916,00	(313.300.416,00)	(20,00)
8	Persediaan Kertas dan Cover	39.719.595,00	0,00	39.719.595,00	100,00
9	Persediaan Bahan Cetak	747.808.162,00	795.108.330.00	(47.300.168,00)	(5,95)
10	Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.780.000,00	540.000,00	1.240.000,00	229,63
11	Persediaan Bahan Komputer	32.135.685,00	0,00	32.135.685,00	100,00
12	Persediaan Perabot Kantor	80.559.655,00	43.565.955,00	36.993.700,00	84,91
13	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar,battery kering)	38.014.140,00	7.101.000,00	30.913.140,00	435,34
14	Persediaan Suvenir/Cenderamata	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	100,00

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	KENAIKAN/PENURUNAN	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
15	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	49.869.600,00	1.104.319.210,00	(1.054.449.610,00)	(95,48)
16	Persediaan Obat	17.872.642.074,00	3.697.067.407,00	14.175.574.667,00	383,43
17	Persediaan Obat-Obatan Lainnya	1.731.475.691,00	0,00	1.731.475.691,00	100.00
18	Persediaan Barang yang akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	27.705.824.340,00	49.702.743.045,00	(21,996,918,705.00)	(44.26)
19	Persediaan Pakan	63.551.200,00	0,00	63.551.200,00	100,00
20	Persediaan Natura dan Pakan Lainnya	63.019.000,00	0,00	63.019.000,00	100,00
21	Persediaan BLUD	32.456.344.754,53	9.444.593.881,55	23,011,750,872.98	243,65
22	Persediaan Alat Kesehatan	0,00	4,687,329,632.00	(4,687,329,632.00)	(100,00)
23	Persediaan Lainnya	0,00	60.089.400,00	(60.089.400,00)	(100,00)
24	Persediaan Obat dan Alat Kesehatan	0,00	7.493.948.842,00	(7.493.948.842,00)	(100,00)
JUMLAH		**83.686.394.756,53**	**78.695.242.818,55**	**4.991.151.937,98**	**6,34**

Persediaan pada Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.92 berikut:

Tabel 5.92
Persediaan Perangkat Daerah Per 31 Desember 2021 dan 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	KENAIKAN/PENURUNAN	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	2.187.750,00	1.309.150,00	878.600,00	67,11
2	Dinas Kesehatan	50.326.355.008,53	16.842.998.783,55	33,483,356,224.98	198.80
3	Rsud dr. Adjidarmo	0,00	8.487.683.939,00	(8.487.683.939,00)	(100,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.055.952.200,00	49.450.118.835,00	(28.394.166.635,00)	(57,42)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	5.712.962.010,00	12.957.640,00	5.700.004.370,00	43989,53
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	516.000,00	1.289.250,00	(773.250,00)	(59,98)
7	Dinas Sosial	34.745.900,00	17.539.100,00	17.206.800,00	98,11
8	Dinas Tenaga Kerja	1.460.550,00	497.700,00	962.850,00	193,46
9	Dinas Ketahanan Pangan	1.263.234.200,00	565.657.360,00	697.576.840,00	123,32
10	Dinas Lingkungan Hidup	36.693.600,00	72.871.000,00	(36.177.400,00)	(49,65)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.834.963.032,00	2.143.575.796,00	(308.612.764,00)	(14,40)

NO	PERANGKAT DAERAH	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	KENAIKAN/PENURUNAN	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.113.650,00	4.772.500,00	1.341.150,00	28,10
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.731.757.091,00	635.000,00	1.731.122.091,00	272.617,65
14	Dinas Perhubungan	109.583.030,00	40.115.650,00	69.467.380,00	173,17
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	656.500,00	929.000,00	(272.500,00)	(29,33)
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	725.000,00	671.000,00	54.000,00	8,05
17	Dinas Penanaman Modal	7.488.890,00	12.396.290,00	(4.907.400,00)	(39,59)
18	Dinas Kepemudaan Olahraga	2.063.800,00	2.001.500,00	62.300,00	3,11
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.248.900,00	1.232.600,00	16.300,00	1,32
20	Dinas Perikanan	69.289.700,00	97.732.400,00	(28.442.700,00)	(29,10)
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	1.338.550,00	(1.338.550,00)	(100,00)
22	Dinas Pertanian	170.428.620,00	220.787.870,00	(50.359.250,00)	(22,81)
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	202.975.670,00	24.466.690,00	178.508.980,00	729,60
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.765.600,00	0,00	5.765.600,00	0.00
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.746.750,00	2.694.000,00	1.052.750,00	39,08
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	29.040.770,00	38.134.190,00	(9.093.420,00)	(23,85)
28	Badan Pendapatan Daerah	39.923.450,00	81.669.000,00	(41.745.550,00)	(51,12)
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.304.000,00	19.669.060,00	(365.060,00)	(1,86)
30	Inspektorat Daerah	13.191.500,00	6.622.390,00	6.569.110,00	99,20
31	Sekretariat Daerah	42.221.355,00	266.494.675,00	(224.273.320,00)	(84,16)
32	Sekretariat DPRD	2.111.800,00	1.112.800,00	999.000,00	89,77
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	103.000,00	318.000,00	(215.000,00)	(67,61)
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	943.165.680,00	253.348.900,00	689.816.780,00	272,28
35	Kecamatan Rangkasbitung	993.500,00	258.000,00	735.500,00	285,08
36	Kecamatan Kalanganyar	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00
37	Kecamatan Cibadak	751.500,00	180.000,00	571.500,00	317,50
38	Kecamatan Warunggunung	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Cimarga	2.971.500,00	2.267.000,00	704.500,00	31,08
40	Kecamatan Cikulur	624.000,00	1.679.400,00	(1.055.400,00)	(62,84)

NO	PERANGKAT DAERAH	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	KENAIKAN/PENURUNAN	
				JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
41	Kecamatan Leuwidamar	1.631.700,00	246.000,00	1.385.700,00	563,29
42	Kecamatan Sajira	476.900,00	421.200,00	55.700,00	13,22
43	Kecamatan Maja	1.405.875,00	3.743.500,00	(2.337.625,00)	(62,44)
44	Kecamatan Curugbitung	349.000,00	533.500,00	(184.500,00)	(34,58)
45	Kecamatan Muncang	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
46	Kecamatan Sobang	100.000,00	240.000,00	(140.000,00)	(58,33)
47	Kecamatan Bojongmanik	370.000,00	145.000,00	225.000,00	155,17
48	Kecamatan Cirinten	226.000,00	246.000,00	(20.000,00)	(8,13)
49	Kecamatan Cipanas	369.500,00	2.380.900,00	(2.011.400,00)	(84,48)
50	Kecamatan Lebakgedong	654.900,00	718.000,00	(63.100,00)	(8,79)
51	Kecamatan Gunung Kencana	402.700,00	104.000,00	298.700,00	287,21
52	Kecamatan Cileles	141.000,00	38.000,00	103.000,00	271,05
53	Kecamatan Banjarsari	152.000,00	143.800,00	8.200,00	5,70
54	Kecamatan Cijaku	703.800,00	636.300,00	67.500,00	10,61
55	Kecamatan Cigemblong	531.250,00	6.026.100,00	(5.494.850,00)	(91,18)
56	Kecamatan Malingping	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Kecamatan Wanasalam	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Kecamatan Panggarangan	321.500,00	411.500,00	(90.000,00)	(21,87)
59	Kecamatan Cihara	315.000,00	120.000,00	195.000,00	162,50
60	Kecamatan Bayah	95.000,00	954.000,00	(859.000,00)	(90,04)
61	Kecamatan Cibeber	1.133.325,00	0,00	1.133.325,00	0,00
62	Kecamatan Cilograng	159.800,00	0,00	159.800,00	0,00
JUMLAH		**83.686.394.756,53**	**78.695.242.818,55**	**4.991.151.937,98**	**6,34**

Berdasarkan tabel di atas terdapat Persediaan Barang yang akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat terdiri dari:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:
   a. Pembangunan Sumur dalam Terlindungi sebesar Rp18.971.970.000,00;
   b. Pembangunan Rumah Dinas dan Penataan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Lebak sebesar Rp1.354.437.000,00;
   c. Jalan sebesar Rp701.809.000,00;
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, berupa Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan sebesar Rp 5.702.465.660,00;
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:
   a. Tanah Kosong untuk pembangunan rumah oleh Kementerian PUPR yang akan pada masyarakat korban bencana alam sebesar Rp637.185.340,00;
   b. Kebutuhan Pokok untuk pertolongan bencana alam sebesar Rp290.052.400,00.
4. Dinas Sosial berupa Kursi Roda sebesar Rp2.250.000,00 dan Kebutuhan Pokok

sebesar Rp30.702.000,00.

Persediaan Vaksin yang masih bisa dipergunakan adalah Vaksin Covid jenis Pfizer sebesar Rp9.297.362.880,00 dan jenis Covovax sebesar Rp 1.210.145.000,00, sedangkan untuk Vaksin yang sudah kadaluarsa jenis Moderna sebesar Rp133.238.000,00 dan jenis Chadox1-S Recommbinant sebesar Rp412.802.773.000,00.

2.Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen. Penambahan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak berdasarkan APBD Tahun 2021 kepada Perusahaan Daerah sebesar Rp9.000.000,00 yaitu untuk PT. LKM Rangkasbitung sebesar Rp4.000.000.000,00 dan PDAM sebesar Rp5.000.000.000,00.

Nilai investasi Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan metode ekuitas untuk nilai investasi lebih dari 20% dan metode biaya untuk nilai investasi kurang dari 20%. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Lebak yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu PDAM, PT. BPR Lebak Sejahtera dan PT. LKM Rangkasbitung. Nilai investasi Pemerintah Derah sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp146.156.999.489,43 dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel 5.93 sebagai berikut:

Tabel 5.93
Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021

No	Lembaga	Kepemilikan Saham (%)	Metode Penilaian	Penyertaan Modal sd Tahun 2021	Nilai Investasi Tahun 2021	Nilai Investasi Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Bank Jabar	< 20	cost method	0,00	12.179.837.700,00	12.179.837.700,00
2	PT. BPR Lebak Sejahtera	85,69	equity method	13.200.000.000,00	20.574.065.711,48	18.936.855.116,65
3	PT. LKM Rangkasbitung	86,56	equity method	10.091.400.000,00	11.749.453.200,58	7.335.873.618,52
4	PDAM	89,15	equity method	111.460.986.550,00	98.795.813.209,36	95.759.114.627,75
5	PD. Lebak Niaga	100,00	equity method	14.205.695.682,00	2.857.829.668,00	2.841.170.635,00
JUMLAH				**148.958.082.232,00**	**146.156.999.489,43**	**137.052.851.697,93**

Salah satu Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yaitu PD. Lebak Niaga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yaitu "*Stone Crusher*". Sejak 2015 izin pertambangan yang dimiliki berada di Blok Gunung Panggo Desa

Luhur Jaya sudah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi karena terdapat perluasan wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Pada 2018 Pemerintah Kabupaten Lebak telah membuat kajian terkait peralihan sektor usaha PD Lebak Niaga dan menyimpulkan bahwa PD Lebak Niaga akan mengalihkan usahanya ke sektor pertanian melalui usaha jual beli gabah. Perubahan sektor usaha tersebut kemudian diikuti dengan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah senilai Rp2.000.000.000,00 pada TA 2019. Tambahan Penyertaan Modal tersebut diperuntukan bagi pembentukan kepengurusan, gaji pegawai dan modal untuk divisi pangan. Sampai dengan per 31 Desember 2021 diversifikasi usaha bidang pertanian belum dapat dilaksanakan karena antara lain belum terbentuknya kepengurusan yang definitif.

3. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.471.398.569.618,39. Perbedaan jumlah realisasi Belanja Modal dengan jumlah penambahan Aset Tetap dan Aset lainnya pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 dikarenakan:

1. Tidak seluruh realisasi Belanja Modal menghasilkan Aset Tetap dan Aset Lainnya karena terdapat beberapa anggaran dengan kode rekening Belanja Modal namun setelah dihitung perjenis satuan barangnya tidak memenuhi batas kapitalisasi Aset Tetap sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap dan Aset Lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 149 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka barang yang diperoleh akan di kelompokkan dalam barang inventaris.
2. Masih terdapat komponen Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa yang tidak ditempatkan pada Belanja Modal untuk menjadi bagian nilai perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Rincian Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Tabel 5.94 berikut:

Tabel 5.94

Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2021

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021			31 DESEMBER 2020
		NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	544.600.573.836,74	0,00	544.600.573.836,74	542.263.171.131,34
2	Peralatan dan Mesin	713.603.363.784,23	533.440.545.639,40	180.162.818.144,87	193.303.860.309,93
3	Gedung dan Bangunan	1.407.744.964.403,75	488.328.656.964,83	919.416.307.438,92	920.814.324.997,37
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.605.366.619.157,05	3.450.959.592.103,48	2.154.407.027.053,57	2.026.730.140.965,94
5	Aset Tetap Lainnya	191.088.911.148,62	0,00	191.088.911.148,62	189.799.324.287,67
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.994.137.288,00	0,00	8.994.137.288,00	25.977.181.061,00
JUMLAH		**8.471.398.569.618,39**	**4.472.728.794.707,73**	**3.998.669.774.910,66**	**8.510.329.516.239,47**

Nilai mutasi untuk masing-masing aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai walaupun belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah. Tanah tersebut dikuasai dan atau digunakan oleh pemerintah maka tanah tersebut dicatat sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 sebesar Rp544.600.573.836,74. Adapun rincian aset tetap tanah per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.95 sebagai berikut:

Tabel 5.95
Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	2	3	4
1	Audited tahun n-1	542.263.171.131,34	539.234.520.411,34
2	Koreksi Saldo Awal	(2.500.000,00)	0,00
	Jumlah	**542.260.671.131,34**	**539.234.520.411,34**
3	Mutasi Tambah		
	A. Pengadaan	6.027.811.248,00	318.706.000,00
	B. Hibah	2.664.088.164,00	2.218.966.000,00
	C. Pindah Antar Perangkat Daerah	959.366.365,00	15.504.595,00
	D. Koreksi	0,00	943.509.000,00
	E. Reklas	306.655.000,00	0,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	2	3	4
	F. Penetapan Status	0,00	0,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	**9.957.920.777,00**	**5.031.640.500,00**
4	Mutasi Kurang		
	A. Hibah	0,00	0,00
	B. Pindah Antar Perangkat Daerah	959.366.365,00	1.550.459.500,00
	C. Penghapusan	67.095.000,00	442.932.280,00
	D. Koreksi	6.390.179.706,60	9.598.000,00
	E. Reklas	201.377.000,00	0,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	**7.618.018.071,60**	**2.002.989.780,00**
	Jumlah BMD Per 31 Desember	**2.339.902.705,40**	**3.028.650.720,00**
5	Penyajian Aset Tetap	544.600.573.836,74	542.263.171.131,34
	Pengurangan		
	A. Kemitraan dengan Pihak Ketiga/KSO	0,00	0,00
	B. Ekstra Komptabel	0,00	0,00
	C. Rusak Berat (Intra Komptabel)	0,00	0,00
	D. Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
	JUMLAH PENGURANG	0,00	0,00
6	Nilai BMD Sebagai Aset Tetap	544.600.573.836,74	542.263.171.131,34
7	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
8	Nilai Buku Per 31 Desember	544.600.573.836,74	542.263.171.131,34

Pada aset tanah Pemerintah Daerah tersebut terdapat tanah yang disewakan yaitu:

a. Tanah lapangan yang terletak di Desa Cikotok Kecamatan Cibeber seluas 230m^{2}untuk menara telekomunikasi PT. XL Axiata Tbk. senilai Rp100.000.000,00 sesuai dokumen perjanjian Nomor 032/1222/ BKAD – 2020 dan Nomor : 182/XL – LM/X/2020 dengan jangka waktu perjanjian selama 5 tahun sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025;

b. Tanah kosong di Desa Sukatani Kecamatan Wanasalam seluas 35.900m^2 untuk tambak udang oleh Raja Udang senilai Rp329.831.250,00 sesuai dokumen perjanjian Nomor: 032/123/BKAD – 2018, dan Nomor :17/Rum – pmd/XII/2018 dengan jangka waktu perjanjian selama 5 tahun sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

c. Lahan/bangunan di Pasar Kota Rangkasbitung seluas 2,5 x 3,5 m^2 untuk ATM BNI senilai Rp48.000.000,00 sesuai dokumen perjanjian nomor 01 tanggal 04 Mei 2020 Dengan jangka waktu perjanjian selama 3 tahun sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

d. Lahan/banguna di Pasar Kota Rangkasbitung seluas 2 x 3 m^2 untuk ruang genset Bank BCA senilai Rp15.000.000,00 sesuai dokumen perjanjian nomor 05 tanggal 05 Februari 2020 Dengan jangka waktu perjanjian selama 3 tahun sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022.

3.b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp713.603.363.784,23 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.96 sebagai berikut:

Tabel 5.96
Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	2	3	4
1	Audited Tahun N-1	671.157.292.826,66	576.529.881.582,70
2	Koreksi Saldo Awal	(1.169.056.884,87)	0,00
	Jumlah	**669.988.235.941,79**	**576.529.881.582,70**
3	Mutasi Tambah		
	A. Pengadaan	55.248.493.450,00	87.323.133.699,80
	B. Hibah	3.865.550.000,00	14.273.418.835,00
	C. Pindah Antar Perangkat Daerah	14.619.083.520,80	17.530.877.281,87
	D. Koreksi	116.980.534,10	9.875.068.000,00
	E. Reklas	2.682.165.788,00	159.410.927,08
	F. Penetapan Status	0,00	71.755.000,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	**76.532.273.292,90**	**129.233.663.743,75**
4	Mutasi Kurang		
	A. Hibah	182.800.000,00	0,00
	B. Pindah Antar Perangkat Daerah	14.619.083.520,80	17.530.877.281,87
	C. Penghapusan	8.840.849.188,05	6.801.249.610,17
	D. Koreksi	384.201.155,72	367.622.250,00
	E. Reklas	1.385.528.966,79	2.133.792.922,00
	JUMLAH MUTASI KURANG	**25.412.462.831,36**	**26.833.542.064,04**
	Jumlah BMD Per 31 Desember	**51.119.810.461,54**	**102.400.121.679,71**
5	Penyajian Aset Tetap	721.108.046.403,37	678.930.003.262,41
	Pengurangan		
	A. Kemitraan dengan Pihak Ketiga/KSO	0,00	0,00
	B. Ekstra Komptabel	6.941.356.984,58	7.454.567.435,75

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	2	3	4
	C. Rusak Berat (Intra Komptabel)	563.325.634,52	0,00
	D. Aset Tidak Berwujud	0,00	318.143.000,00
	JUMLAH PENGURANG	**7.504.682.619,10**	**7.772.710.435,75**
6	Nilai BMD Sebagai Aset Tetap	713.603.363.784,23	671.157.292.826,66
7	Akumulasi Penyusutan	533.440.545.639,40	477.853.432.516,69
8	Nilai Buku Per 31 Desember	180.162.818.144,83	193.303.860.309,97

3.c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai, terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (Lift, Instalansi listrik beserta generator) atau aset yang melekat pada aset tetap (suatu aset tetap yang alokasinya melekat pada aset lain). Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.407.744.964.403,75 dapat dilihat pada tabel 5.97 berikut:

Tabel 5.97
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	2	3	4
1	Audited Tahun N-1	1.358.809.940.046,10	1.230.585.427.366,53
2	Koreksi Saldo Awal	(6.769.966.542,77)	0,00
	Jumlah	**1.352.039.973.503,33**	**1.230.585.427.366,53**
3	Mutasi Tambah		
	A. Pengadaan	27.007.051.046,00	26.986.565.998,00
	B. Hibah	8.500.963.829,00	109.155.534.322,00
	C. Pindah Antar Perangkat Daerah	21.569.481.269,00	16.264.896.935,73
	D. Koreksi	413.765.000,00	0,00
	E. Reklas	44.782.442.677,63	71.690.063,00
	F. Penetapan Status	0,00	195.138.000,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	**102.273.703.821,63**	**152.673.825.318,73**
4	Mutasi Kurang		
	A. Hibah	0,00	0,00
	B. Pindah Antar Perangkat Daerah	21.569.481.269,00	16.264.896.935,73
	C. Penghapusan	0,00	3.447.375.389,14
	D. Koreksi	17.207.634.458,83	170.984.835,00
	E. Reklas	3.334.578.336,59	1.203.012.223,00

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	2	3	4
	JUMLAH MUTASI KURANG	**42.111.694.064,42**	**21.086.269.382,87**
	Jumlah BMD Per 31 Desember	**60.162.009.757,21**	**131.587.555.935,86**
5	Penyajian Aset Tetap	1.412.201.983.260,54	1.362.172.983.302,39
	Pengurangan		
	A. Kemitraan dengan Pihak Ketiga/KSO	0,00	0,00
	B. Ekstra Komptabel	4.457.018.856,79	3.363.043.256,29
	C. Rusak Berat (Intra Komptabel)	0,00	0,00
	D. Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
	JUMLAH PENGURANG	**4.457.018.856,79**	**3.363.043.256,29**
6	Nilai BMD Sebagai Aset Tetap	1.407.744.964.403,75	1.358.809.940.046,10
7	Akumulasi Penyusutan	488.328.656.964,83	437.995.615.048,73
8	Nilai Buku Per 31 Desember	919.416.307.438,92	920.814.324.997,37

3.d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Dilakukan juga *Clustering* jalan dan peningkatannya terhadap penambahan aset jalan sehingga aset jalan dapat diakui setelah memperhitungkan pemeliharaan dan peningkatan sebagai penambah umur ekonomisnya. Saldo Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.605.366.619.157,05 dapat dilihat pada Tabel 5.98 sebagai berikut:

Tabel 5.98
Saldo Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021

NO	URAIAN		TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	2		3	4
1	Audited Tahun N-1		5.197.306.033.425,11	5.040.221.717.933,11
2	Koreksi Saldo Awal		12.096.652.380,94	0,00
	Jumlah		**5.209.402.685.806,05**	**5.040.221.717.933,11**
3	Mutasi Tambah			
	A	Pengadaan	187.474.208.785,00	102.333.378.113,00
	B	Hibah	213.219.878.226,00	85.579.927.641,00
	C	Pindah Antar Perangkat Daerah	121.876.046.635,00	0,00
	D	Koreksi	0,00	0,00
	E	Reklas	13.010.130.437,00	3.529.587.671,00
	F	Penetapan Status	0,00	0,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH		**535.580.264.083,00**	**191.442.893.425,00**

NO	URAIAN		TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	2		3	4
4	Mutasi Kurang			
	A	Hibah	0,00	0,00
	B	Pindah Antar Perangkat Daerah	121.876.046.635,00	0,00
	C	Penghapusan	0,00	7.870.904.885,00
	D	Koreksi	0,00	4.000.000,00
	E	Reklas	17.740.284.097,00	25.982.831.712,00
	JUMLAH MUTASI KURANG		**139.616.330.732,00**	**33.857.736.597,00**
	Jumlah Bmd Per 31 Desember		**395.963.933.351,00**	**157.585.156.828,00**
5	Penyajian Aset Tetap		5.605.366.619.157,05	5.197.806.874.761,11
	Pengurangan			
	A	Kemitraan dengan Pihak Ketiga/KSO	0,00	0,00
	B	Ekstra Komptabel	0,00	500.841.336,00
	C	Rusak Berat (Intra Komptabel)	0,00	0,00
	D	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
	JUMLAH PENGURANG		0,00	500.841.336,00
6	Nilai Bmd Sebagai Aset Tetap		5.605.366.619.157,05	5.197.306.033.425,11
7	Akumulasi Penyusutan		3.450.959.592.103,48	3.170.575.892.459,17
8	Nilai Buku Per 31 Desember		2.154.407.027.053,57	2.026.730.140.965,94

Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat pembangunan Jembatan Komposit Kampung Cigobang Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong, berupa Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan panjang 12 m dan lebar 2,5 m berupa konstruksi Jembatan Komposit. CSR tersebut berasal dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dan telah diserahterimakan per 15 Januari 2021, sesuai BAST Nomor: 017-22/2021/001A dan Nomor: 032/24-BKAD/2021, tanggal 15 Januari 2021, kepada Pemerintah Kabupaten Lebak.

Selain itu, terdapat pembangunan Jembatan Lainnya di 2 (dua) lokasi, dari pihak PT. Bukaka berupa Corporate Social Responsibility (CSR) dengan nilai masih dalam konfirmasi. Jembatan pertama dibangun dengan panjang 54 m dan lebar 1,7 m berupa konstruksi Jembatan Gantung Rigid. Lokasi jembatan tersebut beralamat di Kp. Muhara Desa Banjaririgasi Kecamatan Lebakgedong. Jembatan kedua dibangun dengan panjang 70 m dan lebar 1,4 m berupa konstruksi jembatan gantung. Lokasi jembatan tersebut beralamat di Kp. Sajira Mekar Desa Sajira Mekar Kecamatan Sajira.

Kedua Jembatan tersebut belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021. Pencatatan dalam Aset Tetap Jembatan akan dilakukan apabila dokumen pendukung serah terima CSR telah dilengkapi.

3.e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga, hewan dan tanaman. Saldo Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Per 31 Desember 2021 sebesar Rp191.088.911.148,62 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.99 sebagai berikut

Tabel 5.99
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021

NO	URAIAN		TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	2		3	4
1	Audited Tahun N-1		189.799.324.287,67	79.172.372.803,75
2	Koreksi Saldo Awal		(3.796.131.497,98)	0,00
	Jumlah		**186.003.192.789,69**	**79.172.372.803,75**
3	Mutasi Tambah			
	A.	Pengadaan	6.097.188.218,00	11.297.728.399,00
	B.	Hibah	0,00	0,00
	C.	Pindah Antar Perangkat Daerah	1.053.906.516,00	4.740.822.946,00
	D.	Koreksi	2.222.654,03	0,00
	E.	Reklas	253.635.400,00	243.872.707,92
	F.	Penetapan Status	0,00	0,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH		**7.409.452.788,03**	**16.282.424.052,92**
4	Mutasi Kurang			
	A.	Hibah	0,00	0,00
	B.	Pindah Antar Perangkat Daerah	1.053.906.516,00	4.740.822.946,00
	C.	Penghapusan	128.331.347,00	890.122.323,00
	D.	Koreksi	607.500,00	24.527.300,00
	E.	Reklas	1.140.889.066,10	0,00
	JUMLAH MUTASI KURANG		**2.323.734.429,10**	**5.655.472.569,00**
	Jumlah BMD Per 31 Desember		**5.085.718.358,93**	**10.626.951.483,92**
5	Penyajian Aset Tetap		191.088.911.148,62	189.799.324.287,67
	Pengurangan			
	A.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga/KSO	0,00	0,00
	B.	Ekstra Komptabel	0,00	0,00

NO	URAIAN		TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	2		3	4
	C.	Rusak Berat (Intra Komptabel)	0,00	0,00
	D.	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
	JUMLAH PENGURANG		**0,00**	**0,00**
6	Nilai BMD Sebagai Aset Tetap		191.088.911.148,62	189.799.324.287,67
7	Akumulasi Penyusutan		0,00	0,00
8	Nilai Buku Per 31 Desember		191.088.911.148,62	189.799.324.287,67

3.f. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruh kewajibannya sehingga belum dapat dimanfaatkan. Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Per 31 Desember 2021 sebesar Rp.8.994.137.288,00 yang dapat dilihat pada Tabel 5.100 sebagai berikut:

Tabel 5.100
Saldo Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan
per 31 Desember 2021

NO	URAIAN		TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	2		3	4
1	Audited Tahun N -1		25.977.181.061,00	20.113.580.709,00
2	Koreksi Saldo Awal		(2.004.532.368,00)	0,00
	Jumlah		**23.972.648.693,00**	**20.113.580.709,00**
3	Mutasi Tambah			
	A.	Pengadaan	0,00	0,00
	B.	Hibah	0,00	0,00
	C.	Pindah Antar Perangkat Daerah	0,00	0,00
	D.	Koreksi	-	396.666.000,00
	E.	Reklas	4.631.750.175,00	8.899.935.852,00
	F.	Penetapan Status	0,00	0,00
	JUMLAH MUTASI TAMBAH		**4.631.750.175,00**	**9.296.601.852,00**
4	Mutasi Kurang			
	A.	Hibah	0,00	0,00
	B.	Pindah Antar Perangkat Daerah	0,00	0,00
	C.	Penghapusan	399.313.550,00	0,00
	D.	Koreksi	0,00	0,00
	E.	Reklas	19.210.948.030,00	3.433.001.500,00
	JUMLAH MUTASI KURANG		**19.610.261.580,00**	**3.433.001.500,00**
	Jumlah BMD Per 31 Desember		**(14.978.511.405,00)**	**5.863.600.352,00**
5	Penyajian Aset Tetap		8.994.137.288,00	25.977.181.061,00
	Pengurangan			

NO	URAIAN		TAHUN 2021	TAHUN 2020
1	2		3	4
	A.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga/KSO	0,00	0,00
	B.	Ekstra Komptabel	0,00	0,00
	C.	Rusak Berat (Intra Komptabel)	0,00	0,00
	D.	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
	JUMLAH PENGURANG		**0,00**	**0,00**
6	**Nilai BMD Sebagai Aset Tetap**		**8.994.137.288,00**	**25.977.181.061,00**
7	Akumulasi Penyusutan		0,00	0,00
8	Nilai Buku Per 31 Desember		8.994.137.288,00	25.977.181.061,00

Adapun Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada Tabel 5.100 sebagai berikut:

Tabel 5.100
Saldo Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan
per 31 Desember 2021

Nomor			Uraian KDP	Tahun Perolehan	Harga Kontrak
No.	Kode Barang/ ID Barang/ ID Awal	Reg.			
1	2	3	4	5	6
1	1.3.6.01.01.01.003/ 1457573/ 1457573	0021	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2015	94,978,000.00
2	1.3.6.01.01.01.003/ 1457581/ 1457581	0023	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2016	102,333,000.00
3	1.3.6.01.01.01.003/ 1457582/ 1457582	0024	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2016	51,329,000.00
4	1.3.6.01.01.01.003/ 1457583/ 1457583	0025	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2016	103,039,000.00
5	1.3.6.01.01.01.003/ 1457584/ 1457584	0005	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2016	26,760,000.00
6	1.3.6.01.01.01.003/ 1462669/ 1462669	0005	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2017	39,120,000.00
7	1.3.6.01.01.01.003/ 1462670/ 1462670	0006	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2017	39,010,000.00
8	1.3.6.01.01.01.003/ 1462672/ 1462672	0008	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2017	32,465,000.00
9	1.3.6.01.01.01.003/ 1462680/ 1462680	0011	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2017	39,175,000.00
10	1.3.6.01.01.01.004/ 6840223/ 6840223	0004	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2018	214,674,708.00

Nomor			Uraian KDP	Tahun Perolehan	Harga Kontrak
No.	Kode Barang/ ID Barang/ ID Awal	Reg.			
1	2	3	4	5	6
11	1.3.6.01.01.01.004/ 8171352/ 8171352	0003	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2019	99,747,000.00
12	1.3.6.01.01.01.004/ 8171353/ 8171353	0004	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2019	48,378,000.00
13	1.3.6.01.01.01.004/ 8171354/ 8171354	0005	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2019	79,794,000.00
14	1.3.6.01.01.01.004/ 8171355/ 8171355	0006	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2019	81,279,000.00
15	1.3.6.01.01.01.004/ 8171424/ 8171424	0028	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2019	1,302,379,965.00
16	1.3.6.01.01.01.003/ 8765291/ 8765291	0001	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2020	19,815,000.00
17	1.3.6.01.01.01.003/ 8765292/ 8765292	0002	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2020	40,965,000.00
18	1.3.6.01.01.01.003/ 8778994/ 8778994	0005	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2020	45,513,700.00
19	1.3.6.01.01.01.003/ 8792946/ 8792946	0001	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2020	20,926,200.00
20	1.3.6.01.01.01.004/ 8925340/ 8925340	0002	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2020	3,032,585,040.00
21	1.3.6.01.01.01.004/ 8925341/ 8925341	0003	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2020	372,241,000.00
22	1.3.6.01.01.01.004/ 8925342/ 8925342	0004	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2020	240,835,000.00
23	1.3.6.01.01.01.003/ 9011557/ 9011557	0002	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2021	573,677,000.00
24	1.3.6.01.01.01.004/ 9212526/ 9212526	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	265,472,815.00
25	1.3.6.01.01.01.004/ 9212527/ 9212527	0002	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	585,249,800.00
26	1.3.6.01.01.01.004/ 9212528/ 9212528	0003	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	459,693,160.00
27	1.3.6.01.01.01.004/ 9293919/ 9293919	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	23,405,000.00

Nomor			Uraian KDP	Tahun Perolehan	Harga Kontrak
No.	Kode Barang/ ID Barang/ ID Awal	Reg.			
1	2	3	4	5	6
28	1.3.6.01.01.01.004/ 9295125/ 9106872	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	9,756,200.00
29	1.3.6.01.01.01.004/ 9295126/ 9106873	0002	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	9,756,200.00
30	1.3.6.01.01.01.004/ 9295127/ 9106874	0003	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	9,756,200.00
31	1.3.6.01.01.01.004/ 9295128/ 9106875	0004	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	9,756,200.00
32	1.3.6.01.01.01.004/ 9295129/ 9106876	0005	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	9,756,200.00
33	1.3.6.01.01.01.004/ 9295130/ 9106877	0006	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	68,665,000.00
34	1.3.6.01.01.01.004/ 9295131/ 9106878	0007	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	23,766,000.00
35	1.3.6.01.01.01.004/ 9295132/ 9106879	0008	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	68,951,000.00
36	1.3.6.01.01.01.004/ 9295133/ 9106880	0009	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	69,006,000.00
37	1.3.6.01.01.01.004/ 9295134/ 9088649	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	22,542,300.00
38	1.3.6.01.01.01.004/ 9295135/ 9105162	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	23,095,000.00
39	1.3.6.01.01.01.004/ 9295136/ 9105193	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	22,750,000.00
40	1.3.6.01.01.01.004/ 9295137/ 9106881	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	23,535,000.00
41	1.3.6.01.01.01.004/ 9295138/ 9106882	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	24,085,000.00
42	1.3.6.01.01.01.004/ 9295139/ 9106883	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	24,595,000.00
43	1.3.6.01.01.01.004/ 9295140/ 9106884	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	23,348,000.00
44	1.3.6.01.01.01.004/ 9295141/ 9106885	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	23,238,000.00

Nomor			Uraian KDP	Tahun Perolehan	Harga Kontrak
No.	Kode Barang/ ID Barang/ ID Awal	Reg.			
1	2	3	4	5	6
45	1.3.6.01.01.01.004/ 9295142/ 9106886	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	24,283,000.00
46	1.3.6.01.01.01.004/ 9295143/ 9106887	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	23,535,000.00
47	1.3.6.01.01.01.004/ 9295144/ 9106888	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	23,248,000.00
48	1.3.6.01.01.01.004/ 9295145/ 9106889	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	23,964,000.00
49	1.3.6.01.01.01.004/ 9295146/ 9106890	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	23,348,000.00
50	1.3.6.01.01.01.004/ 9295147/ 9107027	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	23,964,000.00
51	1.3.6.01.01.01.004/ 9295148/ 9107028	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	22,942,000.00
52	1.3.6.01.01.01.004/ 9295149/ 9107029	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	22,750,000.00
53	1.3.6.01.01.01.004/ 9295150/ 9107030	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	23,238,000.00
54	1.3.6.01.01.01.004/ 9295151/ 9107031	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	22,745,000.00
55	1.3.6.01.01.01.004/ 9295152/ 9107032	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	23,405,000.00
56	1.3.6.01.01.01.004/ 9295153/ 9107034	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	23,405,000.00
57	1.3.6.01.01.01.004/ 9295154/ 9107035	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	23,348,600.00
58	1.3.6.01.01.01.004/ 9295155/ 9107036	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	23,348,000.00
59	1.3.6.01.01.01.004/ 9295156/ 9107037	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	23,535,000.00
60	1.3.6.01.01.01.004/ 9295157/ 9107038	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	24,010,000.00
61	1.3.6.01.01.01.004/ 9295158/ 9107039	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	22,745,000.00

Nomor			Uraian KDP	Tahun Perolehan	Harga Kontrak
No.	Kode Barang/ ID Barang/ ID Awal	Reg.			
1	2	3	4	5	6
62	1.3.6.01.01.01.004/ 9295159/ 9107040	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	23,238,000.00
63	1.3.6.01.01.01.004/ 9295160/ 9107041	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	23,405,000.00
64	1.3.6.01.01.01.004/ 9295161/ 9107042	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	23,964,000.00
65	1.3.6.01.01.01.004/ 9295162/ 9107043	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	24,519,000.00
Jumlah Harga					**8.994.137.288,00**

3.g. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.472.728.794.707,73. Nilai akumulasi penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,Irigasi, dan Jaringan. dan Aset Tetap Lainnya (kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan). Rincian dari akumulasi penyusutan aset tetap dapat dilihat pada tabel 5.101 sebagai berikut:

Tabel 5.101
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2021

NO	URAIAN	AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2021	AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2020
1	2	3	4
1	Peralatan dan Mesin	533.440.545.639,42	477.853.432.516,69
2	Gedung dan Bangunan	488.328.656.964,83	437.995.615.048,73
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	3.450.959.592.103,48	3.170.575.892.459,17
JUMLAH		**4.472.728.794.707,73**	**4.086.424.940.024,65**

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo Aset Lainnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember

2021 sebesar Rp22.490.026.087,99. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 5.102 sebagai berikut:

Tabel 5.102
Rincian Aset
Lainnya Per 31 Desember 2021

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	2	3	4
1	Tagihan Jangka Panjang	409.017.500,00	484.992.500,00
2	Penyisihan Tagihan Jangka Panjang	(356.881.800,00)	(357.261.675,00)
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.190.946.000,00	6.190.946.000,00
4	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(6.190.946.000,00)	(6.190.946.000,00)
5	Aset Tak Berwujud	1.728.063.625,53	1.198.869.000,00
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.196.052.490,38)	(187.086.296,93)
7	Aset Lain-Lain	70.212.833.451,38	55.946.279.740,35
8	Akumulasi Penyusutan Rusak Berat	(48.306.954.189,54)	(33.545.131.876,97)
JUMLAH		**22.490.026.087,99**	**23.540.661.391,45**

4.a Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**.** Tagihan Jangka Panjang pada Tahun 2021 sebesar Rp409.017.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp75.975.000,00 atau 15,67% dibandingkan dengan Piutang Tahun 2020 sebesar Rp484.992.500,00 dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 5.103 sebagai berikut:

Tabel 5.103
Rincian Tagihan Jangka Panjang
Per 31 Desember 2021

NO	URAIAN	SALDO AWAL 2020	MUTASI		SALDO AKHIR 2021
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Tagihan Penjualan Angsuran	228.657.500,00	0,00	0,00	228.657.500,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	256.335.000,00	0,00	75.975.000,00	180.360.000,00
JUMLAH		**484.992.500,00**	**23.565.000,00**	**83.248.212,00**	**409.017.500,00**

Penyisihan Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar

Rp356,881,800.00 dapat dilihat pada Tabel 5.104 berikut:

Tabel 5.104
Rincian Penyisihan Tagihan Jangka Panjang
Per 31 Desember 2021

NO	JENIS TAGIHAN JANGKA PANJANG	NILAI TAGIHAN JANGKA PANJANG	PENYISIHAN TAGIHAN JANGKA PANJANG				TOTAL PENYISIHAN TAGIHAN JANGKA PANJANG
			MACET (> 12 BULAN)	DIRAGUKAN (3-12 BULAN)	KURANG LANCAR (1 – 3 BULAN)	LANCAR (0 – 1 BULAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tagihan Penjualan Angsuran	228.657.500,00	170.891.500,00		5.622.600,00	7.700,00	176.521.800,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	180.360.000,00	180.360.000,00	0,00	0,00	0,00	180.360.000,00
Jumlah		**409.017.500,00**	**351.251.500,00**	**0,00**	**5.622.600,00**	**7.700,00**	**356.881.800,00**

4.b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga dilakukan oleh Pemerintah Daerah denganpihak lain dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah yang dimiliki dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Pada per 31 Desember 2021 dengan nilai perolehan sebesar Rp6.190.946.000,00 dengan akumulusai penyusutan sebesar Rp6.190.946.000,00. Saldo Kemitraan tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan saldo per 31 Desember 2020.

Kemitraan merupakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk Kerjasama Operasional (KSO) Dinas Pertanian dan Perkebunan berupa Hand Traktor kepada Kelompok Tani sebanyak 331 unit. Dari 331 unit yang telah diinventarisir sebanyak 161 unit dengan rincian kondisi barang saat ini sebanyak 123 unit rusak berat, 33 unit baik, 2 unit tanpa keterangan kondisi, 1 unit hilang (ada berita surat kehilangan dari Kepolisian), 1 unit belum ditemukan, 1 unit telah dijual oleh mitra. Sedangkan sebanyak 87 (331 – 161) unit belum dapat diinventarisasi.

4.c. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non - moneter yang tidak mempunyai wujud fisik. Nilai perolehan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 berupa Software sebesar Rp1.728.063.625,53. Terhadap aset tak berwujud tersebut dilakukan amortisasi kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Perhitungan Amortisasi dilakukan terhadap aset

tidak berwujud dengan menggunakan metode garis lurus. Saldo amortisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.196.052.490,38 sehingga Nilai Buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp532.011.135,15, jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp1.198.869.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp529.194.625,53 atau 44,14%.

4.d. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah karena kondisinya yang rusak berat dan piutang yang akan dilakukan proses penghapusan yang direklas dari Piutang ke Aset Lain – lain pada Tahun 2019. Nilai Perolehan Aset Lain – lain Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 sebesar Rp70.212.833.451,38 dan penyusutan Aset Lain – lain sebesar Rp48.306.954.189,54. Nilai penyusutan aset lain-lain merupakan nilai penyusutan aset tetap dengan keterangan kondisi rusak berat. Rincian Aset lain-lain dengan kondisi rusak berat dapat dilihat pada Tabel 5.105 berikut:

Tabel 5.105
Rincian Aset Rusak Berat
Per 31 Desember 2021

KIB	2021		2020		KENAIKAN / (PENURUNAN)	
	Harga Perolehan	Akumulasi penyusutan	Harga Perolehan	Akumulasi penyusutan	Harga Perolehan	Akumulasi penyusutan
1	2	3	4	5	6=2-4	7=3-5
Peralatan dan Mesin	22,762,027,636.13	17,663,673,006.75	22,837,173,426.10	17,699,484,879.03	(75,145,789.97)	(35,811,872.28)
Gedung dan Bangunan	20,841,406,579.77	8,925,503,168.98	21,069,940,050.77	8,862,788,830.38	(228,533,471.00)	62,714,338.60
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,359,369,754.00	2,605,402,873.83	4,334,369,754.00	2,581,600,790.50	25,000,000.00	23,802,083.33
Aset Tetap Lainnya	3,137,654,332.48	0,00	3,303,539,132.48	0,00	(165,884,800.00)	-
JUMLAH	**51,100,458,302.38**	**29,194,579,049.56**	**51,545,022,363.35**	**29,143,874,499.91**	**(444,564,060.97)**	**50,704,549.65**

Aset Lain -lain terdiri dari aset tetap yang akan dihapuskan sebesar Rp51.100.458.302,38, piutang yang akan dilakukan proses penghapusan sebesar Rp4.401.257.377,00 dan aset tetap berupa jalan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Propinsi sebesar Rp14.711.117.772,00. Aset Lain – lain yang akan dihapuskan terdiri dari aset

Rincian piutang yang akan dilakukan proses penghapusan sebesar

Rp4.401.257.377,00 yaitu

1 Badan Pendapatan Daerah merupakan piutang Pajak Reklame sebesar Rp37.850.073,00 merupakan Pengakuan Piutang Tahun 2007 sampai dengan 2014;
2 PPKD merupakan Piutang Lainnya sebesar Rp60.727.900,00 adalah Piutang pada Pihak Ketiga kerena kelebihan Pembayaran pada Tahun 2015;
3 Dinas Kesehatan (RSUD dr. Adjidarmo) merupakan Piutang Pelayanan Kesehatan sebesar Rp1.622.111.938,00 dari Pengakuan Piutang Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017;
4 Dinas PUPR merupakan Piutang Retribusi Menara sebesar Rp89.427.616,00 dan Sewa Alat Berat sebesar Rp217.705.000,00;
5 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi merupakan piutang Dana bergulir Penempatan TKI sebesar Rp465.479.000,00 dari pengakuan piutang Tahun 2006;
6 Dinas Koperasi dan UMKM merupakan piutang pinjaman bergulir kepada Badan koperasi dan UMKM perorangan sebesar Rp148.851.604,00;
7 Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan merupakan piutang Kredit Peduli Lebak (KPL) sebesar Rp1.084.667.846,00. Pemerintah Kabupaten Lebak sejak Tahun 2017 sampai dengan 2019 telah melakukan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk memproses penyelesaian Piutang Program Kredit Peduli Lebak (KPL). Hasil pelaksanaan proses penyelesaian pada Tahun 2019 yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Lebak Nomor 500/Kep.407-Ekon/2019 tentang Penetapan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat Program Kredit Peduli Lebak Tahun 2019.
8 Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan piutang RMP sebesar Rp674.436.400,00 adalah Piutang Penjualan Beras kepada masyarakat pada Tahun 2006 dan 2007.

5.1.4.2 Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Sampai dengan 31 Desember 2021 Pemerintah KabupatenLebak mempunyai kewajiban jangka pendek sebesar Rp21.963.855.388,59 . Rincian dari Kewajiban Jangka Pendek dapat dilihat pada Tabel 5.106 sebagai berikut:

Tabel 5.106
Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2021

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	2	3	4
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	738.797.114,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	771.010.030,09	861.451.175,67
3	Utang Belanja	20.454.048.244,50	22.462.305.912,00
JUMLAH		**21.963.855.388,59**	**23.323.757.087,67**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 sebesar Rp738.797.114,00 merupakan utang pajak yang belum di setor oleh Bendahara BOS sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri dari:

- Utang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp504,625,765.00 ;
- Utang Pajak Penghasilan sebesar Rp115.565.445;
- Utang Pajak Daerah Restoran sebesar Rp118.605.904;

Seluruh Utang PFK tersebut selurhnya telah disetorkan ke Kas Negara dan Kas Daerah pada periode bulan Februari 2022.

Pendapatan diterima di muka Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 sebesar Rp771.010.030,09 terdiri dari:

- Badan Pendapatan Daerah atas Pajak Reklame sebesar Rp535.322.113,42;
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas sewa tanah untuk tower telekomunikasi oleh PT. XL Axiata Tbk. sebesar Rp75.000.000,00 dan Raja Udang sebesar Rp133.021.250,00;
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas sewa lahan untuk ATM BNI sebesar Rp22.666.666,67 dan ATM BCA di Pasar Kota Rangkasbitung sebesar Rp5.000.000,00;

Utang Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 sebesar Rp20.454.048.244,50. Rincian Utang Belanja dapat dilihat pada tabel 5.107 sebagai berikut:

Tabel 5.107
Utang Belanja Per 31 Desember 2021

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	2	3	4
1	Belanja Tagihan Listrik	1.068.271.737,00	1.077.532.469,00
2	Belanja Tagihan Air	6.400.860,00	3.378.550,00
3	Belanja Tagihan Telepon	12.677.647,00	47.746.228,00
4	Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	175.167.594,00	100.727.578,00
5	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	480.000,00	0,00
6	Belanja Jasa Tenaga Ahli	423.500.000,00	863.100.000,00
7	Tenaga Pendidikan	1.781.515.000,00	0,00
8	Tenaga Kesehatan	1.013.425.000,00	0,00
9	Tenaga Laboratorium	21.800.000,00	0,00
10	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	24.240.000,00	0,00
11	Tenaga Arsip dan Perpustakaan	1.000.000,00	0,00
12	Tenaga Administrasi	1.671.133.830,00	0,00
13	Tenaga Operator Komputer	191.000.000,00	0,00
14	Tenaga Kebersihan	404.202.000,00	0,00
15	Tenaga Keamanan	143.356.000,00	0,00
16	Tenaga Supir	39.645.000,00	0,00
17	Pelayanan Perpustakaan	1.250.000,00	0,00
18	Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	16.000.000,00	0,00
19	Jasa Konsultasi Survei Permukaan Tanah	2.400.000,00	0,00
20	Belanja Jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap	0,00	4.310.759.450,00
21	Belanja Premi Asuransi	0,00	269.910.130,00
22	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	292.169.930,00	0,00
23	Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	17.828.160,00	0,00
24	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	22.285.200,00	0,00
25	Belanja Barang dan Jasa PPK BLUD	9.646.059.211,00	0,00
26	Belanja Barang dan Jasa PPK BLUD RSUD Adjidarmo	0,00	14.640.441.344,00

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	2	3	4
27	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat / Pihak ketiga	0,00	867.933.615,00
28	Belanja Barang dan Jasa PPK BLUD Puskedmas	0,00	253.476.548,00
29	Belanja Jasa Tenaga Terampil/Terlatih	0,00	27.300.000,00
30	Belanja Modal BOS	1.700.000,00	0,00
31	Bagi Hasil Pajak	3.470.296.863,30	0,00
32	Bagi Hasil Retribusi	6.244.212,20	0,00
JUMLAH		**20.454.048.244,50**	**22.462.305.912,00**

5.1.4.3 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.589.653.219.828,58 jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp70.279.579.233,77 atau 1,56% dari ekuitas sebelumnya sebesar Rp4.519.373.640.594,82. Hal ini diakibatkan dari adanya koreksi kas, koreksi piutang, koreksi penyisihan piutang, koreksi akumulasi penyusutan, koreksi atas aset tanah, koreksi atas aset peralatan mesin, koreksi atas aset gedung dan bangunan, koreksi atas aset jalan irigasi dan jembatan, koreksi atas aset tetap lainnya, koreksi atas aset lainnya, dan RK PPKD.

5.1.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar atau penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun Anggaran 2021 yang diklasifikasikan berdasarkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo akhir Kas Kabupaten Lebak Tahun 2021 adalah sebesar Rp288.825.778.827,05, mengalami penurunan sebesar Rp8.013.065.296,00 atau 2,70% jika dibandingkan dengan Saldo Akhir Kas Tahun 2020 sebesar Rp296.838.844.123,05.

Terdapat perbedaan Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas dengan Kas di Neraca sebesar Rp(16.291.818,00) dikarenakan adalah Piutang Belanja Kecamatan Sobang Tahun 2021 sebesar Rp(23.565.000,00), Piutang Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 sebesar Rp7.273.212,00, Bank BJB kurang input pengembalian uang persediaan Dinas Pendidikan tanggal 24 Desember 2021 sebesar

Rp30,00.

5.1.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp264.379.727.984,00 mengalami kenaikan Rp51,246,862,936.00 atau 24,04% jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp213.132.865.048,00. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas operasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.283.233.412.559,00 merupakan kas masuk dari:
    a. Pendapatan daerah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp2.643.719.867.031,00;
    b. Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp(1.796.536.941,00);
    c. Kas dibendahara penerimaan Tahun Anggaran 2021 yang belum disetorkan ke Kas Daerah terdiri dari Dinas Perhubungan sebesar Rp(48.000,00) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp(9.927.000,00).
    d. Kas dibendahara penerimaan Tahun Anggaran 2020 yang disetorkan ke Kas Daerah Pada Tahun 2021 terdiri dari Dinas Perhubungan sebesar Rp1.014.000,00, Dinas Pariwisata sebesar Rp2.500.000,00, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp3.653.000,00, dan Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.334.095,00.
    e. Pendapatan Lain-lain Dari Dana BOS dan Pendapatan BLUD sebesar Rp(358.688.443.626,00).
2. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.018.853.684.575,00 merupakan kas keluar dari:
    a. Laporan Realisasi Anggaran sebesarRp1.915.912.290.235,00;
    b. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp24.421.516.341,00;
    c. Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa sebesar Rp15.998.934.500,00;
    d. Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp405.279.350.618,00;

e. Belanja Pegawai BLUD, Belanja Pegawai Barang dan Jasa BLUD dan BOS sebesar Rp(342.758.407.119,00).

5.1.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 mengalami defisit sebesar Rp(254.912.296.989,00). Arus Kas Dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi terdiri dari:

1. Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi sebesar Rp1.796.536.941,00 merupakan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahka (hasil penjualan peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya) Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang SahPada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp1.796.536.941,00;
2. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi sebesar Rp256.708.833.930,00 merupakan Belanja Modal sebesar Rp247.708.833.930,00 dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah sebesar Rp9.000.000.000,00

5.1.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp6.400.000,00. Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp6.400.000,00, Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00.

5.1.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran Pendapatan, Beban, dan Pembiayaan Pemerintah Daerah. Saldo Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

Rincian saldo akhir Arus Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari penjumlahan Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi, Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan dan Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris terdapat kenaikan kas sebesar Rp9.473.830.995,00

kemudian ditambahkan dengan Saldo Awal Kas di BUD/SiLPA LRA Tahun 2020 sebesar Rp209.798.226.340,00 sehingga Saldo Akhir Kas di BUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp219.272.057.335,00;

2. Saldo Akhir Kas sebesar Rp288.825.778.827,05 terdiri dari Kas di Kas Daerah sebesar Rp219.272.057.335,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp9.975.000,00, Kas di BLUD sebesar Rp68.379.564.093,85, Kas di Kas Dana BOS sebesar Rp425.385.284,20, Kas di Kas Lainnya Sebesar Rp738.797.114,00.

5.1.6 Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

5.1.6.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp296.838.844.123,05.

5.1.6.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih merupakan SiLPA Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 yang telah digunakan dan dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran dan sebagai Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp296.833.959.123,05. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih tidak sebesar SILPA Tahun Anggaran 2020 atau Saldo Anggaran Lebih Awal dikarenakan ada koreksi sisa kas dana Biaya Operasiaonal Sekolah (BOS) Tahun 2020 sebesar Rp4.885.000,00.

5.1.6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 sebesar Rp288.086.981.713,05,dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Surplus Rp 253.022.590,00;
2. Pembiayaan Netto Rp287.833.959.123,05;
3. SiLPA Tahun berjalan Rp288.086.981.713,05.

5.1.6.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar SiLPA yaitu Rp288.086.981.713,05.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan rangkaian sejarah pembentukannya ditetapkan bahwa Hari Jadi Kabupaten Lebak adalah tanggal 2 Desember 1828, dengan dasar pemikiran dan pertimbangan berdasarkan Staatsblad Nomor 81 Tahun 1828 yang merupakan titik awal pembentukan 3 (tiga) kabupaten di wilayah bekas Kesultanan Banten dan nama Lebak mulai diabadikan menjadi nama kabupaten dengan batas-batas wilayah yang lebih jelas sebagaimana tercantum dalam pembagian wilayah ke dalam (Kewedanaan dan Kecamatan).

Walaupun terjadi perubahan nama dan penataan kembali wilayah *District* dan *Onderdistrict*, wilayah Kabupaten Lebak dalam perkembangan selanjutnya sebagaimana tertuang dalam Staatsblad Nomor 81 Tahun 1828, Staatsblad Nomor 226 Tahun 1828, Staatsblad Nomor 381 Tahun 1925 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, merupakan wilayah Kabupaten Lebak sebagaimana adanya saat ini.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebak beserta seluruh aparat serta dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Lebak melalui wakil-wakilnya di DPRD, telah berhasil menentukan Hari Jadi Kabupaten Lebak dengan lahirnya Keputusan DPRD Nomor 14/172.2/D-II/SK/X/1986, yang memutuskan untuk menerima dan menyetujui bahwa Hari Jadi Kabupaten Lebak jatuh pada tanggal 2 Desember 1828 beserta rancangan peraturan daerahnya.

Dalam perkembangan selanjutnya berkenaan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, maka Wilayah Kabupaten Lebak yang semula masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat menjadi masuk ke dalam wilayah Provinsi Banten.

Kabupaten Lebak adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Banten, dengan Ibu kotanya adalah Rangkasbitung. Kabupaten Lebak berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di sebelah utara, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Pandeglang di sebelah barat. Secara geografi Kabupaten Lebak terletak pada posisi 105º25' -106º30' Bujur Timur dan 6º18' - 7º00' Lintang Selatan, dengan luas wilayah daratan 330.507,18 Ha. Sedangkan luas wilayah laut yang menjadi kewenangan Kabupaten Lebak yaitu

73,3Km² dengan panjang pantai sekitar 91,42 Km². Bagian utara Kabupaten Lebak berupa dataran rendah, sedang di bagian selatan merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Halimun di ujung tenggara, yakni di perbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

Kabupaten Lebak memiliki topografi berupa pantai, dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian wilayah antara 0 - 1929 meter diatas permukaan air laut. Bagian Utara dan Barat Kabupaten Lebak berupa dataran rendah hingga perbukitan bergelombang dan dibagian Selatan merupakan dataran rendah dari pesisir Samudera Hindia. Sedangkan wilayah Timur hingga Tenggara merupakan perbukitan hingga pegunungan yang merupakan bagian Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung yang ada di Kabupaten Lebak antara lain Gunung Halimun, Gunung Kendeng dan Gunung Endut.

Secara administratif Kabupaten Lebak terbagi atas 28 Kecamatan, 340 Desa dan 5 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Cibeber dengan luas 40.096,41 Ha (12,13%) diikuti oleh Kecamatan Cimarga dengan luas 18.752,65 Ha (5,67%) dan Kecamatan Panggarangan dengan luas 17.715,51 Ha (5,36%). Sedangkan untuk Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kalanganyar dengan luas 2.859,34 Ha (0,87%). Jika dilihat dari kondisi jarak ibu kota Kecamatan ke Kota Rangkasbitung sebagai ibu kota Kabupaten Lebak, Kecamatan paling jauh adalah Kecamatan Cilograng sejauh 160 Km dan Kecamatan paling dekat adalah Kecamatan Rangkasbitung dengan jarak 1 Km.

Di Kabupaten Lebak terdapat sungai terpanjang di Provinsi Banten yaitu Sungai Ciujung yang mengalir ke arah utara menuju Laut Jawa. Sedangkan sungai yang melintasi Kabupaten Lebak yang bermuara ke Samudera Hindia diantaranya Sungai Cibareo, Sungai Cisawarna, Sungai Cimadur, Sungai Cisiih, Sungai Cimancak, Sungai Cihara, Sungai Cipageran dan Sungai Cilangkahan.

Penggunaan Lahan di Kabupaten Lebak secara umum didominasi oleh Perkebunan (rakyat dan swasta), persawahan (irigasi dan tadah hujan), pertambangan (galian pasir dan batu), sebagian kecil kawasan perumahan terutama wilayah Kecamatan Maja dan Rangkasbitung serta kawasan industri di Kecamatan Rangkasbitung dan Bayah.

Kabupaten Lebak memiliki 170 objek daya tarik wisata (100 wisata alam, 25 wisata budaya, 17 wisata religi dan 28 wisata buatan) dan telah menetapkan enam objek wisata sebagai destinasi pariwisata unggulan atau *Six Fantastic* yang masuk dalam kalender wisata tahunan nasional yaitu Seren Tahun Kasepuhan Citorek, Kebun Teh Cikuya, Baduy, Pantai Sawarna, Pantai Bagedur dan Museum Multatuli. Selain obyek wisata, Kabupaten Lebak juga memiliki 12 jenis Seni Motif Batik Lebak yang mencerminkan budaya Daerah Lebak yaitu motif Seren Taun, Sawarna, Sadulur, Caruluk Saruntuy, Rangkasbitung, Leuit Sijimat, Gula Sakojor, Angklung Buhun, Batik Kahuripan Baduy, Pare Sapocong, Lebak Bertauhid dan Kalimaya.

Berdasarkan pertimbangan karakteristik potensi dan kebutuhan daerah maka ditetapkan Perangkat Daerah yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan urusannya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak terdiri dari 2 (Dua) Sekretariat, 1 (satu) Inspektorat Daerah, 23 (dua puluh tiga) Dinas, 5 (lima) Badan, 1 (satu) RSUD, 28 (dua puluh delapan) Kecamatan, 5 (lima) Kelurahan, 340 (tiga ratus empat puluh) Desa dan 2 (dua) BUMD.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Lebak pada Tahun 2021 memiliki PNS sebanyak 8951 pegawai. Uraian secara terinci PNS berdasarkan Pendidikan, Golongan dan Eselon dapat dilihat pada tabel - tabel berikut:

Tabel 6.1
PNS Kabupaten Lebak Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PNS		TOTAL
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	SD	121	48	169
2	SMP	88	16	104
3	SMA	775	316	1091
4	D-1	7	7	14
5	D-II	181	136	317
6	D-III	161	484	645
7	D-IV	38	168	206
8	S-1	2.771	2.970	5.741
9	S-2	452	210	662
10	S-3	2	-	2
JUMLAH		**4.596**	**4.355**	**8.951**

Sumber : BKPSDM Kab. Lebak

Tabel 6.2
PNS Kabupaten Lebak Berdasarkan Golongan Tahun 2021

NO	PANGKAT	GOL. RUANG	JUMLAH PNS		TOTAL
			LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5	6
1	Pembina Utama	IV/e	-	-	-
	Pembina Utama Madya	IV/d	2	1	3
	Pembina Utama Muda	IV/c	33	10	43
	Pembina Tk. I	IV/b	414	365	779
	Pembina	IV/a	841	730	1.571
Jumlah Golongan IV			**1.290**	**1.106**	**2.396**
2	Penata Tk.I	III/d	569	560	1.129
	Penata	III/c	595	776	1.371
	Penata Muda Tk. I	III/b	659	788	1.447
	Penata Muda	III/a	621	606	1.229
Jumlah Golongan III			**2.444**	**2.732**	**5.176**
3	Pengatur Tk.I	II/d	184	72	256
	Pengatur	II/c	251	365	616
	Pengatur Muda Tk.I	II/b	214	68	282
	Pengatur Muda	II/a	74	7	81
Jumlah Golongan II			**723**	**512**	**1.235**
4	Juru Tk.I	I/d	38	2	40
	Juru	I/c	4	3	4
	Juru Muda Tk. I	I/b	97	0	100
	Juru Muda	I/a	0	0	0
Jumlah Golongan I			**139**	**5**	**144**
JUMLAH			**4.596**	**4.355**	**8.951**

Sumber : BKPSDM Kab. Lebak

Tabel 6.3
PNS Kabupaten Lebak Berdasarkan Eselon Tahun 2021

INSTANSI	P N S									
	ESELON						NON ESELON		JUMLAH	
	II		III		IV					
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak	27	2	187	49	428	179	3.954	4.125	4.596	4.355
JUMLAH	**29**		**236**		**607**		**8.079**		**8.951**	

Sumber : BKPSDM Kab. Lebak

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak melalui Dinas Penanaman Modal terus melakukan peningkatan pelayanan perijinan sehingga menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lebak. Setelah Online Single Submission (OSS) RBA / Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak menerbitkan 58 Jenis

Perizinan (SIMPONIE dan OSS RBA)

Perizinan sudah berbasis risiko dikelompokkan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan meliputi sektor diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Informasi lainnya adalah sebagai berikut:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha Berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha;
2. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) atau disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS atau Lembaga OSS adalah lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal;
4. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi 16 sektor :
   a. Kelautan dan Perikanan; b. Pertanian; c. Lingkungan Hidup dan Kehutanan, d. Energi dan Sumber Daya Mineral; e. Ketenaganukliran; f. Perindustrian; g. Perdagangan; h. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; i. Transportasi; j. Kesehatan, Obat, dan Makanan, k. Pendidikan dan Kebudayaan, l. Pariwisata, m. Keagamaan, n; Pos, Telekomunikasi, Penyiaran dan Sistem dan Transaksi Elektronik; o. Pertanahan dan Keamanan, dan p. Ketenagakerjaan (Pasal 6 ayat 2 PP Nomor 5 Tahun 2021).

Pada Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak menerbitkan 58 Jenis Perizinan (SIMPONIE dan OSS RBA) dengan jumlah izin sebanyak 2.913 dan Rincian jenis dan jumlah ijin yang diterbitkan dapat dilihat pada Tabel 6.4 berikut:

Tabel 6.4
Penerbitan Perijinan Tahun 2021

NO	JENIS PERIZINAN	JUMLAH IZIN TERBIT
1	2	3
1	Surat Izin Praktik Tenaga Kebidanan	439
2	Surat Izin Praktik Tenaga Keperawatan	335
3	Surat Izin Praktik Dokter Internsip	149
4	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	133
5	Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang (IPPR)	97

NO	JENIS PERIZINAN	JUMLAH IZIN TERBIT
1	2	3
6	Surat Izin Praktik Dokter Umum	93
7	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	86
8	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	78
9	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Pedesaan dan Perkotaan (SK Trayek Baru)	109
10	Data Penerbitan Izin PAUD	100
11	Surat Izin Praktik Bidan Mandiri	36
12	Data Persetujuan / Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	22
13	Data Persetujuan PKPLH :	85
	a. Data Persetujuan PKPLH (Simponie)	31
	b. Data Persetujuan PKPLH (OSS RBA)	54
14	Surat Izin Praktik Tenaga Keperawatan Mandiri	28
15	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis	24
16	Surat Izin Praktik Dokter Gigi	19
17	Data Persetujuan Komitmen Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)	17
18	Surat Izin Praktik Dokter Umum Mandiri	15
19	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM)	13
20	Data Penerbitan Surat Izin Apotek (SIA) :	18
	a. Data Penerbitan Surat Izin Apotek (Simponie)	12
	b. Data Penerbitan Surat Izin Apotek (OSS RBA)	6
21	Data Penerbitan Izin Operasional Klinik :	22
	a. Data Penerbitan Izin Operasional Klinik (Simponie)	11
	b. Data Penerbitan Izin Operasional Klinik (OSS RBA)	11
22	Data Persetujuan Komitmen Surat Izin Usaha Peternakan	9
23	Data Persetujuan Komitmen Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	8
24	Surat Izin Praktik Radiografer	8
25	Data Persetujuan Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Sementara Limbah B3	7
26	Data Persetujuan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)	8
27	Data Persetujuan Komitmen Izin PKKPR :	59
	a. Data Persetujuan Komitmen Izin PKKPR (Simponie)	6
	b. Data Persetujuan Komitmen Izin PKKPR (OSS RBA)	53
28	Data Penerbitan Izin PKBM	6
29	Data Persetujuan Komitmen Izin Reklame	5
30	Data Penerbitan Izin Toko Obat :	7

NO	JENIS PERIZINAN	JUMLAH IZIN TERBIT
1	2	3
	a. Data Penerbitan Izin Toko Obat (Simponie)	5
	b. Data Penerbitan Izin Toko Obat (OSS RBA)	2
31	Surat Izin Praktik Teknisi Tranfusi Darah	4
32	Surat Izin Praktik Fisikawan Medik	3
33	Surat Izin Praktik Sanitasi Lingkungan	3
34	Surat Izin Praktik Terapi Gigi dan Mulut	3
35	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi Nutrisionis	3
36	Data Penerbitan Izin LKP	3
37	Data Penerbitan Izin SMP	3
38	Surat Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (SIPPMIK)	2
39	Data Persetujuan Komitmen Surat Izin usaha Perdagangan	2
40	Data Persetujuan Komitmen Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya	2
41	Data Penerbitan Izin Produksi Rumah Tangga	2
42	Data Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Gigi Mandiri	2
43	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi Dietisien	2
44	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien	2
45	Surat Izin Praktik Penata Anastesi	2
46	Data Persetujuan Komitmen Izin Pendirian LPK	1
47	Surat Izin Praktik Promosi Kesehatan	1
48	Surat Izin Sertifikat Standar Klinik	1
49	Data Penerbitan Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Mandiri	1
50	Surat Izin Praktik Fisioterapis	1
51	Surat Izin Praktik Elektromedis	1
52	Data Penerbitan Izin Operasional Rumah Sakit	1
53	Data Perizinan Izin Puskesmas (OSS RBA)	1
54	Surat Izin Praktik Dokter Hewan	1
55	Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis	1
56	Data Perizinan SPPL (OSS RBA)	636
57	Data Perizinan Sertifikat Standar (OSS RBA)	187
58	Data Perizinan NIB (OSS RBA)	7
JUMLAH		**2.913**

Sumber : DPM Kab. Lebak

Sedangkan untuk Non perizinan Dinas Penanaman Modal pada Tahun 2021 hanya menerbitkan 1 jenis perijnan yaitu Surat Rekomendasi Non perizinan sebanyak 17.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak pada Tahun 2020 banyak menghasilkan prestasi dengan mendapatkan berbagai penghargaan baik tingkat provinsi maupun nasional. Adapun penghargaan yang diperoleh Kabupaten Lebak selama Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 6.5 berikut:

Tabel 6.5
Prestasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021

NO	PRESTASI DAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	PENERIMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Piagam Penghargaan HPN Award 2021 kategori Abdi Negara Mitra Strategis Per	Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lebak dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lebak	Hj. Iti Octavia Jayabaya - Bupati Lebak	Sosok Pimpinan Daerah yang Dinilai Paling Terbuka Dalam Memberikan Layanan Informasi Publik Kepada Wartawan
2	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam LKPD TA 2020	BPK RI	Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak	Opini BPK RI pada Penyerahan Laporah Hasil Pemerikasaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020
3	Piala Juara 2 Anugerah Pesona Indonesia (API) 2020 kategori Festival Pariwisata Terpopuler	Kementerian Pariwisata RI	Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak	Minuman Tradisional Terpopuler untuk Sirup Nila Aren
4	Piala dan Piagam Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2021 kategori Madya	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak	Sebagai Kabupaten layak Anak Peringkat MADYA tahun 2021
5	Piagam Penghargaan BKN Award 2021 Pemerintah Kabupaten Tipe A Peringkat II	Kepala BKN RI	Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak	Atas capaian dalam Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun
6	Piala dan Piagam Penghargaan Top Pembina BUMD 2021	Top Business Top BUMD Awards 2021	Hj. Iti Octavia Jayabaya - Bupati Lebak	Atas Peran & Kontribusi dalam Membina & Mendukung BUMD
7	Piagam Tanda Kehormatan Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional	Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional	Hj Hj. Iti Octavia Jayabaya - Bupati Lebak	Menganugrahkan Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Tani Nelayan Pratama atas Jasa-Jasa yang besar terhadap kemajuan Petani – Nelayan

NO	PRESTASI DAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	PENERIMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8	Sertifikat Penghargaan	a.n. Pemerintah Republik Indonesia - Menteri Keuangan	Kabupaten Lebak	Atas Keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2020 dengan Capaian WTP
9	Plakat Penghargaan	Pemerintah Republik Indonesia	Pemerintah Kabupaten Lebak	Atas Capaian Opini WTP Minimal 5x Berturut-turut Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020
10	Piala dan Piagam Penghargaan	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Kabupaten Lebak	Sebagai Kabupaten Penerima Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 Kategori Madya
11	Piala Penghargaan	Bank Indonesia	Pemerintah Kabupaten Lebak	Peringkat 1 Implementasi ETPD Terbaik Provinsi Banten 2021
12	Sertifikat Eliminasi Filariasis	Menteri Kesehatan	Kabupaten Lebak	Kabupaten Lebak telah memenuhi persyaratan untuk mendapat Sertifikat Eliminasi Filariasis berdasarkan Permenkes No. 94 Tahun 2014
13	Plakat dan Piagam Penghargaan Nomor: 74/SM.00/11/2021	Komisi Aparatur Sipil Negara	Pemerintah Kabupaten Lebak	Atas keberhasilannya menerapkan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Predikat Baik
14	Plakat dan Sertifikat It Works. Top Digital Awards 2021	Majalah IT Works	Hj. Iti Octavia Jayabaya - Bupati Lebak	Top Leader on Digital Implementation 2021
15	Plakat dan Sertifikat It Works. Top Digital Awards 2022	Majalah IT Works	Pemerintah Kabupaten Lebak	For winning in category of Top Digital Implementation 2021 #Level Stars 4

Sumber : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Lebak

Pada Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Selain mendapatkan berbagai penghargaan atas prestasi yang telah dicapai terdapat juga beberapa permasalahan hukum Sengketa perdata yang perkaranya ada yang dapat diselesaikan dengan cara mediasi, gugatan tidak diterima dan persidangan belum sampai pada putusan, masih berjalan sampai dengan tahun 2010 berakhir. Permasalahan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak selama Tahun 2021 seperti terlihat pada Tabel 6.6 berikut:

Tabel 6.6
Permasalahan Hukum Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021

NO.	NOMOR PERKARA	SUBSTANSI	TINDAK LANJUT PERKARA	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Nomor Perkara : 60/G/2021/PTUN.SRG Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Perkara Nomor : 4 / Pdt.G / 2021 / PN.Rkb dengan obyek gugatanya yaitu Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Darmasari Kecamatan Bayah Tahun 2021 Nomor: 140/05-PAN Dms/2021, tertanggal 24 Agustus 2021 beserta lampirannya, dimana **Juhani** Sebagai Penggugat melawan Panitia Pemilihan Kepala Desa Darmasari Kecamatan Bayah Tahun 2021.	Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Serang yaitu : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Darmasari Kecamatan Bayah Tahun 2021 Nomor:140/05-PAN DMS/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 beserta lampirannya; 3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Darmasari Kecamatan Bayah Tahun 2021 Nomor: 140/05-PAN Dms/2021	Tanggal Putusan 30 Desember 2021
2.	Nomor Perkara : 4/Pdt.G/ 2021/ PN.Rkb Sengketa Perdata Pengadilan Negeri	Gugatan Perdata Nomor : 4/Pdt.G/ 2021/PN.Rkb dengan obyek gugatanya yaitu Pengadaan Tanah di ruas jalan Rangkasbitung-Jambubol STA 300 di Kecamatan Cibadak dimana **Achmad**		Tanggal Putusan 8 Desember 2021

NO.	NOMOR PERKARA	SUBSTANSI	TINDAK LANJUT PERKARA	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
		Berliandi Sebagai Penggugat melawan: 1. Menteri Dalam Negeri RI,C.q Gubernur Provinsi Banten,C.q Bupati Kabupaten Lebak C.q, Kepala Dinas Pupr Kabupaten Lebak sebagai Tergugat-I. 2. Kantor Jasa Penilai Publik, Drs. Haryantono Agustinus Tamba sebagai Tergugat-II 3. Endan Darmawansyah, Direktur CV.Masayu Citra Wisesa sebagai Tergugat-III	tertanggal 24 Agustus 2021 beserta lampirannya. Putusan Pengadilan Negeri Gugatan Tidak Diterima. *(Niet Ontvankelijke Verklaard)*	
3.	Nomor Perkara : 5/Pdt.G/ 2021/ PN.Rkb Sengketa Perdata Pengadilan Negeri	Gugatan Perdata Nomor : 5/Pdt.G/ 2021/PN.Rkb dengan obyek gugatanya yaitu Pengadaan Tanah di ruas jalan Rangkasbitung-Jambubol STA 300 di Kecamatan Cibadak dimana **Apid Aliyudin** Sebagai Penggugat melawan: 1. Menteri Dalam Negeri RI,C.q Gubernur Provinsi Banten,C.q Bupati Kabupaten Lebak C.q, Kepala Dinas Pupr Kabupaten Lebak sebagai Tergugat-I. 2. Kantor Jasa Penilai Publik, Drs. Haryantono Agustinus Tamba sebagai Tergugat-II. 3. Endan Darmawansyah, Direktur CV.Masayu Citra Wisesa sebagai Tergugat-III .	Putusan Pengadilan Negeri Gugatan Tidak Diterima. *(Niet Ontvankelijke Verklaard)*	Tanggal Putusan 1 November 2021
4.	Nomor Perkara : 31/Pdt.G/ 2021/ PN.Rkb Sengketa Perdata Pengadilan Negeri	Gugatan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/ 2021/ PN.Rkb dengan obyek gugatanya yaitu Sengketa Pertanahan terkait Klaim An. Ny. **Pho Kim Mariana** yang mengaku memiliki Tanah bersertifikat di Kampung Gardu Batok Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga atas Relokasi Tanah di Kampung Koranji akibat Bencana Alam dimana Presiden Republik Indonesia cq.Gubernur Provinsi Banten cq.Bupati Kabupaten Lebak sebagai Tergugat melawan Ny. PO KHIM MARIANA Sebagai Penggugat.		Tanggal Putusan 31 Desember 2021
5.	Nomor Perkara : 17/Pdt.G/ 2021/ PN.Rkb Sengketa Perdata Pengadilan Negeri	Gugatan Perdata Nomor : 17/Pdt.G/ 2021/ PN.Rkb dengan obyek gugatanya yaitu Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang dimana	Putusan Pengadilan Negeri Akta Perdamaian (*Van Dading*)	Tanggal Putusan Sela 5 Januari 2022

NO.	NOMOR PERKARA	SUBSTANSI	TINDAK LANJUT PERKARA	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
6.	Nomor Perkara : 18/Pdt.G/ 2021/ PN.Rkb Sengketa Perdata Pengadilan Negeri	**Maskah** sebagai Penggugat melawan : **1.** Pemerintah RI Cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq Dirjen Bina Marga Cq Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitasi Daerah Cq Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang II ; **……..… Tergugat-I** **2.** Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang; **……. Tergugat-II** **3.** Gubernur Banten Cq Bupati Lebak; **……. Tergugat-III** **4.** Kantor Jasa Penilai Publik Tono Suhartono & Rekan; **..…. Tergugat-IV** **5.** Kepala Kantor Kecamatan Cibadak; **…… Turut Tergugat- I** **6.** Kepala Desa Bojongleles; **……Turut Tergugat-II** Gugatan Perdata Nomor : 18/Pdt.G/ 2021/ PN.Rkb dengan obyek gugatanya yaitu Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang dimana **Eko Sucipto** sebagai Penggugat melawan : 1. Pemerintah RI Cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	Persidangan tanggal 5 Januari 2022 agenda Putusan Sela Persidangan tanggal 12 Januari 2022 agenda Putusan Sela	Tanggal Putusan Sela 12 Januari 2022

NO.	NOMOR PERKARA	SUBSTANSI	TINDAK LANJUT PERKARA	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
		Rakyat Cq Dirjen Bina Marga Cq Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitasi Daerah Cq Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang II ; **……..… Tergugat-I** 2. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang; **……. Tergugat-II** 3. Gubernur Banten Cq Bupati Lebak; **……. Tergugat-III** 4. Kantor Jasa Penilai Publik Tono Suhartono & Rekan; **..…. Tergugat-IV** 5. Kepala Kantor Kecamatan Cibadak; **…… Turut Tergugat- I** 6. Kepala Desa Bojongleles; **……Turut Tergugat-II**		

Sumber : Bagian Hukum Setda Lebak

BAB VII
PENUTUP

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021 yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dan Pearaturan Mentri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual.

Pendapatan Tahun Anggaran 2021 tercapai lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan, sedangkan pada belanja berdasarkan Program, kegiatan dan sub kegiatan tercapai 90,51%. Kendala dan hambatan yangditemui selama pelaksanaan APBD dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk langkahperbaikan yang berkelanjutan. Berbagai penghargaan dan prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak selama Tahun 2021 akan dijadikan sebagai motivasi dan penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan keberlanjutan program pembangunan, sinergitas dan kesinambungan untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 mengungkapkan penjelasan secara keseluruhan dan memberikan informasi yang lengkap, andal dan relevan mengenai posisi keuangan dan kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak selama Tahun Anggaran 2021 kepada pemangku kepentingan {stakeholder), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja dan mengetahui tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan untuk mencapai mewujudkan *Good Governance* and *Clean Government.*

BUPATI LEBAK

IRTOC PAVIA JAYABAYA